CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, serta bermanfaat untuk masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang diperlukan oleh berbagai pihak guna membuat keputusan dan kebijakan diselaraskan dengan keperluannya masing-masing. Sebagai tahap akhir dari siklus pengelolaan keuangan, laporan keuangan pemerintah daerah juga menunjukan realisasi pelaksanaan perencanaan dan program kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD.

Untuk mendasari pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, telah disusun Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun Anggaran 2024 telah dicapai melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja yang lebih dititikberatkan pada peningkatan pelayanan dasar yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, penggunaan dana Tahun Anggaran 2024 juga diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholder*, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

1. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
2. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan menyeluruh kepada masyarakat, atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; dan
3. Membantu para pengguna Laporan Keuangan dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah selama periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan implikasinya di masa mendatang.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2024, sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan;

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;

1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan;

1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD;

2.1 Ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD;

2.2 Kebijakan Keuangan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul;

2.3 Penjelasan mengenai pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi;

4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan;

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-pos laporan keuangan;

5.1 Laporan Realisasi Anggaran;

5.1.1 Pendapatan-LRA;

5.1.2 Belanja;

5.1.3 Transfer;

5.1.4 Pembiayaan;

5.1.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

5.2.2 Penggunaan SAL

5.2.3 Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

5.3 Neraca

5.3.1 Aset

5.3.2 Kewajiban

5.3.3 Ekuitas

5.4 Laporan Operasional

5.4.1 Pendapatan - LO

5.4.2 Beban

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

5.4.4 Pos Luar Biasa

5.4.5 Surplus/Defisit - LO

5.5 Laporan Arus Kas

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

5.5.5 Saldo Akhir Kas

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

5.6.1 Ekuitas Awal

5.6.2 Surplus/Defisit – LO

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

5.6.4 Ekuitas Akhir

Bab VI Penjelasan Informasi Tambahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bantul tahun 2024 mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan.

Indikator kinerja makro Tahun 2024 meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, IPM, Rasio Gini, dan tingkat pengangguran, mengacu RPJMD 2021-2026 dan arah pembangunan kewilayahan DIY, sebagai berikut:

Tabel 1 Target Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024

No	Indikator	Target RPJMD
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,48%
2	Tingkat Kemiskinan	12,50%
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,54%
4	Rasio Gini	0,325
5	Tingkat pengangguran terbuka	3,40%

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Realisasi ekonomi makro sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

   Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan salah satu indikator kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan kapasitas produksi secara berkesinambungan. Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan.

   Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024

LPE Kabupaten Bantul	-1,65%	4,99%	5,20%	5,06%	5,04%
LPE DIY	-2,67%	5,58%	5,15%	5,07%	5,03%
LPE Nasional	-2,07%	3,70%	5,31%	5,05%	5,03%

Sumber: BPS, 2024

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,65%. Penurunan tersebut disebabkan pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020. Perekonomian Kabupaten Bantul selama tahun 2021 tumbuh sebesar 5,00 persen, selanjutnya pada tahun 2022 perekonomian mulai mengalami perbaikan. Pada tahun 2024 secara umum nilai LPE Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional mengalami penurunan.

2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3 Capaian Tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul tahun 2020 - 2024

Uraian	Tingkat Kemiskinan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bantul	13,50	14,04	12,27	11,96	11,66
DIY	12,28	12,80	11,34	11,04	10,83
Nasional	10,19	10,14	9,54	9,36	9,03

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 11,66% atau lebih rendah 0,30% dibandingkan tahun 2023. Tingkat kemiskinan di Bantul relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan DIY dan Nasional. Kemiskinan bukan hanya masalah jumlah jiwa atau proporsi penduduk miskin tetapi juga menyangkut kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Tahun 2024 garis kemiskinan meningkat dari tahun 2023, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin menurun, namun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan verifikasi Data Kemiskinan Ekstrim melalui musyawarah kalurahan dengan dasar Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS) Kabupaten Bantul yang hasilnya ditetapkan melalui SK Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dengan jumlah 24.296 jiwa. Data ini menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bantul mulai tahun 2023.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak.

Tabel 4 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Bantul	80,36	80,63	81,04	81,74	82,05
DIY	79,95	80,22	80,65	81,09	81,62
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mencapai 82,05 pada tahun 2024 dengan level capaiannya menjadi sangat tinggi (IPM ≥ 80).

Capaian IPM Kabupaten Bantul konsisten naik dari tahun ke tahun dan lebih tinggi dibandingkan DIY dan nasional. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi semakin dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

IPM Kabupaten Bantul masih dapat ditingkatkan antara lain dengan peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan yaitu lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia, penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas BAB penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal penduduk; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk melalui upaya semua anak usia sekolah (SD-SLTA) bisa bersekolah dan tidak putus sekolah; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH).

4. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.

Menurut Harry T. Oshima, nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan, jika nilai kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Tabel 5 Capaian Rasio Gini Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bantul	0,418	0,441	0,410	0,454	0,417
DIY	0,434	0,441	0,439	0,449	0,428*
Nasional	0,385	0,384	0,384	0,388	0,381*

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

*Ket: *Rasio gini DIY dan Nasional pada September 2024*

Tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2020-2024 masih tergolong dalam kategori "kesenjangan sedang" karena berkisar antara 0,400-0,500. Pada tahun 2022 Rasio Gini Kabupaten Bantul mengalami penurunan menjadi 0,410, angka ini merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2024 rasio gini Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Gini rasio Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah 0,417 turun 0,021 dibanding tahun 2023.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul turun dari 3,78% di tahun 2023 menjadi 3,62% di tahun 2024, namun lebih tinggi dibandingkan DIY. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

Tabel 6 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Bantul	4,06	4,04	3,97	3,78	3,62
DIY	4,57	4,56	4,06	3,69	3,48
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang merupakan salah satu faktor penting dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penentuan kebijakan keuangan daerah diperlukan gambaran kondisi keuangan daerah yang meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dan keserasian antar dokumen, maka terkait dengan pengelolaan keuangan berupa struktur APBD, nomenklatur program dan kegiatan serta kode rekening yang disajikan dokumen RKPD, KUA PPAS dan RAPBD berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk tahun 2024 bertumpu pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

   Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Dana transfer terdiri dari DanaTransfer Pemerintah Pusat dan Dana Transfer Antar Daerah.
   Pada tahun 2024 target pendapatan diproyeksikan sebesar Rp2,57 triliun. Tahun 2024, PAD secara total diperkirakan masih sama dengan tahun 2023, karena walaupun ada sektor tertentu yang mulai mengalami peningkatan, tetapi masih ada sektor-sektor yang belum sepenuhnya pulih, seperti misalnya industri hotel yang masih bersifat musiman, dan penyelenggaraan hiburan yang masih terbatas. Namun demikian ada beberapa upaya untuk peningkatan PAD antara lain:

   a) Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan cara:
      1. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak;
      2. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah;
      3. Memberikan *reward* bagi pamong desa dan dukuh yang wilayahnya telah membayar lunas sebelum jatuh tempo;
      4. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara *self assessment*.
   b) Mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito melalui:
      1. Mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
      2. Meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
      3. Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
      4. Meningkatkan saran dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas objek retribusi.

2. Belanja Daerah

Proyeksi belanja tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp2,747 triliun, meningkat sebesar 9,27% dari tahun 2023, yang diharapkan berimplikasi pada aktivitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang mulai kembali normal. Alokasi belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, memperhatikan kebijakan daerah untuk mendukung prioritas daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, dan memperhatikan kebutuhan belanja yang bersifat wajib mengikat dan *earmarked* sebagai berikut:

a) Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang mengikat, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan;
b) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan belanja pegawai ASN dan pemberian gaji ke-13 serta tunjangan hari raya dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangnnya (*acress* maksimal 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangannya), kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, tambahan penghasilan pegawai, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan dan kematian;
c) Belanja prioritas kedua adalah belanja wajib pelayanan dasar pada urusan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
d) Penerimaan dari pajak daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan pajak daerah, belanja yang harus disediakan untuk layanan masyarakat yang terkait dengan perolehan pajak, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal sebesar 10% dari total penerimaan pajak daerah. Selanjutnya sisanya dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya;
e) Penerimaan dari retribusi daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan obyek retribusi baik fisik maupun non fisik, belanja untuk pengelolaan penerimaan retribusi, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal sebesar 10% dari total penerimaan retribusi daerah. Selanjutnya juga dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya;
f) Penerimaan dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja Badan Layanan Umum Daerah;
g) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
h) Belanja bantuan keuangan diarahkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran daerah yaitu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan infrastruktur perdesaan dan fasilitas umum;
i) Pemerintah daerah mengalokasikan 50% dari realisasi penerimaan pajak rokok untuk program Jaminan Kesehatan Nasional bagi warga miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI);
j) Belanja yang bersumber dari dana transfer dan dana penyesuaian otonomi khusus disesuaikan dengan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku;
k) Belanja yang bersumber dari BKK DIY untuk Penugasan Keistimewaan digunakan pada Urusan Kelembagaan, Kebudayaan, Tata Ruang dan Pertanahan.

Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun berikutnya. Peningkatan

alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat daerah harus terukur jelas untuk setiap indikator kinerjanya diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penentuan pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan dengan tahapan sebagai berikut:

a) menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran yaitu alokasi belanja;
b) menentukan keluaran/output setiap kegiatan;
c) menghitung alokasi pagu dari setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya;
d) menghitung alokasi pagu perangkat daerah berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah.

Mandatory spending

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur dan wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagaimana amanat Undang-Undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bahwa:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 27,75% dengan realisasi 28,68%, berikut rincian perhitungannya:

Tabel 7 *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Anggaran Fungsi Pendidikan	762.524.058.009,00	750.334.640.142,92
2.	Total Belanja Daerah	2.747.682.556.153,00	2.616.013.652.966,71
3	Rasio anggaran Pendidikan ((1:2) x100%)	27,75%	28,68%

2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji. Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar 28,08% dengan realisasi sebesar 28,60%, berikut rincian perhitungannya.

Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Bidang Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Urusan Bidang Kesehatan		
	A. Dinas Kesehatan	293.949.017.043,00	283.826.300.341,79
	B. RSUD Panembahan Senopati	272.064.136.007,00	265.349.372.640,00
	C. RSUD Saras Adyatma	39.566.668.969,00	35.661.804.895,75
2	Anggaran Fungsi Kesehatan (A+B+C)	605.579.822.019,00	584.837.477.877,54
3	Total Belanja Daerah	2.747.682.556.153,00	2.616.013.652.966,71
4	Gaji dan tunjangan ASN	591.056.288.195,00	571.299.108.434,00
5	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN (3-4)	2.156.626.267.958,00	2.044.714.544.532,71
6	Rasio anggaran Kesehatan ((2:5)x100%)	28,08%	28,60%

3. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 tahun.

   Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp306.165.470.993,00 dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau belanja transfer sebesar Rp2.390.904.940.554,00 atau baru 12,81%, dengan realisasi sebesar Rp274.787.036.154,48 atau 89,74%, berikut rincian perhitungannya:

Tabel 9 *Mandatory Spending* Bidang Insfrastruktur

No	Komponen Perhitungan	APBD 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Anggaran Belanja Infrastruktur	306.165.470.993,00	274.767.036.154,48
2	Total Belanja Daerah	2.747.682.556.153,00	2.616.013.652.966,71
3	Belanja bagi hasil dan /atau belanja transfer	356.777.615.599,00	356.026.220.783,00
4	Total belanja daerah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau belanja transfer (2-3)	2.390.904.940.554,00	2.259.987.432.183,71
5	Rasio anggaran insfrastruktur ((1:4)x100%)	12,81%	12,16%

4. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan berdasarkan besaran dari total belanja daerah sesuai dengan klasifikasi.

Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran untuk fungsi pengawasan sebesar 0,46% dengan realisasi sebesar 0,45%, berikut rincian perhitungannya:

Tabel 10 *Mandatory Spending* Bidang Pengawasan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Anggaran Belanja Inspektorat	12.702.054.145,00	11.734.494.459,00
2	Total Belanja Daerah	2.747.682.556.153,00	2.616.013.652.966,71
	Rasio anggaran pengawasan ((1:2) x100%)	0,46%	0,45%

3. Pembiayaan

Proyeksi pembiayaan netto tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp175,52 milyar. Diasumsikan bahwa penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bantul sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terutama didominasi oleh penyertaan modal daerah dan pemberian dana bergulir. Hal-hal lain yang menjadi pertimbangan antara lain:

1) Penganggaran surplus/defisit sesuai dengan kondisi kapasitas riil keuangan daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah;
3) Peningkatan efektivitas pengelolaan dana bergulir yang berbasis pada hasil evaluasi berkala dan berkelanjutan.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 yang dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan yang dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diprioritaskan untuk mengatasi permasalahan daerah yang mendesak terutama risiko bencana pada setiap aspek, memperhatikan kemampuan keuangan daerah, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan kajian terhadap kondisi terkini di wilayah Kabupaten Bantul, prioritas pelaksanaan pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul terutama masyarakat miskin melalui pengembangan ekonomi lokal.

Capaian kinerja berdasarkan sasaran pembangunan yang ditetapkan untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Satuan	Realisasi 2023	2024					Keterangan/Penjelasan
				Target RPJMD 2021-2026	Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi*	Persentase Capaian (RKPD)	Persentase Capaian (RPJMD)	
1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3.196	4.2315	4.2315	3.1958	75.52%	75.52%	Realisasi menggunakan Tahun 2023 karena belum ada hasil evaluasi dari Kemenpan RB
2	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	Capaian Tahun 2024 atas LKPD 2023
3	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	94.49	83.75	85	92	108.24%	109.85%	• Realisasi sementara sd. TW IV karena masih proses dilakukan penilaian oleh MCP KPK (QA sampai tanggal 10 Januari 2025) • Target mengalami perubahan sesuai Perubahan RKPD Tahun 2024
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.72	3.35	3.8	4,18	110%	124,78%	• Capaian Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 • Target mengalami perubahan sesuai RKPD Perubahan karena menyesuaikan realisasi tahun sebelumnya yang sudah melampaui target

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Satuan	Realisasi 2023	2024					Keterangan/Penjelasan
				Target RPJMD 2021-2026	Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi*	Persentase Capaian (RKPD)	Persentase Capaian (RPJMD)	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88.73	88.8	88.8	90,14	101.51%	101.51%	Capaian Tahun 2024
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.64	74.2	74.75	74,8	100.17%	100.81%	• Capaian Tahun 2024 • Target mengalami perubahan sesuai RKPD Perubahan karena menyesuaikan realisasi tahun sebelumnya yang sudah melampaui target
7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.61	15.26	15.64	15,63	99.93%	102.42%	• Capaian Tahun 2024 • Target mengalami perubahan sesuai RKPD Perubahan karena menyesuaikan realisasi tahun sebelumnya yang sudah melampaui target
8	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	10	8	10	10	100%	125.00%	Realisasi tahun 2023. Tahun 2024 tidak melakukan verfikasi desa/kalurahan Pamor Budaya karena: 1. Tidak ada pengukuran 2. Target sdh terpenuhi 3. Penyesuaian regulasi tentang desa/kalurahan pamor budaya karena akan adanya perubahan regulasi tersebut
9	Persentase penanganan gangguan	Persen	100	100	100	100	100.00%	100.00%	Capaian Tahun 2024 sebanyak 102 kasus.

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Satuan	Realisasi 2023	2024					Keterangan/Penjelasan
				Target RPJMD 2021-2026	Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi*	Persentase Capaian (RKPD)	Persentase Capaian (RPJMD)	
	ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat								
10	Rasio Gini	Angka	0.454	0.325	0,346-0,439	0.433	101.37%	66.77%	• Realisasi dari Hasil proyeksi Model Exponential Growth, nilai MAPE 3,57440% • Target mengalami perubahan sesuai RKPD Perubahan
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.78	3.4	3.64	3.62	100.55%	101.18%	• Capaian Tahun 2024 • Target mengalami perubahan sesuai RKPD Perubahan karena menyesuaikan realisasi tahun sebelumnya yang sudah melampaui target
12	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	94.4	100	100	94.4	94.40%	94.40%	Capaian Tahun 2024 Capaian kabupaten kreatif baru 94,4% karena dari 18 indikator kota kreatif versi UCCN untuk kab bantul baru 17 indikator, 1 indikator yang belum terpenuhi yaitu kemitraan/kerjasama dengan pihak luar negeri.
13	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	71.52	76.4	76.4	71.52	93.61%	93.61%	• Realisasi menggunakan Tahun 2023 karena masih proses penghitungan • Formula / kompnen dalam penghitungan IKI adalah (40% x tingkat kemantaban jalan) + (5% x rasio bangunan gedung laik fungsi) + (20% x Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi + (15% x Penduduk berakses air minum layak) + (15% x Penduduk berakses sanitasi

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Satuan	Realisasi 2023	2024					Keterangan/Penjelasan
				Target RPJMD 2021-2026	Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi*	Persentase Capaian (RKPD)	Persentase Capaian (RPJMD)	
									yang layak) + (5% x Penanganan kawasan kumuh)
14	Kesesuaian pemanfataan ruang	Persen	75.57	75.07	75.6	75,62	100.02%	100.73%	• Realisasi menggunakan Tahun 2023 karena masih proses penghitungan • Target mengalami perubahan sesuai RKPD Perubahan karena menyesuaikan realisasi tahun sebelumnya yang sudah melampaui target
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63.68	64.42	64.42	65.43	101.57%	101.57%	Capaian Tahun 2024.sesuai rumus di RPJMD. Adapun realisasi kategori dalam penghitungan IKLH yaitu: a. Indeks Kualitas Air (IKA) = 43.67; b. Indeks Kulaitas Udara (IKU)= 88.02 c. IKL = 61.02 Sedangkan sesuai penghitungan rumus yang baru realisasi sebesar 61.67 dengan relaisasi kategori sbb: - IKA = 43.67 - IKU = 88.02 - IKL = 43.83
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	149.27	164.55	148	145.5	111.58%	111.58%	Realisasi dari Hasil proyeksi Model logaritmik dengan Rsquare 72,89%

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Satuan	Realisasi 2023	2024					Keterangan/Penjelasan
				Target RPJMD 2021-2026	Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi*	Persentase Capaian (RKPD)	Persentase Capaian (RPJMD)	
17	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	40.323	71380	40611	38601	104.95%	145.92%	Capaian Tahun 2024
18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70.35	72.66	72.66	71.28	98.10%	98.10%	Realisasi dari Hasil proyeksi Model Kuadratik, nilai MAPE 2,54301%
19	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Utama	Utama	Utama	Utama	100%	100%	Realisasi masih menggunakan Tahun 2023 karena penilaian dilakukan 2 tahun seklai

Sumber: Bappeda, 2025

Tabel 12 Realisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dan BKK dari Provinsi ke Desa/Kelurahan)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PROGRESS		
		VOL	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	VOL	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROGRES TERKINI
1	Dana Keistimewaan	4	Urusan	5.467.260.000,00	50	45.467.260.606,00	Sudah selesai dilaksanakan
2	Jambanisasi (Dinas Kesehatan Bantul)	50	Unit	250.000.000,00	50	250.000.000,00	Sudah selesai dilaksanakan
3	Pada Karya Infrastruktur (Disnakertrans Bantul)	208	Paket	32.600.000.000,00	208	32.443.512.429,00	Terdapat SILPA akibat sisa lelang bahan material
4	Padat Karya Jogja Istimewa	39	Kalurahan	7.175.000.000,00	39	6.459.388.894,00	39 Kalurahan telah selesai dilaksanakan
5	Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	1	Kalurahan	1.000.000.000,00	1	950.350.000,00	Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan
6	Arsitektur Gaya Yogyakarta (untuk RTLH)	21	Kalurahan	4.500.000.000	21	4.500.000.000,00	Sudah selesai dilaksanakan
7	Desa Mandiri Budaya	5	Kalurahan	4.800.000.000,00	5	4.800.000.000,00	Sudah selesai dilaksanakan
8	Kesejarahan	1	Kalurahan	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	Sudah selesai dilaksanakan
9	Desa Prima (Rintisan Desa Mandiri Budaya binaan DP3AP2 DIY)	1	Kalurahan	250.000.000,00	1	250.000.000,00	Sudah selesai dilaksanakan
10	Desa Maritim	3	Kalurahan	1.600.000.000,00	3	1.600.000.000,00	Sudah selesai dilaksanakan
11	Desa Preneur (Rintisan Desa Mandiri Budaya binaan DKUMKM DIY)	3	Kalurahan	1.200.000.000,00	3	998.994.000,00	Kalurahan Dlingo tidak mencairkan Tahap II karena RAB Perubahan tidak disetujui
12	Desa Wisata (Rintisan Desa Mandiri Budaya	4	Kalurahan	3.050.000.000,00	4	3.050.000.000,00	Sudah selesai dilaksanakan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PROGRESS		
		VOL	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	VOL	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROGRES TERKINI
	binaan Dinpar DIY)						
13	Desa Mandiri Pangan (Rintisan Desa Mandiri Budaya binaan Dinas Pertanian DIY)	2	Kalurahan	950.000.000,00	2	949.600.000,00	Terdapat selisih Rp400.000 yang berasal dari Kalurahan Sriharjo akibat selisih SHBJ pembelian gazebo dan pembelian bambu
14	Omah Jagawarga	10	Kalurahan	500.000.000,00	10	500.000.000,00	Sudah selesai dilaksanakan
15	Pengelolaan Sampah	3	Kalurahan	6.000.000.000,00	3	5.985.089.940,00	Kalurahan Guwosari, Kalurahan Karangtengah dan Kalurahan Panggungharjo sudah selesai dilaksanakan
16	Kawasan Terpadu	1	Kalurahan	500.000.000,00	1	500.000.000,00	Penyusuan DED sudah mencapai 100% untuk Pembangunan fisik baru mencapai 85%.
17	Tata Kelola Pertanahan	2	Kalurahan	67.000.000,00	2	267.000.000,00	Kelurahan Argodadi ; untuk pengadaan barang dan jasa sudah selesai. Kalurahan Sriharjo sudah melaksanakan panen bawang merah dan padi.
18	Kampung Berkah	1	Kalurahan	200.000.000,00	1	200.000.000,00	Sudah terlaksana dengan pembangunan 6 kolam dan pompa

2.3.1 Penanggulangan Kemiskinan

Masalah kemiskinan adalah masalah multidimensi yang menjadi permasalahan tidak hanya di tingkat daerah namun juga menjadi salah satu permasalahan nasional. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama dan diperlukan penanganan secara multi sektor. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan antara lain:

1. Mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
4. Menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

I. Kendala/Permasalahan yang Dihadapi

1. Rendahnya derajat kesehatan dan tingkat pendidikan warga miskin;
2. Keterbatasan akses dan aset kebutuhan dasar warga miskin meliputi sandang, perumahan, sanitasi, air bersih dan sumber penghasilan;
3. Keterbatasan akses dan keterampilan dalam berusaha;
4. Sasaran program penanggulangan kemiskinan yang kurang tepat;
5. Kurangnya kolaborasi dan kemitraan;
6. Profesionalitas SDM pengelola dan pelaksana program dan kegiatan pengentasan kemiskinan masih perlu ditingkatkan.

II. Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

1. Penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah dan rencana aksi kabupaten;
2. Koordinator penyusunan rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
3. Koordinator pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
4. Fasilitator pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
5. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;

6. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Penanganan Sampah di Kabupaten Bantul

Pemkab Bantul telah berupaya secara bertahap dalam menangani permasalahan sampah. Capaian pengelolaan sampah yang terkurangi dan tertangani pada tahun 2024 sebesar 31,45 atau tercapai 46,49% dari target sebesar 67,65. Nilai tersebut mengalami penurunan dari capaian tahun 2023 sebanyak 63,94 atau turun sebesar 50,81%. Persentase pengelolaan sampah tahun 2024 tidak tercapai dikarenakan adanya penutupan TPA Piyungan mulai bulan April 2024 sehingga pelayanan dan pengangkutan sampah yang semula langsung dibuang ke TPA Piyungan, menjadi tidak diperbolehkan membuang di TPA Piyungan lagi. Pelayanan persampahan yang semula dibuang ke TPA Piyungan berubah menjadi diolah menggunakan alat pengolahan sampah yang belum bisa operasional sesuai kapasitas terpasang.

Atas permasalahan tersebut, langkah-langkah yang diambil oleh Pemkab Bantul pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kampanye, sosialisasi, edukasi dan advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mensukseskan Gerakan Bantul Bersama;

2. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi melalui program KKN Pengabdian yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan, pendampingan dan edukasi kepada masyarakat. Penelitian-penelitian serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan lingkungan;

3. Pengembangan pendanaan pengelolaan lingkungan dari dana non APBD, antara lain *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan perusahaan dan perguruan tinggi;

4. Pelaksanaan kegiatan dengan adanya kebijakan desentralisasi sampah, yaitu dengan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF), TPST (di Argodadi dan Modalan), TP3SR (di Bantul, Potorono, dan Caturharjo) dan RPS Modalan;

5. Optimalisasi TP3SR yang dikelola oleh BUMKal untuk memilah sampah dan optimalisasi operasional alat pengelolaan sampah di TPST dan TP3SR yang sudah dibangun.

2.3.3 Penanganan Inflasi Daerah

Inflasi secara sederhana didefinisikan sebagai kenaikan harga barang jasa secara umum dimana barang jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masayarakat atau juga dapat dikatakan sebagai penurunan nilai mata uang suatu negara. Tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti keseimbangan antara permintaan (*demand*) dan

ketersediaan (*supply*), biaya produksi suatu barang, nilai tukar, dan jumlah uang yang beredar.

Dalam rangka menjaga kestabilan laju inflasi agar berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2024. Adapun ketugasannya antara lain:

1. Memantau harga dan menganalisa hasil pemantauan harga serta melakukan pemetaan masalah inflasi daerah;

2. Melakukan upaya pengendalian harga;

3. Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka pemantauan harga;

4. Melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam penelitian dan evaluasi potensi sumber tekanan inflasi daerah;

5. Mengambil langkah koordinatif dan preventif dalam pengendalian inflasi daerah dengan cara:

    a) Mengupayakan terpenuhinya ketersediaan pasokan terutama bahan pangan; dan

    b) Meminimalkan dampak kenaikan/penyesuaian harga di Kabupaten Bantul.

6. Mengadakan diseminasi sasaran dan upaya pencapaian inflasi kepada masyarakat.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Struktur APBD murni Kabupaten Bantul TA 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 adalah Pendapatan Rp2.480.009.393.605,00, Belanja Rp2.613.010.146.435,00 dan Pembiayaan Rp133.000.752.830,00

Perubahan APBD TA 2024 terakhir ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tanggal 26 November 2024 tentang Pergeseran Ketiga setelah Penjabaran Perubahan APBD TA 2024, dengan struktur Pendapatan Rp2.572.162.006.893,00, Belanja Rp2.747.682.556.153,00 dan Pembiayaan Rp175.520.549.260,00

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pelaksanaan APBD pada tahun 2024. Realisasi keuangan ini merupakan angka konsolidasi dari pencapaian kinerja keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama tahun anggaran 2024. Adapun pencapaian realisasi keuangan tahun 2024 dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

3.1.1 Pendapatan

Pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum besaran target pendapatan daerah yang dipergunakan sebagai prediksi pendapatan yang terukur dan merupakan capaian minimal yang harus diperoleh, sedangkan di akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah dimaksud. Sebagaimana diketahui bahwa Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel 14 Realisasi Pendapatan Tahun 2024 Dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	618.610.087.119,00	638.567.864.259,57	103,23
Pendapatan Transfer	1.947.551.919.774,00	1.968.055.104.226,00	101,05
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	6.000.000.000,00	2.970.385.919,00	46,51
Jumlah Pendapatan	2.572.162.006.893,00	2.609.413.354.404,57	101,45

Sumber: LRA audited TA.2024

Rasio realisasi pendapatan

Tabel 15 Rasio Realisasi Pendapatan

No.	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	638.567.864.259,57	24,47
2.	Pendapatan Transfer	1.968.055.104.226,00	75,42
3.	Lain-lain Pendapatan Yang sah	2.970.385.919,00	0,11
Jumlah		**2.609.413.354.404,57**	**100,00**

Sumber: LRA audited TA.2024

a. Rasio komponen pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah

Tabel 16 Rasio Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

No.	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pajak Daerah	295.769.695.358,90	46,32
2.	Retribusi Daerah	307.622.088.520,00	48,17
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	20.083.794.982,30	3,15

4.	Lain-lain PAD	15.092.285.398,37	2,36
Jumlah		**638.567.864.259,57**	**100,00**

Sumber: LRA audited TA.2024

Rasio komponen pendapatan transfer terhadap total pendapatan transfer

Tabel 17 Rasio Komponen Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Transfer

No.	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	35.169.801.000,00	1,79
2.	Dana Alokasi Umum	1.022.019.834.045,00	51,93
3.	Dana Alokasi Khusus Fisik	116.981.478.484,00	5,94
4.	Dana Alokasi Khusus non Fisik	325.859.185.456,00	16,56
5.	Dana Desa	127.393.902.000,00	6,47
6.	Insentif Fiskal	51.233.491.000,00	2,60
7.	Pendapatan Bagi Hasil	200.933.285.798,00	10,21
8.	Bantuan Keuangan	88.464.126.443,00	4,50
Jumlah		**1.968.055.104.226,00**	**100,00**

Sumber: LRA audited TA.2024

b. Rasio komponen lain-lain pendapatan yang sah atas lain-lain pendapatan yang sah

Tabel 18 Rasio Komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah atas Lain-Lain Pendapatan yang Sah

No.	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Hibah	2.790.385.919,00	100,00
Jumlah		2.790.385.919,00	**100,00**

Sumber: LRA audited TA.2024

c. Rasio kemandirian daerah

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{(Dana Transfer + Pinjaman Daerah)}} \times 100\ \%$$

$$\frac{638.567.864.259,57}{1.968.055.104.226,00} \times 100\% = 32,45\%$$

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja dan Transfer}} \times 100\ \%$$

$$\frac{638.567.864.259,57}{2.616.013.652.966,71} \times 100\% = 24,41\%$$

3.1.2 Belanja dan Transfer

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam bentuk regulasi peraturan daerah mencantumkan batas maksimal penganggaran, yang dipergunakan sebagai dasar belanja daerah

Tabel 19 Realisasi Belanja Tahun 2024 Dibandingkan dengan Anggaran Belanja Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Operasi	2.050.130.609.141,00	1.972.500.878.943,82	96,21
Belanja Modal	310.690.754.297,00	279.968.387.225,89	90,11
Belanja Tak terduga	30.083.577.116,00	7.518.166.014,00	24,99
Belanja Transfer	356.777.615.599,00	356.026.220.783,00	99,79
Jumlah Belanja Daerah	2.747.682.556.153,00	2.616.013.652.966,71	95,21

Sumber: LRA audited TA.2024

a. Rasio komponen belanja dan transfer terhadap total belanja dan transfer

Tabel 20 Rasio Komponen Belanja Dan Transfer Terhadap Total Belanja Dan Transfer

No.	Komponen Belanja dan transfer	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	1.972.500.878.943,82	75,40
2.	Belanja modal	279.968.387.225,89	10,70
3.	Belanja tak terduga	7.518.166.014,00	0,29
4.	Transfer ke kab/kota/desa	356.026.220.783,00	13,61
Jumlah		**2.616.013.652.966,71**	**100,00**

Sumber: LRA audited TA.2024

b. Rasio komponen belanja operasi terhadap total belanja operasi

Tabel 21 Rasio Komponen Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Operasi

No.	Komponen Belanja Operasi	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	952.731.205.875,00	48,30
2.	Belanja Barang dan Jasa	886.056.158.351,82	44,92

3.	Belanja Bunga	0	0
4.	Belanja Subsidi	0	0
5.	Belanja Hibah	128.922.914.717,00	6,54
6.	Belanja Bantuan Sosial	4.790.600.000,00	0,24
Jumlah		**1.972.500.878.943,82**	**100,00**

Sumber: LRA audited TA.2024

c. Rasio belanja bantuan sosial terhadap total belanja dan transfer

$$\frac{4.790.600.000,00}{2.616.013.652.966,71} \times 100\% = 0,18\%$$

d. Rasio belanja tidak terduga terhadap total belanja dan transfer

$$\frac{7.518.166.014,00}{2.616.013.652.966,71} \times 100\% = 0,29\%$$

e. Rasio belanja hibah terhadap total belanja dan transfer

$$\frac{128.922.914.717,00}{2.616.013.652.966,71} \times 100\% = 4,93\%$$

f. Rasio belanja transfer terhadap total belanja dan transfer

$$\frac{356.026.220.783,00}{2.616.013.652.966,71} \times 100\% = 13,61\%$$

g. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer

$$\frac{952.731.205.875,00}{2.616.013.652.966,71} \times 100\% = 36,42\%$$

h. Rasio belanja barang dan jasa terhadap total belanja dan transfer

$$\frac{886.056.158.351,82}{2.616.013.652.966,71} \times 100\% = 33,87\%$$

3.1.3 Pembiayaan.

Pembiayaan daerah dipergunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Anggaran dan realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah dalam Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp197.220.549.259,59 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp196.239.211.759,59 dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp981.337.500,00.
2. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2024 adalah sebesar Rp16.700.000.000,00, untuk penyertaan modal Rp16.700.000.000,00 dan pemberian pinjaman daerah Rp0,00.
3. Realisasi pembiayaan netto tahun 2024 adalah sebesar Rp180.520.549.259,59 yang berasal dari realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp197.220.549.259,59 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp16.700.000.000,00

a. Rasio SILPA terhadap total penerimaan pembiayaan

$$\frac{196.239.211.759,59}{197.220.549.259,59} \times 100\% = 99,50\%$$

b. Rasio penerimaan kembali investasi non permanen lainnya terhadap total penerimaan pembiayaan

$$\frac{0,00}{197.220.549.259,59} \times 100\% = 0,00\%$$

c. Rasio pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman daerah terhadap total pengeluaran pembiayaan

$$\frac{0,00}{16.700.000.000,00} \times 100\% = 0,00\%$$

3.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp173.920.250.697,45 yang diperoleh dari perbandingan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan netto

3.2 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan suatu proses analisis terhadap laporan keuangan, dengan tujuan untuk memberikan tambahan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga kualitas keputusan yang diambil akan menjadi lebih baik.

Berikut ini beberapa analisis rasio keuangan yang dilakukan:

1) **Rasio Kemandirian Daerah**

Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari

sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri. Semakin besar nilainya, maka semakin baik kemandirian keuangan pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

$$\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} = \frac{638.567.864.259,57}{2.609.413.354.404,57} = 24,47\%$$

2) **Rasio Efektifitas PAD**

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif jika rasio efektifitas yang dicapai minimal 100% dan semakin tinggi semakin baik

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} = \frac{638.567.864.259,57}{618.610.087.119,00} = 103,23\%$$

3) **Rasio Fleksibilitas Keuangan**

Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*). Rasio ini menunjukkan keseimbangan antara kapasitas pendapatan dan kapasitas utang pemerintah daerah untuk satu periode tertentu. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin baik fleksibilitas keuangan pemerintah daerah untuk menghadapi peristiwa luar biasa, yang dapat berasal dari internal maupun eksternal pemerintah daerah.

$$\frac{\text{(Total Pendapatan – DAK)}}{\text{(Total Kewajiban + Belanja Pegawai)}} = \frac{2.166.572.690.464,57}{997.298.297.075,73} = 217,24\%$$

4) **Rasio Solvabilitas Operasional**

Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan semakin banyak pendapatan pemerintah daerah yang tersedia untuk membiayai belanja operasional pemerintah daerah

$$\frac{\text{(Total Pendapatan LO – Pendapatan DAK LO)}}{\text{Total Beban LO}} = \frac{2.252.680.248.208{,}42}{2.510.955.160.649{,}03} = 89{,}71\%$$

5) **Rasio Solvabilitas Jangka Pendek**

Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan. Semakin tinggi nilainya maka semakin banyak aset lancar yang tersedia untuk menjamin kewajiban lancar. Namun nilai yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki aset lancar yang berlebihan yang lebih baik digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, aset lancar yang berlebihan dapat menyebabkan pelayanan yang tidak optimal kepada masyarakat.

$$\frac{\text{(Kas dan Setara Kas +Investasi Jangka pendek)}}{\text{Kewajiban Lancar}} = \frac{173.920.250.697{,}45}{45.698.105.907{,}86} = 380{,}59\%$$

6) **Rasio Solvabilitas Anggaran**

Solvabilitas anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan untuk mendanai operasinya selama satu periode anggaran keuangan. Rasio ini menunjukkan keseimbangan pendapatan normal pemerintah daerah dan pengeluaran operasional selama satu periode. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan semakin banyak pendapatan pemerintah daerah yang tersedia untuk membiayai belanja operasional pemerintah daerah.

$$\frac{\text{(Total Pendapatan – Pendapatan DAK)}}{\text{(Total Belanja – Belanja Modal)}} = \frac{2.166.572.690.464,57}{2.336.045.265.740,82} = 92,75\%$$

7) **Rasio Solvabilitas Layanan**

Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya.

$$\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Jumlah Penduduk}} = \frac{2.971.890.261.465,52}{1.017.750} = 292.005.921,05\%$$

3.3 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

Pencapaian target pembangunan pada tahun 2024 masih terdapat hambatan dan kendala di beberapa indikator meliputi:

Tabel 22 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target

No	Indikator	Hambatan	Solusi/Faktor Pendukung
1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Belum terakomodirnya indikator kinerja kunci LPPD secara keseluruhan ke dalam dokumen peremcanaan perangkat daerah pelaksana IKK urusan, sehingga pencapaian beberapa IKK yang menjadi indikator penilaian belum maksimal	Mengintegrasikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah pelaksana IKK urusan, sehingga capaian IKK yang menjadi indikator penilaian dapat lebih maksimal karena didukung dalam perencanaan

No	Indikator	Hambatan	Solusi/Faktor Pendukung
2	Opini Laporan Keuangan	1) Beberapa SOP Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum terselesaikan; 2) Pembuatan BAST atas penyertaan modal belum sesuai tahapan; dan 3) Pengelolaan aset tetap berupa tanah dan bangunan yang disewakan belum tertib	1) Melakukan identifikasi secara meneyluruh terkait dasar hukum yang belum lengkap dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2) Melakukan monitoring atas pemenuhan SOP dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3) Melakukan penertiban atas pencatatan aset tetap berupa tanah dan bangunan yang disewakan; 4) Melakukan monitoring atas perjanjian atas sewa aset tetap beraupa tanah dan bangunan 5) Melakukan pendampingan penguaan aplikasi SIPD RI dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	a. Pengembangan teknologi informasi membutuhkan anggaran yang besar sehingga pelaksanaan peta rencana SPBE harus dilakukan secara bertahap dan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara menyeluruh dalam waktu singkat b. masih terdapat beberapa pedoman SPBE yang belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul harus terus melakukan perubahan guna menyesuaikan dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat	-Keterpaduan perencanaan dan penganggaran SPBE berjalan dengan baik -Penerapan manajemen SPBE dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang berlaku -Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki kebijakan SPBE yang komprehensif dan dilakukan evaluasi secara berkala
4	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	- Belum dilakukannya pengendalian kualitas survei, tim survei belum bekerja optimal - Kuesioner tidak diisi secara lengkap - Publikasi penggunaan layanan digital belum maksimal	- Meningkatkan kualitas SDM di bidang pelayanan publik - Tahapan survei dilakukan dengan baik dan sesuai kaidah - Melakukan publikasi dan edukasi yang lebih masif ke pengguna publik
5	Rasio Gini	- Kemiskinan yang masih tinggi - Upah yang relatif rendah - Investasi yang tidak merata	-Pemberian bantuan sosial -Meningkatkan industri kreatif
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	a. rendahnya daya saing dan kesesuaian kompetensi SDM tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri; b. kurangnya keakuratan data masyarakat miskin, pengangguran dan/atau setengah penganggur sebagai dasar dalam merumuskan strategi kebijakan dalam upaya mengatasinya; c. keterbatasan ketersediaan dan kesesuaian pelayanan informasi	a. pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi; b. pelayanan informasi lowongan kerja dan AK1; c. penempatan tenaga kerja lokal, antar daerah dan luar negeri; d. penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

No	Indikator	Hambatan	Solusi/Faktor Pendukung
		lowongan kerja dengan kompetensi serta kepeminatan pekerja yang membutuhkan	
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	a. wilayah administratif Kabupaten Bantul yang berada di hilir aliran sungai yang memungkinkan tingginya akumulasi pencemaran air sungai; b. kondisi darurat sampah TPAS Piyungan sehingga mendorong timbulnya banyak lokasi pembuangan sampah ilegal yang akan memperburuk kualitas air sungai; c. kecenderungan alih fungsi lahan yang masih relatif tinggi sehingga berpotensi menurunkan luas tutupan lahan; d. kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah di sembarang tempat bahkan di sungai)	a. meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam mematuhi perizinan yang sudah dimiliki b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan penghijauan lingkungan c. adanya transportasi publik yang melintasi wilayah perkotaan Kabupaten Bantul mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga emisi SO2 dan NO2 yang ditimbulkan bekurang
8	Indeks Resiko Bencana	- Belum Optimalnya Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana - Belum Optimalnya Pelaksanaan Pemulihan Pasca Bencana	- Jumlah Relawan dan Penggiat Kebencanaan yang cukup banyak. - Sinergi dengan Dunia Usaha dan Institusi Perguruan Tinggi yang berjalan baik

3.3.2 Hambatan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah antara lain:

1. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan SKPD kepada SKPKD;
2. Perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah;
3. Kewajiban pemerintah daerah untuk menggunakan SIPD mulai tahun 2021 dalam perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 70 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
4. Keterbatasan SDM di SKPD yang berbasis Pendidikan akuntansi; dan
5. Kecermatan SKPD dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual.

Dalam rangka mengatasi hambatan tersebut telah diupayakan dengan memberikan diklat kepada Pembuat laporan keuangan di SKPD.

Disamping melakukan diklat pembuat laporan keuangan SKPD, BPKPAD telah memberikan bimbingan kepada PPK SKPD fungsi akuntansi dan pelaporan dalam penatausahaan keuangan di seluruh SKPD dan melakukan rekonsiliasi secara periodik terhadap realisasi pendapatan dan belanja yang dikelola oleh masing-masing SKPD dengan data maupun dokumen yang ada di BPKPAD sebagai PPKD sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pencatatan transaksi-transaksi keuangan.

Untuk pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bantul sudah menerapkan kebijakan penggunaan aplikasi SIPD secara penuh tanpa menggunakan aplikasi pendamping. Meskipun di awal-awal penggunaan masih terdapat kendala namun seiring berjalannya waktu aplikasi SIPD sudah dilakukan *update* sehingga kendala tersebut dapat teratasi.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah bupati. Dalam pelaksanaannya bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

BPKPAD Kabupaten Bantul ditunjuk sebagai entitas pelaporan yang bertugas menyusun Laporan Keuangan Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Produk dari entitas pelaporan adalah laporan konsolidasian berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (DKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang, oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan, sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, kepada entitas pelaporan.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan kewenanganya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK SKPD untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodic menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan ke BPKPAD Kabupaten Bantul untuk dikonsolidasikan.

Adapun entitas akuntansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul adalah:

No	Entitas Akuntansi
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2	RSUD Panembahan Senopati
3	RSUD Saras Adyatma
4	Dinas Kesehatan
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
12	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
13	Dinas Lingkungan Hidup
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
16	Dinas Perhubungan
17	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	Dinas Pariwisata
24	Sekretariat Daerah
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Entitas Akuntansi
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
29	Inspektorat Daerah
30	Kapanewon Piyungan
31	Kapanewon Dlingo
32	Kapanewon Imogiri
33	Kapanewon Pandak
34	Kapanewon Bantul
35	Kapanewon Kretek
36	Kapanewon Bambanglipuro
37	Kapanewon Jetis
38	Kapanewon Kasihan
39	Kapanewon Pajangan
40	Kapanewon Sanden
41	Kapanewon Sedayu
42	Kapanewon Sewon
43	Kapanewon Srandakan
44	Kapanewon Banguntapan
45	Kapanewon Pundong
46	Kapanewon Pleret
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian;

b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.3 Basis Pengungkapan dan Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 disajikan menggunakan mata uang rupiah. Apabila terdapat pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dalam mata uang asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal neraca.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pos–pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

a) Pendapatan Kas yang telah diterima pada RKUD;

b) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;

c) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;

d) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan Daerah;

e) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung yang berasal dari dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan Daerah;

f) Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD. BLUD menyampaikan laporan pendapatan setiap bulan untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD;

3) Pengukuran Pendapatan-LRA

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya*, setelah dikompensasikan dengan pengeluaran;

4) Penyajian Pendapatan-LRA

a. Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah;

b. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah;

c. Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Belanja

1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

2) Pengakuan Belanja

a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah;

b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D;

c) Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh SKPD/Unit Kerja yang berbentuk BLUD, dimana pendapatan yang digunakan langsung untuk pengeluaran belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;

d) BLUD menyampaikan laporan belanja setiap bulan untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD;

e) Kas yang dikeluarkan entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai belanja;

f) Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas wajib melaporkannya kepada BUD;

g) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika perolehan barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga maka penganggarannya melalui belanja barang dan jasa;

(3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;

(4) Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset tetap yaitu sebesar harga beli/bangun aset

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;

(5) Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal OPD, meliputi biaya konstruksi, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang, alat tulis kantor, penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan;

(6) Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP tidak menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal.

h) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

(2) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau;

(3) Bertambah umur ekonomis; dan/atau;

(4) Bertambah volume; dan/atau;

(5) Bertambah kapasitas produksi.

(6) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

(7) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan.

(8) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan.

(9) Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar.

(10) Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa, dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

(11) Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

(12) Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan atau hal yang sangat mendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3) Pengukuran Belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening bendahara pengeluaran dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4) Penyajian Belanja

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi belanja, yaitu:

a) Belanja Operasi

b) Belanja Modal

c) Belanja Tak Terduga

d) Belanja Transfer

c. Transfer

1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

2) Transfer diakui pada saat terjadinya penerimaan/pengeluaran dari rekening kas umum daerah.

3) Transfer diukur berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang diterima/dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen yang sah.

4) Transfer disajikan berdasarkan jenis transfer masuk dan jenis transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Surplus/Defisit-LRA

1) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

2) Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

3) Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Pembiayaan

1) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

   Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;

2) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan;

3) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok

pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan, dan pengeluaran investasi non permanen lainnya;

4) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

5) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

6) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

7) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

1) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

2) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

3) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

4.3.2 Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang disusun hanya oleh entitas pelaporan dengan mengkonsolidasikan SiLPA entitas akuntansi pada akhir periode pelaporan. Saldo Anggaran Lebih menggambarkan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan yang tersedia untuk digunakan sebagai pembiayaan anggaran. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal adalah akhir tanggal pelaporan periode sebelum periode pelaporan;

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih adalah bagian SAL awal yang dipergunakan sebagai penerimaan pembiayaan periode pelaporan;

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;

e. Lain-lain; dan

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4.3.3 Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan unsur unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit Operasi, Surplus defisit kegiatan non-operasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

4.3.3.1 Pendapatan – LO

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, asal pendapatan dan jenis pendapatan.

c. Klasifikasi Pendapatan-LO meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non-operasional dan pos luar biasa.

d. Pendapatan Asli Daerah (PAD)—LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;

e. Pendapatan Transfer—LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

f. Lain-lain Pendapatan yang Sah—LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah—LO dan Pendapatan Transfer—LO;

g. Pendapatan Non Operasional—LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi;

h. Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan;

i. Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

j. Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

k. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan tersebut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.3.2 Beban

a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b. Beban diakui pada saat:

   1) Timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah;

   2) Terjadinya konsumsi aset. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah;

   3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

c. Pengukuran beban

   1) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan

   2) Beban diukur berdasarkan besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

3) Beban dari traksaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar

4) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga

5) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

d. Beban disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi belanja, yaitu:

1) Beban operasi;

2) Beban Transfer;

3) Beban Luar Biasa

e. Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut atas beban tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

4.3.4 Pos–Pos Neraca

4.3.4.1 Aset

4.3.4.1.1 Aset Lancar

4.3.4.1.1.1 Kas dan Setara Kas

a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas dapat berupa uang tunai dan saldo simpanan di bank. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh pemerintah. Kas dalam bentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada seluruh rekening bank yang dikuasai pemerintah yang dapat digunakan setiap saat.

b. Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehannya.

c. Kas diakui pada diterima dan/atau dikeluarkan oleh bendahara / Rekening Kas Umum Daerah.

d. Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4.3.4.1.1.2 Piutang

a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

b. Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

c. Untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:

   1) Telah diterbitkan surat ketetapan (termasuk dokumen yang surat ketetapan yang dipersamakan dengan surat ketetapan); dan/atau

   2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau

   3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

d. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

e. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

f. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang.

g. Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

h. Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut.

Tabel 23 Besarnya Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No.	Uraian	% penyisihan berdasarkan kualitas piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1.	Piutang Pajak	0,5 %	10 %	50 %	100 %
2.	Piutang Retribusi	0,5 %	10 %	50 %	100 %
3.	Piutang Selain Pajak dan Retribusi	0,5 %	10 %	50 %	100 %

i. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

j. Penyisihan piutang tidak tertagih di neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada. Nilai penyisihan piutang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

k. Penyisihan piutang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Untuk penghapusan piutang akan diatur dengan peraturan bupati tersendiri.

l. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

m. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan transparansi dan kejelasan informasi maka dalam pencantuman/tampilan/*face* di Neraca untuk nilai piutang ditampilkan beriringan antara nilai nominal/bruto piutang dengan penyisihan piutang dan disajikan berdasarkan jenis piutang.

4.3.4.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka

1) Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

2) Pengakuan beban dibayar dimuka Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

3) Pengukuran beban dibayar dimuka Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

4) Pengungkapan beban dibayar dimuka Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

4.3.4.1.1.4 Persediaan

a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Persediaan merupakan aset yang berwujud:

   1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;

   2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;

   3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

   4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah daerah.

c. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

d. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

e. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya bahan bakar minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

f. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kambing, ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai persediaan.

g. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

i. Persediaan dapat berasal dari belanja modal aset daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kerusakan, kehilangan, nilainya di bawah batas kapitalisasi dan menurut standar teknis masa manfaatnya tidak mencapai 12 (dua belas) bulan.

j. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

k. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

l. Barang yang diserahkan kepada masyarakat apabila belum dibuat Berita Acara Serah Terima tetap diakui sebagai persediaan.

m. Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Biaya perolehan persediaan dianggarkan dalam rekening/akun belanja barang dan jasa. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis, dinilai dengan biaya perolehan terakhir;

2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Penentuan biaya standar untuk produksi sendiri diatur lebih lanjut dengan surat keputusan kepala satuan kerja perangkat daerah;

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Penentuan nilai wajar untuk hewan dan tanaman diatur lebih lanjut dengan surat keputusan kepala satuan kerja perangkat daerah;

n. Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

1) Metode perpetual untuk persediaan yang dinilai menggunakan metode FIFO. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Metode perpetual, untuk persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.

2) Metode periodik untuk persediaan yang dinilai menggunakan harga pembelian terakhir dan nilai wajar. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik *(stock opname)* pada akhir periode akuntansi, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

o. Pendekatan pengakuan beban persediaan yaitu:

1) pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contoh persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

2) pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contoh persediaan untuk suatu kegiatan.

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait persediaan harus mengungkapkan/menyajikan tentang rincian persediaan, penjelasan tentang nilai persediaan dalam kondisi rusak/usang/kedaluwarsa, serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.4.1.2 Investasi Jangka Panjang.

a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non-permanen dan investasi permanen.

b. Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

c. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan yang meliputi penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

d. Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

e. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

f. Investasi non permanen yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

g. Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

h. Investasi non-permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

   Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir mempunyai karakteristik:

   1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;

2. Dana tersebut tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;

3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan atau dikendalikan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat dan ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);

5. Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir

6. Investasi non-permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

7. Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non-permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*)

8. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non-permanen dana bergulir.

9. Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir setelah periode jatuh tempo.

10. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

i. Besarnya persentase penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih adalah sebagai berikut.

Tabel 24 Persentase Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang Tidak Tertagih

No	Uraian	% penyisihan berdasarkan kualitas			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1.	Investasi non permanen	0,5 %	10 %	50 %	100 %

j. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di neraca disajikan sebagai pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar dari penerima dana bergulir.

j. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir bukan merupakan penghapusan piutang. Untuk penghapusan piutang akan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

k. Investasi non permanen yang disisihkan tetap dicatat secara ekstrakomptabel.

l. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

m. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

1) Metode biaya, adalah metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan: digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20 % (dua puluh persen). Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima

2) Metode ekuitas, adalah metode akuntansi yang mencatat nilai awal investasi berdasarkan harga perolehan, nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi, digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50%;

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

n. Harga perolehan investasi dalam mata uang asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Investasi jangka panjang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi kebijakan penentuan nilai investasi, jenis investasi serta informasi lainnya yang dianggap perlu. Khusus untuk Dana Bergulir disajikan sebagai komponen piutang selama mekanisme masih melalui mekanisme Kas Daerah.

4.3.4.1.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan biaya perolehan dapat diukur dengan secara andal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria:

a. Berwujud

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;

c. Tidak mudah rusak;

d. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal;

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

g. Batas Minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:

   (1) Pengadaan/pembelian tanah;

   (2) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau

   (3) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan. atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas, terdiri dari:

a. Tanah;

b. Peralatan dan Mesin;

c. Gedung dan Bangunan;

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;

e. Aset Tetap Lainnya; dan

f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Kebijakan atas setiap akun Aset Tetap:

1.3.1.1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

1.3.1.2. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan nilai barang.

1.3.1.3. Pengadaan Tanah pemerintah daerah yang sejak awal dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan.

1.3.1.4. Tanah diakui sebagai aset tetap pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Pakai/Hak Pengelolaan (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Pengelolaan Lahan (SPL).

1.3.1.5. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran, hibah/donasi dan lainnya. Tanah yang diperoleh dengan melalui pembelian sebagai pelaksanaan kegiatan didasarkan pada anggaran belanja modal sehingga nilai perolehan diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan.

1.3.1.6. Tanah diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

1.3.1.7. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

1.3.1.8. Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

1.3.1.9. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

1.3.1.10. Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

1.3.1.11. Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan, kecuali jika tidak memungkinan dapat dinilai menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

1.3.1.12. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak

1.3.1.13. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

1.3.1.14. Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

1.3.1.15. Jalan Irigasi dan Jaringan diakui pada saat aset telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan atau saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai serta dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai wajar saat diperoleh.

1.3.1.16. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

1.3.1.17. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

1.3.1.18. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

1.3.1.19. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

1.3.1.20. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan atau aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

1.3.1.21. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui dan disajikan tersendiri dalam neraca sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

1.3.1.22. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan estimasi masa manfaat

1.3.1.23. Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (*capitalization threshold*) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut.

a. Pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin, dan alat olah raga yang sama atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

c. Untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi diatas.

Pelaksanaan pengelolaan aset pada Tahun 2020 dilakukan dengan Sistem Berbasis Komputer (SIMAS BMD). Dalam SIMAS BMD untuk beban penyusutan aset tetap dilakukan langsung setelah tahun perolehan tanpa ada tenggang waktu, sehingga penyajian akumulasi penyusutan aset tetap di Neraca dan beban penyusutan di Laporan Operasional merupakan akumulasi penyusutan dari tahun pertama asset tersebut diperoleh.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan transparansi dan kejelasan informasi maka dalam pencantuman/tampilan/*face* di Neraca untuk nilai aset ditampilkan beserta penyusutannya.

4.3.4.1.4 Dana Cadangan

a. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

   1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

   2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

   3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;

   4) Sumber dana cadangan; dan

   5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;

b. Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.

c. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS Pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

d. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-jasa giro/bunga dana cadangan.

4.3.4.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap maupun dana cadangan meliputi:

1. Tagihan jangka panjang (tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah);

2. Kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna);

3. Aset tidak berwujud (lisensi, hak cipta, hak paten, aset tidak berwujud lainnya); dan;

4. Aset lain-lain.

Pengakuan aset lainnya ditetapkan sebagai berikut.

1) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada Pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh Pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah (TPTGR) diakui ketika terbit putusan TPTGR yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) atau SKTJM. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3) Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan mempergunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki. Kemitraan dengan pihak ketiga antara lain dapat berupa sewa, Kerjasama pemanfaatan (KSP), bangun kelola/guna serah, bangun serah kelola/guna.

4) Kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa diakui pada saat terjadinya perjanjian kerjasama/kemitraan dengan perubahan pencatatan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya. Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara sewa.

5) Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan dinilai dari nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau yang paling berdaya uji.

6) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta

mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak dan dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut.

7) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.

8) Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

   Contoh aset tidak berwujud adalah goodwill, hak paten, hak cipta, royalti, software, lisensi, hasil kajian/penelitian, aset tak berwujud lainnya, dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

9) Aset tidak berwujud harus memenuhi kriteria:

   a. Dapat diidentifikasi;

   b. Dikendalikan oleh entitas;

   c. Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan;

   d. Biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal dari aset tidak berwujud tidak menambah masa manfaat dan tidak dikapitalisasi.

10) Pengakuan aset tidak berwujud.

    Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:

    a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

11) Aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan, namun jika tidak dapat ditelusuri maka dapat dicatat sebesar nilai wajar.

Pengeluaran atas aset tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak dapat dianggap sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud tersebut dikemudian hari.

12) Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Penghitungan amortisasi menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

13) Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

4.3.4.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari pihak ketiga, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau lembaga internasional, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

1) Kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya menjadi dua kelompok yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam periode 12 (dua belas) bulan, diluar itu maka diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Panjang.

2) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumberdaya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau saat kewajiban timbul.

3) Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu yang harus dipungut.

4) Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai utang yang terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban pokok atau commitment fee yang telah terjadi diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

5) Bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo pada periode 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, termasuk jumlah bagian dari utang jangka panjang.

6) Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah. Akun ini dinilai sebesar bagian barang/ jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

7) Utang belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

8) Utang jangka pendek lainnya antara lain utang jamkesos diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.

9) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

10) Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber dalam negeri.

4.3.4.3 Ekuitas

1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

2) Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih).

5) Akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran PPKD) diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran SKPD) ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

6) Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan secara bertahap dikarenakan penerapan basis akrual penuh belum sepenuhnya menyeluruh dalam proses pengelolaan keuangan daerah dan untuk perhitungan umur penyusutan piutang masih konsisten berdasarkan perhitungan yang telah diterapkan dimasa yang lalu terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023(Rp)
5.1.1	Pendapatan LRA	2.572.162.006.893,00	2.609.413.354.404,57	101,45	2.416.084.417.354,57

Merupakan Pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

	Uraian	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023(Rp)
5.1.1.1.	Pendapatan Asli Daerah	618.610.087.119,00	638.567.864.259,57	103,23	587.435.038.672,92
5.1.1.2.	Pendapatan Transfer	1.947.551.919.774,00	1.968.055.104.226,00	101,05	1.821.467.142.818,65
5.1.1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.000.000.000,00	2.790.385.919,00	46,51	7.182.235.863,00
		2.572.162.006.893,00	2.609.413.354.404,57	101,45	2.416.084.417.354,57

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.609.413.354.404,57 atau mencapai 101,45% dari pagu anggaran sebesar Rp2.572.162.006.893,00. Realisasi pendapatan tersebut termasuk pendapatan Dana Desa, pendapatan BLUD, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang penerimaannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi pendapatan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,00% dari realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp193.328.937.050,00

	Uraian	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023(Rp)
5.1.1.1.	Pendapatan Asli Daerah	618.610.087.119,00	638.567.864.259,57	103,23	587.435.038.672,92

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2024 dengan rincian pos dan jumlah anggaran dan realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

	Uraian	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023(Rp)
5.1.1.1.1	Pajak Daerah	267.000.000.000,00	295.769.695.358,90	110,78	269.918.537.186,00
5.1.1.1.2	Retribusi Daerah	323.698.865.552,00	307.622.088.520,00	95,03	42.382.506.560,80
5.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.199.694.868,00	20.083.794.982,30	99,43	20.515.070.732,29000
5.1.1.1.4	Lain – Lain PAD yang Sah	7.711.526.699,00	15.092.285.398,37	195,71	254.618.924.193,83
	Jumlah Pendapatan asli Daerah	618.610.087.119,00	638.567.864.259,57	103,23	587.435.038.672,92

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahuan Anggaran 2024 sebesar Rp638.567.864.259,57 atau mencapai 103,22% dari anggaran sebesar Rp618.610.087.119,00 dan mengalami kenaikan 8,70% atau sebesar Rp51.132.825.586,65

Realisasi masing-masing akun Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pengampu Pajak Daerah dikelola oleh BPKPAD.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalami pergeseran pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Berkaitan dengan pengembangan Pajak daerah Pemerintah Pusat melakukan restrukturisasi Pajak Daerah melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak Daerah berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak Daerah, yaitu menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Jenis Pajak Daerah terdiri atas:

a. PBB-P2;

b. BPHTB;

c. PBJT atas:

1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Air Tanah;

f. Pajak MBLB; dan

g. Pajak Sarang Burung Walet (tidak dipungut Daerah)

h. Opsen PKB; dan

i. Opsen BBNKB.

Penganggaran pajak daerah dalam APBD murni TA 2024 didasarkan pada peraturan daerah tentang Pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 karena sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD TA 2024 paraturan daerah tentang Pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah belum ditetapkan. Sedangkan untuk penganggaran di APBD Perubahan sudah menyesuaiakan dengan Perda yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah

Rincian atas anggaran dan realisasi masing-masing Pajak Daerah Tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut :

5.1.1.1.1	Pendapatan atas Pajak Daerah terdiri atas:	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023(Rp)
5.1.1.1.1.1	Pajak hotel	3.513.778.000,00	3.513.777.072,00	100,00	9.545.901.045,00
5.1.1.1.1.1.1	Pajak Hotel	3.507.032.000,00	3.506.000.433,00	99,97	9.511.470.084,00
5.1.1.1.1.1.2	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	6.746.000,00	7.776.639,00	115,28	34.430.961,00
5.1.1.1.1.2	Pajak restoran	11.344.928.000,00	11.646.826.243,70	102,66	31.135.851.736,00
5.1.1.1.1.2.1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.835.240.000,00	3.039.735.818,00	107,21	8.292.503.236,00
5.1.1.1.1.2.2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	6.415.000.000,00	6.519.462.192,00	101,63	12.467.892.963,00
5.1.1.1.1.2.3	Pajak Warung dan Sejenisnya	34.437.000,00	38.502.400,00	111,81	10.245.262.937,00
5.1.1.1.1.2.4	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.060.251.000,00	2.049.125.833,70	99,46	130.192.600,00
5.1.1.1.1.3	Pajak hiburan	193.249.000,00	205.131.613,00	106,15	985.113.818,00
5.1.1.1.1.3.1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana				449.984.227,00
5.1.1.1.1.3.2	Pajak Pameran	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	195.499.000,00
5.1.1.1.1.3.3	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	117.718.000,00	129.548.488,00	110,05	308.216.841,00
5.1.1.1.1.3.4	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	31.531.000,00	31.583.125,00	100,17	20.813.750,00
5.1.1.1.1.3.5	Pajak Pertandingan Olahraga				10.600.000,00
5.1.1.1.1.4	Pajak reklame	2.750.000.000,00	3.048.215.785,80	110,84	3.711.605.801,00
5.1.1.1.1.4.1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.097.773.058,00	2.384.372.953,00	113,66	2.829.625.841,00
5.1.1.1.1.4.2	Pajak Reklame Kain	200.000.000,00	240.571.666,00	120,29	286.879.286,00
5.1.1.1.1.4.3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	450.000.000,00	421.044.224,80	93,57	574.954.736,00
5.1.1.1.1.4.4	Pajak Reklame Berjalan	2.226.942,00	2.226.942,00	100,00	20.145.938,00
5.1.1.1.1.5	Pajak penerangan jalan	21.350.464.664,00	21.350.464.664,00	100,00	57.776.381.090,00
5.1.1.1.1.6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.000.000,00	30.153.000,00	251,28	186.696.450,00
5.1.1.1.1.6.1	Pajak Pasir dan Kerikil	-	1.330.000,00		
5.1.1.1.1.6.2	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	12.000.000,00	28.823.000,00	240,19	
5.1.1.1.1.7	Pajak parkir	73.754.000,00	73.796.107,00	100,06	291.070.969,00
5.1.1.1.1.8	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.294.765.184,40	117,71	1.285.364.422,00
5.1.1.1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet	-			1.500.000,00
5.1.1.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	69.183.000.000,00	72.183.169.264,00	104,34	69.506.010.787,00
5.1.1.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	95.318.000.000,00	108.239.944.942,00	113,56	95.493.041.068,00
5.1.1.1.1.12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Makanan dan/atau Minuman	18.655.072.000,00	22.975.470.693,00	123,16	-
5.1.1.1.1.12.1	PBJT-Restoran	11.405.323.000,00	15.094.807.107,00	132,35	-
5.1.1.1.1.12.2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	7.249.749.000,00	7.880.663.586,00	108,70	-
5.1.1.1.1.13	PBJT-Tenaga Listrik	37.549.535.336,00	43.990.972.571,00	117,15	-

5.1.1.1.1.13.1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	37.549.535.336,00	43.990.972.571,00	117,15	-
5.1.1.1.1.14	PBJT-Jasa Perhotelan	5.486.222.000,00	6.655.255.589,00	121,31	-
5.1.1.1.1.14.1	PBJT-Hotel	5.486.222.000,00	6.655.255.589,00	121,31	-
5.1.1.1.1.15	PBJT-Jasa Parkir	63.246.000,00	86.655.277,00	137,01	-
5.1.1.1.1.15.1	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	63.246.000,00	86.655.277,00	137,01	-
5.1.1.1.1.16	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	406.751.000,00	475.097.353,00	116,80	-
5.1.1.1.1.16.1	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	97.000.000,00	92.989.600,00	95,87	-
5.1.1.1.1.16.2	PBJT-Pameran	96.877.000,00	148.779.591,00	153,58	-
5.1.1.1.1.16.3	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	18.874.000,00	18.874.000,00	100,00	-
5.1.1.1.1.16.4	PBJT-Permainan Ketangkasan	140.000.000,00	111.364.229,00	79,55	-
5.1.1.1.1.16.5	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perler	50.000.000,00	99.173.933,00	198,35	-
5.1.1.1.1.16.6	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	4.000.000,00	3.916.000,00	97,90	-
		267.000.000.000,00	295.769.695.358,90	110,78	269.918.537.186,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp295.769.695.358,90.atau mencapai 110,78% dari anggarannya sebesar Rp267.000.000.000,00. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp295.769.695.358,90 mengalami kenaikan sebesar 9,58% dari pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp25.851.158.172,90

Peningkatan Pajak Daerah ini karena adannya :

1. Ekstensifikasi Pajak yaitu dengan :
   a. Pendaftaran obyek pajak dan subyek pajak;
   b. Pendataan obyek pajak dan subyek pajak;
   c. Pemutakhiran basis data PBB;
   d. Intergrasi data BPHTB dengan data PBB;
   e. pelayanan kepada wajib pajak secara tatap muka maupun online melalui citigov;
   f. Sosialisasi pajak kepada wajib pajak dan dukuh;
   g. Menambah jumlah tempat pembayaran pajak dengan bekerjasama dengan Bank Nasional.
2. Intensifikasi Pajak yaitu dengan :
   a. Melakukan panagihan dengan menerbitkan STPD;
   b. Pelayanan pembayaran pajak dengan mobil keliling;
   c. Pengawasan pelaporan dengan *tapping device* ;
   d. Mensyaratkan pelunasan tunnggakan PBB P2 untuk proses penelitian SSPD BPHTB;
   e. Memberikan reward kepada Dukuh dan Kalurahan yang lunas PBB P2;

f. Apresiasi kepada wajib pajak yang membayar pajak lebih awal.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalami pergeseran pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah atas Objek Retribusi dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizininan Tertentu. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil.

Rincian target dan realisasi dalam retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

5.1.1.1.2	Retribusi Daerah terdiri atas:	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	267.582.403.302,00	269.472.520.280,00	100,71	9.393.839.229,00
5.1.1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	53.348.462.250,00	35.843.700.322,00	67,19	30.957.304.753,00
5.1.1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.768.000.000,00	2.305.867.918,00	83,30	2.031.362.578,80
	Jumlah	323.698.865.552,00	307.622.088.520,00	95,03	42.382.506.560,80

Realisasi Retribusi daerah Tahun 2024 sebesar Rp307.622.088.520,00 atau mencapai 95,03% dari targer sebesar Rp323.698.865.552,00 dan mengalami kenaikan sebesar 625,82% atau sebesar Rp265.239.581.959,20 dari realisasi tahun 2023, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan di Rumah Sakit (BLUD) menjadi objek Retribusi Jasa Umum.

Rincian target dan realisasi menurut jenisnya adalah sebagai berikut :

5.1.1.1.2	Retribusi Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		323.698.865.552,00	307.622.088.520,00	95,03	42.382.506.560,80
5.1.1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	267.582.403.302,00	269.472.520.280,00	100,71	9.393.839.229,00
5.1.1.1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	260.174.532.260,00	261.332.176.610,00	100,44	351.928.000,00
5.1.1.1.2.1.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	65.467.211.268,00	64.158.282.561,00	98,00	0,00
5.1.1.1.2.1.1.2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	194.357.320.992,00	196.764.095.049,00	101,24	0,00
5.1.1.1.2.1.1.3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	350.000.000,00	409.799.000,00	117,09	351.928.000,00

5.1.1.1.2.1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.242.451.433,00	2.760.763.905,00	123,11	2.054.622.640,00
5.1.1.1.2.1.2.1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.242.451.433,00	2.760.763.905,00	123,11	2.054.622.640,00
5.1.1.1.2.1.3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	278.960.000,00	303.605.000,00	108,83	265.455.000,00
5.1.1.1.2.1.3.1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	278.960.000,00	303.605.000,00	108,83	265.455.000,00
5.1.1.1.2.1.4	Retribusi Pelayanan Pasar	4.752.657.109,00	4.890.419.265,00	102,90	4.412.038.089,00
5.1.1.1.2.1.4.1	Retribusi Pelataran	234.416.000,00	268.184.600,00	114,41	236.499.675,00
5.1.1.1.2.1.4.2	Retribusi Los	2.990.772.879,00	3.019.140.557,00	100,95	2.648.447.812,00
5.1.1.1.2.1.4.3	Retribusi Kios	1.527.468.230,00	1.603.094.108,00	104,95	1.527.090.602,00
5.1.1.1.2.1.5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-		910.708.000,00
5.1.1.1.2.1.5.1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-		910.708.000,00
5.1.1.1.2.1.6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.602.500,00	23.952.500,00	110,88	21.775.000,00
5.1.1.1.2.1.6.1	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.602.500,00	23.952.500,00	110,88	21.775.000,00
5.1.1.1.2.1.7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	112.200.000,00	161.603.000,00	144,03	145.327.000,00
5.1.1.1.2.1.7.1	Retribusi Rumah Tangga	112.200.000,00	161.603.000,00	144,03	145.327.000,00
5.1.1.1.2.1.8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-		96.856.500,00
5.1.1.1.2.1.8.1	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	-	-		96.856.500,00
5.1.1.1.2.1.9	Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-		13.729.000,00
5.1.1.1.2.1.9.1	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	-	-		13.729.000,00
5.1.1.1.2.1.10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-		1.121.400.000,00
5.1.1.1.2.1.10.1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-			1.121.400.000,00
5.1.1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	53.348.462.250,00	35.843.700.322,00	67,19	30.957.304.753,00
5.1.1.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	903.265.800,00	1.462.156.800,00	161,87	1.647.778.200,00
5.1.1.1.2.2.1.1	Retribusi Penyewaan Bangunan	738.893.300,00	738.893.300,00	100,00	1.412.131.800,00
5.1.1.1.2.2.1.2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	149.555.000,00	704.701.000,00	471,20	173.803.900,00
5.1.1.1.2.2.1.3	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	14.817.500,00	18.562.500,00	125,27	61.842.500,00
5.1.1.1.2.2.2	Retribusi Tempat Pelelangan	86.700.000,00	112.675.899,00	129,96	72.576.993,00
5.1.1.1.2.2.2.1.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	86.700.000,00	112.675.899,00	129,96	72.576.993,00
5.1.1.1.2.2.3	Retribusi Terminal	79.260.000,00	208.570.000,00	263,15	231.057.700,00
5.1.1.1.2.2.3.1	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	79.260.000,00	208.570.000,00	263,15	231.057.700,00
5.1.1.1.2.2.4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	250.000.000,00	308.815.000,00	123,53	267.995.000,00
5.1.1.1.2.2.4.1	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	250.000.000,00	308.815.000,00	123,53	267.995.000,00
5.1.1.1.2.2.5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	12.100.000,00	242,00	11.300.000,00
5.1.1.1.2.2.5.1	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	12.100.000,00	242,00	11.300.000,00
5.1.1.1.2.2.6	Retribusi Rumah Potong Hewan	35.000.000,00	35.220.000,00	100,63	37.380.000,00

5.1.1.1.2.2.6.1	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	35.000.000,00	35.220.000,00	100,63	37.380.000,00
5.1.1.1.2.2.7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.032.244.000,00	32.010.568.000,00	63,98	27.446.416.750,00
5.1.1.1.2.2.7.1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.032.244.000,00	32.010.568.000,00	63,98	27.446.416.750,00
5.1.1.1.2.2.8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.070.550.250,00	1.172.444.423,00	109,52	1.242.800.110,00
5.1.1.1.2.2.8.1	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	659.605.250,00	744.044.000,00	112,80	825.890.000,00
5.1.1.1.2.2.8.2	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	80.000.000,00	112.729.500,00	140,91	106.614.000,00
5.1.1.1.2.2.8.3	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	281.250.000,00	235.772.923,00	83,83	228.789.610,00
5.1.1.1.2.2.8.4	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan	49.695.000,00	79.898.000,00	160,78	81.506.500,00
5.1.1.1.2.2.9	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	886.442.200,00	521.150.200,00	58,79	0,00
5.1.1.1.2.2.9	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	886.442.200,00	521.150.200,00	58,79	0,00
5.1.1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.768.000.000,00	2.305.867.918,00	83,30	2.031.362.578,80
5.1.1.1.2.3.1	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	-		774.360.000,00
5.1.1.1.2.3.1.1	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	-	-		774.360.000,00
5.1.1.1.2.3.2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.205.000.000,00	1.556.917.918,00	70,61	1.257.002.578,80
5.1.1.1.2.3.2.1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.205.000.000,00	1.556.917.918,00	70,61	1.257.002.578,80
5.1.1.1.2.3.3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	563.000.000,00	748.950.000,00	133,03	0,00
5.1.1.1.2.3.3.1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	563.000.000,00	748.950.000,00	133,03	0,00

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada 4 (empat) jenis objek Retribusi Daerah yang tidak boleh dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.1.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	65.467.211.268,00	64.158.282.561,00	98,00	-

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari 27 Puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusa Bupati Bantul Nomor 524 tahun 2014 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Puskesmas. Dalam pengelolaan keuangan, Puskesmas di Bantul masih menginduk pada Dinas Kesehatan karena BLUD Puskesmas sebagai BLUD Unit SKPD (UPT Puskesmas) sehingga DPA nya masih jadi satu dengan Dinas Kesehatan.
Adapun rincian target anggaran dan realisasi Pendapatan dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Puskesmas	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Srandakan	2.420.000.000,00	2.309.945.416,00	95,45	2.238.535.856,00
2	Sanden	2.468.000.000,00	2.508.132.057,00	101,63	2.454.477.162,00

3	Kretek	2.600.000.000,00	2.521.667.005,00	96,99	2.346.846.517,00
4	Pundong	2.820.000.000,00	2.856.495.026,00	101,29	2.648.917.276,00
5	Bambanglipuro	3.153.000.000,00	3.184.390.686,00	101,00	2.926.428.868,00
6	Pandak I	2.188.000.000,00	2.136.754.083,00	97,66	2.100.618.844,00
7	Pandak II	1.675.000.000,00	1.678.176.015,00	100,19	1.646.542.879,00
8	Bantul I	2.224.600.000,00	2.324.150.604,00	104,47	2.219.662.679,00
9	Bantul II	1.935.000.000,00	1.834.802.274,00	94,82	1.743.037.290,00
10	Jetis I	2.424.687.393,00	2.412.497.009,00	99,50	2.287.065.963,00
11	Jetis II	1.700.000.000,00	1.758.586.687,00	103,45	1.694.055.569,00
12	Imogiri I	2.490.000.000,00	2.573.431.284,00	103,35	2.402.735.029,00
13	Imogiri II	2.949.842.125,00	2.699.813.496,00	91,52	2.483.912.172,00
14	Dlingo I	1.624.304.800,00	1.555.449.737,00	95,76	1.522.542.154,00
15	Dlingo II	1.478.000.000,00	1.492.875.554,00	101,01	1.478.819.553,00
16	P;eret	3.388.230.000,00	3.171.854.303,00	93,61	3.180.466.089,00
17	Piyungan	3.318.000.000,00	3.315.786.034,00	99,93	3.117.308.742,00
18	Banguntapan I	2.723.944.762,00	2.654.259.981,00	97,44	2.574.796.210,00
19	Banguntapan II	2.254.300.000,00	2.230.103.882,00	98,93	1.998.434.696,00
20	Banguntapan III	1.283.563.000,00	1.306.192.711,00	101,76	1.113.273.474,00
21	Sewon I	3.018.000.000,00	2.831.854.685,00	93,83	3.136.124.975,00
22	Sewon II	2.750.400.800,00	2.619.536.665,00	95,24	2.462.425.521,00
23	Kasihan I	3.300.000.000,00	3.138.235.818,00	95,10	3.054.936.673,00
24	Kasihan II	2.465.500.000,00	2.552.795.787,00	103,54	2.203.465.029,00
25	Pajangan	2.795.000.000,00	2.756.802.943,00	98,63	2.585.313.526,00
26	Sedayu I	1.899.500.000,00	1.913.822.466,00	100,75	1.778.223.581,00
27	Sedayu II	2.120.338.388,00	1.819.870.353,00	85,83	1.720.764.813,00
	JUMLAH	65.467.211.268,00	64.158.282.561,00	98,00	61.119.731.140,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.1.1.2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	194.357.320.992,00	196.764.095.049,00	101,24	-

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari RSU Panembahan Senopati dan RSUD Saras Adhyatma. Umum Daerah (PPK-RSU Panembahan Senopati yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor195 Tahun 2014 Tanggal 21 Juli 2009 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

Pada tahun 2022 RS Panembahan Senopati berubah struktur organisasinya menjadi Unit Organisasi Berbadan Khusus (UOBK) berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Dan Tata Kerja, Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan.

RSUD Saras Adyatma Ruamah Sakit tipe D yang merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berdasarkab Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 dan telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 597 tahun 2022.

Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati	190.557.320.992,00	192.568.007.332,00	101,06	-
Rumah Sakit Sarads Adhyatma	3.800.000.000,00	4.186.055.978,00	110,16	-
Jumlah	194.357.320.992,00	196.754.063.310,00	101,23	0,00

Rincian anggaran dan realisasi retribusi daerah dari masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Nomor	Nama Perangkat Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	200.000.000,00	677.555.000,00	338,78	350.535.000,00
2	Dinas Kesehatan	65.616.766.268,00	64.862.983.561,00	98,85	180.756.000,00
3	RSUD Panembahan Senopati	190.557.320.992,00	192.568.007.332,00	101,06	-
4	RSUD Saras Adhyatma	3.800.000.000,00	4.186.055.978,00	110,16	-
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.846.042.500,00	3.017.802.318,00	78,47	2.892.278.878,80
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	563.000.000,00	748.950.000,00	133,03	774.360.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	1.851.598.820,00	2.331.275.826,00	125,91	1.783.300.140,00
8	Dinas Perhubungan	721.133.000,00	822.990.000,00	114,12	1.681.015.700,00
9	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-		1.121.400.000,00
10	Dinas Pariwisata	49.013.473.000,00	30.667.876.500,00	62,57	26.283.785.500,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	367.950.000,00	348.448.822,00	94,70	301.366.603,00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.993.071.250,00	2.046.827.000,00	102,70	2.215.414.750,00
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5.163.509.722,00	5.321.184.444,00	103,05	4.786.993.989,00
14	Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Protokol)	5.000.000,00	12.100.000,00	242,00	11.300.000,00
	Jumlah	323.698.865.552,00	307.612.056.781,00	95,03	42.382.506.560,80

5.1.1.1.3 Pendapatan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri atas:

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba Perusahaan Daerah Tahun 2023 yang disetorkan di Tahun Anggaran 2024 dengan pengaturan sesuai masing-masing Peraturan Daerah sebagai payung hukum pendirian perusahaan daerah.

Nomor	Dasar Hukum	Keterangan
1	Perda Kab. Bantul Nomor 9 Tahun 2007 dan telah dirubah dengan Perda Nomor 11 tahun 2019	

2	Perda Kab. Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 terakhir diubah dengan Perda Nomor 03 Tahun 1991	
3	Perda Kab. Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 terakhir diubah dengan Perda Nomor 3 tahun 2020	Penyertaan modal murni milik Pemerintah Kabupaten Bantul
4	Perda Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 1989	Penyertaan modal milik Pemda DIY, Pemkab/Kota dan Pemerintah Kalurahan
5	Perda Propinsi DIY Nomor 2 Tahun 1993 jo Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000	Penyertaan modal milik Pemda DIY, Pemkab/Kota

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD. Adapun rincian anggaran dan realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.3.1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.692.694.868,00	19.169.161.683,30	97,34	19.714.456.371,29
5.1.1.1.3.2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	157.000.000,00	-	-	19.112.119,00
5.1.1.1.3.3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	350.000.000,00	914.633.299,00	261,32	781.502.242,00
		20.199.694.868,00	20.083.794.982,30	99,43	20.515.070.732,2900

Rincian realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

5.1.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) terdiri dari:

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.3.1.1	Bagian Laba PT Bank BPD DIY	15.865.045.674,00	15.132.156.785,00	95,38	15.865.045.674,00
5.1.1.1.3.1.2	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah PD BPR Bank Bantul	3.627.482.239,00	3.730.919.078,00	102,85	3.627.482.239,00
5.1.1.1.3.1.3	Bagian Laba BUKP	200.166.955,00	306.085.820,30	152,92	221.928.458,29
		19.692.694.868,00	19.169.161.683,30	97,34	19.714.456.371,2900

Penjelasan lebih lanjut dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) adalah sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.3.1.1	Bagian Laba PT Bank BPD DIY	15.865.045.674,00	15.132.156.785,00		15.865.045.674,00

Bagian Laba PT Bank BPD DIY merupakan pembagian laba dari PT Bank BPD DIY. Penetapan bagian laba tahun 2023 yang harus disetor ke kas daerah berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BPD DIY Tahun Buku 2023. Deviden tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Batul pada tanggal 15 Maret 2024. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 04 Maret 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BPD DIY untuk Kabupaten Bantul sebesar Rp15.132.156.785,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.3.1.2	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah PD BPR Bank Bantul	3.627.482.239,00	3.730.919.078,00	102,85	3.627.482.239,00

Penetapan bagian laba Tahun 2023 yang harus disetor ke kas daerah berasal dari hasil audit atas Laporan Keuangan PD BPR Bank Bantul Tahun 2023 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng

	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Laba setelah pajak	6.790.279.511,00	6.602.024.278,00
Laba dibagi 55%	3.734.653.731,05	3.631.113.352,90
Pemda 99,9%	3.730.919.077,32	3.627.482.239,55
PDAM 0,10%	3.734.653,73	3.631.113,35
Pembulatan		
Bagian laba tahun 2023 yang telah disetor di 2024	3.730.919.078,00	3.627.482.239,00
Kewajiban yang belum disetor		

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.3.1.3	Bagian Laba BUKP	200.166.955,00	306.085.855,48	152,92	221.928.458,30

Penetapan bagian laba tahun buku 2023 yang harus disetor ke kas daerah berdasarkan pada Keputusan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 395/KEP/2024 tertanggal 15 Oktober 2023 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Buku 2023.

Realisasi penerimaan bagian laba BUKP tahun 2023 sebesar Rp306.085.855,48 atau mencapai 152,92% dari anggaran sebesar Rp200.166.955,00 dan mengalami kenaikan sebesar 37,92% dari realisasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp84.157.397,18 karena beberapa BUKP yang tidak dikenakan kewajiban menyetorkan laba disebabkan mengalami kerugian.

Rincian dari penerimaan bagian laba BUKP untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

NO	BUKP WILAYAH KERJA KEPANEWON	Kewajiban Menurut SK Gubernur	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Imogiri	10.803.649,26	10.803.649,26	12.662.609,11	(1.858.959,85)
2	Srandakan	23.313.131,99	23.313.131,99	19.940.636,70	3.372.495,29
3	Pandak	-	-	-	-
4	Kretek	45.132.141,17	45.132.141,17	32.759.487,92	12.372.653,25
5	Pleret	7.879.482,89	7.879.482,89	7.059.930,92	819.551,97
6	Piyungan	-	-	-	-
7	Sedayu	34.201.235,06	34.201.235,06	11.886.200,02	22.315.035,04
8	Pajangan	1.336.311,94	1.336.311,94	-	1.336.311,94
9	Sanden	-	-	-	-

10	Dlingo	12.023.123,04	12.023.123,04	16.536.524,37	(4.513.401,33)
11	Bambanglipuro	18.062.103,91	18.062.103,91	11.002.628,56	7.059.475,35
12	Sewon	19.812.906,68	19.812.906,68	9.532.740,12	10.280.166,56
13	Banguntapan	15.073.812,74	15.073.812,74	12.077.442,41	2.996.370,33
14	Jetis	32.640.908,51	32.640.908,51	32.776.746,99	(135.838,48)
15	Pundong	35.613.874,76	35.613.874,76	23.105.354,66	12.508.520,10
16	Bantul	20.435.753,67	20.435.753,67	11.631.369,02	8.804.384,65
17	Kasihan	29.757.419,86	29.757.419,86	20.956.787,50	8.800.632,36
	JUMLAH	306.085.855,48	306.085.855,48	221.928.458,30	84.157.397,18

Pembagian Laba bersih BUKP dibagi untuk pemilik modal 55%, Cadangan Umum 15%, Cadangan Tujuan 15%, Dana Pembinaan 7,5% dan Jasa Produksi 7,5%.
Untuk realisasi pembagian laba bersih BUKP tahun 2024 sebagai berikut :

NO	BUKP WILAYAH KERJA KEPANEWON	Bagian Laba	Dana Pembinaan	Jasa Produksi	Jumlah
1	Imogiri	6.543.207,19	2.434.538,33	1.825.903,74	10.803.649,26
2	Srandakan	16.661.210,11	3.801.098,22	2.850.823,66	23.313.131,99
3	Pandak	-	-	-	-
4	Kretek	28.640.867,52	9.423.584,94	7.067.688,71	45.132.141,17
5	Pleret	5.658.860,43	1.268.927,12	951.695,34	7.879.482,89
6	Piyungan	-	-	-	-
7	Sedayu	26.532.853,26	4.381.932,46	3.286.449,34	34.201.235,06
8	Pajangan	888.625,05	255.821,08	191.865,81	1.336.311,94
9	Sanden	-	-	-	-
10	Dlingo	6.245.199,51	3.301.670,59	2.476.252,94	12.023.123,04
11	Bambanglipuro	11.381.092,14	3.817.721,01	2.863.290,76	18.062.103,91
12	Sewon	12.401.210,50	4.235.254,96	3.176.441,22	19.812.906,68
13	Banguntapan	10.428.827,15	2.654.277,48	1.990.708,11	15.073.812,74
14	Jetis	18.418.114,56	8.127.310,83	6.095.483,12	32.640.908,51
15	Pundong	23.648.607,19	6.837.310,83	5.127.956,74	35.613.874,76
16	Bantul	15.786.266,50	2.656.849,81	1.992.637,36	20.435.753,67
17	Kasihan	20.265.271,35	5.424.084,86	4.068.063,65	29.757.419,86
	Sub Jumlah	203.500.212,46	58.620.382,52	43.965.260,50	306.085.855,48

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)

5.1.1.1.3.2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	-	19.112.119,00

Penetapan bagian laba tahun 2023 yang harus disetor ke kas daerah berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 oleh Kantor Akuntan Publik Hadiono dan Rekan dengan perincian sebagai berikut :

	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Laba Bersih setelah pajak	241.387.353,00	34.749.307,00
Bagian laba dibagi (55% dariLaba)	132.763.044,15	19.112.118,85
Pembulatan		
Bagian laba yang telah disetor	0,00	19.112.119,00
Kewajiban yang belum disetor	132.763.044,15	-0,15

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perumda Aneka Dharma per 31 Desember 2023 mempunyai saldo laba yang positif, akan tetapi tidak berkewajiban menyetorkan bagian laba yang dibagikan kepada pemeintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada Perumda Aneka Dharma karena masih mengalami kerugian (terjadi penurunan nilai ekuitas)

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.3.3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	350.000.000	914.633.299	261,32	781.502.242

Penetapan bagian laba tahun 2024 yang harus disetor ke kas daerah berasal dari hasil audit atas Laporan Keuangan PDAM Tahun 2023 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosaoetro dengan perincian sebagai berikut:

	Realisasi 2024	REALISASI 2023
Laba Bersih setelah pajak	1.662.969.634,54	1.420.913.167,05
Bagian laba dibagi (55% dari Laba)	914.633.299,00	781.502.241,88
Pembulatan		(0,23)
Bagian laba yang telah disetor	914.633.299,00	781.502.242,00
Kewajiban yang belum disetor	(0)	(0,35)

Realisasi untuk penerimaan Bagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp914.633.299,00 mengalami peningkatan sebesar 17,04% dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp133.131.057,00

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah

Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dari SKPD pengelola sebagai berikut:

No.	OPD Penghasil	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	-	-		61.119.731.140,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	-	-		177.245.819.100,00
3	Rumah Sakit Saras Adhyatma	-	-		1.127.069.997,00
4	Dinas Pekerjaan Umum,Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	4.063.320,00		7.233.786,00
5	Dinas Perhubungan	7.500.000,00	-	-	27.450.500,00
6	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan				8.863.740,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-		17.391.600,00
8	Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian	16.000.000,00	25.267.000,00	157,92	
9	Dinas Kelautan dan Perikanan				72.126.800,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan	384.490.278,00	209.118.152,00	54,39	279.181.420,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	-	8.117.079,00		4.842.188,00
12	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	7.303.536.421,00	14.845.719.847,37	203,27	14.643.120.922,83
	Jumlah lain-lain PAD yang sah	7.711.526.699,00	15.092.285.398,37	195,71	254.552.831.193,83

Realisasi Lain-lain PAD yang sah Tahun 2024 sebesar Rp15.092.285.398,37 atau mencapai 195,71% dari targer sebesar Rp7.711.526.699,00 karena ada brbrapa objek pendapatan yang tidak ditarget dalam APBD tetapi ada realisasinya diantaranya denda pajak daerah dan pendapatan dari pengembalian belanja daerah.
Realisasi Lain-lain PAD yang sah Tahun 2024 sebesar Rp15.092.285.398,37 atau mencapai 195,71% dari targer sebesar Rp7.711.526.699,00 dan mengalami penurunan sebesar 94,07% atau sebesar Rp239.460.545.795,46 dari realisasi tahun 2023, karena sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan di Rumah Sakit (BLUD) menjadi objek Retribusi Jasa Umum.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	7.711.526.699,00	15.092.285.398,37	195,71	254.618.924.193,83
5.1.1.1.4 .1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.012.036.421,00	1.368.877.380,00	135,26	759.066.011,00
5.1.1.1.4 .1.1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	907.036.421,00	1.175.022.380,00	129,55	672.806.511,00
5.1.1.1.4.1.1.1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	-	-	-	417.420.635,00
5.1.1.1.4.1.1.2	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	255.385.876,00
5.1.1.1.4.1.1.3	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	667.036.421,00	-	-	-
5.1.1.1.4.1.1.4	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	898.722.380,00	-	-

5.1.1.1.4.1.1.5	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	240.000.000,00	276.300.000,00	115,13	-
5.1.1.1.4 .1.2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	105.000.000,00	175.855.000,00	167,48	52.250.000,00
5.1.1.1.4.1.2.1	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	-	-	-	52.250.000,00
5.1.1.1.4.1.2.2	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	105.000.000,00	175.855.000,00	167,48	-
5.1.1.1.4 .1.3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	18.000.000,00	-	25.500.000,00
5.1.1.1.4.1.3.1	Hasil Penjualan Hewan	-	-	-	25.500.000,00
5.1.1.1.4.1.3.2	Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Potong	-	18.000.000,00	-	-
5.1.1.1.4 .1.4	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	-	-	-	8.509.500,00
5.1.1.1.4.1.4.1	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	8.509.500,00
5.1.1.1.4 .2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	387.490.278,00	922.361.457,00	238,03	631.600.383,00
5.1.1.1.4.2.1	Hasil Sewa BMD	41.000.000,00	779.189.007,00	1.900,46	414.675.183,00
5.1.1.1.4.2.2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	346.490.278,00	143.172.450,00	41,32	216.925.200,00
5.1.1.1.4 .3	Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	72.126.800,00
5.1.1.1.4.3.1	Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	72.126.800,00
5.1.1.1.4 .4	Jasa Giro	275.000.000,00	1.492.559.066,00	542,75	1.505.146.050,00
5.1.1.1.4.4.1	Jasa Giro pada Kas Daerah	275.000.000,00	1.412.935.437,00	513,79	1.499.700.192,00
5.1.1.1.4.4.2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	79.623.629,00	-	5.445.858,00
5.1.1.1.4 .5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.000.000,00	17.894.760,00	596,49	3.000.000,00
5.1.1.1.4.5.1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.000.000,00	17.894.760,00	596,49	38.299.000,00
5.1.1.1.4 .6	Pendapatan Bunga	6.000.000.000,00	6.318.170.841,49	105,30	6.000.000.000,00
5.1.1.1.4.6.1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	6.318.170.841,49	105,30	6.209.253.125,36
5.1.1.1.4 .7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	16.500.000,00	6.000.000,00	36,36	30.257.637,75
5.1.1.1.4.7.1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	16.500.000,00	6.000.000,00	36,36	30.257.637,75
5.1.1.1.4 .8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	7.874.008,00	-	26.228.651,17
5.1.1.1.4.8.1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	7.874.008,00	-	26.228.651,17
5.1.1.1.4 .9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	4.302.198.378,88	-	5.301.325.359,00
5.1.1.1.4.9.1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	68.622.234,68	-	4.862.938,00
5.1.1.1.4.9.1.1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	68.622.234,68	-	4.739.378,00
5.1.1.1.4.9.1.2	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	-	-	-	123.560,00
5.1.1.1.4.9.2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	41.426.282,00	-	14.790.113,00
5.1.1.1.4.9.2.1	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	34.180.850,00	-	5.459.495,00
5.1.1.1.4.9.2.2	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	7.157.449,00	-	8.947.330,00
5.1.1.1.4.9.2.3	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	-	87.983,00	-	383.288,00

5.1.1.1.4.9.3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	635.274,00	-	4.920,00
5.1.1.1.4.9.3.1	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-	90.536,00	-	-
5.1.1.1.4.9.3.2	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-	544.738,00	-	4.920,00
5.1.1.1.4.9.4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	9.506.690,00	-	14.702.447,00
5.1.1.1.4.9.4.1	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	-	7.099.658,00	-	14.470.807,00
5.1.1.1.4.9.4.2	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	-	-	-	8.640,00
5.1.1.1.4.9.4.3	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	-	2.407.032,00	-	223.000,00
5.1.1.1.4.9.5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	651.302,00	-	537.813,00
5.1.1.1.4.9.5.1	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	651.302,00	-	537.813,00
5.1.1.1.4.9.6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	503.680,20	-	1.374.886,00
5.1.1.1.4.9.6.1	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	503.680,20	-	1.374.886,00
5.1.1.1.4.9.1	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	4.180.852.916,00	-	5.265.052.242,00
5.1.1.1.4.9.1.1	Pendapatan Denda PBBP2	-	4.180.852.916,00	-	5.265.052.242,00
5.1.1.1.4 10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	17.500.000,00	36.613.547,00	209,22	47.302.784,00
5.1.1.1.4 10.1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	17.500.000,00	32.611.547,00	186,35	40.166.078,00
5.1.1.1.4.10.1.1	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	-	-	4.842.188,00
5.1.1.1.4.10.1.2	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	8.863.740,00
5.1.1.1.4.10.1.3	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair	-	-	-	97.080,00
5.1.1.1.4.10.1.4	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	-	8.117.079,00	-	-
5.1.1.1.4.10.1.5	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Los	5.500.000,00	13.628.903,00	247,80	3.250.155,00
5.1.1.1.4.10.1.6	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	4.500.000,00	10.804.245,00	240,09	5.721.315,00
5.1.1.1.4.10.1.7	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	-	-	-
5.1.1.1.4.10.1.8	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga	-	61.320,00	-	-
5.1.1.1.4.10.1.9	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	17.391.600,00
5.1.1.1.4 10.2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	4.002.000,00	-	7.136.706,00
5.1.1.1.4.10.2.1	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	7.136.706,00
5.1.1.1.4.10.2.2	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	-	4.002.000,00	-	-
5.1.1.1.4 11	Pendapatan dari Pengembalian	-	619.735.960,00	-	505.698.155,55
5.1.1.1.4.11.1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	33.803.400,00	-	-
5.1.1.1.4.11.1.1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	-	33.803.400,00	-	-
5.1.1.1.4.11.2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-	21.078.112,00	-	46.816.235,00

5.1.1.1.4.11.2.1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	-	7.088.800,00	-	16.138.165,00
5.1.1.1.4.11.2.2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	-	13.989.312,00	-	30.678.070,00
5.1.1.1.4.11.3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	-	1.689.775,00	-	2.224.870,00
5.1.1.1.4.11.3.1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	350.000,00
5.1.1.1.4.11.3.2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	952.325,00	-	-
5.1.1.1.4.11.3.3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	-	737.450,00	-	900.000,00
5.1.1.1.4.11.3.4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-	974.870,00
5.1.1.1.4.11.4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	-	28.704.000,00	-	83.927.600,00
5.1.1.1.4.11.4.1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	200.000,00	-	78.477.600,00
5.1.1.1.4.11.4.2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	-	850.000,00	-	-
5.1.1.1.4.11.4.3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara	-	27.654.000,00	-	-
5.1.1.1.4.11.4.4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	5.450.000,00
5.1.1.1.4.11.5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	-	12.562.101,00	-	51.992.872,87
5.1.1.1.4.11.5.1	Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	12.562.101,00	-	-
5.1.1.1.4.11.5.2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	-	-	-	6.839.672,87
5.1.1.1.4.11.5.3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	-	-	-	32.589.200,00
5.1.1.1.4.11.5.4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	-	-	-	12.564.000,00
5.1.1.1.4.11.6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga		1.750.000,00		
5.1.1.1.4.11.6.1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		1.750.000,00		
5.1.1.1.4.11.7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	-	227.457.572,00	-	168.992.672,40
5.1.1.1.4.11.7.1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	227.457.572,00	-	127.525.890,04
5.1.1.1.4.11.7.2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	-	-	-	31.656.786,36
5.1.1.1.4.11.7.3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	-	-	9.809.996,00

5.1.1.1.4.11.8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	-	292.691.000,00	-	151.743.905,28
5.1.1.1.4.11.8.1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	-	292.691.000,00	-	151.743.905,28
5.1.1.1.4 12	Pendapatan BLUD	-	-	-	239.492.620.237,00
5.1.1.1.4.12.1	Pendapatan BLUD	-	-	-	239.492.620.237,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.4.9	Pendapatan BLUD - LRA	-	-		239.492.620.237,00

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dan dari 27 Puskesmas yang telah menjadi Badan Mekanisme penerimaan tidak melalui Rekening Kas Daerah namun hanya dicatat dan dilaporkan dalam APBD sebagai Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan pendapatan Blud UPT Puskesmas.
Anggaran dan realisasi Pendapatan BLUD tidak ada karena sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan di Rumah Sakit (BLUD) menjadi objek Retribusi Jasa Umum.

No.	Puskesmas	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Srandakan				2.238.535.856,00
2	Sanden				2.454.477.162,00
3	Kretek				2.346.846.517,00
4	Pundong				2.648.917.276,00
5	Bambanglipuro				2.926.428.868,00
6	Pandak I				2.100.618.844,00
7	Pandak II				1.646.542.879,00
8	Bantul I				2.219.662.679,00
9	Bantul II				1.743.037.290,00
10	Jetis I				2.287.065.963,00
11	Jetis II				1.694.055.569,00
12	Imogiri I				2.402.735.029,00
13	Imogiri II				2.483.912.172,00
14	Dlingo I				1.522.542.154,00
15	Dlingo II				1.478.819.553,00
16	P;eret				3.180.466.089,00
17	Piyungan				3.117.308.742,00

18	Banguntapan I				2.574.796.210,00
19	Banguntapan II				1.998.434.696,00
20	Banguntapan III				1.113.273.474,00
21	Sewon I				3.136.124.975,00
22	Sewon II				2.462.425.521,00
23	Kasihan I				3.054.936.673,00
24	Kasihan II				2.203.465.029,00
25	Pajangan				2.585.313.526,00
26	Sedayu I				1.778.223.581,00
27	Sedayu II				1.720.764.813,00
	JUMLAH	-	-		61.119.731.140,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.4.9.6.1	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) RSU	0,00			178.372.889.097,00

	RincianPendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) RSU	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.4.9.6.1.1	Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati				177.245.819.100,00
5.1.1.1.4.9.6.1.2	Rumah Sakit Sarads Adhyatma				1.127.069.997,00
		0,00	0,00		178.372.889.097,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	1.947.551.919.774,00	1.968.055.104.226,00	101,05	1.821.467.142.818,65

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Propinsi untuk periode Tahun Anggaran 2024, dengan rincian pos dan jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.658.829.614.302,00	1.678.657.691.985,00	101,20	1.541.171.838.737,00
5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	288.722.305.472,00	289.397.412.241,00	100,23	280.295.304.081,65
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.947.551.919.774,00	1.968.055.104.226,00	101,05	1.821.467.142.818,65

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang penerimaannya berdasar Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

Realisasi untuk pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.968.055.104.226,00 atau mencapai 101,05% dari anggaran sebesar Rp1.947.551.919.774,00. Realiasi tahun 2024 tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,05% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp146.587.961.407,35

Rincian Pendapatan Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1	Pendapaatan Transfer Pemerintah Pusat	1.658.829.614.302,00	1.678.657.691.985,00	101,20	1.541.171.838.737,00

	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
5.1.1.2.1.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.480.202.221.302,00	1.500.030.298.985,00	101,34	1.355.883.247.737,00
5.1.1.2.1.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	178.627.393.000,00	178.627.393.000,00	100,00	185.288.591.000,00
		1.658.829.614.302,00	1.678.657.691.985,00	101,20	1.541.171.838.737,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah pusat berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 18 November 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Masing-masing dasar penerimaan untuk penetapan definitif maupun penetapan kelebihan/kekurangan realisasi pembayarannya sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan. Asumsi yang diberlakukan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu :

1. Penetapan pagu anggaran Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, yang ditetapkan sesuai peruntukannya sebelum penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
2. Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan realisasi transfer yang masuk ke rekening kas umum daerah tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2024.
3. Atas kelebihan/kekurangan transfer akan dicatat sebagai hutang/piutang apabila Pemerintah Pusat telah menerbitkan peraturan definitif atau dokumen lainnya sebagai informasi yang mendukung penetapan hutang/piutang.

Pendapatan transfer pemerintah pusat Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.480.202.221.302,00	1.500.030.298.985,00	101,34	1.355.883.247.737,00

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Rincian Dana Transfer Umum-Dana Perimbangan terdiri dari :

5.1.1.2.1.1	Dana Perimbangan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	27.231.541.000,00	35.169.801.000,00	129,15	34.766.685.062,00

5.1.1.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.000.093.363.000,00	1.022.019.834.045,00	102,19	954.626.878.777,00
5.1.1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	125.075.667.000,00	116.981.478.484,00	93,53	56.576.626.350,00
5.1.1.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	327.801.650.302,00	325.859.185.456,00	99,41	309.913.057.548,00
		1.480.202.221.302,00	1.500.030.298.985,00	101,34	1.355.883.247.737,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	27.231.541.000,00	35.169.801.000,00	129,15	34.766.685.062,00

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokaskan berdasarkan presentasi atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan daerah , serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah

Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari :

5.1.1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.1.1.1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	957.798.000,00		1.924.979.783,00
5.1.1.2.1.1.1.2	DBH PPh Pasal 21	19.971.309.000,00	26.912.529.000,00	134,76	24.225.546.734,00
5.1.1.2.1.1.1.3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.114.235.000,00	2.546.796.000,00	120,46	2.179.495.000,00
5.1.1.2.1.1.1.4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.166.054.000,00	3.582.268.000,00	113,15	4.863.841.615,00
5.1.1.2.1.1.1.5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	809.628.000,00	223.000,00	0,03	4.390.193,00
5.1.1.2.1.1.1.6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	128.000,00	0,00	-	7.000,00
5.1.1.2.1.1.1.7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	-	23.299.000,00		39.280.526,00
5.1.1.2.1.1.1.8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	23.299.000,00	0,00	-	-
5.1.1.2.1.1.1.9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.146.888.000,00	1.146.888.000,00	100,00	1.529.144.211,00
	Jumlah	27.231.541.000,00	35.169.801.000,00	129,15	34.766.685.062,00

Realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp35.169.801.000,00 belum termasuk didalamnya nilai penyaluran Dana Bagi Hasil melalui *Tresurry Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp365.094.000,00

Sebagaimana surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-5/PK/2023 tanggal 13 Januari 2023 hal Penyampaian Kebijakan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun 2022. Bagi daerah yang memeliki saldo kas tinggi, DBH disalurkan secara nontunai melalui TDF. TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara UmumNegara (BUN) bagi daerah untuk menampung uang di BUN sebagai bentuk penyaluran nontunai, berupa penyimpanan dalam *overnight* pada rekening TDF Pemerintah Daerah di Bank Indonesia. Kebijakan penyaluran DBH melalui rewkening TDF - TKD dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien untuk menjaga kas simpanan Pemda dalam jumlah yang wajar.

Pemerintah Kabupaten Bantul termasuk kategori daerah yang memiliki saldo kas tinggi sehingga menerima penyaluran DBH melalui rekening lain TDF-TKD di Kantor Pusat Bank Indonesia dengan Nomor Rekening 519000370980 nama Rekening REK LAIN BI TDF TKD KAB BANTUL dengan saldo pokok per 31 Desember 2024 sebesar Rp365.094.000,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.000.093.363.000,00	1.022.019.834.045,00	102,19	954.626.878.777,00

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 mangalami peningkatan sebesar RpRp403.115.938,00 atau 1,16% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat

Berdasarkan PMK nomor 211/PMK.07/2022 dan PMK nomor 212/PMK.7/2022 DAU tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaanya dan DAU yang ditentukan penggunaanya. Untuk alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, diserahkan sesuai kewenangan prioritas masing-masing daerah. Sementara untuk alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan bidang layanan umum.

Penggunaan alokasi DAU yang ditentukan penggunaanya digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan bidang layanan umum. DAU bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan daerah, belanja pegawai selain gaji dan tunjangan yang melekat yang dibayarkan kepada ASN bidang kesehatan, dan belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN, serta tidak digunakan untuk belanja honorarium dan belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Sementara untuk penggunaan DAU bidang layanan umum dialokasikan untuk dukungan pendanaan kalurahan dan dukungan penggajian PPPK. Dukungan pendaan kalurahan digunakan untuk memberi dukungan pendanaan kepada daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi penganggaran bagi kalurahan sesuai petunjuk teknis dari kementerian dalam negeri, sedangkan dukungan penggajian formasi PPPK digunkan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPPK.

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	452.877.317.302,00	442.840.663.940,00	97,78	366.489.683.898,00

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Rincian anggaran dan realisasi dana transfer khusus - DAK Fisik sebagai berikut :

	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	125.075.667.000,00	116.981.478.484,00	93,53	56.576.626.350,00
5.1.1.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	327.801.650.302,00	325.859.185.456,00	99,41	309.913.057.548,00
		452.877.317.302,00	442.840.663.940,00	97,78	366.489.683.898,00

Rincian anggaran dan realisasi dana transfer khusus (DAK) sebagai berikut :

5.1.1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.1.3.1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3.603.589.000,00	3.566.082.700,00	98,96	0,00
5.1.1.2.1.1.3.2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.322.140.000,00	1.988.182.000,00	85,62	1.267.225.850,00
5.1.1.2.1.1.3.3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.480.795.000,00	3.794.800.400,00	84,69	1.856.048.500,00
5.1.1.2.1.1.3.4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.700.000.000,00	10.683.017.196,00	99,84	0,00
5.1.1.2.1.1.3.5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	770.500.000,00	721.742.837,00	93,67	0,00
5.1.1.2.1.1.3.6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	-	-		391.690.000,00
5.1.1.2.1.1.3.7	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.490.000.000,00	2.489.016.300,00	99,96	10.513.006.000,00
5.1.1.2.1.1.3.8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.000.834.000,00	3.572.480.120,00	89,29	3.065.880.000,00
5.1.1.2.1.1.3.9	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	7.374.871.000,00	5.162.409.700,00	70,00	0,00
5.1.1.2.1.1.3.10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00		23.254.487.000,00
5.1.1.2.1.1.3.11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	25.017.196.000,00	23.287.454.000,00	93,09	0,00
5.1.1.2.1.1.3.12	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	215.250.000,00	213.224.000,00	99,06	0,00
5.1.1.2.1.1.3.13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	535.500.000,00	535.500.000,00	100,00	0,00
5.1.1.2.1.1.3.14	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.688.899.000,00	2.999.187.500,00	81,30	0,00
5.1.1.2.1.1.3.15	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	977.522.000,00	947.739.200,00	96,95	0,00
5.1.1.2.1.1.3.16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.799.955.000,00	1.788.500.000,00	99,36	0,00
5.1.1.2.1.1.3.17	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	3.892.292.000,00	3.264.647.000,00	83,87	0,00
5.1.1.2.1.1.3.18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00		693.289.000,00
5.1.1.2.1.1.3.19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	53.206.324.000,00	51.967.495.531,00	97,67	15.535.000.000,00
		125.075.667.000,00	116.981.478.484,00	93,53	56.576.626.350,00

5.1.1.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.1.4.1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	101.243.339.863,00	101.148.011.449,00	99,91	102.590.252.271,00
5.1.1.2.1.1.4.2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.480.000.000,00	4.480.000.000,00	100,00	5.027.500.000,00
5.1.1.2.1.1.4.3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	141.700.207.000,00	141.422.297.000,00	99,80	140.587.086.560,00
5.1.1.2.1.1.4.4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.566.397.000,00	2.566.397.000,00	100,00	2.826.210.000,00
5.1.1.2.1.1.4.5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	24.084.798.882,00	24.039.021.367,00	99,81	24.537.329.664,00

5.1.1.2.1.1.4.6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.759.281.624,00	4.711.641.624,00	99,00	4.322.385.974,00
5.1.1.2.1.1.4.7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.267.539.933,00	5.763.693.785,00	46,98	20.390.425.337,00
5.1.1.2.1.1.4.8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.431.682.000,00	7.008.719.850,00	94,31	6.198.102.072,00
5.1.1.2.1.1.4.9	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00		407.482.240,00
5.1.1.2.1.1.4.10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.762.435.000,00	1.762.435.000,00	100,00	200.000.000,00
5.1.1.2.1.1.4.11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	791.376.000,00	767.408.958,00	96,97	331.892.430,00
5.1.1.2.1.1.4.12	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	430.655.200,00	82,82	525.178.500,00
5.1.1.2.1.1.4.13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2.323.825.000,00	2.192.271.500,00	94,34	1.969.212.500,00
5.1.1.2.1.1.4.14	DAK Non Fisik-PK2UMK	674.185.000,00	670.254.290,00	99,42	0,00
5.1.1.2.1.1.4.15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	503.581.000,00	6.567.744.500,00	1.304,21	0,00
5.1.1.2.1.1.4.16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	22.693.002.000,00	22.328.633.933,00	98,39	0,00
		327.801.650.302,00	325.859.185.456,00	99,41	309.913.057.548,00

	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-		-
5.1.1.2.1.2.1	Dana Insentif Daerah	-	-		58.809.566.000,00
5.1.1.2.1.2.2	Dana Desa	127.393.902.000,00	127.393.902.000,00	100,00	126.479.025.000,00
5.1.1.2.1.2.3	Insentif Fiskal	51.233.491.000,00	51.233.491.000,00	100,00	
		178.627.393.000,00	178.627.393.000,00	100,00	185.288.591.000,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.2.1	Dana Insentif Daerah	-	-		58.809.566.000,00

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.2.2	Dana Desa	127.393.902.000,00	127.393.902.000,00	100,00	126.479.025.000,00

Pendapatan Trnsfer pemerintah pusat- Dana Desa merupakan pendapatan yang tidk melalui mekanisme APBD. Pendapatan tersebut dari Pemerintah pusat langsung di tranfer ke rekenening Pemerintah Kalurahan. Pedoman terkait pengelolaan Dana Desa berdasarkan PP Nomor 7 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.2.3	Insentif Fiskal	51.233.491.000,00	51.233.491.000,00	100,00	-

Insentif fiskal adalah dana yang diberikan pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan kinerja tertentu. Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Insentif fiskal diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas kinerja keuangan pemerintah daerah. Insentif fiskal dapat dibagi atas kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan berdasarkan PMK Nomor 125/PMK.07/2023 tentang pengelolaan Insentif Fiskal Tahun 2024 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya.

5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	197.877.204.575,00	200.933.285.798,00	101,54	201.588.461.475,00
5.1.1.2.2.2	Bantuan Keuangan	90.845.100.897,00	88.464.126.443,00	97,38	78.706.842.606,65
		288.722.305.472,00	289.397.412.241,00	100,23	280.295.304.081,65

Penjelasan pendapatan transfer antar daerah sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	197.877.204.575,00	200.933.285.798,00	101,54	201.588.461.475,00

Realisasi dari penerimaan Transfer antar daerah yang berasal dari pos Bagi Hasil Pajak tahun 2024 sebesar Rp200.933.285.798,00 atau mencapai 100,54% dari anggaran sebesar Rp197.877.204.575,00 karena adanya realisasi penerimaan dari kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi pada tahun 2023 sebesar Rp366.750.338,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 43/KEP/2024 tanggal 26 Januari 2024 Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota tahun Anggaran 2024.
Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut :

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	68.589.450.338,00	67.417.269.270,00	98,29	67.118.442.790,00
5.1.1.2.2.1.2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28.305.198.000,00	28.421.224.428,00	100,41	29.378.789.476,00
5.1.1.2.2.1.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.389.662.000,00	55.746.320.000,00	112,87	57.946.328.116,00
5.1.1.2.2.1.4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	86.139.825,00	101.126.933,00	117,40	103.951.513,00
5.1.1.2.2.1.5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	51.506.754.412,00	49.247.345.167,00	95,61	47.407.699.918,00
	Jumlah	197.877.204.575,00	200.933.285.798,00	101,54	201.955.211.813,00

	Rincian realisasi pendapatan bagi hasil pajak	Realisasi murni 2024	kurang bayar tahun 2023	Jumlah 2024
5.1.1.2.3.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor	67.136.130.000,00	281.139.270,00	67.417.269.270,00

5.1.1.2.3.1.2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28.350.600.468,00	70.623.960,00	28.421.224.428,00	
5.1.1.2.3.1.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	55.746.320.000,00	-	55.746.320.000,00	
5.1.1.2.3.1.4	Pajak Air Permukaan	86.139.825,00	14.987.108,00	101.126.933,00	
5.1.1.2.3.1.5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	49.247.345.167,00		49.247.345.167,00	
		200.566.535.460,00	366.750.338,00	200.933.285.798,00	

5.1.1.2.2.2	Bantuan Keuangan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi				
5.1.1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	90.241.132.897,00	87.860.158.443,00	97,36	78.317.260.606,65
5.1.1.2.2.2.3	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	603.968.000,00	603.968.000,00	100,00	389.582.000,00
	Jumlah	90.845.100.897,00	88.464.126.443,00	97,38	**78.706.842.606,65**

5.1.1.2.2.2.2 Realisasi Bantuan Keuangan khusus dari Provinsi DIY Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.2.2.2.1	Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan Danais	54.241.132.897,00	53.227.652.380,00	98,13	45.467.260.606,65
5.1.1.2.2.2.2.2	BKK Jambanisasi	-	0,00		250.000.000,00
5.1.1.2.2.2.2.3	BKK Padat Karya Infrastruktur	33.500.000.000,00	32.238.106.063,00	96,23	32.600.000.000,00
5.1.1.2.2.2.2.4	BKK Penyelenggaraan Pemilukada	2.500.000.000,00	2.394.400.000,00	95,78	
	Jumlah	90.241.132.897,00	87.860.158.443,00	97,36	78.317.260.606,65

Realisasi Bantuan Keuangan khusus dari Provinsi DIY yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 untuk padat karya Insfrakstrutur sebesar Rp32.600.000.000,00 tersaji di LKPD sebesar Rp32.238.106.063,00 sehingga ada selisih sebesar Rp361.893.937,00 dengan rician :

Setor kembali ke Rekening Kas Daerah Propinsi DIY pada tanggal 31 Desember 2024	205.406.366,00
Koreksi pendapatan Tahun Anggaran 2023	156.487.571,00
	361.893.937,00

Koreksi pendapatan Tahun Anggaran 2023 atas bantuan keuangan khusus dari propinsi karena setor kembali baru dilakukan di tanggal 29 Januari 2024 melalu pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Bantul ke Rekening Kas Daerah Propindi DIY dengan surat perintah Nomor B/500.15.10.2/00150/Perben/2024

5.1.1.2.2.2.3	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.2.2.3.1	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk biaya Dana Kompensasi Dampak Negatif TPA/TPS Piyungan Tahun 2023 (Sumber Dana Kasda Kota Yogyakarta)	344.897.000,00	344.897.000,00	100,00	221.477.000,00

5.1.1.2.2.2.3.2	Bantuan Keuangan kepadapemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembayaran KompensasiDampak Negatif (KDN) TPA/TPST Piyungan Tahun 2023	259.071.000,00	259.071.000,00	100,00	168.105.000,00
	Jumlah	603.968.000,00	603.968.000,00	100,00	389.582.000,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.000.000.000,00	2.790.385.919,00	46,51	7.182.235.863,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yan Sah tahun 2024 sebesar Rp2.790.385.919,00 atau mencapai 46,51% dari pagu anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 . Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 61,15% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 atau sebesar Rp4.391.849.944,00 karena untyk pendapatan hibah dari Pemerintah pusat yang diperuntukan hibah untuk air minum perkotaan (PDM) tidakcair

Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	2.790.385.919,00	46,51	7.164.398.619,00
5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-		17.837.244,00
5.1.1.3.3	Pendapatan yang tidak bisa dikelompokan				
	Jumlah	6.000.000.000,00	2.790.385.919,00	46,51	7.182.235.863,00

Rincian Pendapatan Hibah tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.3.1.1	Hibah Air Minum Perkotaan	6.000.000.000	-	-	6.000.000.000,00
5.1.1.3.1.2	Hibah air limbah	-	750.000.000	-	480.000.000,00
5.1.1.3.1.3	Hibah sanitasi	-	1.840.000.000	-	-
5.1.1.3.1.4	Hbah air minum pedeaan	-	-	-	600.000.000,00
5.1.1.3.1.5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	200.385.919	-	84.398.619,00
	Jumlah	6.000.000.000,00	2.790.385.919,00	46,51	7.164.398.619,00

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2024 sebesar Rp2.790.385.919,00 atau mencapai 46,51% dari anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00. Realisasi tahun 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar 61,05% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp4.374.012.700,00

5.1.1.3.1.1 Pendapatan Hibah Air Minum Perkotaantahun 2024 sudah tidak ada pencairan dari Pemerintah Pusat

5.1.1.3.1.2 Pendapatan Hibah AirLimbah berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk hibah air minum limbah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN TA 2024. Nomor PHD-35/MK.7/DTK.03/ALS/2024 tanggal 26 Maret 2024

5.1.1.3.1.3 Pendapatan Hibah Sanitasi berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk hibah Sanitasi (Air limbah setempat) yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN TA 2024. Nomor PHD-01/MK.7/DTK.03/ALT/2024 tanggal 06 Maret 2024

5.1.1.3.1.4 Pendapatan Hibah air minum pedesaa Tahun Anggaran 2024 tidak ada realisasinya

5.1.1.3.1.5 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis

Akun ini digunakan untuk menampung penerimaan yang tidak bisa diklasifikasikan di kode rekening pendapatan yang ada di aplikasi SIPD, diantaranya pendapatan dari:

Setoran sis bosda dari sekolah tahun anggaran 2023	40.802.964,00
Setoran rertibusi yang sudah tidak boleh dipungut di tahun 2024	14.251.600,00
Setor kembali atas bantuan keuangan khusus ke desa tahun 2023	86.580.600,00
Kesalahan setor kembali ke kasda atas belanja tahun 2024	16.398.488,00
Pelimpahan jaminan bonkar reklame	18.207.154,00
Manding Multiguna	5.575.000,00
Setoran sanggah banding dan pembayaran ganti rugi bangunan	18.570.113,00
	200.385.919,00

5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.3.2.1	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-		-
5.1.1.3.2.2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	-		-	17.837.244,00
		-	0,00	-	17.837.244,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2	Belanja	2.747.682.556.153,00	2.616.013.652.966,71	95,21	2.411.425.977.527,72

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga (BTT) dan Transfer. Anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2024 dan Realisasi TA 2023 adalah sebagai berikut:

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1	Belanja Operasi	2.050.130.609.141,00	1.972.500.878.943,82	96,21	1.840.327.289.726,91
5.1.2.2.	Belanja Modal	310.690.754.297,00	279.968.387.225,89	90,11	227.673.894.188,81
5.1.2.3	Belanja Tak Terduga (BTT)	30.083.577.116,00	7.518.166.014,00	24,99	1.122.989.975,00
5.1.2.4	Belanja Transfer	356.777.615.599,00	356.026.220.783,00	99,79	342.301.803.637,00
	Jumlah Belanja Daerah	2.747.682.556.153,00	2.616.013.652.966,71	95,21	2.411.425.977.527,72

Realisasi Belanja Daerah TA 2024 sebesar Rp2.616.013.652.966,71 atau 95,21% dari anggaran sebesar Rp2.747.682.556.153,00 termasuk belanja Dana Desa, BLUD, BOSP dan BOK Puskesmas tahun 2024

Secara garis besar dapat digambarkan bahwa Program dan Kegiatan TA 2024 telah dilaksanakan sesuai capaian kinerjanya namun dari sisi belanja terealisir sebesar 95,26% terutama disebabkan belanja dari anggaran dana perimbangan dari pemerintah pusat DAK dan pendapatan hibah TA 2024 sebagian turun di bulan Desember 2024 dan adanya upaya-upaya untuk efisiensi dan penghematan serta peningkatan kedisiplinan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Rincian belanja daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1	Belanja Operasi	2.050.130.609.141,00	1.972.500.878.943,82	96,21	1.840.327.289.726,91

Belanja Operasi Kabupaten Bantul meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp1.972.500.878.943,82 atau mencapai 95,21% dari anggaran sebesar Rp2.050.130.609.141,00. Realisasi tahun 2024 tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,18% dari realisasi tahun 2023 atau sebesar Rp32.173.589.216,91

	Rincian Belanja Operasi tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	988.565.627.277,00	952.731.205.875,00	96,38	860.578.542.728,00
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	925.676.781.292,00	886.056.158.351,82	95,72	858.885.766.998,91
5.1.2.1.3	Belanja Bunga	-	-		-
5.1.2.1.4	Belanja Subsisi				
5.1.2.1.5	Belanja Hibah	130.343.600.572,00	128.922.914.717,00	98,91	115.915.380.000,00
5.1.2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.544.600.000,00	4.790.600.000,00	86,40	4.947.600.000,00
5.1.2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan				
		2.050.130.609.141,00	1.972.500.878.943,82	96,21	1.840.327.289.726,91

Rincian per jenis belanja Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	988.565.627.277,00	952.731.205.875,00	96,38	860.578.542.728,00

Realisasi untuk Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp952.731.205.875,00 atau mencapai 96,38% dari anggaran sebesar Rp988.565.627.277,00. Realisasi belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp952.731.205.875,00 tersebut mengalami peningkatan sebesar10,71% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp92.152.663.147,00

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

	Uraian Belanja Pegwai	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	591.056.288.195,00	571.299.108.434,00	96,66	520.281.693.331,00

5.1.2.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	131.569.566.715,00	121.535.115.731,00	92,37	113.953.212.449,00
5.1.2.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	194.926.394.035,00	191.674.185.866,00	98,33	158.697.139.482,00
5.1.2.1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.133.667.342,00	22.962.056.909,00	95,15	22.927.229.561,00
5.1.2.1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	185.837.260,00	169.179.602,00	91,04	169.004.900,00
5.1.2.1.1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.093.120.000,00	1.053.808.000,00	96,40	1.093.120.000,00
5.1.2.1.1.7	Belanja Pegawai BOS	29.833.595.755,00	29.833.595.755,00	100,00	28.372.820.500,00
5.1.2.1.1.8	Belanja Pegawai BLUD	15.767.157.975,00	14.204.155.578,00	90,09	15.084.322.505,00
		988.565.627.277,00	952.731.205.875,00	96,38	860.578.542.728,00

Penjelasan lebih lanjut dari Belanja Pegawai tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.1	Gaji dan tunjangan ASN	591.056.288.195,00	571.299.108.434,00	96,66	520.281.693.331,00

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2024 sebesar Rp571.299.108.434,00 atau mencapai 96,66% dari anggaran sebesar Rp591.056.288.195. Realisasi belanja pegawai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,81% dari realisasi tahun 2024 atau sebesar Rp51.017.415.103,00.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2023diperuntukan PNSD sebanyak 6.173 orang dan PPPK sebanyak 2.054 orang.
Dasar penggajian adalah :
PNSD berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2019 tentang penyesuaian gaji pokok PNS menurut PP nomor 30 tahun 2015 ke dalam gaji pokok PNS menurut PP Nomor 15 tahun 2019
PPPK berdasarkan PP Nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah daerah dengan perjanjian kerja
Adapun rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi dari Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2024 dan realisasi TA 2023 sebagai berikut:

5.1.2.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	441.615.922.050,00	435.530.881.696,00	98,62	394.476.147.553,00
	- Belanja Gaji Pokok PNS	360.161.296.907,00	354.840.178.864,00	98,52	350.290.606.433,00
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	81.454.625.143,00	80.690.702.832,00	99,06	44.185.541.120,00
5.1.2.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	39.815.925.197,00	38.056.957.081,00	95,58	34.105.329.587,00
	- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	32.750.969.332,00	31.566.690.156,00	96,38	30.633.971.437,00
	- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.064.955.865,00	6.490.266.925,00	91,87	3.471.358.150,00
5.1.2.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.597.169.697,00	5.589.334.800,00	84,72	5.741.690.000,00
	- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.597.169.697,00	5.589.334.800,00	84,72	5.741.690.000,00
5.1.2.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	29.039.696.099,00	28.189.927.810,00	97,07	26.605.800.000,00
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28.954.446.099,00	28.189.417.810,00	97,36	26.605.800.000,00
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	85.250.000,00	510.000,00	0,60	-

5.1.2.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.202.917.934,00	3.099.975.000,00	73,76	4.729.280.000,00
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.202.917.934,00	3.099.975.000,00	73,76	4.729.280.000,00
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	-			
5.1.2.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	22.837.686.977,00	21.578.697.720,00	94,49	20.692.172.280,00
	- Belanja Tunjangan Beras PNS	17.904.894.605,00	17.089.164.660,00	95,44	18.046.380.000,00
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.932.792.372,00	4.489.533.060,00	91,01	2.645.792.280,00
5.1.2.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.432.941.299,00	4.921.270.398,00	76,50	2.582.763.244,00
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.986.207.161,00	4.609.808.242,00	77,01	2.582.763.244,00
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	446.734.138,00	311.462.156,00	69,72	-
5.1.2.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.154.109,00	5.835.984,00	36,13	5.551.034,00
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.842.250,00	4.700.184,00	39,69	4.795.388,00
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.311.859,00	1.135.800,00	26,34	755.646,00
5.1.2.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.757.933.405,00	30.744.233.262,00	85,98	28.095.043.917,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	32.150.058.720,00	27.505.448.685,00	85,55	26.347.766.907,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.607.874.685,00	3.238.784.577,00	89,77	1.747.277.010,00
5.1.2.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.092.609.093,00	893.807.362,00	81,80	811.986.453,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	868.090.777,00	726.465.518,00	83,69	718.030.552,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	224.518.316,00	167.341.844,00	74,53	93.955.901,00
5.1.2.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.090.528.276,00	2.688.187.321,00	86,98	2.435.929.263,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.498.165.823,00	2.186.199.729,00	87,51	2.154.094.379,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	592.362.453,00	501.987.592,00	84,74	281.834.884,00
5.1.2.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	556.804.059,00	-	-	-
	- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	556.804.059,00	-	-	-
		591.056.288.195,00	571.299.108.434,00	96,66	520.281.693.331,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.2	Tambahan Penghasilan ASN	131.569.566.715,00	121.535.115.731,00	92,37	113.953.212.449,00

Realisasi Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp121.535.115.731,00 atau mencapai 92,37% dari pagu anggaran sebesar Rp131.569.566.715,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,65% dari realisasi tahun 2023yaitu sebesar Rp7.581.903.282,00

Adapun rincian anggaran dan realisasi Tambahan Penghasilan Penghasilan ASN untuk tahun 2024 dan Realisasi 2023 sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	131.569.566.715,00	121.535.115.731,00	92,37	113.953.212.449,00
5.1.2.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	42.113.600.000,00	37.550.519.756,00	89,16	18.421.247.179,00

5.1.2.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	40.797.800.000,00	36.823.001.906,00	90,26	18.421.247.179,00
5.1.2.1.1.2.1.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.315.800.000,00	727.517.850,00	55,29	0,00
5.1.2.1.1.2.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.331.100.000,00	1.028.605.786,00	77,27	0,00
5.1.2.1.1.2.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.331.100.000,00	1.028.605.786,00	77,27	0,00
5.1.2.1.1.2.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	88.124.866.715,00	82.955.990.189,00	94,13	95.531.965.270,00
5.1.2.1.1.2.3.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	88.124.866.715,00	82.955.990.189,00	94,13	95.172.965.270,00
5.1.2.1.1.2.3.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK				359.000.000,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	42.113.600.000,00	37.550.519.756,00	89,16	18.421.247.179,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan alah Raga dengan realisasi sebesar Rp37.550.519.756,00. Tambahan pengahasilan ini diperuntukan bagi Kepala Sekolah TK Negeri, Kepala Sekolah SD Negeri dan Koordinator Wilayah Kepanewon.

Dasar pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS adalah :

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.2.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.331.100.000,00	1.028.605.786,00	77,27	-

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Inspektorat	1.032.700.000,00	754.366.968,00	73,05	-
Bagian Perencanaan Keuangan	298.400.000,00	274.238.818,00	91,90	-
	1.331.100.000,00	1.028.605.786,00	77,27	-

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.2.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	88.124.866.715,00	82.955.990.189,00	94,13	95.531.965.270,00

Dasar pemberian Tambahan Penghasilan PNS TA 2023 adalah Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Tambahan Penghasilan kepada PNSD dan CPNSD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul tidak diberikan kepada :

1 PNS/CPNS yang bekerja pada instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2 PNS/CPNS yang melaksanakan tugaas sebagai kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa di unit kerja pengadaan barang /jasa;
3 PNS/CPNS yang melaksanakan tugaas sebagai kepala sekolah, guru dan pengawas;
4 PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada perangkat daerah di luar jajaran Pemerintah Daerah;

5	PNS Pemerintah Pusat atau Daaerah lain yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Daerah, kecualiyang bersangkutan sudah tidak mendapatkan tunjangan kinerja dan / atau remunerasi dan / atau tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dari instansi asal;
6	PNS yang mengambil Cuti diluar tanggungan negaral;
7	PNS yang melaksanakan Tugas Belajar;
8	PNS yang mengambil Bebas Tugas(BT);
9	PNS yang diberhentikan sementara.

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	194.926.394.035,00	191.674.185.866,00	98,33	158.697.139.482,00

Rincian anggaran dan realisasi dari Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif ASN TA 2024 dan realisasi TA 2023 sebagai berikut:

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	194.926.394.035,00	191.674.185.866,00	98,33	158.697.139.482,00
5.1.2.1.1.3.1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	13.350.000.000,00	13.294.275.830,00	99,58	12.454.381.910,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	131.850.000,00	131.849.886,00	100,00	399.999.271,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	334.500.000,00	334.499.691,00	100,00	1.349.997.563,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	5.750.000,00	5.749.993,00	100,00	44.499.901,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	137.500.000,00	136.861.465,00	99,54	169.999.706,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	803.350.000,00	803.349.271,00	100,00	2.834.994.726,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.750.000,00	2.749.992,00	100,00	13.999.979,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	55.000.000,00	54.761.513,00	99,57	54.999.892,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00		75.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000,00	594.985,00	99,16	6.999.993,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	3.459.150.000,00	3.447.239.661,00	99,66	3.380.473.883,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.765.900.000,00	4.744.219.692,00	99,55	4.198.341.996,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT],	3.653.650.000,00	3.632.399.681,00	99,42	0,00
5.1.2.1.1.3.2	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	157.378.040.028,00	155.073.199.900,00	98,54	137.335.933.572,00
	Belanja TPG PNSD	157.378.040.028,00	155.073.199.900,00	98,54	137.335.933.572,00
5.1.2.1.1.3.3	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.780.272.000,00	2.779.625.000,00	99,98	2.820.045.000,00
	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.780.272.000,00	2.779.625.000,00	99,98	2.820.045.000,00
5.1.2.1.1.3.4	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	14.867.112.007,00	14.291.930.136,00	96,13	0,00

	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	14.867.112.007,00	14.291.930.136,00	96,13	0,00
5.1.2.1.1.3.5	Belanja Honorarium	6.467.690.000,00	6.159.150.000,00	95,23	6.086.779.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.622.395.000,00	5.447.150.000,00	96,88	5.613.585.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	845.295.000,00	712.000.000,00	84,23	473.194.000,00
5.1.2.1.1.3.6	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	83.280.000,00	76.005.000,00	91,26	0,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	83.280.000,00	76.005.000,00	91,26	0,00

Penjelasan lebih lanjut dari jenis Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif ASN adalah sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.3.1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	13.350.000.000,00	13.294.275.830,00	99,58	12.454.381.910,00

Pos belanja Insentif Pemungutan Pajak dialokasikan untuk membayar insentif pemungutan pajak-pajak daerah. Dari anggaran sebesar Rp13.350.000.000,00 realisasi mencapai99,58% . Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,74 atau sebesar Rp839.893.920,00 dari tahun 2023.

Pagu anggaran ditetapkan sebesar 5% dari target pendapatan masing-masing pajak, sedangkan realisasinya diberikan jika dapat mencapai target kinerja pendapatan yang telah ditentukan dan sebesar 5% dari target kinerja tersebut.

Dasar pelaksanaan belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Daerah tahun 2024 sebagai berikut :

1 SK Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sampai dengan Triwulan pertama tahun 2024
2 SK Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif PBBP2 sampai dengan Triwulan pertama tahun 2024
3 SK Bupati Bantul Nomor 345 Tahun 3034 tentang Pemberian Insentif Pajak Derah samapi dengan Triwulan Kedua tahun 2024
4 SK Bupati Bantul Nomor 346 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif PBBP2 sampai dengan Triwulan kedua tahun 2024
5 SK Bupati Bantul Nomor 489 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah sampai dengan Triwulan ketiga tahun 2024
6 SK Bupati Bantul Nomor 490 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif PBBP2 sampai dengan Triwulan ketiga tahun 2024
7 SK Bupati Bantul Nomor 563 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah sampai dengan Triwulan keempat tahun 2024
8 SK Bupati Bantul Nomor 564 Tahun2024 tentang Pemberian Insentif PBBP2 sampai dengan Triwulan keempat tahun 2024

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.3.2	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	157.378.040.028,00	155.073.199.900,00	98,54	137.335.933.572,00

Realisasi belanja Tunjangan Profesi Guru TA 2024 sebesar Rp155.073.199.900,00 atau mencapai 98,54% dari anggaran sebesar Rp157.378.040.028,00 . Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 12,92% dari realisasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp17.737.266.328,00

OPD pelaksana Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.3.3	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.780.272.000,00	2.779.625.000,00	99,98	2.820.045.000,00

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD tahun 2024 sebesar Rp2.779.625.000,00 atau mencapai 99,98% dari pagu anggaran sebesar Rp2.980.272.000,00 dan mengalami penurunan sebesar 1,43% atau sebesar Rp40.420.00 dari tahun 2023.
OPD pelaksana Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.3.4	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	14.867.112.007,00	14.291.930.136,00	96,13	0,00

Pelaksana Belanja Jasan Pelayanan Kesehatan bagi ASN adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.3.5	Belanja Honorarium	6.467.690.000,00	6.159.150.000,00	95,23	6.086.779.000,00

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja honorarim Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berkut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.3.5.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.622.395.000,00	5.447.150.000,00	96,88	5.613.585.000,00
5.1.2.1.1.3.5.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	845.295.000,00	712.000.000,00	84,23	473.194.000,00
	Jumlah	6.467.690.000,00	6.159.150.000,00	95,23	6.086.779.000,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.3.6	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	83.280.000,00	76.005.000,00	91,26	-

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.133.667.342,00	22.962.056.909,00	95,15	22.927.229.561,00

Dasar pemberian belanja gaji dan Tunjangan DPRD adalah :

PP nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Permendagri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

Rincian anggaran dan realisasi dari belanja gaji dan tunjangan DPRD tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut :

	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.4.1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.002.435.000,00	980.280.000,00	97,79	992.985.000,00

5.1.2.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	75.249.300,00	53,53	81.404.400,00
5.1.2.1.1.4.3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	110.074.400,00	92.552.760,00	84,08	99.215.400,00
5.1.2.1.1.4.4	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	84.315.000,00	97,97	85.428.000,00
5.1.2.1.1.4.5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.439.828.250,00	1.421.406.000,00	98,72	1.439.828.250,00
5.1.2.1.1.4.6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	138.852.000,00	104.260.800,00	75,09	120.673.350,00
5.1.2.1.1.4.7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.194.900,00	11.099.025,00	17,56	12.408.375,00
5.1.2.1.1.4.8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.835.100.000,00	7.791.000.000,00	99,44	7.879.200.000,00
5.1.2.1.1.4.9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.602.300.000,00	1.308.300.000,00	81,65	1.969.800.000,00
5.1.2.1.1.4.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	40.000.000,00	16.464.300,00	41,16	16.681.950,00
5.1.2.1.1.4.11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	95.611.824,00	82.355.364,00	86,14	82.403.748,00
5.1.2.1.1.4.12	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00	2.027.340,00	98,16	2.050.272,00
5.1.2.1.1.4.13	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00	6.082.020,00	98,16	6.150.816,00
5.1.2.1.1.4.14	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.430.500.000,00	6.268.000.000,00	97,47	5.929.600.000,00
5.1.2.1.1.4.15	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.723.200.000,00	4.312.000.000,00	91,29	4.196.800.000,00
5.1.2.1.1.4.16	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	417.690.000,00	406.665.000,00	97,36	12.600.000,00
	Jumlah	24.133.667.342,00	22.962.056.909,00	95,15	22.927.229.561,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	185.837.260,00	169.179.602,00	91,04	169.004.900,00

Rincian anggaran dan realisasi dari Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2024 dan Realisasi 2023 sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.5.1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.600.000,00
5.1.2.1.1.5.2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	15.288.000,00	3.528.000,00	23,08	3.528.000,00
5.1.2.1.1.5.3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00
5.1.2.1.1.5.4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00	5.069.400,00	71,43	5.069.400,00
5.1.2.1.1.5.5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.319.260,00	1.889.202,00	56,92	1.714.500,00
5.1.2.1.1.5.6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.960,00	457.400,00	23.336,73	1.160,00
5.1.2.1.1.5.7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.726.720,00	4.915.680,00	73,08	5.362.560,00
5.1.2.1.1.5.8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00	102.960,00	78,57	112.320,00
5.1.2.1.1.5.9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00	336.960,00	85,71	336.960,00
		185.837.260,00	169.179.602,00	91,04	169.004.900,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.093.120.000,00	1.053.808.000,00	96,40	1.093.120.000,00

Pembayaran penghasilan/penerimaan lainnya untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul sebanyak 45 orang serta Belanja Penunjang kegiatan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah. Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Sedangkan belanja penerimaan lainnya untuk Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. termasuk di dalamnya Biaya Penunjang Operasional untuk Bupati dan Wakil Bupati.

Rincian anggaran dan realisasi dari Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah TA 2024 dan realisasi TA 2023 sebagai berikut:

Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH adalah sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.6.1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	353.808.000,00	90,00	393.120.000,00
5.1.2.1.1.6.2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	700.000.000,00
		1.093.120.000,00	1.053.808.000,00	96,40	1.093.120.000,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.7	Belanja Pegawai BOS	29.833.595.755,00	29.833.595.755,00	100,00	28.372.820.500,00

Realisasi Belanja Pegawai BOS tahun 2024 sebesar Rp29.833.595.755,00 atau mencapai 100% dari anggaran sebesar Rp29.833.595.755,00 . Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,15% atau sebesar Rp1.460.775.255,00 dari realisasi tahun 2023.

Rincian Belanja Pegawai BOS		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	BOSDA SD	10.222.689.926,00	10.222.689.926,00	100,00	-
2	BOSDA SMP	5.208.890.980,00	5.208.890.980,00	100,00	-
3	BOSDA PAUD	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	-
4	BOSP SD	8.232.765.849,00	8.232.765.849,00	100,00	-
5	BOSP SMP	5.943.779.000,00	5.946.979.000,00	100,05	-
6	BOSP PAUD	77.270.000,00	77.270.000,00	100,00	-
7	BOSP KESETARAAN	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00	-
	Jumlah	29.833.595.755,00	29.836.795.755,00	100,01	-

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.8	Belanja Pegawai BLUD	15.767.157.975,00	14.204.155.578,00	90,09	15.084.322.505,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2024 dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut:

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1.8.1	Realisasi Belanja Pegawai BLUD RS Panembahan Senopati	14.362.655.291,00	12.836.243.664,00	89,37	12.738.218.069,00
5.1.2.1.1.8.2	Realisasi Belanja Pegawai BLUD RS saras Adhyatma	30.000.000,00	29.600.000,00	98,67	-
5.1.2.1.1.8.3	Realisasi Belanja Pegawai BLUD UPT Puskesmas	1.374.502.684,00	1.338.311.914,00	97,37	2.346.104.436,00
		15.767.157.975,00	14.204.155.578,00	90,09	15.084.322.505,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	925.676.781.292,00	886.056.158.351,82	95,72	858.885.766.998,91

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2024 sebesar Rp886.056.158.351,82 atau mencapai 95,72% dari anggaran sebesar Rp925.676.781.292,00. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,16% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp27.170.391.352,91

Rincian anggaran dan Realisasi 2024 dan realisasi tahun 2023 dari belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.1	Belanja Barang	160.255.735.830,78	154.134.832.207,18	96,18	170.584.238.783,29
5.1.2.1.2.2	Belanja Jasa	307.284.112.436,22	295.116.654.737,91	96,04	285.655.866.509,80
5.1.2.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	27.917.989.242,00	26.373.669.431,34	94,47	26.454.572.748,30
5.1.2.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	44.849.109.000,00	32.913.272.097,00	73,39	37.486.232.078,50
5.1.2.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.616.081.932,00	39.906.071.692,34	98,25	47.456.831.343,00
5.1.2.1.2.6	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.998.647.600,00	18.626.599.750,00	98,04	-
5.1.2.1.2.7	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.627.475.440,00	68.594.049.304,00	99,95	71.530.844.668,00
5.1.2.1.2.8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	257.127.629.811,00	250.391.009.132,05	97,38	219.717.180.868,02
	Jumlah	925.676.781.292,00	886.056.158.351,82	95,72	858.885.766.998,91

Rincian lebih lanjut dari masing-masing komponen belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.1	Belanja Barang	160.255.735.830,78	154.134.832.207,18	96,18	170.584.238.783,29

Realisasi belanja barang tahun 2023 sebesar Rp154.134.832.207,18 atau mencapai 96,18% dari anggaran sebesar Rp160.255.735.830,78. Realisasi belanja barang tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 9,64% dari realisasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp16.449.406.576,11

Rincian dari belanja barang adalah sebagai berikut :		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	157.621.295.197,78	151.531.549.357,18	96,14	169.255.582.733,29
5.1.2.1.2.1.2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.483.497.059,00	1.462.782.900,00	98,60	1.328.656.050,00

5.1.2.1.2.1.3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.150.943.574,00	1.140.499.950,00		
		160.255.735.830,78	154.134.832.207,18	96,18	170.584.238.783,29

Rincian dari anggaran dan realisasi belanja barang habis pakai tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 bebagai berikut :

	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	157.621.295.197,78	151.531.549.357,18	96,14	169.255.582.733,29
5.1.2.1.2.1.1.1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	30.148.161.465,00	29.744.716.189,00	98,66	29.946.738.267,00
5.1.2.1.2.1.1.2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.084.187.414,00	2.041.532.809,00	97,95	1.749.632.320,00
5.1.2.1.2.1.1.3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.438.965.540,00	11.461.899.648,00	92,15	12.291.653.236,00
5.1.2.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Baku	-	-		5.590.000,00
5.1.2.1.2.1.1.5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.742.385.000,00	1.726.092.751,00	99,06	1.391.260.700,00
5.1.2.1.2.1.1.6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	65.250.000,00	62.293.500,00	95,47	51.763.725,00
5.1.2.1.2.1.1.7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	182.937.000,00	180.808.500,00	98,84	124.324.100,00
5.1.2.1.2.1.1.8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	329.802.000,00	320.466.000,00	97,17	295.128.900,00
5.1.2.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.979.859.599,00	9.881.268.503,00	99,01	11.070.786.986,12
5.1.2.1.2.1.1.10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	838.458.648,00	629.054.240,00	75,03	289.251.750,00
5.1.2.1.2.1.1.11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	137.947.000,00	98.224.000,00	71,20	0,00
5.1.2.1.2.1.1.12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	43.879.900,00	43.576.000,00	99,31	84.792.466,00
5.1.2.1.2.1.1.13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	-	-		11.000.000,00
5.1.2.1.2.1.1.14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	51.591.250,00	49.084.375,00	95,14	36.396.000,00
5.1.2.1.2.1.1.15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	53.907.150,00	53.813.000,00	99,83	0,00
5.1.2.1.2.1.1.16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.609.504.578,00	2.508.042.950,00	96,11	11.321.355.353,00
5.1.2.1.2.1.1.17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.189.408.919,78	2.003.613.639,00	91,51	47.439.800,00
5.1.2.1.2.1.1.18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.853.246.602,00	7.501.627.447,00	95,52	6.718.159.682,00
5.1.2.1.2.1.1.19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	342.776.000,00	315.180.350,00	91,95	262.878.000,00
5.1.2.1.2.1.1.20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.381.958.400,00	1.203.860.740,00	87,11	769.718.514,00
5.1.2.1.2.1.1.21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.794.077.982,00	1.733.232.327,00	96,61	108.422.000,00
5.1.2.1.2.1.1.22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.932.498.934,00	3.897.490.152,00	99,11	1.765.272.778,00
5.1.2.1.2.1.1.23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	11.500.000,00	10.465.000,00	91,00	0,00

5.1.2.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	9.855.000,00	8.295.000,00	84,17	1.725.000,00
5.1.2.1.2.1.1.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.118.225.000,00	1.047.354.600,00	93,66	1.249.111.828,00
5.1.2.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.605.671.170,00	1.556.415.125,00	96,93	5.452.231.681,00
5.1.2.1.2.1.1.27	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.992.430.022,00	6.932.879.698,18	99,15	3.809.767.242,17
5.1.2.1.2.1.1.28	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	746.512.500,00	638.978.975,00	85,60	507.121.500,00
5.1.2.1.2.1.1.29	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.008.018.650,00	10.139.801.627,00	92,11	6.329.116.550,00
5.1.2.1.2.1.1.30	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	3.235.060.000,00	3.135.102.500,00	96,91	2.088.644.500,00
5.1.2.1.2.1.1.31	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	312.665.000,00	300.736.500,00	96,18	297.460.000,00
5.1.2.1.2.1.1.32	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	-	-		133.750.000,00
5.1.2.1.2.1.1.33	Belanja Natura dan Pakan-Natura	453.235.000,00	404.893.300,00	89,33	293.018.700,00
5.1.2.1.2.1.1.34	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	431.625.000,00	414.833.750,00	96,11	530.396.800,00
5.1.2.1.2.1.1.35	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	8.390.000,00	8.370.000,00	99,76	2.550.000,00
5.1.2.1.2.1.1.36	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.880.337.725,00	17.038.227.250,00	95,29	21.745.881.850,00
5.1.2.1.2.1.1.37	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.489.215.000,00	2.136.324.002,00	85,82	2.514.944.700,00
5.1.2.1.2.1.1.38	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-		6.840.000,00
5.1.2.1.2.1.1.39	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	-	-		548.582.250,00
5.1.2.1.2.1.1.40	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	776.556.000,00	710.037.010,00	91,43	6.540.862.500,00
5.1.2.1.2.1.1.41	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	8.491.644.000,00	8.443.998.250,00	99,44	397.928.150,00
5.1.2.1.2.1.1.42	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.736.036.749,00	19.169.140.550,00	97,13	31.993.078.956,00
5.1.2.1.2.1.1.43	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	172.300.000,00	172.150.000,00	99,91	169.041.325,00
5.1.2.1.2.1.1.44	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	4.500.000,00	4.400.000,00	97,78	4.500.000,00
5.1.2.1.2.1.1.45	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	132.000.000,00
5.1.2.1.2.1.1.46	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	168.500.000,00	162.500.000,00	96,44	74.960.000,00
5.1.2.1.2.1.1.47	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	126.028.000,00
5.1.2.1.2.1.1.48	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	485.300.000,00	473.530.400,00	97,57	206.630.000,00
5.1.2.1.2.1.1.49	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	66.000.000,00
5.1.2.1.2.1.1.50	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	230.650.000,00	228.970.000,00	99,27	766.805.475,00

5.1.2.1.2.1.1.51	Belanja Pakaian Penyelamatan	204.020.000,00	200.325.000,00	98,19	0,00
5.1.2.1.2.1.1.52	Belanja Pakaian Teknik	565.575.000,00	562.500.200,00	99,46	620.784.200,00
5.1.2.1.2.1.1.53	Belanja Pakaian Adat Daerah	336.300.000,00	297.545.000,00	88,48	443.410.000,00
5.1.2.1.2.1.1.54	Belanja Pakaian Batik Tradisional	281.900.000,00	250.728.500,00	88,94	736.245.000,00
5.1.2.1.2.1.1.55	Belanja Pakaian Olahraga	1.398.970.000,00	1.361.670.000,00	97,33	3.099.001.949,00
5.1.2.1.2.1.1.56	Belanja Pakaian Paskibraka				25.600.000,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.1.2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.483.497.059,00	1.462.782.900,00	98,60	1.328.656.050,00
5.1.2.1.2.1.2.1	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.480.215.000,00	1.459.523.100,00	98,60	1.328.656.050,00
5.1.2.1.2.1.2.2	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.282.059,00	3.259.800,00	99,32	-

5.1.2.1.2.1.3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.150.943.574,00	1.140.499.950,00	99,09	-
5.1.2.1.2.1.3.1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	78.557.800,00	75.615.000,00	96,25	-
5.1.2.1.2.1.3.2	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	75.000.000,00	73.743.500,00	98,32	-
5.1.2.1.2.1.3.3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	10.860.000,00	10.360.000,00	95,40	-
5.1.2.1.2.1.3.4	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95	-
5.1.2.1.2.1.3.5	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	16.390.000,00	16.370.000,00	99,88	-
5.1.2.1.2.1.3.6	Belanja Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.1.3.7	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	38.500.000,00	36.235.950,00	94,12	-
5.1.2.1.2.1.3.8	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	824.635.774,00	821.225.500,00	99,59	-

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2	Belanja Jasa	307.284.112.436,22	295.116.654.737,91	96,04	285.655.866.509,80

Rincian anggaran dan realisasi tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 per OPD pelaksana :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	224.238.505.489,22	215.470.373.656,70	96,09	213.520.511.547,00
5.1.2.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47.035.395.606,00	45.785.716.916,14	97,34	36.266.542.449,30

5.1.2.1.2.2.3	Belanja Sewa Tanah	1.713.859.611,00	1.166.496.406,00	68,06	2.901.283.509,50
5.1.2.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.285.697.250,00	7.623.122.379,00	92,00	8.066.724.720,00
5.1.2.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.408.344.000,00	1.269.994.000,00	90,18	2.372.965.000,00
5.1.2.1.2.2.6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	65.350.000,00	65.350.000,00	100,00	791.725.000,00
5.1.2.1.2.2.7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.342.000.000,00	4.190.078.410,00	96,50	6.080.719.758,00
5.1.2.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.802.485.980,00	7.707.909.953,07	98,79	9.787.953.799,00
5.1.2.1.2.2.9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi	922.055.000,00	912.565.103,00	98,97	86.833.947,00
5.1.2.1.2.2.10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	2.750.000,00
5.1.2.1.2.2.11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.470.419.500,00	10.925.047.914,00	95,25	5.003.304.890,00
5.1.2.1.2.2.12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	50.397.469,00
5.1.2.1.2.2.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	724.154.421,00
	Jumlah	307.284.112.436,22	295.116.654.737,91	96,04	285.655.866.509,80

Adapun rincian dari masing-masing komponen belanja jasa adalah :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	224.238.505.489,22	215.470.373.656,70	96,09	213.520.511.547,00
5.1.2.1.2.2.1.1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.251.260.000,00	8.859.055.000,00	95,76	16.558.588.000,00
5.1.2.1.2.2.1.2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.852.940.000,00	5.675.605.000,00	96,97	8.624.236.500,00
5.1.2.1.2.2.1.3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	73.800.000,00	73.800.000,00	100,00	93.500.000,00
5.1.2.1.2.2.1.4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	0,00		11.400.000,00
5.1.2.1.2.2.1.5	Honorarium Rohaniwan	6.400.000,00	5.200.000,00	81,25	72.000.000,00
5.1.2.1.2.2.1.6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	65.860.000,00	60.440.000,00	91,77	25.500.000,00
5.1.2.1.2.2.1.7	Honorarium Penyelenggara Ujian	900.000,00	900.000,00	100,00	258.900.000,00
5.1.2.1.2.2.1.8	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	41.200.000,00	41.200.000,00	100,00	84.100.000,00
5.1.2.1.2.2.1.10	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.496.440.000,00	1.440.940.000,00	96,29	1.756.466.800,00
5.1.2.1.2.2.1.11	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	666.050.000,00	602.500.000,00	90,46	0,00
5.1.2.1.2.2.1.12	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	34.349.175.000,00	33.182.036.000,00	96,60	35.756.284.000,00
5.1.2.1.2.2.1.13	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.849.554.612,00	4.648.832.323,00	95,86	7.185.223.187,00
5.1.2.1.2.2.1.14	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	399.906.580,00	344.130.201,00	86,05	266.393.600,00
5.1.2.1.2.2.1.15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.542.568.251,00	3.442.428.768,00	97,17	1.694.091.060,00
5.1.2.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00	40.900.000,00

5.1.2.1.2.2.1.17	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.537.123.964,00	2.537.123.964,00	100,00	0,00
5.1.2.1.2.2.1.18	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	677.400.000,00	677.400.000,00	100,00	140.100.000,00
5.1.2.1.2.2.1.19	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	893.606.000,00	871.930.500,00	97,57	657.000.000,00
5.1.2.1.2.2.1.20	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	-	-		669.500,00
5.1.2.1.2.2.1.21	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	-	-		1.221.301.500,00
5.1.2.1.2.2.1.22	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	531.951.120,00	505.353.564,00	95,00	350.686.000,00
5.1.2.1.2.2.1.23	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	851.858.452,00	846.956.452,00	99,42	593.276.800,00
5.1.2.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.195.775.000,00	4.852.700.000,00	93,40	8.954.063.817,00
5.1.2.1.2.2.1.25	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.586.336.612,22	9.435.355.133,00	98,43	7.577.422.663,00
5.1.2.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	900.000,00	900.000,00	100,00	158.179.000,00
5.1.2.1.2.2.1.27	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	33.848.709.957,00	33.211.729.672,70	98,12	35.112.587.205,00
5.1.2.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.666.500.000,00	2.472.037.500,00	92,71	3.827.847.290,00
5.1.2.1.2.2.1.29	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.165.350.743,00	13.030.220.113,00	98,97	7.947.579.356,00
5.1.2.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.333.179.598,00	6.264.951.560,00	98,92	2.953.400.874,00
5.1.2.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Caraka	212.780.448,00	212.780.448,00	100,00	72.327.500,00
5.1.2.1.2.2.1.32	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.779.388.526,00	2.774.955.600,00	99,84	1.513.591.231,00
5.1.2.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	-	-		376.103.000,00
5.1.2.1.2.2.1.34	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	319.170.672,00	319.170.672,00	100,00	101.258.500,00
5.1.2.1.2.2.1.35	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	310.000.000,00	308.702.800,00	99,58	1.874.414.860,00
5.1.2.1.2.2.1.36	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.064.725.000,00	1.033.300.000,00	97,05	729.500.000,00
5.1.2.1.2.2.1.37	Belanja Jasa Tata Rias	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	11.000.000,00
5.1.2.1.2.2.1.38	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.452.117.668,00	1.363.617.668,00	93,91	1.127.379.787,00
5.1.2.1.2.2.1.39	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	-	-		102.339.114,00
5.1.2.1.2.2.1.40	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	-	-		2.000.000,00
5.1.2.1.2.2.1.41	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	72.000.000,00	35.142.680,00	48,81	21.005.500,00
5.1.2.1.2.2.1.42	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.079.525.000,00	2.003.340.970,00	96,34	1.453.963.435,00
5.1.2.1.2.2.1.43	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.734.712.130,00	9.495.047.872,00	97,54	6.313.203.683,00
5.1.2.1.2.2.1.44	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	34.000.000,00	29.000.000,00	85,29	133.250.000,00
5.1.2.1.2.2.1.45	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	28.050.000,00	27.755.000,00	98,95	28.227.250,00
5.1.2.1.2.2.1.46	Belanja Jasa Kalibrasi	164.755.000,00	159.675.100,00	96,92	199.514.150,00
5.1.2.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	605.084.906,00	600.279.530,00	99,21	750.393.408,00
5.1.2.1.2.2.1.48	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	35.000.000,00	29.869.000,00	85,34	39.105.000,00

5.1.2.1.2.2.1.49	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0,00	0,00		203.587.925,00
5.1.2.1.2.2.1.50	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.443.500.000,00	2.321.535.800,00	95,01	6.111.713.353,00
5.1.2.1.2.2.1.51	Belanja Jasa Operator Kapal	-	-		2.019.600,00
5.1.2.1.2.2.1.52	Belanja Tagihan Telepon	419.300.250,00	316.121.333,00	75,39	331.490.804,00
5.1.2.1.2.2.1.53	Belanja Tagihan Air	516.100.000,00	348.728.100,00	67,57	405.079.600,00
5.1.2.1.2.2.1.54	Belanja Tagihan Listrik	47.730.000.000,00	44.741.300.176,00	93,74	41.449.997.319,00
5.1.2.1.2.2.1.55	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	238.075.000,00	229.052.500,00	96,21	257.893.000,00
5.1.2.1.2.2.1.56	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.925.100.000,00	6.813.795.157,00	98,39	6.395.350.240,00
5.1.2.1.2.2.1.57	Belanja Paket/Pengiriman	53.300.000,00	38.216.872,00	71,70	33.086.320,00
5.1.2.1.2.2.1.58	Belanja Penambahan Daya	848.100.000,00	830.205.700,00	97,89	169.948.854,00
5.1.2.1.2.2.1.59	Belanja Registrasi/Keanggotaan	29.980.000,00	29.603.000,00	98,74	0,00
5.1.2.1.2.2.1.60	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.891.500.000,00	2.397.383.128,00	82,91	1.322.206.962,00
5.1.2.1.2.2.1.61	Belanja Pengolahan Air Limbah	6.080.000.000,00	5.660.000.000,00	93,09	0,00
5.1.2.1.2.2.1.62	Belanja Lembur	199.595.000,00	189.404.800,00	94,89	63.470.000,00
5.1.2.1.2.2.1.63	Belanja Medical Check Up	17.400.000,00	8.164.000,00	46,92	4.394.000,00
	Jumlah	224.238.505.489,22	215.470.373.656,70	96,09	213.520.511.547,00

Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2024 sebesar Rp215.470.373.656,70 atau mencapai 96,09% dari pagu anggaran sebesar Rp224.238.505.489,22. Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,91% atau sebesar Rp1.949.862.109,70 dart realisasi tahun 2023.

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47.035.395.606,00	45.785.716.916,14	97,34	36.266.542.449,30

Realisasi belanja iuran jaminan/asuransi tahun 2024 sebesar Rp45.785.716.916,14 atau mencapai 97,34% dari anggaran sebesar Rp47.035.395.606,00. Realisasi belanja iuran jaminan/asuransi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 26,25% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp9.519.174.466,84

Dasar hukum belanjanya adalah Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransimenurut jenisnya sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.2.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan	1.880.275.000,00	1.846.593.772,00	98,21	0,00
5.1.2.1.2.2.2.2	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	41.007.708.000,00	40.587.256.000,00	98,97	31.205.871.000,00
5.1.2.1.2.2.2.3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.500.004.800,00	1.364.451.170,00	90,96	1.432.326.000,00
5.1.2.1.2.2.2.4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.015.397.260,00	1.411.316.901,44	70,03	2.908.047.852,00

5.1.2.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	331.829.044,00	298.003.492,75	89,81	396.671.476,80
5.1.2.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	300.181.502,00	278.095.579,95	92,64	323.626.120,50
	Jumlah	47.035.395.606,00	45.785.716.916,14	97,34	36.266.542.449,30

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.3	Belanja Sewa Tanah	1.713.859.611,00	1.166.496.406,00	68,06	2.901.283.509,50

Realisasi belanja sewa tanah tahun 2024 sebesar Rp1.166.496.406,00 atau mencapai68,06% dari anggaran sebesar Rp1.713.859.611,00. Realisasi belanja sewa tanah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 59,79% dari realisasi tahun 2023sebesar Rp1.734.787.103,50

Realisasi belanja sewa tanah tahun 2024 hanya terealisasi sebear 68,06% dari anggaran sebesar Rp1.713.859.611,00 karena ada beberapa sewa tanah kas desa yang tidak direalisasikan karena terkendala ijin gubernur terkait penggunaan tanah kas desa belum turun yaitu untuk belanja sewa tanah kas desa yang diperuntukan Standion Sultan Agung.

Rincian anggaran dan realisasi belanja sewa tanah tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 adalah :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.3.1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	-	-		135.631.094,00
5.1.2.1.2.2.3.2	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	462.937.369,00	438.565.578,00	94,74	566.043.800,00
5.1.2.1.2.2.3.3	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Industri	-	-		30.008.000,00
5.1.2.1.2.2.3.4	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	262.130.054,00	217.169.144,00	82,85	269.994.683,00
5.1.2.1.2.2.3.5	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	654.664.156,00	178.958.156,00	27,34	602.881.000,00
5.1.2.1.2.2.3.6	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	-	-		44.199.223,00
5.1.2.1.2.2.3.7	Belanja Sewa Tanah Pertanian	233.128.032,00	233.128.032,00	100,00	1.181.155.954,50
5.1.2.1.2.2.3.8	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	-	-		12.000.000,00
5.1.2.1.2.2.3.9	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi	101.000.000,00	98.675.496,00	97,70	55.731.480,00
5.1.2.1.2.2.3.10	Belanja Sewa Tanah untuk Taman	-	-		3.388.275,00
5.1.2.1.2.2.3.11	Belanja Sewa Tanah untuk Latihan	-	-		250.000,00
	Jumlah	1.713.859.611,00	1.166.496.406,00	68,06	2.901.283.509,50

Rincian belanja sewa tanah sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.3.2	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	462.937.369,00	438.565.578,00	94,74	

No	Perangkat Daeah pelaksana	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	DKUKMP	462.937.369,00	438.565.578,00	94,74	566.043.800,00
		462.937.369,00	438.565.578,00	94,74	566.043.800,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.3.4	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	262.130.054,00	217.169.144,00	82,85	269.994.683,00

No	Perangkat Daeah pelaksana	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pemuda dan Olah Raga	59.827.810,00	50.360.200,00		
2	Dinas Kesehatan	61.964.058,00	61.964.058,00	100,00	136.870.531,00
3	DLH	32.000.000,00	31.508.400,00	98,46	38.851.663,00
4	Dinas Perhubungan	73.338.186,00	73.336.486,00	100,00	35.678.739,00
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				58.593.750,00
	Jumlah	227.130.054,00	217.169.144,00	95,61	269.994.683,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.3.5	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	654.664.156,00	178.958.156,00	27,34	602.881.000,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Tanah Kas Kalurahan Trimulyo Jetis Bantul untuk SSA				475.706.000,00
2	Tanah Kas Kalurahan Wonokromo Pleret untuk SSA				-
3	Tanah Kas Kalurahan Timbulharjo sewon Bantul untuk SSA				-
4	Tnah Kas Kalurahan Bantul untuk bangunan gedung sarpras, stadion Dwi Windu,lapangan panjat tebing dan lapanaagan tenis	654.664.156,00	178.958.156,00	27,34	127.175.000,00
	Jumlah	654.664.156,00	178.958.156,00	27,34	602.881.000,00

OPD Pelaksana DISDIKPORA

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.3.7	Belanja Sewa Tanah Pertanian	233.128.032,00	233.128.032,00	100,00	1.181.155.954,50

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	83.174.842,00	83.174.842,00		
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	149.953.190,00	149.953.190,00	100,00	1.097.981.112,50
Dinas Kelautan dan Perikanan				83.174.842,00
Jumlah	233.128.032,00	233.128.032,00	100,00	1.181.155.954,50

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.3.11	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi	101.000.000,00	7.623.122.379,00	92,00	8.066.724.720,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	57.881.250,00	96,47	55.731.480,00
DLH	41.000.000,00	40.794.246,00		
Jumlah	101.000.000,00	98.675.496,00	96,47	55.731.480,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.285.697.250,00	7.623.122.379,00	92,00	8.066.724.720,00

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp7.623.122.379,00 atau mencapai 92,00% dari anggaran sebesar Rp8.285.697.250,00. Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,50% dari realisasi tahun 2023 atau sebesar Rp443.602.341,00

	Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin adalah :	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.4.1	Belanja Sewa Tractor	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.2.4.2	Belanja Sewa Electric Generating Set	196.836.000,00	186.336.000,00	94,67	42.900.000,00
5.1.2.1.2.2.4.3	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	42.000.000,00	31.500.000,00	75,00	202.500.000,00
5.1.2.1.2.2.4.4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.843.900.000,00	1.667.918.041,00	90,46	1.842.615.504,00
5.1.2.1.2.2.4.5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	214.500.000,00	206.000.000,00	96,04	223.000.000,00
5.1.2.1.2.2.4.6	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	-	-		30.000.000,00
5.1.2.1.2.2.4.7	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	-	-		16.000.000,00
5.1.2.1.2.2.4.8	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	204.275.000,00	203.475.000,00	99,61	1.563.008.293,00
5.1.2.1.2.2.4.9	Belanja Sewa Mebel	184.758.000,00	174.240.500,00	94,31	11.292.500,00
5.1.2.1.2.2.4.10	Belanja Sewa Alat Pendingin	85.900.000,00	82.620.000,00	96,18	9.057.600,00
5.1.2.1.2.2.4.11	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.262.410.000,00	1.241.206.000,00	98,32	808.260.000,00
5.1.2.1.2.2.4.12	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	-	-		4.460.000,00
5.1.2.1.2.2.4.13	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	930.000,00	930.000,00	100,00	42.094.500,00
5.1.2.1.2.2.4.14	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.146.014.250,00	1.824.082.250,00	85,00	602.456.000,00
5.1.2.1.2.2.4.15	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	-	-		1.000.000,00
5.1.2.1.2.2.4.16	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	164.250.000,00	155.250.000,00	94,52	-
5.1.2.1.2.2.4.17	Belanja Sewa Peralatan Cetak	56.750.000,00	55.250.000,00	97,36	48.500.000,00
5.1.2.1.2.2.4.18	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	-	-		1.176.700.000,00
5.1.2.1.2.2.4.19	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	-	-		1.686.535,00
5.1.2.1.2.2.4.20	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM	3.000.000,00	1.491.037,00	49,70	9.607.118,00
5.1.2.1.2.2.4.21	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	308.000.000,00	301.200.000,00	97,79	368.613.200,00
5.1.2.1.2.2.4.22	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	-	-		42.168.970,00

5.1.2.1.2.2.4.23	Belanja Sewa Peralatan Perlengkapan Radio	307.460.000,00	295.311.051,00	96,05	-
5.1.2.1.2.2.4.24	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil	-	-		16.676.000,00
5.1.2.1.2.2.4.25	Belanja Sewa System/Power Supply	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	-
5.1.2.1.2.2.4.26	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	179.464.000,00	170.940.000,00	95,25	645.629.500,00
5.1.2.1.2.2.4.27	Belanja Sewa Peralatan Umum	648.925.000,00	611.675.000,00	94,26	181.790.000,00
5.1.2.1.2.2.4.28	Belanja Sewa Komputer Jaringan	-	-		19.400.000,00
5.1.2.1.2.2.4.29	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	431.825.000,00	409.197.500,00	94,76	105.309.000,00
5.1.2.1.2.2.4.30	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	-	-		52.000.000,00
	Jumlah	8.285.697.250,00	7.623.122.379,00	92,00	8.066.724.720,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.408.344.000,00	1.269.994.000,00	90,18	2.372.965.000,00

Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp1.269.994.000,00 atau mencapai 90,18% dari anggaran sebesar Rp1.408.344.000,00. Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 46,48% dari realisasi tahun 2023 atau sebesar Rp1.102.971.000,00

Rincian anggaran dan realisasi belanja sewa gedung dan bangunan tahun 2024 dan Realisasi 2023 sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.5.1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	129.300.000,00	116.300.000,00	89,95	85.000.000,00
5.1.2.1.2.2.5.2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.2.1.2.2.5.3	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60	0,00
5.1.2.1.2.2.5.4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.140.050.000,00	1.025.500.000,00	89,95	2.257.965.000,00
5.1.2.1.2.2.5.5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	44.000.000,00	33.400.000,00	75,91	0,00
5.1.2.1.2.2.5.6	Belanja Sewa Pagar	9.994.000,00	9.994.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	1.408.344.000,00	1.269.994.000,00	90,18	2.372.965.000,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	65.350.000,00	65.350.000,00	100,00	791.725.000,00

Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp65.350.000,00 atau mencapai 100%. Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 91,75% dari realisasi tahun 2023 atau sebesar Rp726.375.000,00 belanja sewa alat musik dan belanja sewa tanaman untuk tahun 2024 tidak dianggarkan.

Rincian Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya adalah :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.7.1	Belanja Sewa Alat Musik	-	-		433.400.000,00
5.1.2.1.2.2.7.2	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	65.350.000,00	65.350.000,00	100,00	357.625.000,00
5.1.2.1.2.2.7.3	Belanja Sewa Tanaman	-	-		700.000,00

	Jumlah	65.350.000,00	65.350.000,00	100,00	791.725.000,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.342.000.000,00	4.190.078.410,00	96,50	6.080.719.758,00

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2024 sebesar Rp4.190.078.410,00 atau mencapai 96,50% dari anggaran sebesar Rp4.342.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar 31,09 dari realisasi tahun 2023 atau sebesar Rp1.890.641.348,00. Penurunan signifikan terdapat pada belanja jasa konsultasi perencanaan penataan jasa perencanaan dan perancaan ,jasa perencanaan wilayah,,jas konsultasi lainnya jasa konsultansi lingkungan

Rincian anggaran dan realisasi belanja jasa konsultasi konstruksi tahun 2024 adalah :

	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.8.1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.074.750.000,00	1.000.734.910,00	93,11	92.086.710,00
5.1.2.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	-	-		282.827.375,00
5.1.2.1.2.2.8.3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	250.000.000,00	247.252.500,00	98,90	1.546.212.900,00
5.1.2.1.2.2.8.4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	100.000.000,00	99.345.000,00	99,35	1.271.116.500,00
5.1.2.1.2.2.8.5	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	949.750.000,00	890.339.800,00	93,74	-
5.1.2.1.2.2.8.6	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	217.500.000,00	215.301.650,00	98,99	472.101.750,00
5.1.2.1.2.2.8.7	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	-	-		632.000,00
5.1.2.1.2.2.8.8	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	725.000.000,00	721.216.950,00	99,48	1.532.576.413,00
5.1.2.1.2.2.8.9	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	1.025.000.000,00	1.015.887.600,00	99,11	883.166.110,00
	Jumlah	4.342.000.000,00	4.190.078.410,00	96,50	6.080.719.758,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.802.485.980,00	7.707.909.953,07	98,79	9.787.953.799,00

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2024 sebesar Rp7.707.909.953,07 atau mencapai 98,79% dari anggaran sebesar Rp7.802.485.980,00 dan mengalami penurunan sebesar 21,25% dari realisasi tahun 2023 atau sebesar Rp2.080.043.845,93. Penurunanan signifikan pada belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa studi penelitian dan teknik

Rincian Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.9.1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	25.000.000,00	24.198.000,00	96,79	24.753.000,00

5.1.2.1.2.2.9.2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	-	-		505.403.400,00
5.1.2.1.2.2.9.3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	605.000.000,00	600.781.950,00	99,30	144.244.500,00
5.1.2.1.2.2.9.4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	-	-		98.770.020,00
5.1.2.1.2.2.9.5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	20.200.000,00	16.380.500,00	81,09	46.241.995,00
5.1.2.1.2.2.9.6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	280.000.000,00	276.859.130,00	98,88	268.920.480,00
5.1.2.1.2.2.9.7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	5.825.285.980,00	5.755.649.273,07	98,80	6.827.274.914,00
5.1.2.1.2.2.9.8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	-	-		242.653.950,00
5.1.2.1.2.2.9.9	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.047.000.000,00	1.034.041.100,00	98,76	1.629.691.540,00
	Jumlah	7.802.485.980,00	7.707.909.953,07	98,79	9.787.953.799,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi	922.055.000,00	912.565.103,00	98,97	86.833.947,00

Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi tahun 2024 sebesar Rp912.566.103,00 atau mencapai 98,97% dari anggaran sebesar Rp922.055.000,00. Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi tahun 2024 mengalami peningkatan hampir seratus persen.,

Rincian Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.10.1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)				
5.1.2.1.2.2.10.1.1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi	-	-		72.750.000,00
5.1.2.1.2.2.10.1.2	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	407.055.000,00	405.517.103,00	99,62	0,00
5.1.2.1.2.2.10.1.3	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	0,00	0,00		14.083.947,00
5.1.2.1.2.2.10.1.4	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan	515.000.000,00	507.048.000,00	98,46	0,00
		922.055.000,00	912.565.103,00	98,97	86.833.947,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-		2.750.000,00

Rincian Belanja Beasiswa Pendidikan PNS adalah :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.10.1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1				2.750.000,00

5.1.2.1.2.2.10.2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2				
	Jumlah	-	-		2.750.000,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.470.419.500,00	10.925.047.914,00	95,25	5.003.304.890,00

Rincian Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan adalah :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.11.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.981.929.500,00	5.596.649.880,00	93,56	4.404.279.890,00
5.1.2.1.2.2.11.2	Belanja Sosialisasi	4.063.480.000,00	3.903.437.034,00	96,06	101.010.000,00
5.1.2.1.2.2.11.3	Belanja Bimbingan Teknis	348.900.000,00	348.900.000,00	100,00	78.235.000,00
	Belanja Duklat Kepemimpinan	1.076.110.000,00	1.076.061.000,00	100,00	419.780.000,00
	Jumlah	11.470.419.500,00	10.925.047.914,00	95,25	5.003.304.890,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah				50.397.469,00
	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan				

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00		724.154.421,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2.14.1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan / Kebersihan				680.954.421,00
5.1.2.1.2.2.14.2	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengolahan Limbah Cair				43.200.000,00
					724.154.421,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	27.917.989.242,00	26.373.669.431,34	94,47	26.454.572.748,30

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 adalah :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.3.1	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-		5.852.125,00
5.1.2.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.470.733.100,00	8.927.357.934,00	94,26	8.051.049.528,00
5.1.2.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.976.061.819,00	9.563.796.138,34	95,87	13.131.950.227,35
5.1.2.1.2.3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.471.194.323,00	7.882.515.359,00	93,05	5.081.867.904,00
5.1.2.1.2.3.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-		183.852.963,95
	Jumlah	27.917.989.242,00	26.373.669.431,34	94,47	26.454.572.748,30

Adapun rincian dari jenis belanja pemeliharaan adalah sebagi berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.3.1	Belanja Pemeliharaan Tanah				5.852.125,00
	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB				

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.470.733.100,00	8.927.357.934,00	94,26	8.051.049.528,00

Rincian dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin adalah :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.3.1.1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	0,00	0,00		24.190.000,00
5.1.2.1.2.3.1.2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	108.925.000,00	101.722.228,00	93,39	94.212.900,00
5.1.2.1.2.3.1.3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	28.500.000,00	21.850.000,00	76,67	0,00
5.1.2.1.2.3.1.4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	899.415.000,00	869.450.917,00	96,67	635.835.668,00
5.1.2.1.2.3.1.5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.624.755.000,00	2.425.979.986,00	92,43	2.160.060.790,00
5.1.2.1.2.3.1.6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-		39.750.000,00
5.1.2.1.2.3.1.7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	350.707.500,00	280.858.600,00	80,08	294.945.900,00
5.1.2.1.2.3.1.8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.310.000,00	5.273.000,00	99,30	23.404.200,00
5.1.2.1.2.3.1.9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	225.000.000,00	224.227.000,00	99,66	335.981.000,00
5.1.2.1.2.3.1.10	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	149.200.000,00	99,47	0,00

5.1.2.1.2.3.1.11	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
5.1.2.1.2.3.1.12	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.2.1.2.3.1.13	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	89.000.000,00	87.821.400,00	98,68	22.744.500,00
5.1.2.1.2.3.1.14	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00
5.1.2.1.2.3.1.15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.212.230.600,00	3.069.681.412,00	95,56	3.072.531.790,00
5.1.2.1.2.3.1.16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	243.920.000,00	227.136.427,00	93,12	212.005.663,00
5.1.2.1.2.3.1.17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	226.085.000,00	221.855.100,00	98,13	167.257.600,00
5.1.2.1.2.3.1.18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	31.500.000,00	31.255.000,00	99,22	0,00
5.1.2.1.2.3.1.19	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	121.000.000,00	115.849.860,00	95,74	9.693.500,00
5.1.2.1.2.3.1.20	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	250.000.000,00	240.139.000,00	96,06	99.345.000,00
5.1.2.1.2.3.1.21	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!	248.406.000,00
5.1.2.1.2.3.1.22	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	96.900.000,00	94.870.520,00	97,91	50.360.357,00
5.1.2.1.2.3.1.23	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	235.290.000,00	225.649.750,00	95,90	171.260.000,00
5.1.2.1.2.3.1.24	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	91.250.000,00	87.419.250,00	95,80	116.673.500,00
5.1.2.1.2.3.1.25	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	230.000.000,00	197.918.820,00	86,05	128.186.000,00
5.1.2.1.2.3.1.26	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	50.000.000,00	49.040.140,00	98,08	58.185.000,00
5.1.2.1.2.3.1.27	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	75.000.000,00	74.626.024,00	99,50	72.580.160,00
5.1.2.1.2.3.1.28	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	12.000.000,00	11.950.000,00	99,58	11.940.000,00
5.1.2.1.2.3.1.29	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	107.445.000,00	107.083.500,00	99,66	0,00
	Jumlah	9.470.733.100,00	8.927.357.934,00	94,26	8.051.049.528,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp8.927.357.934,00 atau mencapai 94,26% dari pagu anggaran sebesar Rp9.470.733.100,00 dan mengalami peningkatan sebesar 10,88% dari realisasi tahun 2023 atau sebesar Rp876.308.406,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.976.061.819,00	9.563.796.138,34	95,87	13.131.950.227,35

Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2024 adalah:

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)

5.1.2.1.2.3.2.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.089.592.253,00	7.010.958.612,13	98,89	11.129.031.736,35
5.1.2.1.2.3.2.2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00		37.014.000,00
5.1.2.1.2.3.2.3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	30.000.000,00	29.997.000,00	99,99	0,00
5.1.2.1.2.3.2.4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	201.000.000,00	153.561.268,00	76,40	0,00
5.1.2.1.2.3.2.5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	25.980.660,00	25.548.750,00	98,34	0,00
5.1.2.1.2.3.2.6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	19.265.000,00	19.242.000,00	99,88	0,00
5.1.2.1.2.3.2.7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	2.392.000.000,00	2.110.796.508,21	88,24	1.687.230.000,00
5.1.2.1.2.3.2.8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	80.000.000,00	79.000.000,00	98,75	79.952.270,00
5.1.2.1.2.3.2.9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	138.223.906,00	134.692.000,00	97,44	20.039.000,00
5.1.2.1.2.3.2.10	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	0,00	0,00		6.700.000,00
5.1.2.1.2.3.2.11	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	-	-		108.418.000,00
5.1.2.1.2.3.2.12	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	-	-		24.153.721,00
5.1.2.1.2.3.2.13	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	-	-		39.411.500,00
	Jumlah	9.976.061.819,00	9.563.796.138,34	95,87	13.131.950.227,35

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp9.563.796.138,34 atau mencapai 95,87% dari anggaran sebesar Rp9.976.061.819,00 dan mengalami penurunan sebesar 27,18% dari realisasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.568.154.089,01

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.471.194.323,00	7.882.515.359,00	93,05	5.081.867.904,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	5.986.974.650,00	5.431.822.880,00	90,73	3.554.523.233,00
5.1.2.1.2.3.3.2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	18.698.000,00	18.357.200,00	98,18	166.896.000,00
5.1.2.1.2.3.3.3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi				333.709.000,00
5.1.2.1.2.3.3.4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	24.765.640,00	24.503.400,00	98,94	400.005,00

5.1.2.1.2.3.3.5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	502.516.640,00	481.043.931,00	95,73	223.383.940,00
5.1.2.1.2.3.3.6	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	-	-		10.500.000,00
5.1.2.1.2.3.3.7	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	95.900.000,00	95.764.850,00	99,86	119.499.270,00
5.1.2.1.2.3.3.8	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.842.339.393,00	1.831.023.098,00	99,39	552.426.456,00
5.1.2.1.2.3.3.9	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	-	-		120.530.000,00
	Jumlah	8.471.194.323,00	7.882.515.359,00	93,05	5.081.867.904,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2024 ebesar Rp7.882.515.359,00 atau mencapai 93,05% dari pagu anggaran sebesar Rp8.471.194.323,00 dan mengalami peningkatan sebesar 55,11% dari realisasi tahun 2023 atau sebesar Rp2.800.647.455,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.3.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-		183.852.963,95

Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	44.849.109.000,00	32.913.272.097,00	73,39	37.486.232.078,50

Realisasi Belana Perjalanan Dinas tahun 2024 sebesar Rp32.913.272.097,00atau mencapai 73,39% dari pagu anggaran sebesar Rp44.849.109.000,00 dan mengalami penurunan sebesar 12,20% dari realisasi tahun 2023 atau sebesar Rp4.572.959.982,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.849.109.000,00	32.913.272.097,00	73,39	37.396.866.803,50
5.1.2.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-		89.365.275,00
		44.849.109.000,00	32.913.272.097,00	73,39	37.486.232.078,50

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 adalah:

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.349.104.000,00	20.148.406.009,00	64,27	17.214.592.907,50
5.1.2.1.2.4.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.005.000,00	12.764.866.088,00	94,55	20.172.583.657,00
5.1.2.1.2.4.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				9.690.239,00
	Jumlah	44.849.109.000,00	32.913.272.097,00	73,39	37.396.866.803,50

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri				89.365.275,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.616.081.932,00	39.906.071.692,34	98,25	47.456.831.343,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.5.1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.832.890.000,00	11.493.458.750,00	97,13	11.947.127.250,00
5.1.2.1.2.5.1.1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.546.300.000,00	3.512.450.000,00	99,05	2.358.210.000,00
5.1.2.1.2.5.1.2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	4.860.590.000,00	4.605.008.750,00	94,74	5.845.917.250,00
5.1.2.1.2.5.1.3	Belanja Beasiswa	-	-		43.000.000,00
5.1.2.1.2.5.1.4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	2.216.000.000,00	2.216.000.000,00	100,00	3.700.000.000,00
5.1.2.1.2.5.1.5	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1.210.000.000,00	1.160.000.000,00	95,87	0,00
5.1.2.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.783.191.932,00	28.412.612.942,34	98,71	35.509.704.093,00
5.1.2.1.2.5.2.1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	28.779.191.932,00	28.412.612.942,34	98,73	12.528.564.093,00
5.1.2.1.2.5.2.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.000.000,00	-	-	22.981.140.000,00
		40.616.081.932,00	39.906.071.692,34	98,25	47.456.831.343,00

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024 sebesar Rp39.906.949.454,00 atau mencapai 98,73% dari pagu anggaran sebesar Rp40.616.081.932,00 dan mengalami penurunan sebesar 15,91% dari realisasi tahun 2023 ataru sebesar Rp7.549.881.889,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.6	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.998.647.600,00	18.626.599.750,00	98,04	0,00

Realaisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas merupakan belanja yang diterima langsung oleh Puskesmas atau transaksi non RKUD.

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.6	Belanja Barang dan Jasa BOSP	68.627.475.440,00	68.594.049.304,00	99,95	71.530.844.668,00

Belanja Barang dan Jasa BOS merupakan belanja non RKUD dengan rincian:

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
BOSDA SD	13.633.117.874,000	13.633.117.874,000	100,00	-
BOSDA SMP	9.115.279.770,000	9.115.279.770,000	100,00	-

BOSDA PAUD	137.450.000,000	137.450.000,000	100,00	-
BOSP SD	26.748.268.880,000	26.748.268.880,000	100,00	-
BOSP SMP	18.524.695.666,000	18.529.269.450,000	100,02	-
BOSP PAUD	180.773.250,000	180.773.250,000	100,00	-
BOSP KESETARAAN	287.890.000,000	249.890.080,000	86,80	-
Jumlah	68.627.475.440,000	68.594.049.304,000	99,95	-

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	257.127.629.811,00	250.391.009.132,05	97,38	219.717.180.868,02

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2024 sebagai berikut :

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa BLUD RSU Panembahan Senopati Bantul	188.722.680.394,00	185.090.831.413,00	98,08	166.533.337.656,00
- Belanja bahan	82.765.835.610,00	82.765.835.610,00	100,00	67.710.968.147,00
- Belanja Jasa Pelayanan	71.425.473.987,00	71.425.473.987,00	100,00	71.202.763.914,00
- Belanja Pemeliharaan	10.527.205.855,00	2.591.804.967,00	24,62	6.400.642.837,00
- Belanja administrasi Kantor	2.670.954.870,00	8.957.040.028,00	335,35	2.486.704.097,00
- Belanja barang dan jasa	18.314.769.326,00	2.495.588.806,00	13,63	16.117.010.877,00
- Belanja promosi	250.000.000,00	195.133.810,00	78,05	350.415.446,00
- Belanja barang dan jasa lainnya	2.768.440.746,00	16.659.954.205,00	601,78	2.264.832.338,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD RSU Saras Adyatma	1.970.000.000,00	1.891.147.153,00	96,00	33.710.000,02
- Belanja bahan	513.289.614,00	555.892.432,00	108,30	-
- Belanja Jasa Pelayanan	1.241.432.386,00	0,00	0,00	-
- Belanja Pemeliharaan	11.930.000,00	1.233.376.132,00	10338,44	-
- Belanja administrasi Kantor	100.200.000,00	0,00	0,00	-
- Belanja barang dan jasa	48.485.000,00	5.717.307,00	11,79	-
- Belanja promosi	0,00	0,00		-
- Belanja barang dan jasa lainnya	54.663.000,00	96.161.282,00	175,92	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	66.434.949.417,00	63.409.030.566,05	95,45	53.150.133.212,00
- Belanja bahan	3.904.265.620,00	3.400.320.427,00	87,09	-
- Belanja Jasa Pelayanan	49.904.122.506,30	48.896.325.673,00	97,98	-
- Belanja Pemeliharaan	3.274.467.706,00	1.004.843.462,00	30,69	-
- Belanja administrasi Kantor	1.046.875.483,20	2.720.924.592,25	259,91	-
- Belanja barang dan jasa	7.153.589.175,50	682.481.516,00	9,54	-

- Belanja promosi	400.000,00	205.000,00	51,25	-
- Belanja barang dan jasa lainnya	1.151.228.926,00	6.703.929.895,80	582,33	-
Jumlah	257.127.629.811,00	250.391.009.132,05	97,38	219.717.180.868,02

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.3	Belanja Bunga	-	-		-

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak menganggarkan Belanja Bunga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024.

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.4	Belanja Subsidi	-	-		-

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak menganggarkan Belanja Subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024.

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.5	Belanja Hibah	130.343.600.572,00	128.922.914.717,00	98,91	115.915.380.000,00

Realisasi Belanja Hibah tahun 2024 sebesar Rp128.922.914.717,00 atau mencapai 98,91% dri anggaran sebesar Rp130.006.622.268,00 dan mengalami peningkatan sebesar 11,22% dari realisasi tahun 2023 atau sebesar Rp13.007.534.717,00

Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah tahun 2024 dan realisasi tahun 2023		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.5.1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	32.518.027.600,00	32.349.169.650,00	99,48	21.071.194.400,00
5.1.2.1.5.2	Belanja Hibah kepada BUMD	-	-		3.710.000.000,00
5.1.2.1.5.3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	97.825.572.972,00	96.573.745.067,00	98,72	61.547.997.300,00
5.1.2.1.5.4	Belanja Hibah Dana BOS				27.623.874.900,00
5.1.2.1.5.5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				1.962.313.400,00
5.1.2.1.5.6	Belanja Hibah Dana BOSP				
Jumlah		130.343.600.572,00	128.922.914.717,00	98,91	115.915.380.000,00

5.1.2.1.5.1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.5.1.1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	31.333.077.600,00	31.333.077.600,00	100,00	20.888.718.400,00
5.1.2.1.5.1.2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.184.950.000,00	1.016.092.050,00	85,75	182.476.000,00
	Jumlah	**32.518.027.600,00**	**32.349.169.650,00**	99,48	**21.071.194.400,00**

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2024 sebesar Rp32.349.169.650,00 atau mencapai 99,48% dari pagu anggaran sebesar Rp32.518.027.600,00 dan mengalami kenaikan sebesar 53,52% dari

realisasi tahun 2023 atau sebesar Rp11.277.975.250,00 karena pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2024.

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.5.1.1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	31.333.077.600,00	31.333.077.600,00	100,00	20.888.718.400,00

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat tahun 2024 sebesar Rp31.333.077.600,00 diperuntukan untuk kegiatan pemilihan kepala daerah (PILKADA) dengan rincian:

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.5.1.1.1	Belanja Hibah uang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)	23.219.646.600,00	23.219.646.600,00	100,00	15.479.764.400,00
5.1.2.1.5.1.1.2	Belanja Hibah uang kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	8.113.431.000,00	8.113.431.000,00	100,00	**5.408.954.000,00**
		31.333.077.600,00	**31.333.077.600,00**	**100,00**	**20.888.718.400,00**

Pengampu Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.5.2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.184.950.000,00	1.016.092.050,00	85,75	182.476.000,00

Rincian realaisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat tahun 2024

NO	Nama Barang	Penerima Hibah	Nomor NPHD	NO Berita Acara	**Jumlah**
1	Pembangunan Ruang Kelas SPN Selopamioro	Kepala SPN Selopamioro	600.1.15.2/005-CK/DPUPKP/2025	600.1.15.2/BAST-005/CK/20	238.851.000,00
2	Pembangunan Pagar dan Gapura Polres Bantul	Kepala POLRES Bantul	600.1.15.2/150-SET/DPUPKP/2024	600.1.15.2/BAST-001/CK/20	450.587.000,00
3	Renovasi Gedung Kejaksaan Negeri Bantul	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	B/NK/29/XII/HUK.8.1.1./2024		144.664.000,00
4	Jasa Konsultasi Pengawasan Paket 1	-		-	54.112.500
5	Penyusunan DED Gedung Kejaksaan Negeri Bantul	-		-	74.259.000
6	Jasa Konsultan Perencanaan	-		-	44.067.000
7	Pengawasan Renovasi Gedung Kejaksaan Negeri Bantul	-		-	9.551.550
					1.016.092.050

5.1.2.1.5.2

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Hibah kepada BUMD	-	-		
Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0,00	0,00		3.710.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	3.710.000.000,00

Tahun Anggaran 2024 tidak ada Belanja Hibah Barang kepada BUMD

5.1.2.1.5.3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.5.3.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	55.917.513.723,00	55.047.732.980,00	98,44	20.278.376.717,00
5.1.2.1.5.3.2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.938.750.000,00	4.848.199.000,00	98,17	5.236.301.000,00
5.1.2.1.5.3.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.770.583.849,00	7.605.005.835,00	97,87	36.033.319.583,00
5.1.2.1.5.3.4	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.5.3.5	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	59.000.000,00	59.000.000,00	100,00	-
5.1.2.1.5.3.6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.978.905.400,00	1.978.902.567,00	100,00	
5.1.2.1.5.3.7	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	26.910.820.000,00	26.784.904.685,00	99,53	-
5.1.2.1.5.3.8	Jumlah	97.825.572.972,00	96.573.745.067,00	98,72	61.547.997.300,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 adalah :

	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.5.3.1.1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	41.881.987.900,00	41.702.973.980,00	99,57	17.649.009.717,00
5.1.2.1.5.3.1.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.035.525.823,00	13.344.759.000,00	95,08	2.629.367.000,00
	Jumlah	55.917.513.723,00	55.047.732.980,00	98,44	20.278.376.717,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.5.3.1.1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	41.881.987.900,00	41.702.973.980,00	99,57	17.649.009.717,00

Realisasi penggunaan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan per OPD pelaksana tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut :

Nomor	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DIKPORA	41.011.987.900,00	40.850.913.313,00	99,61	16.619.103.024,00

	Belanja Operasional Pendidikan non Formal	23.844.390.000,00	23.758.422.725,00	99,64	3.744.246.624,00
	BOP Kesetaraan	4.316.520.000,00	4.241.412.688,00	98,26	
	Hibah uang SD/MI swasta penyelenggara inklusi	8.540.767.500,00	8.540.767.500,00	100,00	8.419.830.000,00
	Hibah uang SMP Swasta, MTS Negeri	4.310.310.400,00	4.310.310.400,00	100,00	4.455.026.400,00
2	DINKES	545.000.000,00	527.060.667,00	96,71	729.906.693,00
	Hibah kepada PMI Bantul	545.000.000,00	527.060.667,00	96,71	529.906.693,00
	Hibah Kepada Yayasan Kanker Indonesia Cab Bantul th 2023	0,00	0,00		200.000.000,00
3	DPUPKP	325.000.000,00	325.000.000,00	100,00	300.000.000,00
	Hibah kepada Sekber Kartamantul				300.000.000,00
	Jumlah	41.881.987.900,00	41.702.973.980,00	99,57	17.649.009.717,00

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan per OPD Pelaksana adalah sebagai berikut :

Nomor	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DPUPKP	11.726.732.823,00	11.083.441.800,00	94,51	-
2	DIKPORA	2.260.286.000,00	2.214.617.200,00	97,98	-
	Rehab sedang Perpustakaan SMP	230.750.000	201.107.200	87,15	
	Mebel Sekolag SMP	39.600.000	38.610.000	97,50	
	Peralatan IPA SMP (DAK)	50.000.000	49.150.000	98,30	
	Pembangunan Gedung PAUD	1.872.536.000	1.858.750.000	99,26	
	alat Praktik peraga PAUD	67.400.000	67.000.000	99,41	
3	DPMK	-	-		2.330.576.000,00
	Hibah Air Minum PeKalurahanan (HAMP) kepada beberapa Kalurahan di wilayah Kabupaten Bantul	-	-	-	840.000.000,00
	Hibah Pengembangan sistem dan pengelolaan sampah kepada beberapa kelurahan di wilayah Kabupaten Bantul	-	-	-	960.000.000,00
	Hibah pekerjaan penanganan kawasan kumuh di beberapa kelurahan di wilayah Kabupaten Bantul	-	-	-	530.576.000,00
5	DINAS SOSIAL	48.507.000,00	46.700.000,00	96,27	269.910.000,00
	Hibah barang kepada LKSA Tunas Harapan & LKSA Bina Putra Bantul				80.000.000,00
	Hibah barang kepada PUSKESOS GIRIREJO & PUSKESOS DONOTIRTO	-	-	-	189.910.000,00
6	DKUKMP	-	-		28.881.000,00
	Hibah barang DED pembangunan Taman Kuliner Wukirsari (berupa Jasa konsultasi perencanaan CV PADHAWA JAYA RESWARA)	-	-	-	28.881.000,00

	Jumlah	14.035.525.823,00	13.344.759.000,00	105,18	2.629.367.000,00

Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut :

	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.5.3.2.1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.530.000.000,00	3.495.000.000,00	99,01	2.156.000.000,00
5.1.2.1.5.3.2.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.408.750.000,00	1.353.199.000,00	96,06	3.080.301.000,00
	Jumlah	4.938.750.000,00	4.848.199.000,00	98,17	5.236.301.000,00

Realisasi penggunaan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2024 sebagai berikut :

Nomor	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Keterangan
	BAGIAN KESRA				
1	Pimpinan Daerah Aisyiyah Bantul	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
2	Takmir Masjid Ainul Yaqin	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
15	Takmir Masjid Al Ikhlas Demangan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
16	Pimpinan Muslimat NU Anak Cabang Banguntapan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
16	Masjid Nurul Huda	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
17	Takmir Masjid Ar-Rohman	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
17	Pondok Pesantren Al-Mahali	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
18	Ta'mir Masjid Al-Imron	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
18	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantul	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
19	Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Bantul	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
19	Takmir Masjid Salamaini	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
20	Takmir Masjid As- Sami'un	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
20	Takmir Mushola Al-Huda	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
21	Pimpinan Anak Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kapanewon Piyungan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
21	Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pandak Barat	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
22	Takmir Mushola Al Mawaddah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
22	Takmir Masjid Al Mujahidin	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
23	Takmir Masjid Al-Istiqomah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	

23	Takmir Masjid Al-Fatah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
24	Masjid Baiturrahman	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
24	Takmir Masjid Al- Mukhlisin	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
25	PAC Muslimat NU Pleret	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
25	Takmir Masjid Baiturrohman	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
26	Takmir Masjid Al-Qodr	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
26	Masjid Al Huda	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
27	Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Bantul	115.000.000,00	115.000.000,00	100,00	
27	Takmir Musholla Baitul Mubarokah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
28	Masjid As Salam Sutopadan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
28	Takmir Masjid Ibrahim Baitussalam	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
29	Mushola Al Barokah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
29	Mushola Al Irsyad	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
30	Masjid Al Akbar	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
30	MUSHOLA AL MANAR	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
31	MASJID AL JIHAD	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
31	Masjid al Mubarok Geblagan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
32	Gereja Santo Martinus Bangunharjo	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
32	Takmir Masjid Baiturrahim	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
33	Masjid Nurhuda	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
33	Gereja St Lukas Tambran	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
34	DEWAN PASTORAL WILAYAH MATER DEI IMOGIRI	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
34	MAJELIS WAKIL CABANG NU KEC DLINGO	145.000.000,00	145.000.000,00	100,00	
35	MASJID AL MUTTAQIN	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
35	MASJID AN NUR	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
36	MASJID AL IKHWAN	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
36	TAKMIR MASJID AL IKHLAS	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
37	MASJID AR ROYAN	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
37	MASJID AN NIMATULLAH	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
38	MASJID AL GHOFUUR	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
38	MASJID MULTAZAM	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
39	TAKMIR MASJID ISLAMIC CENTER AL MUQORROBIN	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
39	MASJID AL MUTTAQIN	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
40	MUSHOLA AL ITTIHAD MWC NU SEDAYU	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	

40	TAKMIR MASJID AL HIDAYAH	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
41	TAKMIR MASJID AL IMAN	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
41	MASJID ITTIHATUL JANNAH	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
42	MASJID ROHMATULLOH,KALIASEM,BANGUNJIWO	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
42	MASJID BAITUL MUSLIMIN KAMIJORO	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
43	GEREJA KATHOLIK WILAYAH SANTA MARIA ROSARI PIJENAN	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
43	TAKMIR MUSHOLA AL BAROKAH	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
44	MASJID AR RIDLO	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	
44	JUMAKIR QQ TAKMIR MASJID IMADUDDIN	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
45	TAKMIR MUSHOLLA BAITURRAHMAT	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
45	MASJID AR ROHMAN	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
46	MASJID DARUSSALAM	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
46	TAKMIR MASJID AT TASYAKUR	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
47	MASJID AL HIKMAH	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
47	MASJID NURUL HUDA	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
48	TAKMIR MASJID MIFTAHUL HUDA KARASAN	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
48	PENGURUS MASJID AL MUHSININ	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
49	MASJID ALMAHDIYYIN	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
49	SIMON IDRIS S QQ TAKMIR MUSHOLA AL IKHLAS	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
50	MASJID AL HIKMAH GARJOYO	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
50	MUSHOLA AL FALAAH	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
51	TAKMIR MASJID NASRULLAH	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
52	MASJID AL-IKLAS SONOSEWU	35.000.000,00	0,00	-	tidak dicairkan karena status tanah tidak jelas
	Jumlah	3.530.000.000,00	3.495.000.000,00	99,01	

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar tahun 2024 sebagai berikut :

Nomor	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DKPP	1.408.750.000,00	1.353.199.000,00	96,06	3.080.301.000,00
	Hibah barang kepada kelompok tani antara lain berupa :				
	Cultivator, TR2(singkal), PTM, Hand sprayer, TR2 (Rotary), pengembangan demlpot, pertamanan, pembibitan dan rehabilitasi jaringan irigasi tetsier				
	Jumlah	1.408.750.000,00	1.353.199.000,00	96,06	3.080.301.000,00

5.1.2.1.5.3.3 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.5.3.3.1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.770.583.849,00	7.605.005.835,00	97,87	34.423.499.583,00
5.1.2.1.5.3.3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00		1.609.820.000,00
	Jumlah	7.770.583.849,00	7.605.005.835,00	97,87	36.033.319.583,00

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.5.3.3.1	DIKPORA				
	Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) Kabupaten Bantul	6.300.583.849,00	6.271.180.835,00	99,53	8.580.364.292,00
	Hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bantul	100.000.000,00	85.000.000,00	85,00	200.000.000,00
	Hibah kepada National Paralimpic Cpmmite (NPC) Kabupaten Bantul	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	1.200.000.000,00
	Hibah kepada Kwarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul	170.000.000,00	48.825.000,00	28,72	211.550.000,00
	Belanja BOP PAUD Swasta				24.231.585.291,00
	Jumlah	7.770.583.849,00	7.605.005.835,00	97,87	34.423.499.583,00

5.1.2.1.5.3.3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	29.403.014,00	1.609.820.000,00

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tahun 2024 tidak ada

5.1.2.1.5.3.3.2	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	250.000.000,00	250.000.000,00		0,00

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil tahun 2024 diberikan kepada Kelompok Desa Prima yang beranggotakan 25 perempuan yang melakukan usaha pada skala rumah tangga. Dana tersebut digunakan untuk menambah modal usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluaraha serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Pelaksana Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil tahun 2024 adaalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Aanak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Daftar Penerima Hibah tahun 2024:sebagai berikut:	Jumlah Penerimaan
Desa Prima Srikandi, Kasihan	25.000.000,00

Desa Prima Mukarabi, Piyungan	25.000.000,00
Desa Prima Manunggal Jaya, Muntuk, Dlingo	25.000.000,00
Desa Prima Mutiara Sealatan, Parangtritis, Kretek	25.000.000,00
Desa Prima Permata, Argodadi, sedayu	25.000.000,00
Desa Prima Rejo Makmur, Panjangrejo, Pundong	25.000.000,00
Desa Prima Mandiri Prima, Girirejo,Kasihan	25.000.000,00
Desa Prima Sendang Prima Sejahtera, Sendangsasri	25.000.000,00
Desa Prima Retno Makmur, Baturetno Banguntapan	25.000.000,00
Desa Prima Guwosari Makmur, Guwosari, Pajangan	25.000.000,00
Jumlah	250.000.000,00

5.1.2.1.5.3.5

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	59.000.000,00	59.000.000,00	100,00	0,00
	59.000.000,00	**59.000.000,00**		**0,00**

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2024 untuk dua LKS (PA Amanah Al Maauun dan PA Yapitu Al Huda Pusung.
Pelaksana Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah Dinas Sosial

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Hibah Dana BOS	-	-		18.867.111.504
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	-		18.867.111.504
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	-	-		8.756.763.396
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	-	-		8.756.763.396

Penganggaran Belanja Hibah Dana BOS direklas ke Belanja Hibah Dana BOSP-BOS

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.5.5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.978.905.400,00	1.978.902.567,00	100,00	1.962.313.400,00

Adapun rincian realisasi Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2024 dan 2023 . adalah sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)

1	DPC Partai Amanat Nasional	171.825.800	171.825.800	100,00	188.305.600,00
2	DPC Partai Kebangkitan Bangsa	307.876.800	307.876.800	100,00	295.762.600,00
3	DPC Partai NASDEM	48.970.200,00	48.968.500,00	100,00	83.946.000,00
4	DPC Partai GERINDRA	274.461.600,00	274.461.600,00	100,00	293.675.000,00
5	DPC Partai Demokrat	119.799.000,00	119.799.000,00	100,00	126.350.800,00
6	DPC PDI Perjuangan	506.426.600,00	506.426.600,00	100,00	467.156.600,00
7	DPC PPP	108.531.400,00	108.531.400,00	100,00	111.217.400,00
8	DPD PKS	203.823.200,00	203.823.200,00	100,00	193.001.000,00
9	DPD Partai Golkar	173.825.000,00	173.825.000,00	100,00	154.278.400,00
10	Partai Umat	35.003.000,00	35.003.000,00	100,00	-
11	DPC Partai Bulan Bintang	28.362.800,00	28.361.667,00	100,00	48.620.000,00
	Jumlah	1.978.905.400,00	1.978.902.567,00	100,00	1.962.313.400,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.5.3.7	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	26.910.820.000,00	26.784.904.685,00	99,53	-

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOSmerupakan transaksi non RKUD. Dana di transfer dari pemerintah pusat langsung ke rekening satuan pendidikan dengan rincian realisasi:

satuan Pendidikan SD Swasta	8.127.354.104,00
satuan Pendidikan SMP Swasta	18.657.550.581,00
	26.784.904.685,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.544.600.000,00	4.790.600.000,00	86,40	4.947.600.000,00

Rincian Anggaran dan realisasi belanja bansos tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.939.600.000,00	1.280.600.000,00	66,02	1.467.600.000,00
5.1.2.1.6.2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.605.000.000,00	3.510.000.000,00	97,36	3.480.000.000,00
	Jumlah	5.544.600.000,00	4.790.600.000,00	86,40	4.947.600.000,00

Rincian lebih lanjut dari Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan pengelompokannya dapat diuraikan sebagai berikut :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.939.600.000,00	1.280.600.000,00	66,02	1.467.600.000,00

Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu				-
DPUPKP	700.000.000,00	50.000.000,00	7,14	-
DINSOS	1.239.600.000,00	1.230.600.000,00	99,27	-
Jumlah	1.939.600.000,00	1.280.600.000,00	66,02	-

5.1.2.1.6.2 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
DINKES	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	400.000.000,00
DPUPKP	3.455.000.000,00	3.360.000.000,00	97,25	3.080.000.000,00
Jumlah	3.605.000.000,00	3.510.000.000,00	97,36	3.480.000.000,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.6.3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat				

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.	Belanja Modal	310.690.754.297,00	279.968.387.225,89	90,11	227.673.894.188,81

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal serta Aset Tetap Lainnya.
Rincian anggaran dan realisasi dari belanja modal TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.1	Belanja Tanah	-	-		-
5.1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	85.777.912.975,00	83.581.489.731,00	97,44	76.046.486.634,86
5.1.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	64.999.542.886,00	55.257.517.175,64	85,01	32.716.587.212,88
5.1.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	151.730.159.490,00	132.989.716.998,25	87,65	110.642.014.782,07
5.1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.083.138.946,00	8.041.511.571,00	99,49	8.268.805.559,00
5.1.2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	98.151.750,00	98,15	-
	Jumlah	310.690.754.297,00	279.968.387.225,89	90,11	227.673.894.188,81

Adapun rincian lebih lanjut terhadap Belanja Modal adalah sebagai berikut:

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak melakukan Belanja Tanah

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.777.912.975,00	83.581.489.731,00	97,44	76.046.486.634,86

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp83.581.489.731,00 atau mencapai 97,44% dari anggaran sebesar Rp85.777.912.975,00 dan mengalami peningkatan sebesar 9,91% dari realisas tahun 2023 yaitu sebesar Rp7.535.003.096,14

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2024 dan realisasi tahun 2023

	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Besar	2.661.112.105,00	2.632.913.600,00	98,94	1.975.428.296,00
5.1.2.2.2.2	Pengadaan Alat Angkutan	6.440.437.000,00	7.164.613.713,00	111,24	6.565.735.716,86
5.1.2.2.2.3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	521.815.375,00	509.145.750,00	97,57	186.275.825,00
5.1.2.2.2.4	Belanja Modal Alat Pertanian	33.475.000,00	33.475.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.2.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.313.464.152,00	13.003.413.808,00	97,67	7.220.019.852,00
5.1.2.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	478.728.000,00	469.207.199,00	98,01	1.291.281.590,00
5.1.2.2.2.7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	22.762.322.872,00	21.488.266.119,00	94,40	16.621.486.120,00
5.1.2.2.2.8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.862.872.000,00	1.828.005.246,00	98,13	3.103.142.800,00
5.1.2.2.2.9	Belanja Modal Komputer	9.138.239.900,00	8.848.233.028,00	96,83	10.890.988.945,00
5.1.2.2.2.10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	110.180.000,00	104.331.490,00	94,69	13.499.708,00
5.1.2.2.2.11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	419.535.000,00	404.810.750,00	96,49	247.376.000,00
5.1.2.2.2.12	Belanja Modal Alat Peraga	-	-		215.188.000,00
5.1.2.2.2.13	Belanja Modal Rambu-Rambu	171.765.500,00	169.419.500,00	98,63	99.678.000,00
5.1.2.2.2.14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	43.511.000,00	43.161.000,00	99,20	55.311.000,00
5.1.2.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.288.029.859,00	17.288.029.859,00	100,00	18.622.275.605,00
5.1.2.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.532.425.212,00	9.594.463.669,00	91,09	8.928.799.177,00
	Jumlah	85.777.912.975,00	83.581.489.731,00	97,44	76.046.486.634,86

Adapun rincian dari komponen belanja peralatan dan mesin adalah :

5.1.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Besar	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2.1.1	Belanja Modal Alat Besar Darat	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	1.218.911.296,00
5.1.2.2.2.1.1.1	Belanja Modal Mesin Proses	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	1.218.911.296,00
5.1.2.2.2.1.2	Belanja Modal Alat Bantu	2.411.112.105,00	2.382.913.600,00	98,83	756.517.000,00
5.1.2.2.2.1.2.1	Belanja Modal Compressor	13.323.000,00	12.397.000,00	93,05	0,00
5.1.2.2.2.1.2.2	Belanja Modal Electric Generating Set	2.214.150.000,00	2.190.257.100,00	98,92	715.054.000,00
5.1.2.2.2.1.2.3	Belanja Modal Pompa	104.117.860,00	101.359.500,00	97,35	41.463.000,00
5.1.2.2.2.1.2.4	Belanja Modal Mesin Bor	5.070.245,00	4.850.000,00	95,66	0,00
5.1.2.2.2.1.2.5	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	74.451.000,00	74.050.000,00	99,46	0,00
	Jumlah	2.661.112.105,00	2.632.913.600,00	98,94	1.975.428.296,00

5.1.2.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.222.437.000,00	6.948.323.713,00	111,67	6.492.805.716,86
5.1.2.2.2.2.1.1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	965.550.000,00	965.010.000,00	99,94	4.448.580.000,00
5.1.2.2.2.2.1.2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	525.000.000,00	474.159.000,00	90,32	0,00
5.1.2.2.2.2.1.3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.194.432.000,00	1.115.739.200,00	93,41	125.450.008,86
5.1.2.2.2.2.1.4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	187.455.000,00	163.064.626,00	86,99	802.523.948,00
5.1.2.2.2.2.1.5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	650.000.000,00	614.983.500,00	94,61	506.100.760,00
5.1.2.2.2.2.1.6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.700.000.000,00	3.615.367.387,00	133,90	610.151.000,00
5.1.2.2.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	218.000.000,00	216.290.000,00	99,22	72.930.000,00
5.1.2.2.2.2.1.1	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	218.000.000,00	216.290.000,00	99,22	72.930.000,00
	Jumlah	6.440.437.000,00	7.164.613.713,00	111,24	6.565.735.716,86

5.1.2.2.2.3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2.3.1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	73.271.715,00	62.872.000,00	85,81	5.700.000,00
5.1.2.2.2.3.1.1	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	15.600.000,00	14.837.000,00	95,11	-
5.1.2.2.2.3.1.2	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	473.415,00	445.000,00	94,00	-
5.1.2.2.2.3.1.3	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	3.116.880,00	3.108.000,00	99,72	-
5.1.2.2.2.3.1.4	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	7.603.500,00	7.500.000,00	98,64	-
5.1.2.2.2.3.1.5	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	43.123.500,00	33.652.000,00	78,04	-
5.1.2.2.2.3.1.6	Belanja Modal Peralatan Las	3.354.420,00	3.330.000,00	99,27	-
5.1.2.2.2.3.1.7	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	-	-		5.700.000,00
5.1.2.2.2.3.2	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	55.542.660,00	54.205.750,00	97,59	-
5.1.2.2.2.3.2.1	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	27.161.700,00	26.583.750,00	97,87	-
5.1.2.2.2.3.2.2	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	4.218.000,00	4.200.000,00	99,57	-
5.1.2.2.2.3.2.3	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	14.580.960,00	13.937.000,00	95,58	-
5.1.2.2.2.3.2.4	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	830.000,00	830.000,00	100,00	-
5.1.2.2.2.3.2.5	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	4.620.000,00	4.595.000,00	99,46	-
5.1.2.2.2.3.2.6	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	3.560.000,00	3.560.000,00	100,00	-
5.1.2.2.2.3.2.7	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	72.000,00	0,00	0,00	-
5.1.2.2.2.3.2.8	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	500.000,00	500.000,00	100,00	-

5.1.2.2.2.3.3	Belanja Modal Alat Ukur	393.001.000,00	392.068.000,00	99,76	180.575.825,00
5.1.2.2.2.3.3.1	Belanja Modal Alat Ukur Universal	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.2.2.2.3.3.2	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	-	-		5.000.000,00
5.1.2.2.2.3.3.3	Belanja Modal Alat Kalibrasi	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	14.999.985,00
5.1.2.2.2.3.3.4	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	0,00	0,00		7.867.000,00
5.1.2.2.2.3.3.5	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	22.799.600,00	21.998.000,00	96,48	18.700.000,00
5.1.2.2.2.3.3.6	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	12.120.000,00	12.070.000,00	99,59	19.349.840,00
5.1.2.2.2.3.3.7	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	346.581.400,00	346.500.000,00	99,98	24.860.000,00
5.1.2.2.2.3.3.8	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	-	-		89.799.000,00
	Jumlah	521.815.375,00	509.145.750,00	97,57	186.275.825,00

5.1.2.2.2.4	Belanja Modal Alat Pertanian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2.4.1	Belanja Modal Alat Pengolahan	33.475.000,00	33.475.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.2.2.2.4.1.1	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	8.875.000,00	8.875.000,00	100,00	0,00
5.1.2.2.2.4.1.2	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00		7.000.000,00
5.1.2.2.2.4.1.3	Belanja Modal Alat Processing	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.2.2.2.4.1.4	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	33.475.000,00	33.475.000,00	100,00	10.000.000,00

5.1.2.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2.5.1	Belanja Modal Alat Kantor	9.443.748.752,00	9.319.131.675,00	98,68	2.782.923.757,00
5.1.2.2.2.5.1.1	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	474.999.062,00	415.220.000,00	87,41	420.570.000,00
5.1.2.2.2.5.1.2	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.968.749.690,00	8.903.911.675,00	99,28	2.362.353.757,00
5.1.2.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.869.415.400,00	3.684.282.133,00	95,22	4.249.674.095,00
5.1.2.2.2.5.2.1	Belanja Modal Mebel	1.423.570.000,00	1.385.671.890,00	97,34	651.904.655,00
5.1.2.2.2.5.2.2	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0,00	0,00		7.050.000,00
5.1.2.2.2.5.2.3	Belanja Modal Alat Pembersih	123.500.000,00	117.410.000,00	95,07	0,00
5.1.2.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin	750.800.000,00	711.964.190,00	94,83	1.010.232.500,00
5.1.2.2.2.5.2.5	Belanja Modal Alat Dapur	45.375.000,00	44.425.000,00	97,91	24.296.400,00
5.1.2.2.2.5.2.6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	492.020.400,00	475.041.173,00	96,55	2.177.475.240,00
5.1.2.2.2.5.2.7	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.034.150.000,00	949.769.880,00	91,84	378.715.300,00
5.1.2.2.2.5.3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	300.000,00	0,00	0,00	187.422.000,00
5.1.2.2.2.5.3.1	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00		4.980.000,00

5.1.2.2.2.5.3.2	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00		49.152.000,00
5.1.2.2.2.5.3.3	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00		118.000.000,00
5.1.2.2.2.5.3.4	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	300.000,00	0,00	0,00	15.290.000,00
	Jumlah	13.313.464.152,00	13.003.413.808,00	97,67	7.220.019.852,00

5.1.2.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	370.628.000,00	361.782.200,00	97,61	327.528.140,00
5.1.2.2.2.6.1.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	243.228.000,00	240.882.200,00	99,04	29.727.890,00
5.1.2.2.2.6.1.2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	77.400.000,00	71.400.000,00	92,25	274.200.250,00
5.1.2.2.2.6.1.3	Belanja Modal Peralatan Cetak	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	0,00
5.1.2.2.2.6.1.4	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00		23.600.000,00
5.1.2.2.2.6.2	Belanja Modal Alat Komunikasi	100.600.000,00	99.925.000,00	99,33	527.814.150,00
5.1.2.2.2.6.2.1	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	100.600.000,00	99.925.000,00	99,33	74.712.000,00
5.1.2.2.2.6.2.2	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00		57.794.150,00
5.1.2.2.2.6.2.3	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00		395.308.000,00
5.1.2.2.2.6.3	Belanja Modal Peralatan Pemancar	7.500.000,00	7.499.999,00	100,00	435.939.300,00
5.1.2.2.2.6.3.1	Belanja Modal Peralatan Antena UHF	7.500.000,00	7.499.999,00	100,00	0,00
5.1.2.2.2.6.3.2	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00		360.475.300,00
5.1.2.2.2.6.3.3	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00		75.464.000,00
	Jumlah	478.728.000,00	469.207.199,00	98,01	1.291.281.590,00

5.1.2.2.2.7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2.7.1	Belanja Modal Alat Kedokteran	589.827.372,00	447.882.162,00	75,93	16.418.180.920,00
5.1.2.2.2.7.1.1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	445.287.372,00	322.605.300,00	72,45	16.255.620.412,00
5.1.2.2.2.7.1.2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	76.200.000,00	63.683.862,00	83,57	0,00
5.1.2.2.2.7.1.3	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	53.000.000,00	52.903.000,00	99,82	162.560.508,00
5.1.2.2.2.7.1.4	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	13.500.000,00	6.850.000,00	50,74	0,00
5.1.2.2.2.7.1.5	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00	0,00
5.1.2.2.2.7.2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	22.172.495.500,00	21.040.383.957,00	94,89	203.305.200,00
5.1.2.2.2.7.2.1	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	0,00	0,00		16.000.000,00
5.1.2.2.2.7.2.2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	22.172.495.500,00	21.040.383.957,00	94,89	187.305.200,00
	Jumlah	22.762.322.872,00	21.488.266.119,00	94,40	16.621.486.120,00

5.1.2.2.2.8	Belanja Modal Alat Laboratorium	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)

5.1.2.2.2.8.1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.352.700.000,00	1.338.520.000,00	98,95	2.880.824.800,00
5.1.2.2.2.8.1.1	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00		2.527.041.000,00
5.1.2.2.2.8.1.2	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	0,00	0,00		353.783.800,00
5.1.2.2.2.8.1.3	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	950.000.000,00	947.000.000,00	99,68	0,00
5.1.2.2.2.8.1.4	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	2.700.000,00	2.600.000,00	96,30	0,00
5.1.2.2.2.8.1.5	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	400.000.000,00	388.920.000,00	97,23	0,00
5.1.2.2.2.8.2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	100.000.000,00	98.000.000,00	98,00	0,00
5.1.2.2.2.8.2.1	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	100.000.000,00	98.000.000,00	98,00	0,00
5.1.2.2.2.8.3	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	66.500.000,00	59.410.246,00	89,34	72.579.000,00
5.1.2.2.2.8.3.1	Belanja Modal Modular Counting and Scientific Electronic	0,00	0,00		39.000.000,00
5.1.2.2.2.8.3.2	Belanja Modal System/Power Supply	66.500.000,00	59.410.246,00	89,34	33.579.000,00
5.1.2.2.2.8.4	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	42.797.000,00	36.600.000,00	85,52	149.739.000,00
5.1.2.2.2.8.4.1	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	0,00		16.428.000,00
5.1.2.2.2.8.4.2	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	42.797.000,00	36.600.000,00	85,52	0,00
5.1.2.2.2.8.4.3	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	0,00	0,00		133.311.000,00
5.1.2.2.2.8.1	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	300.875.000,00	295.475.000,00	98,21	0,00
5.1.2.2.2.8.1.1	Belanja Modal Peralatan Umum	300.875.000,00	295.475.000,00	98,21	0,00
	Jumlah	1.862.872.000,00	1.828.005.246,00	98,13	3.103.142.800,00

5.1.2.2.2.9	Belanja Modal Komputer	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2.9.1	Belanja Modal Komputer Unit	4.197.305.840,00	3.958.678.999,00	94,31	7.708.140.282,00
5.1.2.2.2.9.1.1	Belanja Modal Komputer Jaringan	11.100.000,00	11.050.000,00	99,55	0,00
5.1.2.2.2.9.1.2	Belanja Modal Personal Computer	4.186.205.840,00	3.947.628.999,00	94,30	7.706.840.282,00
5.1.2.2.2.9.1.3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00		1.300.000,00
5.1.2.2.2.9.1.4	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.940.934.060,00	4.889.554.029,00	98,96	3.182.848.663,00
5.1.2.2.2.9.1.5	Belanja Modal Peralatan Mainframe	1.700.000,00	1.600.000,00	94,12	0,00
5.1.2.2.2.9.1.6	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	451.534.060,00	401.924.543,00	89,01	265.047.740,00
5.1.2.2.2.9.1.7	Belanja Modal Peralatan Jaringan	4.429.500.000,00	4.427.829.486,00	99,96	2.694.674.023,00
5.1.2.2.2.9.1.8	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	58.200.000,00	58.200.000,00	100,00	223.126.900,00
	Jumlah	9.138.239.900,00	8.848.233.028,00	96,83	10.890.988.945,00

5.1.2.2.2.10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2.10.1	Belanja Modal Sumur				
5.1.2.2.2.10.1.1	Belanja Modal Sumur Pemboran	110.180.000,00	104.331.490,00	94,69	13.499.708,00

	Jumlah	110.180.000,00	104.331.490,00	94,69	13.499.708,00

5.1.2.2.2.11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2.11.1	Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00		199.000.000,00
5.1.2.2.2.11.1.1	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	0,00	0,00		199.000.000,00
5.1.2.2.2.11.2	Belanja Modal Alat Pelindung	300.750.000,00	289.860.750,00	96,38	6.600.000,00
5.1.2.2.2.11.2.1	Belanja Modal Baju Pengaman	33.000.000,00	32.197.500,00	97,57	0,00
5.1.2.2.2.11.2.2	Belanja Modal Masker	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
5.1.2.2.2.11.2.3	Belanja Modal Topi Kerja	140.050.000,00	130.503.250,00	93,18	6.600.000,00
5.1.2.2.2.11.2.4	Belanja Modal Sabuk Pengaman	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
5.1.2.2.2.11.2.5	Belanja Modal Sepatu Lapangan	122.900.000,00	122.360.000,00	99,56	0,00
5.1.2.2.2.11.3	Belanja Modal Alat SAR	118.785.000,00	114.950.000,00	96,77	0,00
5.1.2.2.2.11.3.1	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	118.785.000,00	114.950.000,00	96,77	0,00
5.1.2.2.2.11.1	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	-	-		41.776.000,00
5.1.2.2.2.11.1.1	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	-	-		41.776.000,00
	Jumlah	419.535.000	404.810.750	96	247.376.000,00

5.1.2.2.2.12	Belanja Modal Alat Peraga	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2.12.1.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	-	-		215.188.000,00
5.1.2.2.2.12.1.1	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	-	-		26.000.000,00
5.1.2.2.2.12.1.2	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	-	-		189.188.000,00
	Jumlah				215.188.000,00

5.1.2.2.2.13	Belanja Modal Rambu-Rambu	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2.12..1	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat				
5.1.2.2.2.12..1.1	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	171.765.500,00	169.419.500,00	98,63	99.678.000,00
	Jumlah	171.765.500,00	169.419.500,00	98,63	99.678.000,00

5.1.2.2.2.14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2..14.1	Belanja Modal Peralatan Olahraga	43.511.000,00	43.161.000,00	99,20	55.311.000,00
5.1.2.2.2..14.1.1	Belanja Modal Peralatan Permainan	42.350.000,00	42.000.000,00	99,17	55.311.000,00
5.1.2.2.2..14.1.2	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	1.161.000,00	1.161.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	43.511.000,00	43.161.000,00	99,20	55.311.000,00

5.1.2.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2.15.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS				
5.1.2.2.2.15.1.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.288.029.859,00	17.288.029.859,00	100,00	18.622.275.605,00
	Jumlah	17.288.029.859,00	17.288.029.859,00	100,00	18.622.275.605,00

5.1.2.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2.16.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				
5.1.2.2.2.16.1.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.532.425.212,00	9.594.463.669,00	91,09	8.928.799.177,00
	Jumlah	10.532.425.212,00	9.594.463.669,00	91,09	8.928.799.177,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	64.999.542.886,00	55.257.517.175,64	85,01	32.716.587.212,88

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp55.257.517.175,64 atau mencapai 85,01% dari anggaran sebesar Rp64.999.542.886,00 dan mengalami peningkatan sebesar 68,90% dari realisas tahun 2023 yaitu sebesar Rp22.540.929.962,76

Adapun rincian dari komponen belanja peralatan dan mesin adalah :

5.1.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.3.1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	64.302.142.886,00	54.594.759.251,64	84,90	32.618.382.552,88
5.1.2.2.3.2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	402.400.000,00	402.101.473,00	99,93	42.230.000,00
5.1.2.2.3.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	295.000.000,00	260.656.451,00	88,36	55.974.660,00
	Jumlah	64.999.542.886,00	55.257.517.175,64	85,01	32.716.587.212,88

Rincian dari belanja modal gedung dan bangunan sebagai berikut:

5.1.2.2.3.1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.3.1.1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	27.153.763.030,00	22.735.685.756,39	83,73	26.444.651.409,00
5.1.2.2.3.1.2	Belanja Modal Bangunan Gudang	172.124.064,00	170.472.000,00	99,04	197.727.000,00
5.1.2.2.3.1.3	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00		143.124.000,00
5.1.2.2.3.1.4	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	15.422.897.011,00	14.798.643.511,00	95,95	0,00
5.1.2.2.3.1.5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00		1.126.680.000,00
5.1.2.2.3.1.6	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.928.302.336,00	1.748.754.238,00	90,69	2.479.537.009,00
5.1.2.2.3.1.7	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	75.000.000,00	73.750.000,00	98,33	0,00
5.1.2.2.3.1.8	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	10.315.675.000,00	10.267.738.940,02	99,54	0,00
5.1.2.2.3.1.9	Belanja Modal Bangunan Terbuka	7.186.000.000,00	2.945.859.156,69	40,99	0,00

5.1.2.2.3.1.10	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00		129.506.000,00
5.1.2.2.3.1.11	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	36.000.000,00	35.285.000,00	98,01	18.100.000,00
5.1.2.2.3.1.12	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00		709.701.000,00
5.1.2.2.3.1.13	Belanja Modal Bangunan Parkir	109.591.162,00	108.891.659,00	99,36	547.626.433,65
5.1.2.2.3.1.14	Belanja Modal Taman	1.902.790.283,00	1.709.678.990,54	89,85	821.729.701,23
	Jumlah	64.302.142.886,00	54.594.759.251,64	84,90	32.618.382.552,88

Dalam realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 ada pelaksanaan pekerjaan belanja modal bangunan terbuka (Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo) dengan nilai kontrak Rp5.731.299.411,00 dan telah terealisasi sebesar Rp4.011.909.587,00. Akan tetapi dalam perjalanannya pekerjaan tidak dapat selesai 100% (seratus%) sesuai dengan kontrak pekerjaan dan telah dilakukan pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pariwisata secara sepihak karena wanprestasi pekerjaan. Atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal bangunan terbuka (Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo) ini telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Bantul .

Berdasarkan Hasil Reviu dari Inspektorat sebagai berikut:

Total kelebihan bayar kepada penyedia jasa a.n CV. Cipto Wening sebesar Rp1.066.050.430,31 dengan rincian rekomendasi BPK sebesar Rp1.058.070.286,01 dan hasil opname Inspektorat sebesar Rp7.980.144,30. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan setor kembali ke Kas Daerah pada tahun anggaran 2025 (lunas) dan setoran tersebut sudah dilakukan kontra pos pada belanja modal bangunan terbuka (Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo)

Terhadap perolehan aset dari realisasi belanja modal ini belum kami akui dalam penambahan aset di akun Gedung dan Bangunan.

5.1.2.2.3.2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.3.2.1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas				
5.1.2.2.3.2.1.1	Belanja Modal Pagar	222.400.000,00	222.101.473,00	99,87	42.230.000,00
5.1.2.2.3.2.1.2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	402.400.000,00	402.101.473,00	99,93	42.230.000,00

5.1.2.2.3.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.3.31	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				
5.1.2.2.3.3.1.1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	295.000.000,00	260.656.451,00	88,36	55.974.660,00
	Jumlah	295.000.000,00	260.656.451,00	88,36	55.974.660,00

5.1.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.4.1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	78.286.563.745,00	67.758.642.851,12	86,55	72.723.465.899,07
5.1.2.2.4.2	Belanja Modal Bangunan Air	26.134.799.855,00	20.803.802.135,75	79,60	14.937.726.904,00
5.1.2.2.4.3	Belanja Modal Instalasi	28.992.265.000,00	26.572.100.811,38	91,65	4.264.455.679,00
5.1.2.2.4.4	Belanja Modal Jaringan	18.316.530.890,00	17.855.171.200,00	97,48	18.716.366.300,00
	Jumlah	151.730.159.490,00	132.989.716.998,25	87,65	110.642.014.782,07

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.4.1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	151.730.159.490,00	133.156.486.568,99	87,76	110.642.014.782,07

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2014 sebesar Rp133.156.486.568,99 atau mencapai 87,76% dari anggaran sebesar Rp151.730.159.490,00 dan menglami peningkatan sebesar 20,35% dari realisasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp22.514.471.786,92

5.1.2.2.4.1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.4.1.1	Belanja Modal Jalan	76.705.245.152,00	66.205.037.551,12	86,31	60.768.152.899,07
5.1.2.2.4.1.1.1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	74.576.685.564,00	64.414.258.567,12	86,37	44.699.158.249,00
5.1.2.2.4.1.1.2	Belanja Modal Jalan Desa	2.106.632.600,00	1.768.987.000,00	83,97	15.894.943.377,00
5.1.2.2.4.1.1.3	Belanja Modal Jalan Khusus	21.926.988,00	21.791.984,00	99,38	174.051.273,07
5.1.2.2.4.1.2	Belanja Modal Jembatan	1.581.318.593,00	1.553.605.300,00	98,25	11.955.313.000,00
5.1.2.2.4.1.2.1	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.581.318.593,00	1.553.605.300,00	98,25	10.561.957.000,00
5.1.2.2.4.1.2.2	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	-	-		1.393.356.000,00
	Jumlah	78.286.563.745,00	67.758.642.851,12	86,55	72.723.465.899,07

5.1.2.2.4.2	Belanja Modal Bangunan Air	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.4.2.1.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	12.767.194.928,00	9.796.728.710,00	76,73	7.066.547.300,00
5.1.2.2.4.2.1.1	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	7.242.431.056,00	5.874.410.250,00	81,11	6.566.948.400,00
5.1.2.2.4.2.1.2	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	4.923.740.137,00	3.419.265.460,00	69,44	100.110.900,00
5.1.2.2.4.2.1.3	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	-	-		147.851.000,00
5.1.2.2.4.2.1.4	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	-	-		251.637.000,00
5.1.2.2.4.2.1.5	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	601.023.735,00	503.053.000,00	83,70	0,00
5.1.2.2.4.2.2.	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	-	-		297.249.000,00
5.1.2.2.4.2.2.1	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	-	-		297.249.000,00
5.1.2.2.4.2.3.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.411.982.927,00	1.810.977.000,00	75,08	1.650.026.600,00
5.1.2.2.4.2.3.1	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2.411.982.927,00	1.810.977.000,00	75,08	1.650.026.600,00
5.1.2.2.4.2.4	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	-	-		931.650.000,00
5.1.2.2.4.2.4.1	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	-		931.650.000,00

5.1.2.2.4.2.5.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	10.955.622.000,00	9.196.096.425,75	83,94	4.992.254.004,00
5.1.2.2.4.2.5.1	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	10.770.622.000,00	9.013.937.850,00	83,69	4.807.770.600,00
5.1.2.2.4.2.5.2	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	185.000.000,00	182.158.575,75	98,46	184.483.404,00
	Jumlah	26.134.799.855,00	20.803.802.135,75	79,60	14.937.726.904,00

5.1.2.2.4.3	Belanja Modal Instalasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.4.3.1.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.957.500.000,00	2.956.231.700,00	99,96	16.029.000,00
5.1.2.2.4.3.1.1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.957.500.000,00	2.956.231.700,00	99,96	16.029.000,00
5.1.2.2.4.3.2.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00		1.431.257.500,00
5.1.2.2.4.3.2.1	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	0,00	0,00		1.431.257.500,00
5.1.2.2.4.3.3.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	26.034.765.000,00	23.615.869.111,38	90,71	2.817.169.179,00
5.1.2.2.4.3.3.1	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	12.486.570.000,00	10.572.498.894,38	84,67	0,00
5.1.2.2.4.3.3.2	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	13.548.195.000,00	13.043.370.217,00	96,27	2.817.169.179,00
	Jumlah	28.992.265.000,00	26.572.100.811,38	91,65	4.264.455.679,00

5.1.2.2.4.4	Belanja Modal Jaringan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.4.4.1	Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.512.460.400,00	3.386.367.310,00	96,41	58.841.100,00
5.1.2.2.4.4.1.1	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	1.189.450.000,00	1.068.130.000,00	89,80	58.841.100,00
5.1.2.2.4.4.1.2	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	2.323.010.400,00	2.318.237.310,00	99,79	0,00
5.1.2.2.4.4.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	14.804.070.490,00	14.468.803.890,00	97,74	18.657.525.200,00
5.1.2.2.4.4.2.1	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	14.804.070.490,00	14.468.803.890,00	97,74	18.657.525.200,00
	Jumlah	18.316.530.890,00	17.855.171.200,00	97,48	18.716.366.300,00

5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	226.150.000,00	218.827.500,00	96,76	6.000.000,00
5.1.2.2.5.2	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00		90.000.000,00
5.1.2.2.5.3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00		1.011.013.569,00
5.1.2.2.5.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.806.988.946,00	7.806.988.946,00	100,00	7.112.878.260,00
5.1.2.2.5.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	50.000.000,00	15.695.125,00	31,39	48.913.730,00

	Jumlah	8.083.138.946,00	8.041.511.571,00	99,49	8.268.805.559,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.4.1	Belanja ModalAset Tetap Lainnya	8.083.138.946,00	8.041.511.571,00	87,76	110.642.014.782,07

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp8.041.511.571,00 atau mencapai 99,49% dari anggaran sebesar Rp8.083.138.946,00 dan mengalami penurunan sebesar 2,75% dari realisasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp227.293.988,00

5.1.2.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	226.150.000,00	218.827.500,00	96,76	2.000.000,00
5.1.2.2.5.1.1.1	Belanja Modal Buku Umum	25.500.000,00	25.177.500,00	98,74	2.000.000,00
5.1.2.2.5.1.1.2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	200.650.000,00	193.650.000,00	96,51	0,00
5.1.2.2.5.1.2	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	-	-		4.000.000,00
5.1.2.2.5.1.2.1	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	-	-		4.000.000,00
	Jumlah	226.150.000,00	218.827.500,00		6.000.000,00

5.1.2.2.5.2	Belanja Modal Tanaman	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.5.2.1.	Belanja Modal Tanaman	-	-		90.000.000,00
5.1.2.2.5.2.1.1.	Belanja Modal Tanaman	-	-		90.000.000,00
	Jumlah	-	-		90.000.000,00

5.1.2.2.5.3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.5.3.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00		1.011.013.569,00
5.1.2.2.5.3.1.1	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	0,00	0,00		850.190.569,00
5.1.2.2.5.3.1.2	Belanja Modal Software	0,00	0,00		160.823.000,00
	Jumlah	0,00	0,00		1.011.013.569,00

5.1.2.2.5.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.5.4.1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS				

5.1.2.2.5.4.1.1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.806.988.946,00	7.806.988.946,00	100,00	7.112.878.260,00
	Jumlah	7.806.988.946,00	7.806.988.946,00	100,00	7.112.878.260,00

5.1.2.2.5.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.5.5.1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD				
5.12.2.5.5.1.1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	50.000.000,00	15.695.125,00	31,39	48.913.730,00
	Jumlah	50.000.000,00	15.695.125,00	31,39	48.913.730,00

5.1.2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud				
5.1.2.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	98.151.750,00	98,15	-
5.1.2.2.6.1.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	100.000.000,00	98.151.750,00	98,15	-
	Jumlah	100.000.000,00	98.151.750,00	98,15	-

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.3	Belanja Tak Terduga (BTT)	30.083.577.116,00	7.518.166.014,00	24,99	1.122.989.975,00

Sebagai dasar penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT), di Kabupaten Bantul telah diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Bealanja Tidak Terduga

Rincian penggunaan Belanja Tak terduga Tahun 2024 sebagai berikut :

Nomor	URAIAN PENGGUNAAN	JUMLAH	OPD PENGAMPU	NOMOR SK BUPATI
1	Belanja Bantuan Sosial untuk Jaring Pengaman Sosial untuk untuk pemberian nutrisi bagi bayi / anak ODHA	42.000.000,00	DINSOS	SK NO. 99 Tahun 2024
2	Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial untuk evaluasi dan tindak lanjut penanganan 4 (empat) jenazah terlantar	1.850.000,00	DINSOS	SK NO. 165 Tahun 2024
3	Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial untuk evaluasi dan tindak lanjut penanganan jenasah terlantar / pemulasaran jenasah.	850.000,00	DINSOS	SK NO. 207 Tahun 2024

4	Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial untuk biaya pemulangan /pengiriman orang terlantar / gelandangan ke Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara serta untuk biaya bantuan sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesehajretaan Sosial) anak/ balita penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus	10.779.600,00	DINSOS	SK NO. 225 Tahun 2024
5	Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial untuk biaya pemulangan /pengiriman orang terlantar / gelandangan ke Kabupaten Badung Bali.	900.000,00	DINSOS	SK NO. 241 Tahun 2024
6	Bantuan Sosial jaring pengaman sosial untuk pemberian nutrisi bagi anak dari PPKS dengan kekebalan tubuh yang rentan dan Bahan Medis Habis Pakai serta untuk pembayaran Sewa Ambulans guna pemakaman jenazah terlantar	17.058.702,00	DINSOS	SK NO. 412 Tahun 2024
7	Bantuan Sosial jaring pengaman sosial untuk Penjemputan warga Binaan Sosial ke Panti Sosial Bina Laras Harapan 3 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	8.976.529,00	DINSOS	SK NO. 528 Tahun 2024
8	Bantuan Sosial jaring pengaman sosial untuk pembiayaan penjemputan dan pendampingan kepulangan PPKS orang terlantar dengan gangguang jiwa di Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus;	1.786.000,00	DINSOS	SK NO. 552 Tahun 2024
9	biaya pengobatan keracunan massal pada tanggal 10 September 2024 .	85.395.038,00	DINKES	SK NO. 516 Tahun 2024
10	Pembuatan TPSS Puncak Bucu , Pembuatan TPSS Wonoroto dan Rehabilitasi dan Operasional TPS3R Sokowaten.	2.450.219.500,00	DLH	SK NO. 344 Tahun 2024
11	Optimalisasi TPS3R di Sokowaten Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan serta TPSS di Dusun Wonoroto Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden	2.268.607.290,00	DLH	SK NO. 162 Tahun 2024
12	pengelolaan sampah bulan Oktober sampai dengan Desember 2024.	2.196.759.460,00	DLH	SK NO. 515 Tahun 2024
13	pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah yang dibayar wajib pajak pada tahun anggaran sebelumya.	57.785.000,00	BPKPAD	SK NO. 103 Tahun 2024
14	pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah yang dibayar wajib pajak pada tahun anggaran sebelumya	125.850.485,00	BPKPAD	SK NO. 190 Tahun 2024
15	untuk pembayaran pengembalian kelebihan pajak restoran.	870.000,00	BPKPAD	SK NO. 231 Tahun 2024
16	untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	92.239.000,00	BPKPAD	SK NO. 379 Tahun 2024
17	pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	106.941.500,00	BPKPAD	SK NO. 539 Tahun 2024
18	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah karena hasil penilaian kelayakan RPTKA Tahun 2023.	4.425.000,00	NAKERTRANS	SK NO. 136 Tahun 2024
19	Biaya Pemeriksaan pasien Kecelakaan Lalu Lintas Bus di Bukit Bego Imogiri serta untuk Kegiatan Yustisi bagi pelanggaran pembuang sampah liar di wilayah Kabupaten Bantul	11.858.610,00	RSUD & POLPP	SK NO. 182 Tahun 2024
20	operasi yustisi bagi pelanggar pembuang sampah liar di wilayah Kabupaten Bantul periode bulan oktober , november dan desember 2024 dan belanja bantuan sosial jaring pengaman sosial untuk pemulangan orang terlantar ke Tasikmalaya Jawa Barat.	25.136.000,00	SATPOL PP & DINSOS	SK NO. 517 Tahun 2024
21	Bantuan sosial jaring pengaman sosial untuk biaya penanganan jenasah terlantar dan Bantuan sosial jaring pengaman sosial untuk biaya penanganan jenasah terlantar	7.878.300,00	DINSOS	SK NO. 576 Tahun 2024
	Jumlah	7.518.166.014,00	-	

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.4	BELANJA TRANSFER	356.777.615.599,00	356.026.220.783,00	99,79	342.301.803.637,00

Realisasi Belanja Transfer tahun 2024 sebesar Rp356.026.220.783,00 atau 99,79% . Realisasi tahun 2024 tersebut mmengalami peningkatan sebesar 4,01% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp13.724.417.146,00.

	Rincian belanja transfer adalah :	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Kalurahan	35.625.921.569,00	35.620.232.553,00	99,98	30.677.039.097,00
5.1.2.4.2	Belanja Bantuan Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Kalurahan	321.151.694.030,00	320.405.988.230,00	99,77	311.624.764.540,00
		356.777.615.599,00	356.026.220.783,00	99,79	342.301.803.637,00

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing pos belanja transfer adalah :

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Kalurahan	35.625.921.569,00	35.620.232.553,00	99,98	30.677.039.097,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bagi Hasil dari Pemerintah Kabupaten Bantul ke seluruh Kalurahan selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023 berupa pembagian hasil pajak dan bagi hasil retribusi yang ditentukan oleh peraturan perundangan dan pembagiannya diformulasikan sesuai dengan hasil pendapatan perwilayah, rincian sebagai berikut:

	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kalurahan	30.456.991.909,00	30.451.302.893,00	99,98	26.764.870.787,00
5.1.2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kalurahan	5.168.929.660,00	5.168.929.660,00	100,00	3.912.168.310,00
		35.625.921.569,00	35.620.232.553,00	99,98	30.677.039.097,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kalurahan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap Kkalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	KALURAHAN	BAGI HASIL PAJAK 2023		BAGI HASIL PAJAK 2022	
		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	ANGGARAN 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pundong				
	Seloharjo	246.938.309,00	246.938.309,00	234.116.000,00	234.116.000,00
	Panjangrejo	254.048.993,00	254.048.993,00	254.616.000,00	254.616.000,00
	Sri Hardono	264.152.854,00	264.152.854,00	281.616.000,00	281.616.000,00
2	Pandak				
	Catuharjo	259.400.600,00	259.400.600,00	243.964.000,00	243.964.000,00
	Triharjo	277.287.805,00	277.287.805,00	299.095.000,00	299.095.000,00
	Gilangharjo	349.395.639,00	345.424.783,00	331.710.000,00	331.710.000,00

	Wijirejo	287.304.708,00	287.304.708,00	285.987.000,00	285.987.000,00
3	Kasihan				
	Bangujiwo	848.808.200,00	848.808.200,00	881.741.000,00	881.741.000,00
	Tirtonirmolo	594.583.317,00	594.583.317,00	536.905.000,00	536.905.000,00
	Tamantirto	773.040.663,00	773.040.663,00	694.115.000,00	694.115.000,00
	Ngestiharjo	1.246.203.394,00	1.246.203.394,00	907.003.000,00	907.003.000,00
4	Sanden				
	Gadingsari	250.766.235,00	250.766.235,00	233.796.000,00	233.796.000,00
	Gadingharjo	233.673.846,00	233.673.846,00	253.712.000,00	253.712.000,00
	Srigading	285.635.760,00	285.635.760,00	292.022.000,00	292.022.000,00
	Murtigading	308.203.021,00	308.203.021,00	286.152.000,00	286.152.000,00
5	Bantul				
	Palbapang	326.556.069,00	326.556.069,00	330.602.000,00	330.602.000,00
	Ringinharjo	278.656.060,00	278.656.060,00	268.415.000,00	268.415.000,00
	Bantul	642.380.148,00	642.380.148,00	505.975.000,00	505.975.000,00
	Trirenggo	495.082.317,00	495.082.317,00	453.019.000,00	453.019.000,00
	Sabdodadi	334.130.532,00	334.130.532,00	302.921.000,00	302.921.000,00
6	Sewon				
	Pendowoharjo	543.496.599,00	541.779.439,00	510.769.787,00	510.769.787,00
	Timbulharjo	759.267.767,00	759.267.767,00	563.161.000,00	563.161.000,00
	Bangunharjo	943.848.973,00	943.848.973,00	795.317.000,00	795.317.000,00
	Panggungharjo	829.901.203,00	829.901.203,00	638.575.000,00	638.575.000,00
7	Banguntapan				
	Baturetno	739.940.446,00	739.940.446,00	593.603.000,00	593.603.000,00
	Banguntapan	1.470.971.388,00	1.470.970.388,00	1.003.493.000,00	1.003.493.000,00
	Jagalan	263.851.032,00	263.851.032,00	212.541.000,00	212.541.000,00
	Singosaren	384.143.898,00	384.143.898,00	287.681.000,00	287.681.000,00
	Jambitan	495.141.169,00	495.141.169,00	425.793.000,00	425.793.000,00
	Potorono	694.298.627,00	694.298.627,00	575.443.000,00	575.443.000,00
	Tamanan	763.066.146,00	763.066.146,00	521.982.000,00	521.982.000,00
	Wirokerten	719.177.388,00	719.177.388,00	541.472.000,00	541.472.000,00
8	Imogiri				
	Selopamioro	280.977.106,00	280.977.106,00	250.895.000,00	250.895.000,00
	Sriharjo	277.632.394,00	277.632.394,00	248.792.000,00	248.792.000,00

	Wukirsari	337.058.274,00	337.058.274,00	299.265.000,00	299.265.000,00
	Kebonagung	229.231.462,00	229.231.462,00	226.034.000,00	226.034.000,00
	Karangtengah	224.788.335,00	224.788.335,00	211.352.000,00	211.352.000,00
	Girirejo	222.149.973,00	222.149.973,00	213.217.000,00	213.217.000,00
	Karangtalun	225.429.002,00	225.429.002,00	231.617.000,00	231.617.000,00
	Imogiri	257.657.601,00	257.657.601,00	260.401.000,00	260.401.000,00
9	Dlingo				
	Mangunan	225.748.707,00	225.748.707,00	211.677.000,00	211.677.000,00
	Muntuk	235.132.659,00	235.132.659,00	200.380.000,00	200.380.000,00
	Dlingo	224.930.886,00	224.930.886,00	197.371.000,00	197.371.000,00
	Temuwuh	227.244.094,00	227.244.094,00	215.864.000,00	215.864.000,00
	Terong	227.239.238,00	227.239.238,00	208.075.000,00	208.075.000,00
	Jatimulyo	221.671.796,00	221.671.796,00	199.713.000,00	199.713.000,00
10	Srandakan				
	Poncosari	339.998.622,00	339.998.622,00	316.496.000,00	316.496.000,00
	Trimurti	282.458.310,00	282.458.310,00	254.758.000,00	254.758.000,00
11	Kretek				
	Tirtomulyo	236.353.225,00	236.353.225,00	218.979.000,00	218.979.000,00
	Parangtritis	258.027.897,00	258.027.897,00	254.734.000,00	254.734.000,00
	Donotirto	295.341.784,00	295.341.784,00	264.684.000,00	264.684.000,00
	Tirtosari	228.933.458,00	228.933.458,00	203.931.000,00	203.931.000,00
	Tirtohargo	227.143.803,00	227.143.803,00	205.225.000,00	205.225.000,00
12	Jetis				
	Patalan	282.258.810,00	282.258.810,00	299.301.000,00	299.301.000,00
	Canden	262.081.436,00	262.081.436,00	248.634.000,00	248.634.000,00
	Sumber Agung	276.466.574,00	276.466.574,00	296.023.000,00	296.023.000,00
	Trimulyo	332.181.458,00	332.181.458,00	311.101.000,00	311.101.000,00
13	Pajangan				
	Triwidadi	249.472.334,00	249.472.334,00	281.396.000,00	281.396.000,00
	Sendangsari	312.864.556,00	312.864.556,00	305.021.000,00	305.021.000,00
	Guwosari	318.451.041,00	318.451.041,00	293.380.000,00	293.380.000,00
14	Piyungan				
	Sitimulyo	559.034.697,00	559.034.697,00	486.484.000,00	486.484.000,00
	Srimulyo	557.907.787,00	557.907.787,00	428.029.000,00	428.029.000,00

	Srimartani	388.229.666,00	388.229.666,00	347.654.000,00	347.654.000,00
15	Sedayu				
	Argodadi	328.401.164,00	328.401.164,00	314.970.000,00	314.970.000,00
	Argorejo	493.948.113,00	493.948.113,00	471.329.000,00	471.329.000,00
	Argosari	370.070.590,00	370.070.590,00	317.543.000,00	317.543.000,00
	Argomulyo	612.499.742,00	612.499.742,00	564.391.000,00	564.391.000,00
16	Pleret				
	Wonokromo	626.401.589,00	626.401.589,00	481.989.000,00	481.989.000,00
	Pleret	448.794.708,00	448.794.708,00	345.085.000,00	345.085.000,00
	Segoroyoso	248.889.717,00	248.889.717,00	238.070.000,00	238.070.000,00
	Bawuran	237.516.306,00	237.516.306,00	286.891.000,00	286.891.000,00
	Wonolelo	229.285.907,00	229.285.907,00	205.460.000,00	205.460.000,00
17	Bambanglipuro				
	Sidomulyo	312.555.222,00	312.555.222,00	265.388.000,00	265.388.000,00
	Mulyodadi	264.652.896,00	264.652.896,00	251.500.000,00	251.500.000,00
	Sumber Mulyo	296.525.864,00	296.525.864,00	284.460.000,00	284.460.000,00
	Jumlah	30.456.991.909,00	30.451.302.893,00	26.764.871.787,00	26.764.871.787,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kalurahan tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2024 tentang tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Kalurahan dan jasa pemungutan Kepada Kalurahan Parangtritis Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	Kalurahan	BAGI HASIL RETRIBUSI		BAGI HASIL RETRIBUSI	
		Anggaran 2024(Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	ANGGARAN 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pundong				
	Seloharjo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Panjangrejo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Sri Hardono	37.451.400,00	37.451.400,00	33.898.300,00	33.898.300,00
2	Pandak				
	Catuharjo	32.173.100,00	32.173.100,00	32.106.200,00	32.106.200,00
	Triharjo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Gilangharjo	35.365.800,00	35.365.800,00	33.568.300,00	33.568.300,00
	Wijirejo	38.466.700,00	38.466.700,00	36.676.300,00	36.676.300,00
3	Kasihan				
	Bangujiwo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Tirtonirmolo	52.164.100,00	52.164.100,00	44.747.300,00	44.747.300,00

	Tamantirto	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Ngestiharjo	31.862.200,00	31.862.200,00	32.080.900,00	32.080.900,00
4	Sanden				
	Gadingsari	50.806.800,00	50.806.800,00	104.127.300,00	104.127.300,00
	Gadingharjo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Srigading	189.517.900,00	189.517.900,00	103.287.300,00	103.287.300,00
	Murtigading	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
5	Bantul				
	Palbapang	32.033.800,00	32.033.800,00	32.547.300,00	32.547.300,00
	Ringinharjo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Bantul	71.330.100,00	71.330.100,00	60.617.300,00	60.617.300,00
	Trirenggo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Sabdodadi	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
6	Sewon				
	Pendowoharjo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Timbulharjo	34.147.900,00	34.147.900,00	35.098.300,00	35.098.300,00
	Bangunharjo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Panggungharjo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
7	Banguntapan				
	Baturetno	33.975.400,00	33.975.400,00	33.693.300,00	33.693.300,00
	Banguntapan	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Jagalan	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Singosaren	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Jambitan	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Potorono	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Tamanan	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Wirokerten	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
8	Imogiri				
	Selopamioro	32.884.000,00	32.884.000,00	32.924.300,00	32.924.300,00
	Sriharjo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Wukirsari	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Kebonagung	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Karangtengah	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Girirejo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00

	Karangtalun	34.557.200,00	34.557.200,00	33.711.300,00	33.711.300,00
	Imogiri	53.505.800,00	53.505.800,00	50.847.300,00	50.847.300,00
9	Dlingo				
	Mangunan	31.297.300,00	31.297.300,00	87.767.300,00	87.767.300,00
	Muntuk	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Dlingo	32.790.900,00	32.790.900,00	32.616.300,00	32.616.300,00
	Temuwuh	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Terong	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Jatimulyo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
10	Srandakan				
	Poncosari	94.992.300,00	94.992.300,00	101.937.300,00	101.937.300,00
	Trimurti	34.086.900,00	34.086.900,00	33.738.300,00	33.738.300,00
11	Kretek				
	Tirtomulyo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Parangtritis	1.176.161.010,00	1.176.161.010,00	1.181.297.300,00	1.181.297.300,00
		1.256.761.350,00	1.256.761.350,00		
	Donotirto	38.598.300,00	38.598.300,00	37.773.300,00	37.773.300,00
	Tirtosari	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Tirtohargo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
12	Jetis				
	Patalan	31.297.300,00	31.297.300,00	31.338.210,00	31.338.210,00
	Canden	31.353.300,00	31.353.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Sumber Agung	37.070.700,00	37.070.700,00	35.217.300,00	35.217.300,00
	Trimulyo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
13	Pajangan				
	Triwidadi	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Sendangsari	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Guwosari	36.951.100,00	36.951.100,00	40.523.300,00	40.523.300,00
14	Piyungan				
	Sitimulyo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Srimulyo	57.052.000,00	57.052.000,00	50.877.300,00	50.877.300,00
	Srimartani	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
15	Sedayu				
	Argodadi	32.247.400,00	32.247.400,00	32.347.300,00	32.347.300,00

	Argorejo	33.045.400,00	33.045.400,00	32.659.300,00	32.659.300,00
	Argosari	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Argomulyo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
16	Pleret				
	Wonokromo	35.667.700,00	35.667.700,00	33.884.300,00	33.884.300,00
	Pleret	36.924.900,00	36.924.900,00	37.363.300,00	37.363.300,00
	Segoroyoso	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Bawuran	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
	Wonolelo	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00
17	Bambanglipuro				
	Sidomulyo	32.756.000,00	32.756.000,00	32.776.300,00	32.776.300,00
	Mulyodadi	31.798.700,00	31.798.700,00	31.582.700,00	31.582.700,00
	Sumber Mulyo	33.348.300,00	33.348.300,00	32.754.300,00	32.754.300,00
	Jumlah	5.168.929.660,00	5.168.929.660,00	3.912.168.310,00	3.912.168.310,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	321.151.694.030,00	320.405.988.230,00	99,77	311.624.764.540,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2024 sebesar Rp320.405.988.230,00 atau 99,77% dari anggaran sebesar Rp321.151.694.030,00. Realisasi tahun 2024 tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,82% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp8.781.223.690,00

Rincian Belanja Bantuan Keuangan adalah :

5.1.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	120.347.030,00	120.347.030,00	100,00	100.151.140,00
5.1.2.4.2.1.1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	120.347.030,00	120.347.030,00	100,00	100.151.140,00
5.1.2.4.2.1.2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	120.347.030,00	120.347.030,00	100,00	100.151.140,00
5.1.2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	321.031.347.000,00	320.285.641.200,00	99,77	311.524.613.400,00
5.1.2.4.2.1.1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-		97.236.088.400,00
5.1.2.4.2.1.2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-		97.236.088.400,00
5.1.2.4.2.1.2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	321.031.347.000,00	320.285.641.200,00	99,77	214.288.525.000,00
5.1.2.4.2.1.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-		214.288.525.000,00
5.1.2.4.2.1.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	91.221.560.000,00	90.475.854.200,00	99,18	-
5.1.2.4.2.1.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	127.393.902.000,00	127.393.902.000,00	100,00	-

5.1.2.4.2.1.2.4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	102.415.885.000,00	102.415.885.000,00	100,00	-
Jumlah		321.151.694.030,00	320.405.988.230,00	99,77	311.624.764.540,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	120.347.030,00	120.347.030,00	100,00	100.151.140,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi tahun 2023 digunakan untuk sharing kontribusi pengelolaan IPAL Sewon

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kalurahan				

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kalurahan tahun 2024 tidak ada

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.4.2.1.2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	321.031.347.000,00	320.285.641.200,00	99,78	214.288.525.000,00
5.1.2.4.2.1.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-		214.288.525.000,00
5.1.2.4.2.1.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	91.221.560.000,00	90.475.854.200,00	99,22	-
5.1.2.4.2.1.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	127.393.902.000,00	127.393.902.000,00	100,00	-
5.1.2.4.2.1.2.4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	102.415.885.000,00	102.415.885.000,00	100,00	-

5.1.2.4.2.1.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	91.221.560.000,00	90.475.854.200,00	99,22	-

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.4.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kalurahan	91.221.560.000,00	90.475.854.200,00		214.288.525.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kalurahan digunakan untuk :

Nomor	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bantuan Keuangan BBGRM bagi juara lomba Kalurahan		-		-
2	Bantuan Keuangan Khusus untuk 75 Kalurahan se Kabupaten Bantul	30.061.560.000,00	29.853.060.000,00	99,31	26.719.500.000,00
3	Bantuan Keuangan Khusus untuk Pedukuhan se Kabupaten Bantul	46.650.000.000,00	46.650.000.000,00	100,00	46.650.000.000,00
4	Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Tanah Kas Kalurahan	2.500.000.000,00	2.462.794.200,00	98,51	2.500.000.000,00

5	Bantuan Keuangan Khusus P2MD	8.110.000.000,00	7.860.000.000,00	96,92	4.900.000.000,00
6	Bantuan Keuangan Khusus PILURDES				
7	Bantuan Keuangan Khusus TMMD	2.020.000.000,00	2.020.000.000,00	100,00	3.640.000.000,00
8	Bantuan Keuangan Khusus Rehap Pasar Kalurahan	1.880.000.000,00	1.380.000.000,00	73,40	600.000.000,00
9	Bantuan Keuangan Khusus Dana Kalurahan	-	-		126.479.025.000,00
10	Bantuan Keuangan Khusus Dana Insentif Kalurahan	-	-		2.600.000.000,00
11	Reward Dikal	-	250.000.000,00		
12	Bantuan Sarpras Lapangan Desa Timbulharjo				200.000.000,00
	Jumlah	91.221.560.000,00	90.475.854.200,00	99,18	214.288.525.000,00

-

Penjelasan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kalurahan sebagai berikut :
Bantuan Keuangan Khusus tahun 2024 untuk 75 Kalurahan se Kabupaten Bantul
Rincian Bantuan Keuangan Khusus tahun 2024 dan 2023 untuk 75 Kalurahan se Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Nomor	NAMA KALURAHAN	Realisasi 2024 BERDASARKAN SK	Realisasi 2023 BERDASARKAN SK	Bertambah/(Berkurang)
1	Kalurahan Poncosari	129.700.000	105.000.000,00	24.700.000,00
2	Kalurahan Trimurti	70.000.000	345.000.000,00	(275.000.000,00)
3	Kalurahan Gadingsari	289.860.000	162.500.000,00	127.360.000,00
4	Kalurahan Gadingharjo	120.000.000		120.000.000,00
5	Kalurahan Srigading	460.000.000	259.000.000,00	201.000.000,00
6	Kalurahan Murtigading	260.000.000	220.000.000,00	40.000.000,00
7	Kalurahan Tirtohargo	30.000.000	150.000.000,00	(120.000.000,00)
8	Kalurahan Parangtritis	30.000.000	100.000.000,00	(70.000.000,00)
9	Kalurahan Donotirto	210.000.000	260.000.000,00	(50.000.000,00)
10	Kalurahan Tirtomulyo	360.000.000	430.000.000,00	(70.000.000,00)
11	Kalurahan Tirtosari	40.000.000	60.000.000,00	(20.000.000,00)
12	Kalurahan Panjangrejo	300.000.000	155.000.000,00	145.000.000,00
13	Kalurahan Sidomulyo	420.000.000	500.000.000,00	(80.000.000,00)
14	Kalurahan Sumbermulyo	100.000.000	220.000.000,00	(120.000.000,00)
15	Kalurahan Mulyodadi	240.000.000	165.000.000,00	75.000.000,00
16	Kalurahan Caturharjo	190.000.000	180.000.000,00	10.000.000,00
17	Kalurahan Gilangharjo	580.000.000	565.000.000,00	15.000.000,00
18	Kalurahan Wijirejo	210.000.000	220.000.000,00	(10.000.000,00)
19	Kalurahan Palbapang	826.500.000	625.000.000,00	201.500.000,00
20	Kalurahan Trirenggo	572.000.000	300.000.000,00	272.000.000,00
21	Kalurahan Sabdodadi	280.000.000	100.000.000,00	180.000.000,00

22	Kalurahan Patalan	380.000.000	125.000.000,00	255.000.000,00
23	Kalurahan Sumberagung	120.000.000	545.000.000,00	(425.000.000,00)
24	Kalurahan Selopamioro	917.000.000	920.000.000,00	(3.000.000,00)
25	Kalurahan Sriharjo	657.000.000	140.000.000,00	517.000.000,00
26	Kalurahan Karangtalun		120.000.000,00	(120.000.000,00)
27	Kalurahan Imogiri	84.500.000	350.000.000,00	(265.500.000,00)
28	Kalurahan Wukirsari	1.507.000.000	2.143.000.000,00	(636.000.000,00)
29	Kalurahan Jatimulyo	570.000.000	620.000.000,00	(50.000.000,00)
30	Kalurahan Mangunan	830.000.000	740.000.000,00	90.000.000,00
31	Kalurahan Temuwuh	930.000.000	400.000.000,00	530.000.000,00
32	Kalurahan Terong	160.000.000	260.000.000,00	(100.000.000,00)
33	Kalurahan Muntuk	490.000.000	1.105.000.000,00	(615.000.000,00)
34	Kalurahan Wonokromo	290.000.000	240.000.000,00	50.000.000,00
35	Kalurahan Pleret	505.000.000	630.000.000,00	(125.000.000,00)
36	Kalurahan Segoroyoso	440.000.000	210.000.000,00	230.000.000,00
37	Kalurahan Bawuran	176.000.000	120.000.000,00	56.000.000,00
38	Kalurahan Wonolelo	280.000.000	300.000.000,00	(20.000.000,00)
39	Kalurahan Sitimulyo	110.000.000	330.000.000,00	(220.000.000,00)
40	Kalurahan Srimulyo	455.000.000	350.000.000,00	105.000.000,00
41	Kalurahan Jagalan	50.000.000		50.000.000,00
42	Kalurahan Potorono	220.000.000	90.000.000,00	130.000.000,00
43	Kalurahan Banguntapan	485.000.000	275.000.000,00	210.000.000,00
44	Kalurahan Tamanan	384.000.000	270.000.000,00	114.000.000,00
45	Kalurahan Pendowoharjo	260.000.000	130.000.000,00	130.000.000,00
46	Kalurahan Panggungharjo	730.000.000	395.000.000,00	335.000.000,00
47	Kalurahan Tirtonirmolo	570.000.000	825.000.000,00	(255.000.000,00)
48	Kalurahan Bangunjiwo	1.515.000.000	1.170.000.000,00	345.000.000,00
49	Kalurahan Triwidadi	480.000.000	410.000.000,00	70.000.000,00
50	Kalurahan Sendangsari	451.500.000	280.000.000,00	171.500.000,00
51	Kalurahan Guwosari	480.000.000	340.000.000,00	140.000.000,00
52	Kalurahan Argodadi	220.000.000	355.000.000,00	(135.000.000,00)
53	Kalurahan Argosari	270.000.000	110.000.000,00	160.000.000,00
54	Kalurahan Argomulyo	580.000.000	665.000.000,00	(85.000.000,00)
55	Kalurahan Argorejo	170.000.000	150.000.000,00	20.000.000,00
56	Kalurahan Tamantirto	370.000.000	200.000.000,00	170.000.000,00
57	Kalurahan Karangtengah	520.000.000	280.000.000,00	240.000.000,00

58	Kalurahan Girirejo	210.000.000	240.000.000,00	(30.000.000,00)
59	Kalurahan Seloharjo	670.000.000	90.000.000,00	580.000.000,00
60	Kalurahan Timbulharjo	470.000.000	740.000.000,00	(270.000.000,00)
61	Kalurahan Ngestiharjo	760.000.000	505.000.000,00	255.000.000,00
62	Kalurahan Bangunharjo	1.278.000.000	830.000.000,00	448.000.000,00
63	Kalurahan Baturetno	120.000.000	270.000.000,00	(150.000.000,00)
64	Kalurahan Jambidan	320.000.000	395.000.000,00	(75.000.000,00)
65	Kalurahan Srimartani	545.000.000	180.000.000,00	365.000.000,00
66	Kalurahan Dlingo	110.000.000	180.000.000,00	(70.000.000,00)
67	Kalurahan Bantul	900.000.000	270.000.000,00	630.000.000,00
68	Kalurahan Trimulyo	590.000.000	793.000.000,00	(203.000.000,00)
69	Kalurahan Canden	110.000.000	497.000.000,00	(387.000.000,00)
70	Kalurahan Triharjo	275.000.000	340.000.000,00	(65.000.000,00)
71	Kalurahan Srihardono	470.000.000	425.000.000,00	45.000.000,00
72	Kalurahan Wirokerten	380.000.000	250.000.000,00	130.000.000,00
73	Kalurahan Kebonagung	30.000.000		30.000.000,00
74	Kalurahan Ringinharjo	130.000.000		130.000.000,00
75	Kalurahan Singosaren	110.000.000		110.000.000,00
	Jumlah	29.853.060.000,00	26.719.500.000,00	3.133.560.000,00

Bantuan Keuangan Khusus tahun 2024 dan 2023 untuk Pedukuhan se Kabupaten Bantul
Daftar peneriman bantuan keuangan adalah :

Nomor	NAMA KALURAHAN	Realisasi 2024 BERDASARKAN SK	Realisasi 2023 BERDASARKAN SK	Bertambah/(Berkurang)
1	Kalurahan Argodadi	700.000.000	700.000.000,00	-
2	Kalurahan Argorejo	650.000.000	650.000.000,00	-
3	Kalurahan Argosari	650.000.000	650.000.000,00	-
4	Kalurahan Argomulyo	700.000.000	700.000.000,00	-
5	Kalurahan Triwidadi	1.100.000.000	1.100.000.000,00	-
6	Kalurahan Sendangsari	900.000.000	900.000.000,00	-
7	Kalurahan Guwosari	750.000.000	750.000.000,00	-
8	Kalurahan Tamantirto	500.000.000	500.000.000,00	-
9	Kalurahan Bangunjiwo	950.000.000	750.000.000,00	200.000.000,00
10	Kalurahan Ngestiharjo	600.000.000	600.000.000,00	-
11	Kalurahan Tirtonirmolo	600.000.000	600.000.000,00	-
12	Kalurahan Bangunharjo	850.000.000	1.050.000.000,00	(200.000.000,00)
13	Kalurahan Panggungharjo	700.000.000	700.000.000,00	-

14	Kalurahan Pendowoharjo	800.000.000	800.000.000,00	-
15	Kalurahan Timbulharjo	800.000.000	800.000.000,00	-
16	Kalurahan Tamanan	450.000.000	450.000.000,00	-
17	Kalurahan Singosaren	150.000.000	150.000.000,00	-
18	Kalurahan Banguntapan	550.000.000	550.000.000,00	-
19	Kalurahan Jambidan	350.000.000	400.000.000,00	(50.000.000,00)
20	Kalurahan Potorono	450.000.000	450.000.000,00	-
21	Kalurahan Jagalan	100.000.000	100.000.000,00	-
22	Kalurahan Wirokerten	400.000.000	400.000.000,00	-
23	Kalurahan Baturetno	400.000.000	400.000.000,00	-
24	Kalurahan Srimartani	850.000.000	850.000.000,00	-
25	Kalurahan Srimulyo	1.100.000.000	1.100.000.000,00	-
26	Kalurahan Sitimulyo	1.050.000.000	1.000.000.000,00	50.000.000,00
27	Kalurahan Segoroyoso	450.000.000	450.000.000,00	-
28	Kalurahan Wonokromo	600.000.000	600.000.000,00	-
29	Kalurahan Wonolelo	400.000.000	400.000.000,00	-
30	Kalurahan Pleret	550.000.000	550.000.000,00	-
31	Kalurahan Bawuran	350.000.000	350.000.000,00	-
32	Kalurahan Terong	450.000.000	450.000.000,00	-
33	Kalurahan Mangunan	300.000.000	300.000.000,00	-
34	Kalurahan Temuwuh	600.000.000	600.000.000,00	-
35	Kalurahan Dlingo	500.000.000	500.000.000,00	-
36	Kalurahan Jatimulyo	500.000.000	500.000.000,00	-
37	Kalurahan Muntuk	550.000.000	550.000.000,00	-
38	Kalurahan Karangtengah	100.000.000	300.000.000,00	(200.000.000,00)
39	Kalurahan Imogiri	200.000.000	200.000.000,00	-
40	Kalurahan Karangtalun	450.000.000	250.000.000,00	200.000.000,00
41	Kalurahan Kebonagung	250.000.000	250.000.000,00	-
42	Kalurahan Sriharjo	650.000.000	650.000.000,00	-
43	Kalurahan Girirejo	250.000.000	250.000.000,00	-
44	Kalurahan Selopamioro	900.000.000	900.000.000,00	-
45	Kalurahan Wukirsari	800.000.000	800.000.000,00	-
46	Kalurahan Sumberagung	850.000.000	850.000.000,00	-
47	Kalurahan Patalan	1.000.000.000	1.000.000.000,00	-
48	Kalurahan Canden	750.000.000	750.000.000,00	-
49	Kalurahan Trimulyo	600.000.000	600.000.000,00	-

50	Kalurahan Ringinharjo	300.000.000	300.000.000,00	-
51	Kalurahan Trirenggo	850.000.000	850.000.000,00	-
52	Kalurahan Palbapang	500.000.000	500.000.000,00	-
53	Kalurahan Bantul	600.000.000	600.000.000,00	-
54	Kalurahan Sabdodadi	250.000.000	250.000.000,00	-
55	Kalurahan Gilangharjo	750.000.000	750.000.000,00	-
56	Kalurahan Triharjo	500.000.000	500.000.000,00	-
57	Kalurahan Wijirejo	500.000.000	500.000.000,00	-
58	Kalurahan Caturharjo	700.000.000	700.000.000,00	-
59	Kalurahan Sumbermulyo	800.000.000	800.000.000,00	-
60	Kalurahan Sidomulyo	750.000.000	750.000.000,00	-
61	Kalurahan Mulyodadi	700.000.000	700.000.000,00	-
62	Kalurahan Srihardono	850.000.000	850.000.000,00	-
63	Kalurahan Panjangrejo	800.000.000	800.000.000,00	-
64	Kalurahan Seloharjo	800.000.000	800.000.000,00	-
65	Kalurahan Donotirto	650.000.000	650.000.000,00	-
66	Kalurahan Tirtomulyo	750.000.000	750.000.000,00	-
67	Kalurahan Tirtohargo	300.000.000	300.000.000,00	-
68	Kalurahan Tirtosari	350.000.000	350.000.000,00	-
69	Kalurahan Parangtritis	550.000.000	550.000.000,00	-
70	Kalurahan Srigading	1.000.000.000	1.000.000.000,00	-
71	Kalurahan Gadingharjo	300.000.000	300.000.000,00	-
72	Kalurahan Murtigading	900.000.000	900.000.000,00	-
73	Kalurahan Gadingsari	900.000.000	900.000.000,00	-
74	Kalurahan Poncosari	1.200.000.000	1.200.000.000,00	-
75	Kalurahan Trimurti	950.000.000	950.000.000,00	-
	Jumlah	46.650.000.000	46.650.000.000	-

Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Tanah Kas Kalurahan Tahun 2024

Nomor	NAMA KALURAHAN	Realisasi 2024 BERDASARKAN SK No 36	Realisasi 2023 BERDASARKAN SK	Bertambah/(Berkurang)
1	Kalurahan Seloharjo	8.540.000,00	7.040.000,00	1.500.000,00
2	Kalurahan Bantul	67.234.200,00	61.421.800,00	5.812.400,00
3	Kalurahan Trirenggo	58.229.150,00	58.229.150,00	-
4	Kalurahan Sumberagung	43.087.000,00	44.517.000,00	(1.430.000,00)
5	Kalurahan Trimulyo	28.175.000,00	28.175.000,00	-

6	Kalurahan Girirejo	9.960.000,00	9.960.000,00	-
7	Kalurahan Imogiri	12.968.000,00	12.968.000,00	-
8	Kalurahan Karangtalun	15.496.000,00	15.496.000,00	-
9	Kalurahan Sriharjo	30.900.000,00	28.740.000,00	2.160.000,00
10	Kalurahan Wukirsari	31.768.000,00	31.768.000,00	-
11	Kalurahan Karangtengah	7.844.000,00	5.594.000,00	2.250.000,00
12	Kalurahan Keboangung	14.896.000,00	13.638.000,00	1.258.000,00
13	Kalurahan Selopamioro	44.305.800,00	44.305.800,00	-
14	Kalurahan Trimurti	23.144.000,00	27.764.000,00	(4.620.000,00)
15	Kalurahan Poncosari	20.462.400,00	20.462.400,00	-
16	Kalurahan Pleret	8.536.000,00	8.536.000,00	-
17	Kalurahan Bawuran	16.170.000,00	16.170.000,00	-
18	Kalurahan Wonolelo	7.216.000,00	5.660.150,00	1.555.850,00
19	Kalurahan Segoroyoso	23.405.800,00	23.405.800,00	-
20	Kalurahan Wonokromo	43.804.200,00	30.278.600,00	13.525.600,00
21	Kalurahan Muntuk	32.768.000,00	32.774.000,00	(6.000,00)
22	Kalurahan Dlingo	37.754.000,00	37.754.000,00	-
23	Kalurahan Terong	27.330.000,00	27.330.000,00	-
24	Kalurahan Temuwuh	68.442.000,00	60.844.000,00	7.598.000,00
25	Kalurahan Mangunan	15.920.000,00	23.920.000,00	(8.000.000,00)
26	Kalurahan Jambidan	10.989.000,00	10.989.000,00	-
27	Kalurahan Jagalan	7.614.600,00	2.330.000,00	5.284.600,00
28	Kalurahan Potorono	21.253.750,00	21.253.750,00	-
29	Kalurahan Singosaren	7.710.000,00	5.460.000,00	2.250.000,00
30	Kalurahan Wirokerten	16.627.600,00	16.627.600,00	-
31	Kalurahan Ngestiharjo	35.145.250,00	35.145.250,00	-
32	Kalurahan Bangunjiwo	60.700.200,00	63.870.400,00	(3.170.200,00)
33	Kalurahan Timbulharjo	78.608.250,00	78.608.250,00	-
34	Kalurahan Panggungharjo	36.686.300,00	36.686.300,00	-
35	Kalurahan Sidomulyo	94.410.750,00	94.410.750,00	-
36	Kalurahan Srimartani	50.715.000,00	50.715.000,00	-
37	Kalurahan Srimulyo	60.098.500,00	60.098.500,00	-
38	Kalurahan Sitimulyo	33.649.000,00	33.649.000,00	-
39	Kalurahan Caturharjo	31.380.000,00	31.852.000,00	(472.000,00)
40	Kalurahan Triharjo	29.472.000,00	29.472.000,00	-
41	Kalurahan Gilangharjo	115.588.550,00	126.123.550,00	(10.535.000,00)

42	Kalurahan Wijirejo	49.630.000,00	49.630.000,00	-
43	Kalurahan Donotirto	45.241.900,00	46.327.600,00	(1.085.700,00)
44	Kalurahan Tirtosari	11.814.000,00	11.814.000,00	-
45	Kalurahan Tamantirto	46.767.600,00	45.887.600,00	880.000,00
46	Kalurahan Tirtonirmolo	35.574.000,00	34.874.400,00	699.600,00
47	Kalurahan Sabdodadi	13.213.000,00	13.213.200,00	(200,00)
48	Kalurahan Palbapang	34.118.700,00	34.118.700,00	-
49	Kalurahan Jatimulyo	29.702.000,00	29.558.000,00	144.000,00
50	Kalurahan Baturetno	37.805.950,00	35.858.200,00	1.947.750,00
51	Kalurahan Banguntapan	47.613.300,00	45.503.850,00	2.109.450,00
52	Kalurahan Tamanan	21.863.800,00	21.863.800,00	-
53	Kalurahan Argodadi	37.206.000,00	35.134.000,00	2.072.000,00
54	Kalurahan Argorejo	15.300.000,00	15.300.000,00	-
55	Kalurahan Argosari	10.397.200,00	10.397.200,00	-
56	Kalurahan Argomulyo	54.100.900,00	54.100.900,00	-
57	Kalurahan Bangunharjo	59.223.850,00	65.905.000,00	(6.681.150,00)
58	Kalurahan Sumbermulyo	23.789.500,00	23.789.500,00	-
59	Kalurahan Mulyodadi	34.232.000,00	34.232.000,00	-
60	Kalurahan Srihardono	75.508.400,00	81.338.400,00	(5.830.000,00)
61	Kalurahan Panjangrejo	11.550.000,00	11.550.000,00	-
62	Kalurahan Canden	23.408.000,00	28.468.000,00	(5.060.000,00)
63	Kalurahan Patalan	49.159.250,00	46.650.450,00	2.508.800,00
64	Kalurahan Guwosari	17.454.000,00	18.718.000,00	(1.264.000,00)
65	Kalurahan Triwidadi	26.000.000,00	26.000.000,00	-
66	Kalurahan Sendangsari	43.720.000,00	56.320.000,00	(12.600.000,00)
67	Kalurahan Pendowoharjo	35.525.000,00	35.525.000,00	-
68	Kalurahan Ringinharjo	10.560.000,00	10.560.000,00	-
69	Kalurahan Parangtritis	22.862.000,00	22.862.000,00	-
70	Kalurahan Tirtohargo	9.604.000,00	9.604.000,00	-
71	Kalurahan Gadingsari	46.762.750,00	38.354.750,00	8.408.000,00
72	Kalurahan Srigading	17.208.400,00	17.208.400,00	-
73	Kalurahan Murtigading	87.824.000,00	86.614.000,00	1.210.000,00
74	Kalurahan Gadingharjo	13.540.000,00	13.540.000,00	-
75	Kalurahan Tirtomulyo	12.716.000,00	15.136.000,00	(2.420.000,00)
	Jumlah	2.499.999.800,00	2.500.000.000,00	(200,00)

Bantuan Keuangan Khusus P2MD

Realisasi 'Bantuan Keuangan Khusus P2MD tahun 2024 dan 2023 per Kalurahan sebagaai berikut :

Nomor	NAMA KALURAHAN	Realisasi 2024 BERDASARKAN SK	Realisasi 2023 BERDASARKAN SK	Bertambah/(Berkurang)
1	Kalurahan Triwidadi	460.000.000,00	255.000.000,00	205.000.000,00
2	Kalurahan Bangunjiwo	440.000.000,00	170.000.000,00	270.000.000,00
3	Kalurahan Tamantirto	165.000.000,00	100.000.000,00	65.000.000,00
4	Kalurahan Pendowoharjo	170.000.000,00	90.000.000,00	80.000.000,00
5	Kalurahan Sabdodadi	30.000.000,00	-	30.000.000,00
6	Kalurahan Timbulharjo	20.000.000,00	-	20.000.000,00
7	Kalurahan Pleret	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)
8	Kalurahan Imogiri	-	130.000.000,00	(130.000.000,00)
9	Kalurahan Srihardono	300.000.000,00	-	300.000.000,00
10	Kalurahan Selopamioro	-	-	
11	Kalurahan Trirenggo	80.000.000,00	210.000.000,00	(130.000.000,00)
12	Kalurahan Caturharjo	-	-	
13	Kalurahan Sumbermulyo	250.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00
14	Kalurahan Srihardono	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)
15	Kalurahan Panjangrejo	140.000.000,00	190.000.000,00	(50.000.000,00)
16	Kalurahan Srigading	70.000.000,00	70.000.000,00	-
17	Kalurahan Gadingsari	140.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00
18	Kalurahan Poncosari	80.000.000,00	220.000.000,00	(140.000.000,00)
19	Kalurahan Guwosari	500.000.000,00	160.000.000,00	340.000.000,00
20	Kalurahan Trimurti	-	45.000.000,00	(45.000.000,00)
21	Kalurahan Murtigading	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
22	Kalurahan Gadingharjo	20.000.000,00	140.000.000,00	(120.000.000,00)
23	Kalurahan Parangtritis	-	-	
24	Kalurahan Tirtomulyo	-	115.000.000,00	(115.000.000,00)
25	Kalurahan Tirtosari	50.000.000,00	-	50.000.000,00
26	Kalurahan Donotirto	-	-	
27	Kalurahan Seloharjo	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
28	Kalurahan Mulyodadi	80.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00
29	Kalurahan Sidomulyo	330.000.000,00	110.000.000,00	220.000.000,00
30	Kalurahan Triharjo	130.000.000,00	-	130.000.000,00
31	Kalurahan Gilangharjo	50.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00
32	Kalurahan Palbapang	-	-	-

33	Kalurahan Bantul	350.000.000,00	-	350.000.000,00
34	Kalurahan Sabdodadi	-	-	-
35	Kalurahan Ringinharjo	-	60.000.000,00	(60.000.000,00)
36	Kalurahan Sumberagung	300.000.000,00	120.000.000,00	180.000.000,00
37	Kalurahan Kebonagung	-	-	-
38	Kalurahan Sriharjo	370.000.000,00	60.000.000,00	310.000.000,00
39	Kalurahan Wukirsari	100.000.000,00	-	100.000.000,00
40	Kalurahan Girirejo	-	-	-
41	Kalurahan Karangtalun	-	-	-
42	Kalurahan Jatimulyo	150.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00
43	Kalurahan Mangunan	60.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00
44	Kalurahan Dlingo	300.000.000,00	453.000.000,00	(153.000.000,00)
45	Kalurahan Temuwuh	60.000.000,00	60.000.000,00	-
46	Kalurahan Terong	90.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00
47	Kalurahan Muntuk	-	132.000.000,00	(132.000.000,00)
48	Kalurahan Segoroyoso	80.000.000,00	-	80.000.000,00
49	Kalurahan Srimartani	240.000.000,00	455.000.000,00	(215.000.000,00)
50	Kalurahan Srimulyo	160.000.000,00	310.000.000,00	(150.000.000,00)
51	Kalurahan Sitimulyo	-	-	-
52	Kalurahan Wirokerten	-	-	
53	Kalurahan Jambidan	30.000.000,00	-	30.000.000,00
54	Kalurahan Singosaren	205.000.000,00	-	205.000.000,00
55	Kalurahan Panggungharjo	160.000.000,00	-	160.000.000,00
56	Kalurahan Bangunharjo	20.000.000,00	-	20.000.000,00
57	Kalurahan Timbulharjo	-	210.000.000,00	(210.000.000,00)
58	Kalurahan Ngestiharjo	20.000.000,00	-	20.000.000,00
59	Kalurahan Sendangsari	850.000.000,00	335.000.000,00	515.000.000,00
60	Kalurahan Argosari	120.000.000,00	-	120.000.000,00
61	Kalurahan Argorejo	20.000.000,00	20.000.000,00	-
62	Kalurahan Argomulyo	120.000.000,00	-	120.000.000,00
63	Kalurahan Argodadi	110.000.000,00	-	110.000.000,00
64	Kalurahan Tirtonirmolo	90.000.000,00	-	90.000.000,00
65	Kalurahan Argosari	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
66	Kalurahan Banguntapan	240.000.000,00	40.000.000,00	200.000.000,00
67	Kalurahan Tamanan	30.000.000,00	80.000.000,00	(50.000.000,00)
68	Kalurahan Wonokromo	80.000.000,00	80.000.000,00	-

	Jumlah	7.860.000.000,00	4.900.000.000,00	2.960.000.000,00

Bantuan Keuangan Khusus TMMD tahun 2024 dan 2023

No.	NAMA KALURAHAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Bertambah/(Berkurang)
1	Kalurahan Wonokromo	40.000.000,00	-	40.000.000,00
2	Kalurahan Sriharjo	-	120.000.000,00	(120.000.000,00)
3	Kalurahan Selopamioro	30.000.000,00	500.000.000,00	(470.000.000,00)
4	Kalurahan Wukirsari	-	120.000.000,00	(120.000.000,00)
5	Kalurahan Sidomulyo	30.000.000,00	-	30.000.000,00
6	Kalurahan Terong	30.000.000,00	80.000.000,00	(50.000.000,00)
7	Kalurahan Tirtomulyo	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
8	Kalurahan Bangunjiwo	30.000.000,00	250.000.000,00	(220.000.000,00)
9	Kalurahan Argodadi	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
10	Kalurahan Sendangsari	-	80.000.000,00	(80.000.000,00)
11	Kalurahan Guwosari	-	60.000.000,00	(60.000.000,00)
12	Kalurahan Bangunjiwo	-	100.000.000,00	(100.000.000,00)
13	Kalurahan Tirtonirmolo	-	100.000.000,00	(100.000.000,00)
14	Kalurahan Tamantirto	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
15	Kalurahan Pendowoharjo	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
16	Kalurahan Potorono	-	160.000.000,00	(160.000.000,00)
17	Kalurahan Tamanan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
18	Kalurahan Banguntapan	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)
19	Kalurahan Baturetno	-	160.000.000,00	(160.000.000,00)
20	Kalurahan Jambidan	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)
21	Kalurahan Sitimulyo	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)
22	Kalurahan Wonikromo	-	60.000.000,00	(60.000.000,00)
23	Kalurahan Segoroyoso	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
24	Kalurahan Muntuk	750.000.000,00	20.000.000,00	730.000.000,00
25	Kalurahan Jatimulyo	-	80.000.000,00	(80.000.000,00)
26	Kalurahan Tewmuwuh	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)
27	Kalurahan Mangunan	300.000.000,00	120.000.000,00	180.000.000,00
28	Kalurahan Kebonagung	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
29	Kalurahan Karangtalun	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)
30	Kalurahan Patalan	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)
31	Kalurahan Trirenggo	20.000.000,00	20.000.000,00	-
32	Kalurahan Palbapang	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)

33	Kalurahan Gilangharjo	-	60.000.000,00	(60.000.000,00)
34	Kalurahan sumbermulyo	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
35	Kalurahan Srihardono	30.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
36	Kalurahan Panjangrejo	-	100.000.000,00	(100.000.000,00)
37	Kalurahan Tirtomulyo	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)
38	Kalurahan Tirtohargo	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
39	Kalurahan Parangtritis	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
40	Kalurahan Murtigading	-	100.000.000,00	(100.000.000,00)
41	Kalurahan Srigading	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
42	Kalurahan Gaadingsari	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
43	Kalurahan Triwidadi	-	80.000.000,00	(80.000.000,00)
44	Kalurahan Panggungharjo	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
45	Kalurahan Timbulharjo	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
46	Kalurahan Wirokerten	-	80.000.000,00	(80.000.000,00)
47	Kalurahan Imogiri	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
48	Kalurahan Selopamioro	-	140.000.000,00	(140.000.000,00)
49	Kalurahan Girirejo	-	60.000.000,00	(60.000.000,00)
50	Kalurahan Palbapang	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
51	Kalurahan Ringinharjo	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)
52	Kalurahan Wonolelo	400.000.000,00	-	400.000.000,00
53	Kalurahan Trimulyo	60.000.000,00	-	60.000.000,00
54	Kalurahan Sumberagung	30.000.000,00	-	30.000.000,00
55	Kalurahan Singosaren	30.000.000,00	-	30.000.000,00
56	Kalurahan Bawuran	30.000.000,00	-	30.000.000,00
57	Kalurahan Donotirto	20.000.000,00	-	20.000.000,00
58	Kalurahan Temuwuh	150.000.000,00	-	150.000.000,00
59	Kalurahan Palbapang	-	60.000.000,00	(60.000.000,00)
60	Kalurahan Ringinharjo	-	250.000.000,00	(250.000.000,00)
	Jumlah	2.020.000.000,00	3.640.000.000,00	(1.620.000.000,00)

Bantuan Keuangan Khusus Rehap Pasar Kalurahan tahun 2024 dan 2023

Nomor	NAMA KALURAHAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Bertambah/(Berkurang)
1	Rehap pasar desa Jatimulyo	200.000.000,00	-	200.000.000,00
2	Rehap pasar kuliner desa timbulharjo	200.000.000,00	-	200.000.000,00
3	Rehap pasar desa Karangtalun	200.000.000,00	-	200.000.000,00
4	Rehap pasar desa singosaren	200.000.000,00	-	200.000.000,00

5	Rehap pasar desa Wukirsari	200.000.000,00	-	200.000.000,00
6	Rehap pasar desa Kepek	200.000.000,00	-	200.000.000,00
7	Rehap pasar Mangunan	180.000.000,00	-	180.000.000,00
	- Kalurahan Mangunan	-	200.000.000,00	(200.000.000,00)
	- Kalurahan Timbulharjo	-	200.000.000,00	(200.000.000,00)
	- Kalurahan Wukirsari	-	200.000.000,00	(200.000.000,00)
	Jumlah	1.380.000.000,00	600.000.000,00	780.000.000,00

Bantuan Keuangan Khusus Dana Insentif Kalurahan tahun2024 dan 2023

Nomor	NAMA KALURAHAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Bertambah/(Berkurang)
1	Kalurahan Sumberagung	-	100.000.000,00	(100.000.000,00)
2	Kalurahan Pendowoharjo	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
3	Kalurahan Murtigading	-	150.000.000,00	(150.000.000,00)
4	Kalurahan Panjangrejo	-	150.000.000,00	(150.000.000,00)
5	Kalurahan Guwosari	-	150.000.000,00	(150.000.000,00)
6	Kalurahan Mulyodadi	125.000.000.000,00	100.000.000,00	124.900.000.000,00
7	Kalurahan Sumbermulyo	-	150.000.000,00	(150.000.000,00)
8	Kalurahan Potorono	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
9	Kalurahan Srimartani	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
10	Kalurahan Srimulyo	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
11	Kalurahan Terong	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
12	Kalurahan Timbulharjo	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
13	Kalurahan Wukirsari	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
14	Kalurahan Karangtengah	-	100.000.000,00	(100.000.000,00)
15	Kalurahan Parangtritis	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
16	Kalurahan Tirtohargo	125.000.000.000,00	100.000.000,00	124.900.000.000,00
17	Kalurahan Donotirto	-	100.000.000,00	(100.000.000,00)
18	Kalurahan Patalan	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
19	Kalurahan Tamantirto	-	100.000.000,00	(100.000.000,00)
20	Kalurahan Tirtonirmolo	-	100.000.000,00	(100.000.000,00)
21	Kalurahan Bangunjiwo	-	100.000.000,00	(100.000.000,00)
22	Kalurahan Triharjo	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
23	Kalurahan Wijirejo	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
24	Kalurahan Caturharjo	-	150.000.000,00	(150.000.000,00)
25	Kalurahan Gadingsari	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
26	Kalurahan Srigading	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)

27	Kalurahan Srihardono	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
28	Kalurahan Sidulmulyo	-	100.000.000,00	(100.000.000,00)
29	Kalurahan Pleret	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
30	Kalurahan Bawuran	-	150.000.000,00	(150.000.000,00)
31	Kalurahan Segoroyoso	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
	Jumlah	250.000.000.000,00	2.600.000.000,00	247.400.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kalurahan tahun 2024 digunakan untuk pembayaran Alokasi Dana Kalurahan (ADD) bagi 75 Kalurahan di Kabupaten Bantul

Adapun rincian dari Alokasi Dana Kalurahan tahun 2024 dan 2023 adalah :

Nomor	Nama Kalurahan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	- Kalurahan Poncosari Srandakan	1.796.262.800,00	1.796.262.800,00	100,00	1.700.949.100,00
2	- Kalurahan Trimurti	1.601.870.300,00	1.601.870.300,00	100,00	1.534.684.400,00
3	- Kalurahan Gadingasri	1.449.621.300,00	1.449.621.300,00	100,00	1.425.999.500,00
4	- Kalurahan Gadingharjo	938.839.300,00	938.839.300,00	100,00	935.697.900,00
5	- Kalurahan Srigading	1.452.005.900,00	1.452.005.900,00	100,00	1.397.943.500,00
6	- Kalurahan Murtigading	1.473.032.400,00	1.473.032.400,00	100,00	1.308.705.600,00
7	- Kalurahan Tirtomulyo	1.429.869.900,00	1.429.869.900,00	100,00	1.237.430.200,00
8	- Kalurahan Parangtritis	1.191.367.000,00	1.191.367.000,00	100,00	1.153.078.700,00
9	- Kalurahan Donotirto	1.331.170.600,00	1.331.170.600,00	100,00	1.184.353.900,00
10	- Kalurahan Tirtosari	997.170.300,00	997.170.300,00	100,00	939.581.300,00
11	- Kalurahan Tirtohargo	935.827.000,00	935.827.000,00	100,00	935.138.600,00
12	- Kalurahan Seloharjo	1.509.961.700,00	1.509.961.700,00	100,00	1.439.744.300,00
13	- Kalurahan Panjangrejo	1.505.335.700,00	1.505.335.700,00	100,00	1.342.170.900,00
14	- Kalurahan Srihardono	1.603.536.200,00	1.603.536.200,00	100,00	1.470.597.800,00
15	- Kalurahan Sidomulyo	1.526.909.700,00	1.526.909.700,00	100,00	1.424.544.700,00
16	- Kalurahan Mulyodadi	1.437.583.800,00	1.437.583.800,00	100,00	1.299.540.300,00
17	- Kalurahan Sumbermulyo	1.559.681.500,00	1.559.681.500,00	100,00	1.455.381.700,00
18	- Kalurahan Caturharjo	1.333.403.300,00	1.333.403.300,00	100,00	1.332.715.000,00
19	- Kalurahan Triharjo	1.321.034.900,00	1.321.034.900,00	100,00	1.320.346.700,00
20	- Kalurahan Gilangharjo	1.576.463.700,00	1.576.463.700,00	100,00	1.508.878.900,00
21	- Kalurahan Wijirejo	1.221.598.800,00	1.221.598.800,00	100,00	1.174.178.300,00
22	- Kalurahan Triwidadi	1.698.843.700,00	1.698.843.700,00	100,00	1.689.878.600,00

23	- Kalurahan Sendangsari	1.621.302.900,00	1.621.302.900,00	100,00	1.602.297.900,00
24	- Kalurahan Guwosari	1.499.090.500,00	1.499.090.500,00	100,00	1.447.036.200,00
25	- Kalurahan Palbapang	1.327.746.600,00	1.327.746.600,00	100,00	1.198.424.100,00
26	- Kalurahan Ringinharjo	992.915.800,00	992.915.800,00	100,00	967.633.900,00
27	- Kalurahan BANTUL	1.257.268.900,00	1.257.268.900,00	100,00	1.130.505.600,00
28	- Kalurahan Trirenggo	1.617.728.400,00	1.617.728.400,00	100,00	1.481.301.900,00
29	- Kalurahan Sabdodadi	937.538.700,00	937.538.700,00	100,00	936.850.200,00
30	- Kalurahan Patalan	1.649.864.100,00	1.649.864.100,00	100,00	1.451.779.900,00
31	- Kalurahan Canden	1.517.422.500,00	1.517.422.500,00	100,00	1.345.857.800,00
32	- Kalurahan Sumberagung	1.525.994.400,00	1.525.994.400,00	100,00	1.436.451.900,00
33	- Kalurahan Trimulyo	1.531.130.800,00	1.531.130.800,00	100,00	1.403.241.300,00
34	- Kalurahan Selopamioro	1.938.832.500,00	1.938.832.500,00	100,00	1.855.031.600,00
35	- Kalurahan Sriharjo	1.246.859.600,00	1.246.859.600,00	100,00	1.239.801.500,00
36	- Kalurahan Wukirsari	1.662.490.300,00	1.662.490.300,00	100,00	1.602.417.600,00
37	- Kalurahan Kebonagung	935.087.600,00	935.087.600,00	100,00	934.399.200,00
38	- Kalurahan Karangtengah	1.018.925.800,00	1.018.925.800,00	100,00	979.544.400,00
39	- Kalurahan Girirejo	943.172.000,00	943.172.000,00	100,00	942.483.600,00
40	- Kalurahan Karangtalun	935.206.300,00	935.206.300,00	100,00	934.517.300,00
41	- Kalurahan Imogiri	936.831.300,00	936.831.300,00	100,00	936.142.700,00
42	- Kalurahan Mangunan	1.146.821.000,00	1.146.821.000,00	100,00	1.027.028.800,00
43	- Kalurahan Muntuk	1.345.260.100,00	1.345.260.100,00	100,00	1.344.571.000,00
44	- Kalurahan Dlingo	1.183.465.100,00	1.183.465.100,00	100,00	1.141.539.600,00
45	- Kalurahan Temuwuh	1.290.009.800,00	1.290.009.800,00	100,00	1.204.776.100,00
46	- Kalurahan Terong	1.106.592.400,00	1.106.592.400,00	100,00	1.071.273.200,00
47	- Kalurahan Jatimulyo	1.230.787.600,00	1.230.787.600,00	100,00	1.230.099.300,00
48	- Kalurahan Baturetno	1.156.569.400,00	1.156.569.400,00	100,00	1.135.586.400,00
49	- Kalurahan Banguntapan	1.689.984.200,00	1.689.984.200,00	100,00	1.533.047.700,00
50	- Kalurahan Jagalan	935.949.200,00	935.949.200,00	100,00	935.260.500,00
51	- Kalurahan Singosaren	935.899.700,00	935.899.700,00	100,00	935.211.300,00
52	- Kalurahan Jambidan	1.103.275.400,00	1.103.275.400,00	100,00	1.078.469.900,00
53	- Kalurahan Potorono	1.206.585.200,00	1.206.585.200,00	100,00	1.175.522.500,00
54	- Kalurahan Tamanan	1.225.757.500,00	1.225.757.500,00	100,00	1.070.868.100,00
55	- Kalurahan Wirokerten	1.183.836.000,00	1.183.836.000,00	100,00	1.159.416.600,00
56	- Kalurahan Wonokromo	1.267.218.700,00	1.267.218.700,00	100,00	1.261.138.200,00

57	- Kalurahan Pleret	1.378.400.100,00	1.378.400.100,00	100,00	1.269.087.100,00
58	- Kalurahan Segoroyoso	1.167.125.700,00	1.167.125.700,00	100,00	1.166.437.400,00
59	- Kalurahan Bawuran	1.074.089.600,00	1.074.089.600,00	100,00	1.073.401.000,00
60	- Kalurahan Wonolelo	996.212.400,00	996.212.400,00	100,00	975.783.200,00
61	- Kalurahan Sitimulyo	1.732.164.800,00	1.732.164.800,00	100,00	1.609.809.200,00
62	- Kalurahan Srimulyo	1.742.887.800,00	1.742.887.800,00	100,00	1.733.576.800,00
63	- Kalurahan Srimartani	1.594.770.000,00	1.594.770.000,00	100,00	1.544.863.300,00
64	- Kalurahan Pendowoharjo	1.597.020.500,00	1.597.020.500,00	100,00	1.486.792.100,00
65	- Kalurahan Timbulharjo	1.666.438.300,00	1.666.438.300,00	100,00	1.553.145.900,00
66	- Kalurahan Bangunharjo	1.714.021.000,00	1.714.021.000,00	100,00	1.583.296.800,00
67	- Kalurahan Panggungharjo	1.673.617.500,00	1.673.617.500,00	100,00	1.470.567.400,00
68	- Kalurahan Bangunjiwo	1.976.541.600,00	1.976.541.600,00	100,00	1.840.583.200,00
69	- Kalurahan Tirtonirmolo	1.487.018.800,00	1.487.018.800,00	100,00	1.397.316.200,00
70	- Kalurahan Tamantirto	1.431.167.700,00	1.431.167.700,00	100,00	1.352.088.600,00
71	- Kalurahan Ngestiharjo	1.471.457.400,00	1.471.457.400,00	100,00	1.470.768.900,00
72	- Kalurahan Argodadi	1.468.699.900,00	1.468.699.900,00	100,00	1.453.471.600,00
73	- Kalurahan Argorejo	1.491.329.500,00	1.491.329.500,00	100,00	1.307.970.200,00
74	- Kalurahan Argosari	1.226.370.700,00	1.226.370.700,00	100,00	1.215.330.100,00
75	- Kalurahan Argomulyo	1.531.741.600,00	1.531.741.600,00	100,00	1.390.731.700,00
	Jumlah	102.415.885.000,00	102.415.885.000,00		97.236.088.400,00

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah TA 2024 disandingkan dengan realisasi TA 2023 sebagai berikut:

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan.	196.239.211.760,00	196.082.724.188,59	99,92	215.664.574.732,74

Komponen Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 terdiri dari SiLPA, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan daerah dari lembaga keuangan bank dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang berasal dari piutang dana bergulir terealisasi.

Rincian lebih lanjut dari Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	196.239.211.760,00	196.239.211.759,59	100,00	215.631.865.732,74

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Tahun 2023 sebesar Rp196.239.211.759,59

Uraian	Tahun 2023 (Rp)
Kelebihan pencapaian target pendapatan	93.199.676.800,57
Anggaran yang tidak direalisasikan	103.006.825.959,28
Surplus/defisit	(6.529.729.653,90)
Selisih pembiayaan netto	32.708.999,74
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	196.239.211.760,00

SiLPA pada Tahun 2023 sebesar Rp196.239.211.759,59 terdiri dari

Uraian	Tahun 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	171.064.455.774,11
Kas di Bendahara Pengeluaran	-
Kas di Bendahara Penerimaan	699.567.547,00
Kas di Pengelola Dana Bergulir	-
Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah	23.947.680.740,48
Kas Pemerintah diluar Pengelolaan BUD - Dana BOS	527.507.698,00
Jumlah Kas	196.239.211.759,59

5.1.4.1.2 Pencairan dana Cadangan

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)

5.1.4.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD	981.337.500,00	981.337.500,00	100,00	0,00
	981.337.500,00	981.337.500,00	100,00	0,00

5.1.4.1.4

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat				
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	1.000.000.000,00	0,00	0,00	32.709.000,00
	1.000.000.000,00	0,00		32.709.000,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah.	21.700.000.000,00	16.700.000.000,00		24.051.093.800,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2024 dan TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	21.700.000.000,00	16.700.000.000,00	76,96	24.051.093.800,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan (investasi jangka panjang) ke Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp16.700.000.000,000
Adapun rincian anggaran dan realisasi penyertaan modal sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
a)	BPD DIY	12.200.000.000,00	12.200.000.000,00	100,00	13.200.000.000,00
b)	Aneka Dharma	-	-		351.093.800,00
c)	PD BPR Bank Bantul	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
d)	PDAM	6.000.000.000,00	1.000.000.000,00	16,67	6.000.000.000,00
	Jumlah	21.700.000.000,00	16.700.000.000,00	76,96	24.051.093.800,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4.2.3	Pembayaran Pokok Utang karena Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai pinjaman daerah.				

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4.2.4	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir)	1.000.000.000,00	-		-

Realisasi Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya TA 2024 dan 2023 digunakan untuk pemberian pinjaman daerah berupa dana bergulir. Untuk Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mencairkan dana Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Uraian	Tahun 2024(Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)
Kelebihan pencapaian target pendapatan	37.241.315.772,57	2.416.084.417.354,57	(2.378.843.101.582,00)
Anggaran yang tidak direalisasikan	131.418.928.711,53	2.411.425.977.527,72	(2.280.007.048.816,19)
Surplus/defisit	(6.600.298.562,14)	4.658.439.826,85	(11.258.738.388,99)

Selisih pembiayaan netto	180.520.549.259,59	191.580.771.932,74	(11.060.222.673,15)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	173.920.250.697,45	196.239.211.759,59	(22.318.961.062,14)

SiLPA pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp173.920.250.697,45 dan Rp196.239.211.759,59 terdiri dari

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)
Kas di Kas Daerah	161.319.107.783,71	171.064.455.774,11	(9.745.347.990,40)
Kas di Bendahara Penerimaan	304.712.756,00	699.567.547,00	(394.854.791,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	-		-
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	10.404.078.395,43	23.947.680.740,48	(13.543.602.345,05)
Kas Dana BOSP	101.060.109,00		101.060.109,00
Kas Dana BOK Puskesmas	900.241.223,00	-	900.241.223,00
Kas Pemerintah diluar Pengelolaan BUD - Dana BOS	-	527.507.698,00	(527.507.698,00)
Kas Lainnya	891.050.430,31	-	891.050.430,31
Jumlah Kas	173.920.250.697,45	196.239.211.759,59	(22.318.961.062,14)

SiLPA tahun 2024 sebesar Rp173.920.250.697,45 yang merupakan sisa dana *earmark* (dana alokasi yang ditentukan penggunaannya) adalah:

Sisa dana BLUD	10.404.078.395,43	
Sisa Dana BOK Puskesmas	900.241.223,00	
Sisa DAK Fisik	974.509.913,00	
Sisa DAK Non Fisik	883.296.377,00	
	13.162.125.908,43	

SiLPA tahun 2024 sebesar Rp173.920.250.697,45 telah digunalan untuk menutup devisit dalam APBD Murni TA 2025 165.755.513.482,03

SiLPA tahun 2024 Audited		173.920.250.697,45
Sudah digunakan dalam APBD murni Tahun Anggaran 2025	165.755.513.482,03	
Sisa dana earmark	13.162.125.908,43	
		178.917.639.390,46
Defisit		-4.997.388.693,01

Dalam sisa kas di Kasda terdapat alokasi anggaran yang diperuntukan untuk pembayaran THR dan gaji ke 13 TPG bagi guru ASN daerah Ta 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, khususnya untuk Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) sebesar Rp24.586.017.000.yang di transfer dari Kas Negara ke RKUD dari Kas Negara pada tanggal 16 Desember 2024. Total dana yang dibutuhkan sebesar Rp24.606.097.500,00 dan telah dicairkan pada tanggal 12 Maret 2025 setelah dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2025. Terdapat kekurangan dana sebesar Rp20.080.500,00 dan atas kekurangan tersebut dibayar dari dana APBD.

5 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.2 **POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	196.239.211.759,59	215.631.865.732,74

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal tahun pada 2024 sebesar Rp196.239.211.759,59 bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 8,99% atau sebesar Rp19.392.653.973,15.

Saldo awal Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp196.239.211.759,59 bersumber dari:

Uraian	Jumlah
Kelebihan pencapaian target pendapatan	2.416.084.417.354,57
Anggaran yang tidak direalisasikan	2.411.425.977.527,72
Surplus/defisit	4.658.439.826,85
Selisih pembiayaan netto	191.580.771.932,74
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	196.239.211.759,59

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)
5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	196.239.211.759,59	215.631.865.732,74

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan penggunaan saldo akhir tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai tahun berjalan, tahun 2024 dan tahun 2023

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)
5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	173.920.250.697,45	196.239.211.759,59

Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp173.920.250.697,45 bersumber dari:

Uraian	Jumlah
Kelebihan pencapaian target pendapatan	37.251.347.511,57
Anggaran yang tidak direalisasikan	131.668.903.186,29
Surplus/defisit	(6.600.298.562,14)
Selisih pembiayaan netto	180.520.549.259,59
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	173.920.250.697,45

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya -

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk tahun 2024 koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya bersaldo nihil.

5.2.5 Lain-lain

Akun Lain-lain pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2024 bersaldo nihil

	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)
5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir	173.920.250.697,45	196.239.211.759,59
	22.318.961.062,14	11,37

Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp173.920.250.697,45 atau mengalami penurunan 11,51% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp22.318.961.062,14

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan TA 2024 dan 2023 sebesar SAL awal tahun yang bersangkutan digunakan untuk menutup defisit dan mendanai pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berkenaan.

Perhitungan Saldo Anggaran Lebih (SILPA) TA 2024 dan 2023 adalah :

Pendapatan dan Belanja	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Peningkatan/Penurunan (Rp)
Realisasi Pendapatan	2.609.413.354.404,57	2.416.084.417.354,57	193.328.937.050,00
Realisasi Belanja	2.616.013.652.966,71	2.411.425.977.527,72	204.587.675.438,99
Surplus(Defisit) anggaran	(6.600.298.562,14)	4.658.439.826,85	(11.258.738.388,99)
Pembiayaan			
Penerimaan Daerah	197.220.549.259,59	215.631.865.732,74	-18.411.316.473,15
Pengeluaran Daerah	16.700.000.000,00	24.051.093.800,00	-7.351.093.800,00
Pembiayaan Netto	180.520.549.259,59	191.580.771.932,74	(11.060.222.673,15)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	173.920.250.697,45	196.239.211.759,59	(22.318.961.062,14)

5 RINCIAN dan PENJELASAN MASING-MASING POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.3 NERACA

5.3.1 Aset

Perbandingan Aset Tetap Kabupaten Bantul Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

	Jenis Akun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1	Aset Lancar	318.396.335.052,79	310.736.821.203,23	7.659.513.849,56
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	469.746.685.563,78	610.357.224.338,38	(140.610.538.774,61)
5.3.1.3	Aset Tetap	2.971.890.261.465,52	2.880.650.606.330,87	91.239.655.134,65
5.3.1.4	Dana Cadangan	-	-	-
5.3.1.5	Aset Lainnya	9.454.643.858,43	10.470.525.532,63	(1.015.881.674,20)
	Jumlah Aset	3.769.487.925.940,52	3.812.215.177.405,11	(42.727.251.464,59)

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1	Aset Lancar	318.396.335.052,79	310.736.821.203,23	7.659.513.849,56

	Rincian Aset Lancar adalah:	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1	Kas	173.920.250.697,45	196.239.211.759,59	(22.318.961.062,14)
5.3.1.1.2	Piutang	-	-	-
5.3.1.1.2.1	Piutang Pajak	152.385.877.881,50	148.876.031.658,50	3.509.846.223,00
5.3.1.1.2.2	Piutang Retribusi	17.239.224.192,85	4.919.697.367,85	12.319.526.825,00
5.3.1.1.2.3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.606.126.723,86	-	20.606.126.723,86
5.3.1.1.2.4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	60.546.502.899,00	60.782.486.429,00	(235.983.530,00)
5.3.1.1.2.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-
5.3.1.1.2.6	Piutang Transfer Antar Daerah	8.242.200.378,00	366.750.338,00	7.875.450.040,00
5.3.1.1.2.7	Piutang Lainnya	10.647.600.119,00	10.665.494.879,00	(17.894.760,00)
5.3.1.1.2.8	Penyisihan Piutang	(167.902.380.301,76)	(162.920.846.936,52)	(4.981.533.365,25)
5.3.1.1.4	Beban dibayar dimuka	1.090.133.961,25	1.674.397.002,09	(584.263.040,84)
5.3.1.1.5	Persediaan	41.620.798.501,64	50.133.598.705,71	(8.512.800.204,07)
	Jumlah Aset Lancar	318.396.335.052,79	310.736.821.203,23	7.659.513.849,56

Penjelasan terkait aset lancar sebagai berikut:

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.	Kas	173.920.250.697,45	196.239.211.759,59	(22.318.961.062,14)

Rincian Kas sebagai berikut:

	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	161.319.107.783,71	171.064.455.774,11	(9.745.347.990,40)
5.3.1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	304.712.756,00	699.567.547,00	(394.854.791,00)
5.3.1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
5.3.1.1.1.4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	10.404.078.395,43	23.947.680.740,48	(13.543.602.345,05)
5.3.1.1.1.5	Kas Dana BOSP	101.060.109,00	-	101.060.109,00
5.3.1.1.1.6	Kas Dana BOK Puskesmas	900.241.223,00	-	900.241.223,00
5.3.1.1.1.7	Kas Pemerintah diluar Pengelolaan BUD - Dana BOS	-	527.507.698,00	(527.507.698,00)
5.3.1.1.1.8	Kas Lainnya	891.050.430,31	-	891.050.430,31
	Jumlah Kas	**173.920.250.697,45**	**196.239.211.759,59**	**(22.318.961.062,14)**

Penjelasan dari masing-masing komponen Kas adalah:

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	161.319.107.783,71	171.064.455.774,11	(9.745.347.990,40)

Jumlah tersebut merupakan kas pemerintah daerah Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah yang terdiri atas Saldo Kas di Kas Daerah yang berada di Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Cabang Bantul No. Rekening 004.111.000207

Dalam Saldo Kas di Kas Daerah termasuk setoran dari satuan pendidikan anak usia dini dan biaya operasional kesetaraan sebesar Rp24.373.166,00 dengan rincian BOP PAUD sebesar Rp15.128.166,00 dan BOP Kesetaraan sebesar Rp9.245.000,00.

Sesuai dengan PMK Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, pasal 30 yang mengamanatkan bahwa:

Ayat (1)	Sekolah penerima Dana BOS yang mengalami penggabungan, penutupan, atau tidak bersedia menerima Dana BOS, mengembalikan Dana BOS yang telah diterima ke RKUD.
Ayat (2)	Pengembalian Dana BOS dari RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara dilakukan oleh bendahara umum Daerah setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Inspektorat Daerah.
Ayat (3)	Pengembalian Dana BOS ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan karena penggabungan/penutupan Sekolah penerima Dana BOS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan -undangan.
Ayat (4)	Pengembalian Dana BOS ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan karena Sekolah tidak bersedia menerima Dana BOS dilaksanakan berdasarkan surat pernyataan tidak bersedia menerima Dana BOS yang ditandatangani oleh kepala Sekolah atau ketua yayasan.

Rincian Kas di Kasda tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
a)	Saldo Kas Pemerintah Daerah (Kas Daerah) yang berada di Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Cabang Bantul Nomor rekening 004.111.000207	161.068.220.859,95	171.064.455.774,11	(9.996.234.914,16)
b)	Setor kembali temuan BPK	250.886.924	-	250.886.923,76
		161.319.107.783,71	171.064.455.774,11	-9.745.347.990,40

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	304.712.756,00	699.567.547,00	(394.854.791,00)

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang masih ada pada bendahara penerimaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang disetorkan ke Kasda pada Tahun Anggaran berikutnya dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Saldo pendapatan Retribusi Jasa Umum pada obyek pariwisata yang dikelola Dinas Pariwisata yang dterima petugas pada tanggal 31 Desember 2024 dan Tahun 2023	232.273.500,00	664.012.500,00	(431.739.000,00)
2	Saldo pendapatan Retribusi Jasa Umum pada obyek pariwisata Kebun Buah Mangunan, tempat rekreasi dan olah raga, penjualan produksi daerah yang dikelola Dinas Pertanian yang diterima petugas pada tanggal 31 Desember 2024 dan Tahun 2023	3.739.500,00	11.926.750,00	(8.187.250,00)
3	Saldo pendapatan Pajak Air Tanah yang diterima Rekening Penampungan Per 31 Desember 2024 dan tahun 2023	2.147.000,00	-	2.147.000,00
4	Saldo pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola DKUKMP yang diterima petugas pada tanggal 31 Desember 2024 dan Tahun 2023	21.174.734,00	18.951.110,00	2.223.624,00
5	Saldo pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikelola DIKPORA yang diterima petugas pada tanggal 31 Desember 2024 dan Tahun 2023	2.000.000,00	-	2.000.000,00
6	Saldo pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikelola dinas Kesehatan yang diterima petugas pada tanggal 31 Desember 2024 dan Tahun 2023	39.206.000,00	-	39.206.000,00
7	Saldo pendapatan Retribusi pemakaian kekayaan daerah (Rusunawa) yang dikelola DPUPKP yang diterima petugas pada tanggal 31 Desember 2024 dan Tahun 2023	1.476.080,00	4.213.880,00	(2.737.800,00)

8	Saldo pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dikelola DLH yang diterima petugas pada tanggal 31 Desember 2024 dan Tahun 2023	2.695.942,00	463.307,00	2.232.635,00
	Jumlah	304.712.756,00	699.567.547,00	(394.854.791,00)

Saldo kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp304.712.756,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2025 oleh masing-masing OPD dengan nomor STS sebagai berikut:

Nomor	OPD	Tanggal Setor	Nomor STS	Jumlah
1	DPUPKP	02 Januari 2025	02	1.476.080,00
2	Dinas Pariwisata	02 Januari 2025	04	232.273.500,00
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	02 Januari 2025	20	3.739.500,00
4	DKUKMP	02 Januari 2025	13	21.174.734,00
5	Dinas Kesehatan	02 Januari 2025	19	39.206.000,00
6	DIKPORA	02 Januari 2025	17	2.000.000,00
7	BPKPAD	02 Januari 2025	23	2.147.000,00
8	DLH	02 Januari 2025	02	73.002,00
9	DLH	02 Januari 2025	18	2.622.940,00
			Jumlah Kas Di Bendahara Penerimaan	304.712.756,00

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran			-

Jumlah tersebut merupakan sisa Uang Persediaan (UP)/saldo kas di bendahara pengeluaran pada Unit Organisasi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum disetor ke rekening Kas Daerah Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 . Untuk saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 nihil.

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	10.404.078.395,43	23.947.680.740,48	(13.325.387.729,05)

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di RSUD Panembahan Senopati , RSUD Saras Adhyatma, dan saldo kas di Puskesmas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

RSUD Penembahan Senopati Bantul telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan SK Bupati No 195 Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD/PPK BLUD pada RSUD Panembahan Senopati. Pada tahun 2022 Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 tahun 2021 RSUD Panembahan Senopati status kelembagaan menjadi UOBK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Puskesmas di wilayah Kabupaten Bantul telah menerapkan pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan dan untuk Puskesmas berdasarkan Perpres No 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah

RSUD Saras Adyatma Ruamah Sakit tipe D yang merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berdasarkab Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 dan telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 597 tahun 2022.

Rincian saldo kas BLUD:		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.5.1	Kas di RS Panembahan Senopati Bantul	7.518.515.293,52	17.049.925.348,52	(9.531.410.055,00)
5.3.1.1.1.5.2	Kas di RS Saras Adhyatma	870.700.381,00	1.088.914.997,00	(218.214.616,00)
5.3.1.1.1.5.3	Kas di 27 Puskesmas	2.014.862.720,91	5.808.840.394,96	(3.793.977.674,05)
		10.404.078.395,43	23.947.680.740,48	(13.543.602.345,05)

5.3.1.1.1.5.1	BLUD RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	BPD Rekening No 004.111.000424	7.472.209.166,00	16.968.085.288,00	(9.495.876.122,00)
2	Bank Mandiri Nomor Rekening 137-00-0534188-4	11.126.517,00	2.267.266,00	8.859.251,00
3	BRI Bantul No Rek 00000236-01-000931-30-3	21.586.447,52	79.572.794,52	(57.986.347,00)
4	Pendapatan yang divalidasi tanggal 02 Januari 2025	13.593.163,00	-	13.593.163,00
		7.518.515.293,52	17.049.925.348,52	(9.531.410.055,00)

Keterangan saldo bank:

Saldo bank di Bank Mandiri Per 31 Desember 2024 belum nihil karena ada dana sebesar Rp11.126.517,00 dan di BRI sebesar Rp21.586.447,52
Pembayaran pasien atau layanan yang dilakukan oleh pasien masih dibuka secara sistem (EDC, Qris, transfer) melalui Bank Mandiri maupun BRI sehingga masih terdapat transaksi penerimaan kas, sedangkan pemindahan kas dari bank tersebut ke BPD dilakukan secara manual (layanan internet banking masih dalam proses).

Disamping tiga rekening bank yang digunakan operasional kegiatan, Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul juga mengelola Rekening *management reward* di BPD Cabang Bantul dengan nomor rekening 004.221.025669 atas nama RSUD Panembahan Senopati. yang digunakan untuk menampung dana pembagian insentif kepada penerima penghargaan yang meliputi pegawai yang mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana harian, pegawai yang memenuhi kriteria tertentu dan pihak lain yang berkontribusi terhadap perkembangan rumah sakit. Saldo dana management reward per 31 Desember 2024 sebesar Rp159.968.981,84. Penggunaan dana tersebut berdasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2024 tentang remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Panembahan Senopati Bantul dan Peraturan Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul Nomor 18 tahun 2024 tentang pemberian Remunerasi. Realisasi management reward sebesar 1,19% dari jumlah insentif.

5.3.1.1.1.5.2 Kas di RS Saras Adhyatma

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
BPD Rekening No 004.111.001953	869.835.226,00	1.088.914.997,00	(219.079.771,00)
Bank Mandiri Nomor Rekening 137-00-7117119-9	865.155,00	-	865.155,00
	870.700.381,00	1.088.914.997,00	(218.214.616,00)

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.5.2	Kas di 27 Puskesmas	2.014.862.720,91	5.808.840.394,96	(3.793.977.674,05)

NOMOR	NAMA PUSKESMAS	NOMOR REKENING BLUD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Srandakan	4.111.001.190	17.632.585,00	154.642.513,00	(137.009.928,00)
2	Sanden	4.111.001.189	42.836.941,00	88.726.748,00	(45.889.807,00)
3	Kretek	4.111.001.194	53.616.680,46	56.336.773,46	(2.720.093,00)
4	Pundong	4.111.001.191	37.000.854,00	34.374.852,00	2.626.002,00
5	Bambanglipuro	4.111.001.205	31.628.200,36	369.559.817,36	(337.931.617,00)
6	Pandak I	4.111.001.197	17.365.506,00	78.580.007,00	(61.214.501,00)
7	Pandak II	4.111.001.192	141.427.169,00	159.922.987,00	(18.495.818,00)
8	Bantul I	4.111.001.201	205.946.669,25	309.752.526,30	(103.805.857,05)
9	Bantul II	4.111.001.212	41.003.455,00	241.341.161,00	(200.337.706,00)
10	Jetis I	4.111.001.208	36.191.951,49	105.312.607,49	(69.120.656,00)
11	Jetis II	4.111.001.196	81.170.326,85	305.722.246,85	(224.551.920,00)
12	Imogori I	4.111.001.211	102.886.148,00	279.962.160,00	(177.076.012,00)
13	Imogiri II	4.111.001.188	5.432.853,00	586.810.626,00	(581.377.773,00)
14	Dlingo I	4.111.001.200	17.303.546,00	15.824.610,00	1.478.936,00
15	Dlingo II	4.111.001.204	54.719.306,00	223.119.859,00	(168.400.553,00)
16	Pleret	4.111.001.209	138.115.902,00	451.548.658,00	(313.432.756,00)
17	Piyungan	4.111.001.210	158.473.410,00	143.253.257,00	15.220.153,00
18	Banguntapan I	4.111.001.206	28.954.082,00	218.122.697,00	(189.168.615,00)
19	Banguntapan II	4.111.001.195	161.173.601,00	447.634.745,00	(286.461.144,00)
20	Banguntapan III	4.111.001.213	74.458.129,00	153.369.510,00	(78.911.381,00)
21	Sewon I	4.111.001.207	86.181.126,00	138.658.309,00	(52.477.183,00)
22	Sewon II	4.111.001.202	32.669.328,00	162.535.932,00	(129.866.604,00)
23	Kasihan I	4.111.001.203	105.505.024,00	85.793.043,00	19.711.981,00

24	Kasihan II	4.111.001.198	185.770.741,00	327.632.712,00	(141.861.971,00)
25	Pajangan	4.111.001.214	32.343.542,00	190.730.100,00	(158.386.558,00)
26	Sedayu I	4.111.001.193	81.444.293,00	154.688.918,00	(73.244.625,00)
27	Sedayu II	4.111.001.199	43.611.351,50	324.883.019,50	(281.271.668,00)
		Jumlah	2.014.862.720,91	5.808.840.394,96	(3.793.977.674,05)

Saldo kas di 27 Puskesmas Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.014.862.720,91 berada di Rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Cabang Bantul

5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOSP

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.5	Kas Dana BOSP			(62.079.522,00)
1	Kas di Bendahara BOSNAS SD	22.423.036,00	22.475.482,00	(52.446,00)
2	Kas di Bendahara BOSNAS SMP	1.900.001,00	12.054.655,00	(10.154.654,00)
3	Kas di Bendahara BOP PAUD	40.189.760,00	25.211.118,00	14.978.642,00
4	Kas di Bendahara BOSNAS Kesetaraan	36.547.312,00	103.398.376,00	(66.851.064,00)
	Jumlah	**101.060.109,00**	**163.139.631,00**	-62.079.522,00

Rekening operasional BOSNAS SD, BOSNAS SMP, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan di rekening giro di PT Bank BPD DIY Cabang bantul

5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas

NOMOR	NAMA PUSKESMAS	NOMOR REKENING BLUD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Srandakan	1590107293	25.625.320,00	644.416,00	24.980.904,00
2	Sanden	1590107419	35.169.575,00	7.926.428,00	27.243.147,00
3	Kretek	1590107351	19.400.759,00	18.178.932,00	1.221.827,00
4	Pundong	1590107431	39.029.254,00	11.502.902,00	27.526.352,00
5	Bambanglipuro	1590107340	23.975.827,00	13.844.187,00	10.131.640,00
6	Pandak I	1590107328	21.149.422,00	4.181.989,00	16.967.433,00
7	Pandak II	1590107282	23.041.597,00	4.803.279,00	18.238.318,00
8	Bantul I	1590107248	55.574.813,00	9.354.784,00	46.220.029,00
9	Bantul II	1590107373	25.726.223,00	20.243.412,00	5.482.811,00
10	Jetis I	1590107260	23.020.862,00	16.017.356,00	7.003.506,00

11	Jetis II	1590107271	48.508.023,00	10.747.968,00	37.760.055,00
12	Imogori I	1590107511	26.392.456,00	10.892.037,00	15.500.419,00
13	Imogiri II	1590107442	26.812.847,00	18.366.274,00	8.446.573,00
14	Dlingo I	1590107339	37.244.566,00	10.591.382,00	26.653.184,00
15	Dlingo II	1590107395	20.707.018,00	57.001.716,00	(36.294.698,00)
16	Pleret	1590107384	20.279.330,00	4.462.967,00	15.816.363,00
17	Piyungan	1590107497	49.786.278,00	26.585.685,00	23.200.593,00
18	Banguntapan I	1590107453	15.996.279,00	201.000,00	15.795.279,00
19	Banguntapan II	1590107362	30.874.244,00	26.855.271,00	4.018.973,00
20	Banguntapan III	1590107306	40.653.232,00	5.342.518,00	35.310.714,00
21	Sewon I	1590107420	45.627.413,00	1.456.300,00	44.171.113,00
22	Sewon II	1590107464	52.531.949,00	15.705.107,00	36.826.842,00
23	Kasihan I	1590107500	37.783.637,00	9.464.995,00	28.318.642,00
24	Kasihan II	1590107408	57.615.145,00	38.116.299,00	19.498.846,00
25	Pajangan	1590107486	27.066.155,00	3.038.242,00	24.027.913,00
26	Sedayu I	1590107317	48.713.355,00	6.483.143,00	42.230.212,00
27	Sedayu II	150107259	21.935.644,00	12.359.478,00	9.576.166,00
Jumlah			**900.241.223,00**	**364.368.067,00**	**535.873.156,00**

Rekening operasional BOK Kesehatan Puskesmas di rekening giro pada BNI Cabang Bantul sesuai dengan amanat dari Kemenkes Republik Indonesia. Penetapan rekening giro dituangkan dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2023 tentang Rekening Giro dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Bantul.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dana BOK Puskesmas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat.

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.1.8	Kas Lainnya	891.050.430,31	0,00	891.050.430,31

Realisasi kas lainnya tahun 2024 terdiri dari:

Realisasi Kas Lainnya tahun 2024 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran paket pekerjaan pembangunan Agrowisata Bukit Dermo di Dinas Pariwisata atas temuam Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan LHP Nomor 22/LHP/XVIII.YOG/12/2024 Ndan setoran hasil reviu dari Inspektorat Kabupaten Bantul Nomor 700/0050/Reviu.Bangunan/2025 dengan rincian temuan dari BPK sebesar Rp883.70.286,01 dan temuan hasil reviu dari Inspektorat Kabupaten Bantul sebesar Rp7.980.144,30	891.050.430,31

				891.050.430,3100
		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)

5.3.1.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai investasi Jangka Pendek

5.3.1.1.2 Piutang

Saldo Piutang yang tersaji di Neraca adalah nilai saldo piutang yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengatur kebijakan tentang nilai penyisihsn piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang disajikan di Neraca sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan dan tidak menghapuskan kewajiban

Besaran persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

Kualitas piutang	%
Lancar	0,5
Kurang Lancar	10
Diragukan	50
Macet	100

Rekapitulasi Piutang Bruto dengan rician sebagai berikut:

	Jenis piutang	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.1	Piutang Pajak	152.385.877.881,50	148.876.031.658,50	3.509.846.223,00
5.3.1.1.2.2	Piutang Retribusi	17.239.224.192,85	4.919.697.367,85	12.319.526.825,00
5.3.1.1.2.3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.606.126.723,86	-	20.606.126.723,86
5.3.1.1.2.4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	60.546.502.899,00	60.782.486.429,00	(235.983.530,00)
5.3.1.1.2.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-
5.3.1.1.2.6	Piutang Transfer Antar Daerah	8.242.200.378,00	366.750.338,00	7.875.450.040,00
5.3.1.1.2.7	Piutang Lainnya	10.647.600.119,00	10.665.494.879,00	(17.894.760,00)
	Jumlah	269.667.532.194,21	225.610.460.672,35	44.057.071.521,86

Rekapitulasi Penyisihan Putang dengan rician sebagai berikut:

	Jenis piutang	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.1	Piutang Pajak	103.669.763.346,29	101.279.537.629,04	2.390.225.717,25
5.3.1.1.2.2	Piutang Retribusi	3.858.091.362,26	2.582.836.373,11	1.275.254.989,16
5.3.1.1.2.3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-

5.3.1.1.2.4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	49.726.925.474,22	48.392.978.055,37	1.333.947.418,85
5.3.1.1.2.5	Piutang Trnasfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-
5.3.1.1.2.6	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	-
5.3.1.1.2.7	Piutang Lainnya	10.647.600.119,00	10.665.494.879,00	(17.894.760,00)
	Jumlah	167.902.380.301,76	162.920.846.936,52	4.981.533.365,25

Rekapitulasi Putang Netto dengan rician sebagai berikut:

	Jenis piutang	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.1	Piutang Pajak	48.716.114.535,22	47.596.494.029,46	1.119.620.505,75
5.3.1.1.2.2	Piutang Retribusi	13.381.132.830,59	2.336.860.994,75	11.044.271.835,85
5.3.1.1.2.3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.606.126.723,86	-	20.606.126.723,86
5.3.1.1.2.4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.819.577.424,78	12.389.508.373,63	(1.569.930.948,85)
5.3.1.1.2.5	Piutang Trnasfer Pemerintah Pusat			-
5.3.1.1.2.6	Piutang Transfer Antar Daerah	8.242.200.378,00	366.750.338,00	7.875.450.040,00
5.3.1.1.2.7	Piutang Lainnya	-	-	-
	Jumlah	101.765.151.892,45	62.689.613.735,83	39.075.538.156,61

Rincian dari masing-masing piutang Pajak Daerah sebagai berikut:		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.1	Piutang Pajak Daerah	152.385.877.881,50	148.876.031.658,50	3.509.846.223,00

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) Pemerintah Pusat melakukan restrukturisasi Pajak Daerah melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak Daerah berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak Daerah, yaitu menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas piutang pajak daerah direklasifikasi ke jenis pajak yang baru sesuai dengan Undang-Undang Npmpo 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

	Jenis Pajak Daerah	
	Lama	Baru
5.3.1.1.2.1.1	Pajak Restoran	PBJT-Makanan dan/atau Minuman
5.3.1.1.2.1.2	Pajak Hotel	PBJT-Jasa Perhotelan
5.3.1.1.2.1.3	Pajak Hiburan	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
5.3.1.1.2.1.4	Pajak Parkir	PBJT-Jasa Parkir
5.3.1.1.2.1.5	Pajak Air Tanah	Pajak Air Tanah

5.3.1.1.2.1.6	PBB P2	PBB P2
5.3.1.1.2.1.7	Pajak Reklame	Pajak Reklame
5.3.1.1.2.1.8	Pajak Penerangan Jalan	PBJT-Tenaga Listrik

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Piutang Bruto	152.385.877.881,50	148.876.031.658,50	3.509.846.223,00
Penyisihan Piutang	103.669.763.346,29	101.279.537.629,04	2.390.225.717,25
Piutang Netto	48.716.114.535,22	47.596.494.029,46	5.900.071.940,25

Piutang Pajak merupakan hak pemerintah terhadap pendapatan tersebut. Piutang ini diakui pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) oleh Bidang PP3 BPKPAD dan sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah). Rincian Piutang Pajak Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Rincian Piutang Bruto Pajak Daerah sebagai berikut:

	Jenis Pajak Daerah	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	777.012.688,00	697.181.467,00	79.831.221,00
5.3.1.1.2.2	PBJT-Jasa Perhotelan	110.915.137,50	114.381.798,50	(3.466.661,00)
5.3.1.1.2.3	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	122.503.723,10	122.503.723,10	-
5.3.1.1.2.4	PBJT-Jasa Parkir	7.494.728,90	5.994.503,90	1.500.225,00
5.3.1.1.2.5	Pajak Air Tanah	144.581.825,00	129.460.575,00	15.121.250,00
5.3.1.1.2.6	PBB P2	145.216.847.342,00	141.883.569.033,00	3.333.278.309,00
5.3.1.1.2.7	Pajak Reklame	411.365.862,00	413.969.475,00	(2.603.613,00)
5.3.1.1.2.8	PBJT-Tenaga Listrik	5.595.156.575,00	5.508.971.083,00	86.185.492,00
	Jumlah	152.385.877.881,50	148.876.031.658,50	3.509.846.223,00

Rincian Mutasi Piutang Pajak tahun 2024 sebagai berikut:

	Jenis Pajak Daerah	Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	697.181.467,00	146.036.009,00	66.204.788,00	777.012.688,00
5.3.1.1.2.2	PBJT-Jasa Perhotelan	114.381.798,50	37.889.297,00	41.355.958,00	110.915.137,50
5.3.1.1.2.3	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	122.503.723,10	-	-	122.503.723,10
5.3.1.1.2.4	PBJT-Jasa Parkir	5.994.503,90	3.271.425,00	1.771.200,00	7.494.728,90
5.3.1.1.2.5	Pajak Air Tanah	129.460.575,00	41.908.533,00	26.787.283,00	144.581.825,00
5.3.1.1.2.6	PBB P2	141.883.569.033,00	17.836.028.968,00	14.502.750.659,00	145.216.847.342,00
5.3.1.1.2.7	Pajak Reklame	413.969.475,00	42.567.784,00	45.171.397,00	411.365.862,00
5.3.1.1.2.8	PBJT-Tenaga Listrik	5.508.971.083,00	5.595.156.575,00	5.508.971.083,00	5.595.156.575,00

	Jumlah	148.876.031.658,50	23.702.858.591,00	20.193.012.368,00	152.385.877.881,50

Penyisihan Piutang Pajak Daerah

	Jenis Pajak Daerah	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	609.135.228,05	629.227.902,14	(20.092.674,10)
5.3.1.1.2.2	PBJT-Jasa Perhotelan	64.679.643,08	56.619.240,64	8.060.402,44
5.3.1.1.2.3	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	122.503.723,10	118.253.723,10	4.250.000,00
5.3.1.1.2.4	PBJT-Jasa Parkir	3.894.961,03	3.728.099,90	166.861,13
5.3.1.1.2.5	Pajak Air Tanah	91.781.910,17	89.502.602,37	2.279.307,80
5.3.1.1.2.6	PBB P2	102.431.397.451,44	100.104.211.274,42	2.327.186.177,02
5.3.1.1.2.7	Pajak Reklame	346.370.429,42	277.994.786,47	68.375.642,95
5.3.1.1.2.8	PBJT-Tenaga Listrik	-	-	-
	Jumlah	103.669.763.346,29	101.279.537.629,04	2.390.225.717,25

Piutang Netto Pajak Daerah tahun 2024 sebagai berikut:

	Jenis Piutang Pajak	Per 31 Desember 2024		
		Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Netto (Rp)
5.3.1.1.2.1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	777.012.688,00	609.135.228,05	167.877.459,96
5.3.1.1.2.2	PBJT-Jasa Perhotelan	110.915.137,50	64.679.643,08	46.235.494,42
5.3.1.1.2.3	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	122.503.723,10	122.503.723,10	-
5.3.1.1.2.4	PBJT-Jasa Parkir	7.494.729,90	3.894.961,03	3.599.768,87
5.3.1.1.2.5	Pajak Air Tanah	144.581.825,00	91.781.910,17	52.799.914,83
5.3.1.1.2.6	PBB P2	145.216.847.342,00	102.431.397.451,44	42.785.449.890,56
5.3.1.1.2.7	Pajak Reklame	411.244.362,00	346.370.429,42	64.873.932,58
5.3.1.1.2.8	PBJT-Tenaga Listrik	5.595.156.575,00	-	5.595.156.575,00
	Jumlah	152.385.756.382,50	103.669.763.346,29	48.715.993.036,22

Penyisihan Piutang Pajak yang tidak tertagih dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.1.2.1 PBJT-Makanan dan/atau Minuman

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	146.036.009,00	0,50%	730.180,05	145.305.828,96

>1 Tahun s/d 2 Tahun	6.186.840,00	10%	618.684,00	5.568.156,00
>2 tahun s/d 5 Tahun	34.006.950,00	50%	17.003.475,00	17.003.475,00
>5 tahun	590.782.889,00	100%	590.782.889,00	-
Jumlah	**777.012.688,00**		**609.135.228,05**	**167.877.459,96**

5.3.1.1.2.2 PBJT-Jasa Perhotelan

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	37.889.297,00	0,50%	189.446,48	37.699.850,52
>1 Tahun s/d 2 Tahun	8.655.871,00	10%	865.587,10	7.790.283,90
>2 tahun s/d 5 Tahun	1.490.720,00	50%	745.360,00	745.360,00
>5 tahun	62.879.249,50	100%	62.879.249,50	-
Jumlah	**110.915.137,50**		**64.679.643,08**	**46.235.494,42**

5.3.1.1.2.3 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	-	0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 2 Tahun	-	10%	-	-
>2 tahun s/d 5 Tahun	-	50%	-	-
>5 tahun	122.503.723,10	100%	122.503.723,10	-
Jumlah	**122.503.723,10**		**122.503.723,10**	**-**

5.3.1.1.2.4 PBJT-Jasa Parkir

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	3.271.426,00	0,50%	16.357,13	3.255.068,87
>1 Tahun s/d 2 Tahun	-	10%	-	-
>2 tahun s/d 5 Tahun	689.400,00	50%	344.700,00	344.700,00
>5 tahun	3.533.903,90	100%	3.533.903,90	-
Jumlah	**7.494.729,90**		**3.894.961,03**	**3.599.768,87**

5.3.1.1.2.5 Pajak Air Tanah

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	41.908.533,00	0,50%	209.542,67	41.698.990,33
>1 Tahun s/d 2 Tahun	10.068.850,00	10%	1.006.885,00	9.061.965,00

>2 tahun s/d 5 Tahun	4.077.919,00	50%	2.038.959,50	2.038.959,50
>5 tahun	88.526.523,00	100%	88.526.523,00	-
Jumlah	**144.581.825,00**		**91.781.910,17**	**52.799.914,83**

5.3.1.1.2.6 PBB P2

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	17.836.028.968,00	0,50%	89.180.144,84	17.746.848.823,16
>1 Tahun s/d 2 Tahun	12.287.947.946,00	10%	1.228.794.794,60	11.059.153.151,40
>2 tahun s/d 5 Tahun	27.958.895.832,00	50%	13.979.447.916,00	13.979.447.916,00
>5 tahun	87.133.974.596,00	100%	87.133.974.596,00	-
Jumlah	**145.216.847.342,00**		**102.431.397.451,44**	**42.785.449.890,56**

5.3.1.1.2.7 Pajak Reklame

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun	42.837.784,00	0,50%	214.188,92	42.623.595,08
>1 Tahun s/d 2 Tahun	13.500,00	10%	1.350,00	12.150,00
>2 tahun s/d 5 Tahun	44.476.375,00	50%	22.238.187,50	22.238.187,50
>5 tahun	323.916.703,00	100%	323.916.703,00	-
Jumlah	**411.244.362,00**		**346.370.429,42**	**64.873.932,58**

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi	13.381.132.830,59	2.336.860.994,75	11.044.271.835,85

Piutang Retribusi merupakan penerimaan terhadap pendapatan retribusi. Piutang Retribusi diakui saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan yang berakibat timbulnya tagihan berupa hak Pemerintah Daerah melalui OPD pengelola terkait dan sampai dengan tanggal Neraca belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Retribusi Daerah.

Rekapitulasi saldo piutang bruto, penyisihan piutang dan piutang Netto tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Piutang Bruto	17.239.224.192,85	4.919.697.367,85	12.319.526.825,00
Penyisihan Piutang	3.858.091.362,26	2.582.836.373,11	1.275.254.989,16
Piutang Netto	13.381.132.830,59	2.336.860.994,75	11.044.271.835,85

Nama OPD dan jenis Piutang Retribusi yang dikelola tahun 2024 sebagai berkut:

Nomor	Nama OPD	Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)

Nomor	Nama OPD	Jenis Piutang Retribusi	Rp	Rp
1	RSUD Panembahan Senopati	Piutang Jaminan Kesehatan atas Layanan Kesehatan di BLUD RSUD	14.293.446.808,00	2.825.703.724,00
2	RSUD Saras Adhyatma	Piutang Jaminan Kesehatan atas Layanan Kesehatan di BLUD RSUD		
3	Dinas Kesehatan	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di Puskesmas	366.932.550,00	137.129.250,00
4	Dinas Komunikasi & Informatika	Retribusi Menara Telekomunikasi	350.411.367,00	361.502.967,00
5	Dinas Perhubungan	Retribusi Khusus Parkir	45.345.000,00	80.500.000,00
		Retribusi Parkir Tepi Jalan	63.140.500,00	88.090.500,00
		Retribusi Ijin Trayek	700.000,00	700.000,00
6	DPUPKP	Retribusi Rusunawa	13.689.954,00	26.573.060,00
		Retribusi IMB	29.626.639,85	29.626.639,85
		Limbah Rumah Tangga	22.342.000,00	-
7	Badan Lingkungan Hidup	Retribusi Ijin Gangguan	19.534.720,00	19.534.720,00
		Retribusi Sampah	80.401.739,00	55.678.375,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pelayanan Pasar	1.473.214.573,00	1.203.525.062,00
		Retribusi Kebersihan Pasar	88.440.742,00	52.000.070,00
		Retribusi Ijin Minuman Beralkohol	25.753.000,00	25.753.000,00
9	DKPP	Retribusi Benih Padi	-	13.380.000,00
		Jumlah	16.872.979.592,85	4.919.697.367,85

Mutasi Piutang Retribusi tahun 2024 sebagai berikut:

	Jenis Piutang Retribusi	Saldo Awal 20232Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.2.1	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di BLUD RSPS	2.825.703.724,00	192.990.560.587,00	181.522.817.503,00	14.293.446.808,00
5.3.1.1.2.2.2	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di BLUD RSSA		366.244.600,00		366.244.600,00
5.3.1.1.2.2.3	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di Puskesmas	137.129.250,00	366.932.550,00	137.129.250,00	366.932.550,00
5.3.1.1.2.2.4	Retribusi Menara Telekomunikasi	361.502.967,00	-	11.091.600,00	350.411.367,00
5.3.1.1.2.2.5	Retribusi Khusus Parkir	80.500.000,00	-	35.155.000,00	45.345.000,00
5.3.1.1.2.2.6	Retribusi Parkir Tepi Jalan	88.090.500,00	-	24.950.000,00	63.140.500,00
5.3.1.1.2.2.7	Retribusi Ijin Trayek	700.000,00	-	-	700.000,00
5.3.1.1.2.2.8	Retribusi Rusunawa	26.573.060,00	1.264.223.400,00	1.277.106.506,00	13.689.954,00

5.3.1.1.2.2.9	Retribusi IMB	29.626.639,85		-	29.626.639,85
5.3.1.1.2.2.10	Limbah Rumah Tangga	-	22.342.000,00		22.342.000,00
5.3.1.1.2.2.11	Retribusi Ijin Gangguan	19.534.720,00	-	-	19.534.720,00
5.3.1.1.2.2.12	Retribusi Sampah	55.678.375,00	50.661.934,00	25.938.570,00	80.401.739,00
5.3.1.1.2.2.13	Retribusi Pelayanan Pasar	1.203.525.062,00	460.080.259,00	190.390.748,00	1.473.214.573,00
5.3.1.1.2.2.14	Retribusi Kebersihan Pasar	52.000.070,00	46.110.955,00	9.670.283,00	88.440.742,00
5.3.1.1.2.2.15	Retribusi Ijin Minuman Beralkohol	25.753.000,00	-	-	25.753.000,00
5.3.1.1.2.2.16	Retribusi benih padi	13.380.000,00		13.380.000,00	-
	Jumlah	**4.919.697.367,85**	**195.567.156.285,00**	**183.247.629.460,00**	**17.239.224.192,85**

Rincian piutang bruto per jenis piutang retribusi daerah sebagai berikut:

	Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.2.1	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di BLUD RSPS	14.293.446.808,00	2.825.703.724,00	11.467.743.084,00
5.3.1.1.2.2.2	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di BLUD RSSA	366.244.600,00		366.244.600,00
5.3.1.1.2.2.3	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di Puskesmas	366.932.550,00	137.129.250,00	229.803.300,00
5.3.1.1.2.2.4	Retribusi Menara Telekomunikasi	350.411.367,00	361.502.967,00	(11.091.600,00)
5.3.1.1.2.2.5	Retribusi Khusus Parkir	45.345.000,00	80.500.000,00	(35.155.000,00)
5.3.1.1.2.2.6	Retribusi Parkir Tepi Jalan	63.140.500,00	88.090.500,00	(24.950.000,00)
5.3.1.1.2.2.7	Retribusi Ijin Trayek	700.000,00	700.000,00	-
5.3.1.1.2.2.8	Retribusi Rusunawa	13.689.954,00	26.573.060,00	(12.883.106,00)
5.3.1.1.2.2.9	Retribusi IMB	29.626.639,85	29.626.639,85	-
5.3.1.1.2.2.10	Limbah Rumah Tangga	22.342.000,00		22.342.000,00
5.3.1.1.2.2.11	Retribusi Ijin Gangguan	19.534.720,00	19.534.720,00	-
5.3.1.1.2.2.12	Retribusi Sampah	80.401.739,00	55.678.375,00	24.723.364,00
5.3.1.1.2.2.13	Retribusi Pelayanan Pasar	1.473.214.573,00	1.203.525.062,00	269.689.511,00
5.3.1.1.2.2.14	Retribusi Kebersihan Pasar	88.440.742,00	52.000.070,00	36.440.672,00
5.3.1.1.2.2.15	Retribusi Ijin Minuman Beralkohol	25.753.000,00	25.753.000,00	-
5.3.1.1.2.2.16	Retribusi benih padi	-	13.380.000,00	(13.380.000,00)
	Jumlah	**17.239.224.192,85**	**4.919.697.367,85**	**12.319.526.825,00**

Rincian Penyisihan piutang per jenis piutang retribusi daerah sebagai berikut:

	Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.2.1	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di BLUD RSPS	2.078.643.250,27	907.962.619,88	1.170.680.630,39

5.3.1.1.2.2.2	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di BLUD RSSA			
5.3.1.1.2.2.3	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di Puskesmas		-	-
5.3.1.1.2.2.4	Retribusi Menara Telekomunikasi	350.411.367,00	351.273.567,00	(862.200,00)
5.3.1.1.2.2.5	Retribusi Khusus Parkir	45.345.000,00	80.500.000,00	(35.155.000,00)
5.3.1.1.2.2.6	Retribusi Parkir Tepi Jalan	63.140.500,00	88.090.500,00	(24.950.000,00)
5.3.1.1.2.2.7	Retribusi Ijin Trayek	700.000,00	700.000,00	-
5.3.1.1.2.2.8	Retribusi Rusunawa	13.689.954,00	10.756.858,40	2.933.095,60
5.3.1.1.2.2.9	Retribusi IMB	29.626.639,85	29.626.639,85	0,00
5.3.1.1.2.2.10	Limbah Rumah Tangga	11.171.000,00		11.171.000,00
5.3.1.1.2.2.11	Retribusi Ijin Gangguan	19.534.720,00	19.534.720,00	-
5.3.1.1.2.2.12	Retribusi Sampah	46.767.182,89	26.309.520,50	20.457.662,39
5.3.1.1.2.2.13	Retribusi Pelayanan Pasar	1.118.594.591,29	992.318.237,48	126.276.353,82
5.3.1.1.2.2.14	Retribusi Kebersihan Pasar	54.714.156,97	43.320.710,00	11.393.446,97
5.3.1.1.2.2.15	Retribusi Ijin Minuman Beralkohol	25.753.000,00	25.753.000,00	-
5.3.1.1.2.2.16	Retribusi benih padi	-	6.690.000,00	(6.690.000,00)
	Jumlah	3.858.091.362,26	2.582.836.373,11	1.275.254.989,16

Piutang Netto Retribusi Daerah tahun 2023 sebagai berikut:

Nomor	Jenis piutang retribusi daerah:	Per 31 Desember 2024		
		Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Netto (Rp)
5.3.1.1.2.2.1	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di BLUD RSUD	14.293.446.808,00	2.078.643.250,27	12.214.803.557,74
5.3.1.1.2.2.2	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di Puskesmas	366.932.550,00		366.932.550,00
5.3.1.1.2.2.3	Retribusi Menara Telekomunikasi	350.411.367,00	350.411.367,00	-
5.3.1.1.2.2.4	Retribusi Khusus Parkir	45.345.000,00	45.345.000,00	-
5.3.1.1.2.2.5	Retribusi Parkir Tepi Jalan	63.140.500,00	63.140.500,00	-
5.3.1.1.2.2.6	Retribusi Ijin Trayek	700.000,00	700.000,00	-
5.3.1.1.2.2.7	Retribusi Rusunawa	13.689.954,00	13.689.954,00	-
5.3.1.1.2.2.8	Retribusi IMB	29.626.639,85	29.626.639,85	(0,00)
5.3.1.1.2.2.9	Limbah Rumah Tangga	22.342.000,00	11.171.000,00	11.171.000,00
5.3.1.1.2.2.10	Retribusi Ijin Gangguan	19.534.720,00	19.534.720,00	-
5.3.1.1.2.2.11	Retribusi Sampah	80.401.739,00	46.767.182,89	33.634.556,11
5.3.1.1.2.2.12	Retribusi Pelayanan Pasar	1.473.214.573,00	1.118.594.591,29	354.619.981,71
5.3.1.1.2.2.13	Retribusi Kebersihan Pasar	88.440.742,00	54.714.156,97	33.726.585,04

5.3.1.1.2.2.14	Retribusi Ijin Minuman Beralkohol		25.753.000,00	25.753.000,00	-
5.3.1.1.2.2.15	Retribusi benih padi		-		-
		Jumlah	16.872.979.592,85	3.858.091.362,26	13.014.888.230,59

Penyisihan Piutang Retribusi yang tidak tertagih dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.1.2.2.1 Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di BLUD RSUD

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	11.747.776.073,00	0,50%	58.738.880,37	11.689.037.192,64
>1 s/d 3 bulan	489.362.789,00	10%	48.936.278,90	440.426.510,10
>2 s/d 12 bulan	170.679.710,00	50%	85.339.855,00	85.339.855,00
> 12 bulan	1.885.628.236,00	100%	1.885.628.236,00	-
Jumlah	14.293.446.808,00		2.078.643.250,27	12.214.803.557,74

Mutasi Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di BLUD RSUD Tahun 2024

NO	Nama Debitur	Saldo Awal 20232Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir 2024 (Rp)
1	BPJS Kesehatan	647.418.496,00	185.398.882.362,00	174.836.808.583,00	**11.209.492.275,00**
2	BPJS Ketenagakerjaan		635.353.610,00	635.353.610,00	**-**
3	Asuransi In-Health	6.859.073,00	78.170.802,00	53.591.970,00	**31.437.905,00**
4	BAPEL Jamkesos		163.686.600,00	163.686.600,00	**-**
5	Jamkesda	-	82.682.200,00	70.572.700,00	**12.109.500,00**
6	PT Madu Baru	21.784.202,00		16.951.501,00	4.832.701,00
7	PT Maeisindo	25.096.585,00	103.444.902,00	87.340.937,00	41.200.550,00
8	Asuransi Wana Artha Life	12.045.138,00			12.045.138,00
9	Asuransi Puri Asih	17.979.733,00			17.979.733,00
10	Tunggakan Pasien	844.696.155,00	129.998.542,00	90.713.873,00	883.980.824,00
11	Ummi Khasanah	27.030.000,00	5.006.000,00		32.036.000,00
12	JAMPERSAL		14.618.000,00	14.618.000,00	-
13	RS UII	-	58.294.000,00	51.470.000,00	6.824.000,00
14	RS Elisabeth	50.888.000,00	260.386.872,00	239.068.000,00	72.206.872,00
15	PT TASPEN		79.053.108,00	79.053.108,00	
16	PT Jasa Raharja	122.306.061,00	5.405.031.363,00	4.603.621.814,00	923.715.610,00
17	Java Parking	281.000.000,00			281.000.000,00
18	Covid-19 (Kemenkes)	479.065.700,00			479.065.700,00

19	RSPAU Harjolukito	935.000,00	48.113.000,00	47.528.000,00	1.520.000,00
20	Nusantara Parking	284.000.000,00			284.000.000,00
21	CV Petra	4.599.579,00	1.296.891,00	5.896.470,00	-
22	Global Fund	-	10.879.016,00	10.879.016,00	-
23	RSKB	-			-
24	Satria Parkir	-	244.260.000,00	244.260.000,00	-
25	RS Saras Adhyatma	-	56.239.000,00	56.239.000,00	-
26	RS Nur Hidayah	-	72.597.000,00	72.597.000,00	-
27	RS Respira	-	220.000,00	220.000,00	-
28	BKPSDM	-	8.164.000,00	8.164.000,00	-
29	BTT	-	15.223.526,00	15.223.526,00	-
30	DPRD Bantul	-	12.727.000,00	12.727.000,00	-
31	DPRD DIY	-	5.962.000,00	5.962.000,00	-
32	ASABRI	-	32.145.793,00	32.145.793,00	-
33	JR Putra	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-
34	KPU	-	31.674.000,00	31.674.000,00	-
35	Desa Panggungharjo	-	879.000,00	879.000,00	-
36	BAWASLU	-	32.120.000,00	32.120.000,00	
	Jumlah	2.825.703.722,00	192.990.608.587,00	181.522.865.501,00	14.293.446.808,00

5.3.1.1.2.2.2 Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di Puskesmas

Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di Puskesmas tidak disisihkan piutangnya karena tingkat terbayarnya piutang tinggi

Rincian Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di Puskesmas tahun 2024 sebagai berikut:

NOMOR	NAMA PUSKESMAS	NON KAPITASI	JAMKESDA	JAMKESOS	JUMLAH
1	Srandakan	11.544.500,00	4.434.850,00	-	15.979.350,00
2	Sanden	6.635.000,00	12.754.540,00	-	19.389.540,00
3	Kretek	8.487.000,00	7.940.360,00	-	16.427.360,00
4	Pundong	-	18.964.160,00	-	18.964.160,00
5	Bambanglipuro	19.750.000,00	8.771.190,00	-	28.521.190,00
6	Pandak I	-	4.228.100,00	-	4.228.100,00
7	Pandak II	2.115.000,00	5.349.160,00	-	7.464.160,00
8	Bantul I	-	1.777.800,00	-	1.777.800,00

9	Bantul II	-	7.315.630,00	-	7.315.630,00
10	Jetis I		12.484.380,00	-	12.484.380,00
11	Jetis II	2.790.000,00	2.811.770,00	-	5.601.770,00
12	Imogori I	23.525.000,00	20.835.890,00	-	44.360.890,00
13	Imogiri II	12.103.000,00	17.427.950,00	-	29.530.950,00
14	Dlingo I	4.705.000,00	8.660.900,00	-	13.365.900,00
15	Dlingo II	3.885.000,00	-	-	3.885.000,00
16	Pleret	11.090.000,00	13.109.740,00	-	24.199.740,00
17	Piyungan	7.495.000,00	5.815.560,00	-	13.310.560,00
18	Banguntapan I	-	9.440.690,00	-	9.440.690,00
19	Banguntapan II	2.870.000,00	-	-	2.870.000,00
20	Banguntapan III		434.050,00	-	434.050,00
21	Sewon I	8.970.000,00	9.122.220,00	-	18.092.220,00
22	Sewon II	-	8.743.270,00	-	8.743.270,00
23	Kasihan I	-	11.176.850,00	-	11.176.850,00
24	Kasihan II	1.980.000,00	9.614.120,00	-	11.594.120,00
25	Pajangan	3.060.000,00	9.328.190,00	-	12.388.190,00
26	Sedayu I	11.605.000,00	4.146.450,00	-	15.751.450,00
27	Sedayu II	5.475.000,00	4.160.230,00	-	9.635.230,00
		148.084.500,00	218.848.050,00		366.932.550,00

5.3.1.1.2.2.3 Retribusi Menara Telekomunikasi

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	-	0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>3 s/d 12 bulan	-	50%	-	-
> 12 bulan	350.411.367,00	100%	350.411.367,00	-
Jumlah	350.411.367,00		350.411.367,00	-

5.3.1.1.2.2.4 Retribusi Khusus Parkir

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)

0 s/d 1 bulan	-	0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>3 s/d 12 bulan	-	50%	-	-
> 12 bulan	45.345.000,00	100%	45.345.000,00	-
Jumlah	45.345.000,00		45.345.000,00	**-**

5.3.1.1.2.2.5 Retribusi Parkir Tepi Jalan

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan		0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan		10%	-	-
>3 s/d 12 bulan		50%	-	-
> 12 bulan	63.140.500,00	100%	63.140.500,00	-
Jumlah	63.140.500,00		63.140.500,00	**-**

5.3.1.1.2.2.6 Retribusi Ijin Trayek

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	-	0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>3 s/d 12 bulan	-	50%	-	-
> 12 bulan	700.000,00	100%	700.000,00	-
Jumlah	**700.000,00**		**700.000,00**	**-**

5.3.1.1.2.2.7 Retribusi Rusunawa

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	-	0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>3 s/d 12 bulan	-	50%	-	-
> 12 bulan	13.689.954,00	100%	13.689.954,00	-
Jumlah	13.689.954,00		13.689.954,00	**-**

5.3.1.1.2.2.8 Retribusi IMB 0

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan		0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan		10%	-	-
>3 s/d 12 bulan		50%	-	-
> 12 bulan	29.626.639,85	100%	29.626.639,85	-
Jumlah	**29.626.639,85**		**29.626.639,85**	**-**

5.3.1.1.2.2.9 Limbah Rumah Tangga

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	-	0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>3 s/d 12 bulan	22.342.000,00	50%	11.171.000,00	11.171.000,00
> 12 bulan		100%	-	-
Jumlah	22.342.000,00		11.171.000,00	11.171.000,00

5.3.1.1.2.2.10 Retribusi Ijin Gangguan

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	-	0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>3 s/d 12 bulan	-	50%	-	-
> 12 bulan	19.534.720,00	100%	19.534.720,00	-
Jumlah	**19.534.720,00**		**19.534.720,00**	**-**

5.3.1.1.2.2.11 Retribusi Sampah

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	12.980.378,00	0,50%	64.901,89	12.915.476,11
>1 s/d 3 bulan	4.695.755,00	10%	469.575,50	4.226.179,50

>3 s/d 12 bulan	32.985.801,00	50%	16.492.900,50	16.492.900,50
> 12 bulan	29.739.805,00	100%	29.739.805,00	-
Jumlah	80.401.739,00		46.767.182,89	33.634.556,11

5.3.1.1.2.2.12 Retribusi Pelayanan Pasar

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	126.592.398,00	0,50%	632.961,99	125.959.436,01
>1 s/d 3 bulan	194.846.663,00	10%	19.484.666,30	175.361.996,70
>3 s/d 12 bulan	106.597.098,00	50%	53.298.549,00	53.298.549,00
> 12 bulan	1.045.178.414,00	100%	1.045.178.414,00	-
Jumlah	1.473.214.573,00		1.118.594.591,29	354.619.981,71

5.3.1.1.2.2.13 Retribusi Kebersihan Pasar

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	10.117.473,00	0,50%	50.587,37	10.066.885,64
>1 s/d 3 bulan	14.157.396,00	10%	1.415.739,60	12.741.656,40
>3 s/d 12 bulan	21.836.086,00	50%	10.918.043,00	10.918.043,00
> 12 bulan	42.329.787,00	100%	42.329.787,00	-
Jumlah	88.440.742,00		54.714.156,97	33.726.585,04

5.3.1.1.2.2.14 Retribusi Ijin Minuman Beralkohol

Umur Piutang	Jumlah Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan		0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan		10%	-	-
>3 s/d 12 bulan		50%	-	-
> 12 bulan	25.753.000,00	100%	25.753.000,00	-
Jumlah	**25.753.000,00**		**25.753.000,00**	**-**

31-Des-24	31-Des-23	Bertambah (Berkurang)

		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.2.3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.606.126.723,86	-	20.606.126.723,86

Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

No	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31-Des-24	31-Des-23	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Bagian laba Pemda atas PT Bank BPD DIY	15.376.947.091,00		15.376.947.091,00
2	Bagian laba Pemda atas PT BPR Bank Bantul (Perseroda)	4.146.980.489,28	-	4.146.980.489,28
3	Bagian laba Pemda atas PDAM Tirta Projotamansari	1.082.199.143,58	-	1.082.199.143,58
4	Bagian laba Pemda atas Perumdam Aneka Dharma	-	-	-
5	Bagian laba Pemda atas BUKP	0		-
	Piutang Netto	20.606.126.723,86	0	20.606.126.723,86

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal Pemda pada BUMD yang belum diterima Per 31 Desember 2024 dan akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2025.

1 Bagian Laba Pemda atas PT Bank BPD DIY

Berdasarkan pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 11 Maret 2025 Perolehan deviden untuk Pemeritah Kabupaten Bantul TA 2025 sebesar Rp15.376.947.091,00 dari modal sebesar Rp202.641.000.000,00

2 Bagian Laba Pemda atas PT BPR Bank Bantul (Perseroda)

Berdasarkan Laporan Keuangan PT BPR Bank Bantul (Perseroda)Tahun 2024 Audited, total laba setelah pajak tahun 2024 sebesar Rp7.547.512.038,00. Untuk piutang bagian laba Per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.146.980.489,28 merupakan bagian laba Pemda atas penyertaan modal Pemda pada PT BPR Bank Bantul berdasarkan Laporan Keuangan PT BPR Bank Bantul Tahun 2024 Audited dan akan diterima setorannya pada tahun 2025.

3 Bagian laba Pemda atas PDAM Tirta Projotamansari

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta ProjotamansariTahun 2024 Audited, total laba setelah pajak tahun 2024 sebesar Rp1.967.634.806,51. UntukPiutang bagian laba Per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.082.199.143,58 merupakan bagian laba Pemda atas PDAM Tirta Projotamansasri berdasarkan Laporan Keuangan PDAM TirtaProjotamansariTahun 2024 Audited dan akan diterima setorannya pada tahun 2025.

4 Bagian laba Pemda atas Perumdam Aneka Dharma

Berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Aneka Dharma Tahun 2024 Audited, Perumda Aneka Dharma memperoleh Laba usaha setelah pajak sebesar Rp84.186.244,00 akan tetapi belum berkewajiban untuk menyetorkan bagi hasil laba ke Pemda karena masih memenuhi persentasi cadangan umum sebesar 20% dari modal disetor.

5 Bagian laba Pemda atas BUKP

Saldo piutang Bagian Laba atas BUKP nihil

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	60.546.502.899,00	60.782.486.429,00	(235.983.530,00)

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Piutang Bruto	60.546.502.899,00	60.782.486.429,00	(235.983.530,00)
Penyisihan piutang	49.726.925.474,22	48.392.978.055,37	1.333.947.418,85
Piutang Netto	10.819.577.424,78	12.389.508.373,63	(1.569.930.948,85)

Mutasi Piutang PAD Lainnya tahun 2024 sebagai berikut:

	Jenis Piutang	Saldo awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir (Rp)
5.3.1.1.2.4.2	Partisipasi Pembanguan Kios	94.287.500,00	-	-	94.287.500,00
5.3.1.1.2.4.4	Piutang Denda PBB P2	59.932.343.547,00	4.448.028.241,00	4.678.082.553,00	59.702.289.235,00
5.3.1.1.2.4.5	Piutang Denda Pajak Hotel	37.684.638,00	5.060.378,00	6.025.365,00	36.719.651,00
5.3.1.1.2.4.6	Piutang Denda Pajak Restoran	313.015.804,00	7.124.227,00	15.309.932,00	304.830.099,00
5.3.1.1.2.4.7	Piutang Denda Pajak Hiburan	58.801.797,00	-	-	58.801.797,00
5.3.1.1.2.4.8	Piutang Denda Pajak Parkir	2.087.674,00	357.624,00	328.602,00	2.116.696,00
5.3.1.1.2.4.9	Piutang Denda Pajak ABT	46.127.244,00	3.896.955,00	699.286,00	49.324.913,00
5.3.1.1.2.4.10	Piutang Denda Pajak Reklame	179.233.991,00	3.524.554,00	3.709.137,00	179.049.408,00
5.3.1.1.2.4.11	Piutang atas sewa barang milik daerah berupa tanah dan gedung eks Transito Kabupaten Bantul oleh Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Yogyakarta	83.210.400,00	-	-	83.210.400,00
5.3.1.1.2.4.13	Piutang Kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Omah Lele	35.693.834	179.366,00	-	35.873.200,00
	Jumlah	60.782.486.429,00	4.468.171.345,00	4.704.154.875,00	60.546.502.899,00

Rincian piutang bruto per jenis piutang PAD lainnya sebagai berikut:

	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.4.2	Partisipasi Pembanguan Kios	94.287.500,00	94.287.500,00	-

5.3.1.1.2.4.4	Piutang Denda PBB P2	59.702.289.235,00	59.932.343.547,00	(230.054.312,00)
5.3.1.1.2.4.5	Piutang Denda Pajak Hotel	36.719.651,00	37.684.638,00	(964.987,00)
5.3.1.1.2.4.6	Piutang Denda Pajak Restoran	304.830.099,00	313.015.804,00	(8.185.705,00)
5.3.1.1.2.4.7	Piutang Denda Pajak Hiburan	58.801.797,00	58.801.797,00	-
5.3.1.1.2.4.8	Piutang Denda Pajak Parkir	2.116.696,00	2.087.674,00	29.022,00
5.3.1.1.2.4.9	Piutang Denda Pajak ABT	49.324.913,00	46.127.244,00	3.197.669,00
5.3.1.1.2.4.10	Piutang Denda Pajak Reklame	179.049.408,00	179.233.991,00	(184.583,00)
5.3.1.1.2.4.11	Piutang atas sewa barang milik daerah berupa tanah dan gedung eks Transito Kabupaten Bantul oleh Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Yogyakarta	83.210.400,00	83.210.400,00	-
5.3.1.1.2.4.13	Piutang Kerjasana Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Omah Lele	35.873.200,00	179.366,00	35.693.834,00
	Jumlah	60.546.502.899,00	60.746.971.961,00	(200.469.062,00)

Rincian penyisihan piutang per jenis piutang PAD lainnya sebagai berikut:

	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.4.2	Partisipasi Pembanguan Kios	94.287.500,00	94.287.500,00	-
5.3.1.1.2.4.4	Piutang Denda PBB P2	48.920.164.680,75	47.827.036.628,57	1.093.128.052,18
5.3.1.1.2.4.5	Piutang Denda Pajak Hotel	30.864.620,55	27.065.167,43	3.799.453,12
5.3.1.1.2.4.6	Piutang Denda Pajak Restoran	291.840.811,48	301.704.202,65	(9.863.391,17)
5.3.1.1.2.4.7	Piutang Denda Pajak Hiburan	58.801.797,00	56.761.797,00	2.040.000,00
5.3.1.1.2.4.8	Piutang Denda Pajak Parkir	1.862.191,48	1.785.553,57	76.637,91
5.3.1.1.2.4.9	Piutang Denda Pajak ABT	43.851.229,31	230.636,21	43.620.593,10
5.3.1.1.2.4.10	Piutang Denda Pajak Reklame	166.169.043,65	896.169,94	165.272.873,71
5.3.1.1.2.4.11	Piutang atas sewa barang milik daerah berupa tanah dan gedung eks Transito Kabupaten Bantul oleh Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Yogyakarta	83.210.400,00	83.210.400,00	-
5.3.1.1.2.4.13	Piutang Kerjasana Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Omah Lele	35.873.200,00		35.873.200,00
	Jumlah	49.726.925.474,22	48.392.978.055,37	1.298.074.218,85

Piutang Netto PAD Lainnya tahun 2024 sebagai berikut

	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2024		
		Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Netto (Rp)
5.3.1.1.2.4.2	Partisipasi Pembanguan Kios	94.287.500,00	94.287.500,00	-
5.3.1.1.2.4.4	Piutang Denda PBB P2	59.702.289.235,00	48.920.164.680,75	10.782.124.554,25
5.3.1.1.2.4.5	Piutang Denda Pajak Hotel	36.719.651,00	30.864.620,55	5.855.030,45

5.3.1.1.2.4.6	Piutang Denda Pajak Restoran	304.830.099,00	291.840.811,48	12.989.287,52
5.3.1.1.2.4.7	Piutang Denda Pajak Hiburan	58.801.797,00	58.801.797,00	-
5.3.1.1.2.4.8	Piutang Denda Pajak Parkir	2.116.696,00	1.862.191,48	254.504,52
5.3.1.1.2.4.9	Piutang Denda Pajak ABT	49.324.913,00	43.851.229,31	5.473.683,69
5.3.1.1.2.4.10	Piutang Denda Pajak Reklame	179.049.408,00	166.169.043,65	12.880.364,36
5.3.1.1.2.4.11	Piutang atas sewa barang milik daerah berupa tanah dan gedung eks Transito Kabupaten Bantul oleh Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Yogyakarta	83.210.400,00	83.210.400,00	-
5.3.1.1.2.4.12	Piutang Kerjasana Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Omah Lele	35.873.200,00	35.873.200,00	-
	Jumlah	60.546.502.899,00	49.726.925.474,22	10.819.577.424,79

Penyisihan piutang PAD lainnya yang tidak tertagih dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.1.2.4.2 Partisipasi Pembangunan Kios

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan		0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan		10%	-	-
>2 s/d 12 Tahun		50%	-	-
> 12 tahun	94.287.500,00	100%	94.287.500,00	-
Jumlah	**94.287.500,00**		**94.287.500,00**	**-**

5.3.1.1.2.4.4 Piutang Denda PBB P2

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	632.097.589,00	0,50%	3.160.487,95	628.937.101,05
>1 s/d 3 bulan	3.825.613.838,00	10%	382.561.383,80	3.443.052.454,20
>3 s/d 12 Bulan	13.420.269.998,00	50%	6.710.134.999,00	6.710.134.999,00
> 12 Bulan	41.824.307.810,00	100%	41.824.307.810,00	-
Jumlah	59.702.289.235,00		48.920.164.680,75	10.782.124.554,25

5.3.1.1.2.4.5 Piutang Denda Pajak Hotel

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	2.709.510,00	0,50%	13.547,55	2.695.962,45

>1 s/d 3 bulan	3.112.550,00	10%	311.255,00	2.801.295,00
>3 s/d 12 Bulan	715.546,00	50%	357.773,00	357.773,00
> 12 Bulan	30.182.045,00	100%	30.182.045,00	-
Jumlah	36.719.651,00		30.864.620,55	5.855.030,45

5.3.1.1.2.4.6 Piutang Denda Pajak Restoran

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	4.102.576,00	0,50%	20.512,88	4.082.063,12
>1 s/d 3 bulan	828.396,00	10%	82.839,60	745.556,40
>3 s/d 12 Bulan	16.323.336,00	50%	8.161.668,00	8.161.668,00
> 12 Bulan	283.575.791,00	100%	283.575.791,00	-
	304.830.099,00		291.840.811,48	12.989.287,52

5.3.1.1.2.4.7 Piutang Denda Pajak Hiburan

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	-	0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>3 s/d 12 Bulan	-	50%	-	-
> 12 Bulan	58.801.797,00	100%	58.801.797,00	-
Jumlah	58.801.797,00		58.801.797,00	-

5.3.1.1.2.4.8 Piutang Denda Pajak Parkir

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	89.496,00	0,50%	447,48	89.048,52
>1 s/d 3 bulan	-	10%	-	-
>3 s/d 12 Bulan	330.912,00	50%	165.456,00	165.456,00
> 12 Bulan	1.696.288,00	100%	1.696.288,00	-
Jumlah	2.116.696,00		1.862.191,48	254.504,52

5.3.1.1.2.4.9 Piutang Denda Pajak ABT

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)

0 s/d 1 bulan	1.137.082,00	0,50%	5.685,41	1.131.396,59
>1 s/d 3 bulan	3.737.304,00	10%	373.730,40	3.363.573,60
>3 s/d 12 Bulan	1.957.427,00	50%	978.713,50	978.713,50
> 12 Bulan	42.493.100,00	100%	42.493.100,00	-
Jumlah	49.324.913,00		43.851.229,31	5.473.683,69

5.3.1.1.2.4.10 Piutang Denda Pajak Reklame

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan	2.182.929,00	0,50%	10.914,65	2.172.014,36
>1 s/d 3 bulan	37.800,00	10%	3.780,00	34.020,00
>3 s/d 12 Bulan	21.348.660,00	50%	10.674.330,00	10.674.330,00
> 12 Bulan	155.480.019,00	100%	155.480.019,00	-
Jumlah	179.049.408,00		166.169.043,65	12.880.364,36

5.3.1.1.2.4.11 Piutang atas sewa barang milik daerah berupa tanah dan gedung eks Transito Kabupaten Bantul oleh Universitas Nahdatul ulama (UNU) Yogyakarta

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan		0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan		10%	-	-
>3 s/d 12 Bulan		50%	-	-
> 12 Bulan	83.210.400,00	100%	83.210.400,00	-
Jumlah	83.210.400,00		83.210.400,00	**-**

5.3.1.1.2.4.12 Piutang Kerjasana Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Omah Lele

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
0 s/d 1 bulan		0,50%	-	-
>1 s/d 3 bulan		10%	-	-
>3 s/d 12 Bulan		50%	-	-
> 12 Bulan	35.873.200,00	100%	35.873.200,00	-
Jumlah	**35.873.200,00**		**35.873.200,00**	**-**

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)

5.3.1.1.2.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-

Pemerintah Kabupataen Bantul tidak mempunyai piutang transfer Pemerintah Pusat

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.6	Piutang Transfer Antar Daerah	8.242.200.378,00	366.750.338,00	7.875.450.040,00

Rincian Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2024 daan 2023 sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	3.388.286.926,00	281.139.270,00	3.107.147.656,00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.663.565.541,00	70.623.960,00	1.592.941.581,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.147.818.252,00	-	3.147.818.252,00
4	Pajak Air Permukaan	42.529.659,00	14.987.108,00	27.542.551,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok			-
6	Bagi Laba dari BUKP Sanden yang salah transfer			-
	Jumlah	8.242.200.378,00	366.750.338,00	7.875.450.040,00

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar Tahun 2024 atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024. Dalam SK. Gubernur tersebut disebutkan secara total Piutang Transfer antar Daerah (dari Pemda DIY) kepada Pemkab Bantul sebesar Rp8.242.200.378,00,

5.3.1.1.2.7 Piutang Lainnya

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Piutang Lainnya (Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat)	10.647.600.119,00	10.665.494.879,00	(17.894.760,00)

Jumlah tersebut merupakan jumlah Piutang Lainnya dari berbagai bentuk pinjaman pemerintah yang diberikan kepada masyarakat baik kepada kelompok maupun perorangan di Kabupaten Bantul Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Rekapitulasi saldo piutang bruto, nama OPD dan jenis Piutang Lainnya (Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat) yang di kelola tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berkut:

Nomor	Nama OPD	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023 (Rp)
			Rp	Rp
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan Industri Kecil (PIK)	270.804.856,00	271.004.856,00
		Pasar Seni Gabusan (PSG)	570.078.567,00	570.078.567,00
		Usaha Ekonomi produktif Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM)	283.596.230,00	287.244.990,00
		Pemberdayaan Pedagang Pasar	690.056.000,00	690.672.000,00

2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kredit Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK)	399.686.676,00	399.686.676,00
		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM)	4.205.334.305,00	4.205.334.305,00
		Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKB PMD)	156.772.650,00	156.772.650,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	*Revolving* Ternak Sapi	2.025.115.000,00	2.037.545.000,00
		Alih Profesi Penambang Pasir bagi petani peternak	60.800.000,00	60.800.000,00
		Piutang Pasca Panen	1.679.456.835,00	1.680.456.835,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penguatan modal usaha perikanan/Budidaya Ikan Gurami	300.899.000,00	300.899.000,00
5	Bagian Perekonomian PSDA	Lembaga Keuangan Mikro BMT	5.000.000,00	5.000.000,00
		Jumlah	10.647.600.119,00	10.665.494.879,00

Piutang yang berasal dari perikatan khususnya dana bergulir sesuai dengan tata pengelolaan yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul dan mengacu pada Buletin Teknis Nomor 7 Standart Akuntansi Pemerintahan pada pos neraca tercantum dan ditempatkan pada aset lancar pos piutang lainnya

Penjelasan dari masing-masing jenis piutang lainnya (pinjaman yang diberikan kepada masyarakat):

1. Pengembangan Industri Kecil (PIK)

   Penerima Dana Bergulir PIK warga Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP dan memiliki usaha industri kecil.

   Jangka waktu pengembalian dana bergulir PIK selama 24 (dua puluh empat) bulan

2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM)

   Penerima dana adalah warga Kabupaten Bantul (dibuktiksn dengsn KTP) yang membentuk kelompok yang beranggotakan 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) keluarga miskin dan mempunyai rencana kegiatan usaha di bidang peningkatan ekonomi.

   Jangka waktu pengembalian dana bergulir PEKM selama 12 (dua belas) bulan

   Jasa dana bergulir PEKM yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 3% dari total dana bergulir yang diterima.

3. Pasar Seni Gabusan (PSG)

   Penerima Dana bergulir PSG adalah pengrajin Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP dan menempati Pasar seni Gabusan

   Jangka waktu pengembalian dana bergulir PSG selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan masa tenggang selama 3 (tiga) bulan

4. Usaha Ekonomi produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

   Penerima dana bergulir UMKM adalah pengrajin Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP dan mempunyai usaha ekonomi produktif

   Jangka waktu pengembalian dana bergulir UMKM selama 12 (dua belas) bulan

5. Kredit Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK)

Penerima dana bergulir KUPK adalah warga bantul yang dibuktikan dengan KTP dengan membentuk kelompok yang beranggotakan minimal 5 (lima) orang dan masing-masing anggota kelompok mempunyai usaha ekonomi produktif

Jangka waktu pengembalian dana bergulir KUPK selama 12 (dua belas) bulan dengan masa tenggang selama 1 (satu) bulan

6. *Revolving* Ternak Sapi

Penerima dana bergulir Revolving ternak sapi adalah warga Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP dan merupakan petani peternak dengan penghasilan rendah.

Jangka waktu pengembalian dana bergulir revolving ternak sapi selama 5 (lima) tahun dengan masa angsuran selama 6 (enam) bulan

7. Alih Profesi Penambang Pasir bagi petani peternak (Dinas Pertanian)

Penerima dana bergulir alih profesi penambang pasir bagi petani peternak adalah warga Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP, bertempat tinggal tetap dan besedia menyediakan kandang, pakan dan mengelola ternak dengan baik

Jangka waktu pengembalian dana bergulir alih profesi penambang pasir bagi petani peternak selama 5 (lima) tahun dengan masa angsuran selama 6 (enam) bulan

8. Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKB PMD)

Penerima dana bergulir Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKB PMD) adalah warga Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP yang merupakan warga miskin dan membentuk kelompok uasaha ekonomi produktif yang beranggotakan 5 (lima) samapi 20 (dua puluh) keluarga

Jangka waktu pengembalian dana bergulir Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKB PMD) adalah 12 (dua belas) bulan

9. Penguatan modal usaha perikanan/Budidaya Ikan Gurami

Penerima dan bergulir Penguatan modal usaha perikanan/Budidaya Ikan Gurami adalah kelompok tani
Jangka waktu pengembalian Penguatan Modal Usaha Perikanan/Budidaya Ikan Gurami selama 2 (dua) tahun dengan masa angsuran 6 (enam) bulan sekali

10. Pemberdayaan Pedagang Pasar

Program pemberdayaan pedagang melalui dana bergulir ini dimaksudkan untuk menambah modal usaha pedagang agar dapat meningkatkan usahanya melalui penguatan modal untuk berdagang serta terlepas dari jeratan rentenir. Selain hal tersebut diatas, dana bergulir juga bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan bahwa masih banyak pedagang yang menggunakan jasa rentenir dalam menambah modal usahanya, dimana dana dapat diperoleh dengan mudah dan cepat serta tanpa persyaratan yang berbelit-belit meskipun dengan bunga yang tinggi.

Pada awalnya dana bergulir ditujukan untuk pedagang arahan yang lemah dalam permodalannya, namun seiring berjalannya waktu serta sesuai dengan dasar hukum yang digunakan, dana bergulir ditujukan untuk pedagang tetap yang berjualan di pasar tradisional.

Guna pemerataan pengguna dana bergulir untuk pedagang pasar, maka pada saat ini nominal pinjaman yang diterima oleh pedagang maksimal Rp1.000.000,00 dengan jangka waktu angsuran 100 kali angsuran dengan bunga 2 % yang dibayar di depan dan dengan syarat yang mudah yaitu fotocopy KTP pedagang.

Kondisi piutang lainnya pada saat ini hampir semua jenis piutang masuk dalam kategori piutang macet, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Piutang Bruto	10.647.600.119,00	10.665.494.879,00	(17.894.760,00)

Penyisihan Piutang	10.647.600.119,00	10.665.494.879,00	(17.894.760,00)
Piutang Netto	-	-	-

Mutasi Piutang Lainnya (Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat) tahun 2024 sebagai berikut:

		Saldo awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir (Rp)
5.3.1.1.2.7.1	Piutang PIK	271.004.856,00		200.000,00	270.804.856,00
5.3.1.1.2.7.2	Piutang PEKM	4.205.334.305,00	-	-	4.205.334.305,00
5.3.1.1.2.7.3	Piutang PSG	570.078.567,00			570.078.567,00
5.3.1.1.2.7.4	Piutang Kelompok UMKM	287.244.990,00		3.648.760,00	283.596.230,00
5.3.1.1.2.7.5	Piutang Kelompok KUPK	399.686.676,00	-	-	399.686.676,00
5.3.1.1.2.7.6	Piutang Penguatan Modal Sapi	2.037.545.000,00		12.430.000,00	2.025.115.000,00
5.3.1.1.2.7.7	Piutang Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKP)	60.800.000,00			60.800.000,00
5.3.1.1.2.7.8	Piutang Alih Profesi Penambang Pasir (DPPAPPKB)	156.772.650,00	-	-	156.772.650,00
5.3.1.1.2.7.9	Piutang Budi Daya Ikan	300.899.000,00			300.899.000,00
5.3.1.1.2.7.10	Piutang Lembaga Keuangan Mikro BMT	5.000.000,00			5.000.000,00
5.3.1.1.2.7.11	Piutang Pemberdayaan Pedagang Pasar	690.672.000,00		616.000,00	690.056.000,00
5.3.1.1.2.7.12	Piutang Pasca Panen	1.680.456.835,00		1.000.000,00	1.679.456.835,00
	Jumlah	10.665.494.879,00	-	17.894.760,00	10.647.600.119,00

Piutang Bruto Piutang Lainnya sebagai berikut:

	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.7.1	Piutang PIK	270.804.856,00	271.004.856,00	(200.000,00)
5.3.1.1.2.7.2	Piutang PEKM	4.205.334.305,00	4.205.334.305,00	-
5.3.1.1.2.7.3	Piutang PSG	570.078.567,00	570.078.567,00	-
5.3.1.1.2.7.4	Piutang Kelompok UMKM	283.596.230,00	287.244.990,00	(3.648.760,00)
5.3.1.1.2.7.5	Piutang Kelompok KUPK	399.686.676,00	399.686.676,00	-
5.3.1.1.2.7.6	Piutang Penguatan Modal Sapi	2.025.115.000,00	2.037.545.000,00	(12.430.000,00)
5.3.1.1.2.7.7	Piutang Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKP)	60.800.000,00	60.800.000,00	-
5.3.1.1.2.7.8	Piutang Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKBPMD)	156.772.650,00	156.772.650,00	-
5.3.1.1.2.7.9	Piutang Budi Daya Ikan	300.899.000,00	300.899.000,00	-
5.3.1.1.2.7.10	Piutang Lembaga Keuangan Mikro BMT	5.000.000,00	5.000.000,00	-

5.3.1.1.2.7.11	Piutang Pemberdayaan Pedagang Pasar	690.056.000,00	690.672.000,00	(616.000,00)
5.3.1.1.2.7.12	Piutang Pasca Panen	1.679.456.835,00	1.680.456.835,00	(1.000.000,00)
	Jumlah	10.647.600.119,00	10.665.494.879,00	(17.894.760,00)

Rincian penyisihan piutang sebagai berikut:

	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.7.1	Piutang PIK	270.804.856,00	271.004.856,00	(200.000,00)
5.3.1.1.2.7.2	Piutang PEKM	4.205.334.305,00	4.205.334.305,00	-
5.3.1.1.2.7.3	Piutang PSG	570.078.567,00	570.078.567,00	-
5.3.1.1.2.7.4	Piutang Kelompok UMKM	283.596.230,00	287.244.990,00	(3.648.760,00)
5.3.1.1.2.7.5	Piutang Kelompok KUPK	399.686.676,00	399.686.676,00	-
5.3.1.1.2.7.6	Piutang Penguatan Modal Sapi	2.025.115.000,00	2.037.545.000,00	(12.430.000,00)
5.3.1.1.2.7.7	Piutang Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKP)	60.800.000,00	60.800.000,00	-
5.3.1.1.2.7.8	Piutang Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKBPMD)	156.772.650,00	156.772.650,00	-
5.3.1.1.2.7.9	Piutang Budi Daya Ikan	300.899.000,00	300.899.000,00	-
5.3.1.1.2.7.10	Piutang Lembaga Keuangan Mikro BMT	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.3.1.1.2.7.11	Piutang Pemberdayaan Pedagang Pasar	690.056.000,00	690.672.000,00	(616.000,00)
5.3.1.1.2.7.12	Piutang Pasca Panen	1.679.456.835,00	1.680.456.835,00	(1.000.000,00)
	Jumlah	10.647.600.119,00	10.665.494.879,00	(17.894.760,00)

10.647.600.119,00

Penyisihan Piutang Lainnya yang tidak tertagih dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.1.2.7.1 Piutang PIK

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun		0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun		10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun		50%	-	-
>5 tahun	270.804.856,00	100%	270.804.856,00	-
Jumlah	270.804.856,00		270.804.856,00	-

5.3.1.1.2.7.2 Piutang PEKM

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)

<= 1 Tahun		0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun		10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun		50%	-	-
>5 tahun	4.205.334.305,00	100%	4.205.334.305,00	-
Jumlah	4.205.334.305,00		4.205.334.305,00	-

5.3.1.1.2.7.3 Piutang PSG

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun		0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun		10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun		50%	-	-
>5 tahun	570.078.567,00	100%	570.078.567,00	-
Jumlah	570.078.567,00		570.078.567,00	-

5.3.1.1.2.7.4 Piutang Kelompok UMKM

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun		0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun		10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun		50%	-	-
>5 tahun	283.596.230,00	100%	283.596.230,00	-
Jumlah	283.596.230,00		283.596.230,00	-

5.3.1.1.2.7.5 Piutang Kelompok KUPK

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun		0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun		10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun		50%	-	-
>5 tahun	399.686.676,00	100%	399.686.676,00	-
Jumlah	399.686.676,00		399.686.676,00	-

5.3.1.1.2.7.6 Piutang Penguatan Modal Sapi

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun		0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun		10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun		50%	-	-
>5 tahun	2.025.115.000,00	100%	2.025.115.000,00	-
Jumlah	2.025.115.000,00		2.025.115.000,00	-

5.3.1.1.2.7.7 Piutang Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKP)

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun		0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun		10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun		50%	-	-
>5 tahun	60.800.000,00	100%	60.800.000,00	-
Jumlah	60.800.000,00		60.800.000,00	-

5.3.1.1.2.7.8 Piutang Alih Profesi Penambang Pasir (DPPAPPKB)

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun		0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun		10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun		50%	-	-
>5 tahun	156.772.650,00	100%	156.772.650,00	-
Jumlah	156.772.650,00		156.772.650,00	-

5.3.1.1.2.7.9 Piutang Budi Daya Ikan

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun		0,50%	-	-

>1 Tahun s/d 3 Tahun		10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun		50%	-	-
>5 tahun	300.899.000,00	100%	300.899.000,00	-
Jumlah	300.899.000,00		300.899.000,00	-

5.3.1.1.2.7.10 Piutang Lembaga Keuangan Mikro BMT

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun		0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun		10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun		50%	-	-
>5 tahun	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	-
Jumlah	5.000.000,00		5.000.000,00	-

5.3.1.1.2.7.11 Piutang Pemberdayaan Pedagang Pasar

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun		0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun		10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun		50%	-	-
>5 tahun	690.056.000,00	100%	690.056.000,00	-
Jumlah	690.056.000,00		690.056.000,00	-

5.3.1.1.2.7.12 Piutang Pasca Panen

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
<= 1 Tahun		0,50%	-	-
>1 Tahun s/d 3 Tahun		10%	-	-
>3 tahun s/d 5 Tahun		50%	-	-
>5 tahun	1.679.456.835,00	100%	1.679.456.835,00	-
Jumlah	1.679.456.835,00		1.679.456.835,00	-

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023(Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.8	Penyisihan Piutang	167.902.380.301,76	162.920.846.936,52	4.981.533.365,25

	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.2.8.1	Penyisihsn Piutang Pajak	103.669.763.346,29	101.279.537.629,04	2.390.225.717,25
5.3.1.1.2.8.2	Penyisihan Piutang Retribusi	3.858.091.362,26	2.582.836.373,11	1.275.254.989,16
5.3.1.1.2.8.3	Peanyisian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	49.726.925.474,22	48.392.978.055,37	1.333.947.418,85
5.3.1.1.2.8.4	Penyisihan Piutang Lainnya	10.647.600.119,00	10.665.494.879,00	(17.894.760,00)
	Jumlah	167.902.380.301,76	162.920.846.936,52	4.981.533.365,25

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.4	Beban Dibayar Dimuka	1.090.133.961,25	1.674.397.002,09	(584.263.040,84)

Piutang Lain-lain / Belanja Dibayar dimuka/Piutang Sewa Lahan
Jumlah tersebut merupakan piutang lain-lain yang belum diselesaikan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	OPD Pelaksana	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	728.506.658,33	1.091.444.158,33	(362.937.500,00)
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	83.174.842,00	83.174.842,00	-
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	50.701.525,67	48.469.328,01	2.232.197,66
4	RSUD Panembahan Senopati	26.000.000,00	26.000.000,00	-
5	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	18.302.611,42	24.577.880,83	(6.275.269,41)
6	DPUPKP	69.220.937,33	251.880.052,67	(182.659.115,34)
7	Dinas Perpustakaan dan Arsip	43.945.312,50	55.664.062,50	(11.718.750,00)
8	DLH	21.123.723,00	19.708.187,75	1.415.535,25
9	DINHUB	18.351.250,00	16.281.250,00	2.070.000,00
10	DINKES	30.807.101,00	57.197.240,00	(26.390.139,00)
	Jumlah	1.090.133.961,25	1.674.397.002,09	(584.263.040,84)

Rincian belanja dibayar dimuka per OPD sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023(Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	728.506.658,33	1.091.444.158,33	-362.937.500,00

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Warga desa Dlingo untuk Kebun Buah Mangunan Dlingo	725.875.000,00	1.088.812.500,00	(362.937.500,00)
2	Pemdes Argorejo untuk gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	122.500,00	122.500,00	-
3	Pemdes Donotirto untuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	89.425,00	89.425,00	-
4	Pemdes Gilangharjo untuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	122.500,00	122.500,00	-
5	Pemdes Kebon Agung untuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	38.500,00	38.500,00	-
6	Pemdes Srihardono untuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	76.475,00	76.475,00	-
7	Pemdes Poncosari untuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	148.925,00	148.925,00	-
8	Pemdes Tirtonirmolo untuk Puskeswan	250.000,00	250.000,00	-
9	Pemdes Terong untuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	770.000,00	770.000,00	-
10	Pemdes Tamanan untuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	513.333,33	513.333,33	-
11	Pemdes Trirenggo untuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	500.000,00	500.000,00	-
	Jumlah	728.506.658,33	1.091.444.158,33	(362.937.500,00)

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Dinas Kelautan dan Perikanan	83.174.842,00	83.174.842,00	-

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Pemdes Srihardono untuk BAT	55.350.000,00	55.350.000,00	-
2	Pemdes Sumbermulyo untuk BAT	10.981.850,00	10.981.850,00	-
3	Pemdes Panggungharjo untuk Balai Benih Ikan (BBI Krapyak)	16.842.992,00	16.842.992,00	-
	Jumlah	83.174.842,00	83.174.842,00	-

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	50.701.525,67	48.469.328,01	2.232.197,66

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Pemdes Dlingo untuk Pasar Dlingo	4.166.666,67	4.166.666,67	-
2	Pemdes Bantul Pasar Unggas Bantul	4.859.375,00	4.859.375,00	-
3	Argosari (Terminal Darat)	37.182.984,00	35.078.286,34	2.104.697,66
4	Pasar Piyungan	4.492.500,00	4.365.000,00	127.500,00
	Jumlah	50.701.525,67	48.469.328,01	2.232.197,66

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
RSUD Panembahan Senopati	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
Tanah kas desa Trirenggo Kec Bantul dan Gudang Barang			

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	18.302.611,42	24.577.880,83	(6.275.269,41)

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Pemdes Triharjo untuk TKN 1 Pandak	1.736.437,67	4.134.375,00	(2.397.937,33)
2	Pemdes Tirtonirmolo untuk SD Winongo	2.586.100,42	3.621.990,00	(1.035.889,58)
3	Pemdes Trimurti untuk TKN Srandakan	3.000.000,00	3.750.000,00	(750.000,00)
4	Pemdes Sidomulyo untuk TKN Bambanglipuro	5.469.778,00	6.511.640,83	(1.041.862,83)
5	Pemdes Triwidadi untuk TKN Pajangan	5.510.295,33	6.559.875,00	(1.049.579,67)
	Jumlah	18.302.611,42	24.577.880,83	(6.275.269,41)

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	69.220.937,33	251.880.052,67	(182.659.115,34)

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Penggunaan Tanah Kas Desa Ngestiharjo utk Rusunawa	9.233.125,00	19.305.625,00	(10.072.500,00)
2	Penggunaan tanah Kas Desa Banguntapan untuk Rusunawa	59.987.812,33	85.696.875,33	(25.709.063,00)
3	Penggunaan Tanah Kas Desa Tamanan untuk Rusunawa	-	27.882.708,34	(27.882.708,34)
4	Penggunaan Tanah Kas Desa Panggungharjo untuk Rusunawa	-	105.213.594,00	(105.213.594,00)
5	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi	-	13.781.250,00	(13.781.250,00)
	Jumlah	69.220.937,33	251.880.052,67	(182.659.115,34)

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Dinas Perpustakaan dan Arsip	43.945.312,50	55.664.062,50	35.937.500,00

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup	21.123.723,00	19.708.187,75	42.247.446,00

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)

1	Sewa tanah untul IPAL	20.397.123,00	19.425.831,50	971.291,50
2	Sewa tanah untuk RTH	351.500,00	282.356,25	69.143,75
	Sewa Tanah untuk TPST Modalan	375.100,00		375.100,00
	Jumlah	21.123.723,00	19.708.187,75	1.415.535,25

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Dinas Perhubungan	18.351.250,00	16.281.250,00	2.070.000,00

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Sewa tanah dan gedung milik PT KAI untuk gudang	9.400.000,00	5.625.000,00	3.775.000,00
2	Sewa tanah untuk terminal Parangtritis	8.951.250,00	10.656.250,00	(1.705.000,00)
	Jumlah	18.351.250,00	16.281.250,00	2.070.000,00

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Dinas Kesehatan	30.807.101,00	57.197.240,00	609.861,00

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Pemdes Sumbermulyo untuk Puskesmas Bambanglipuro	5.916.476,00	5.634.740,00	281.736,00
2	Pemdes Banguntapan untuk Puskesmas Banguntapan III	6.890.625,00	6.562.500,00	328.125,00
	Pemdes Timbulharjo untuk Puskesmas Sewon I	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)
	Pemdes Palbapang untuk Puskesmas Bantul I	18.000.000,00	42.000.000,00	(24.000.000,00)
	Jumlah	30.807.101,00	57.197.240,00	609.861,00

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.1.5	Persediaan	41.620.798.501,64	50.133.598.705,71	(8.512.800.204)

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Mutasi persediaan tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Saldo awal 2024	50.133.598.705,71	45.732.797.735,02	4.400.800.970,69

2	Penambahan	226.244.771.576,77	332.861.933.143,98	(106.617.161.567,21)
3	Penggunaan /pengurangan	234.757.571.780,84	328.461.132.173,29	(93.703.560.392,45)
4	Reklasifikasi akun barang yang diserahkan			
5	Saldo akhir	41.620.798.501,64	50.133.598.705,71	-8.512.800.204,07

Nilai persediaan merupakan persediaan yang masih tersisa Per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Jenis Persediaan	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Bahan	1.102.686.633,34	1.705.047.751,73	(602.361.118,39)
2	Suku Cadang	185.052.235,00	17.860.980,00	167.191.255,00
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	9.776.446.723,57	14.693.991.745,20	(4.917.545.021,63)
4	Obat-obatan	27.653.634.010,98	27.501.444.903,28	152.189.107,70
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	1.297.366.133,71	5.395.868.807,90	(4.098.502.674,19)
6	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	263.216.971,34	164.469.158,60	98.747.812,74
7	Natura dan Pakan	606.038.693,00	1.000.954.338,00	(394.915.645,00)
8	Persediaan Penelitian	153.194.452,00	36.052.000,00	117.142.452,00
9	Persediaan dalam Proses		2.531.000,00	(2.531.000,00)
10	Komponen	583.162.648,70	21.000,00	583.141.648,70
11	Pipa		-	-
	Jumlah	41.620.798.501,64	50.518.241.684,71	(8.897.443.183,07)

Rincian mutasi Persediaan per OPD tahun 2024 sebagai berikut:

Nomor	Nama Instansi	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	-
2	Bagian Tata Pemerintahan	1.356.500,00	68.439.600,00	68.983.600,00	812.500,00
3	Bagian Hukum	6.333.100,00	94.612.256,00	97.399.856,00	3.545.500,00
4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2.513.000,00	127.160.910,00	128.523.910,00	1.150.000,00
5	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	626.080,00	886.857.460,00	887.313.540,00	170.000,00
6	Bagian Organisasi	1.179.240,00	135.383.200,00	136.407.850,00	154.590,00
7	Bagian Umum dan Protokol	7.180.300,00	1.905.632.635,00	1.909.403.335,00	3.409.600,00
8	Bagian Perencanaan dan Keuangan	4.002.500,00	122.095.900,00	122.838.080,00	3.260.320,00
9	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA	811.500,00	74.557.100,00	74.779.700,00	588.900,00
10	Sekretariat DPRD	38.178.500,00	742.670.510,00	746.143.310,00	34.705.700,00

11	Inspektorat Daerah	54.442.920,00	214.583.753,00	234.496.493,00	34.530.180,00
12	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	5.466.053.905,08	25.724.805.920,04	26.024.849.477,92	5.166.010.347,20
13	Dinas Kesehatan	11.924.255.943,34	28.004.993.107,35	25.292.923.785,32	14.636.325.265,37
14	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.827.627.139,00	17.966.221.638,00	22.158.816.204,29	635.032.572,71
15	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.934.450,00	800.978.695,00	799.539.795,00	3.373.350,00
16	Satuan Polisi Pamong Praja	7.947.500,00	756.634.786,00	762.195.286,00	2.387.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.290.900,00	22.306.355.062,00	22.301.832.562,00	10.813.400,00
18	Dinas Perhubungan	411.497.255,00	4.138.673.710,00	3.181.695.793,00	1.368.475.172,00
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.187.000.268,00	1.600.557.772,00	2.662.972.252,00	1.124.585.788,00
20	Dinas Lingkungan Hidup	433.602.900,00	5.992.956.378,00	5.978.056.123,00	448.503.155,00
21	Dinas Kebudayaan	112.436.180,00	2.551.480.558,00	2.571.465.670,00	92.451.068,00
22	Dinas Pariwisata	3.608.097.470,00	685.723.579,00	3.969.878.822,23	323.942.226,77
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	24.114.690,00	404.491.874,00	413.281.061,00	15.325.503,00
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.090.390,00	599.714.016,00	600.103.726,00	700.680,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.761.700,00	515.837.400,00	517.049.700,00	6.549.400,00
26	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	15.497.300,00	1.184.957.982,00	1.187.854.332,00	12.600.950,00
27	Dinas Sosial	169.404.762,00	1.419.228.111,00	1.418.051.388,00	170.581.485,00
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.470.708.401,00	4.325.363.740,00	5.497.679.140,00	1.298.393.001,00
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan KB	166.873.114,10	1.704.708.599,00	1.811.695.785,60	59.885.927,50
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	3.128.330,00	2.371.231.229,00	2.371.572.659,00	2.786.900,00
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	190.881.230,00	2.562.256.491,00	2.594.058.861,00	159.078.860,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.189.800,00	461.728.745,00	475.756.825,00	2.161.720,00
33	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	238.258.400,00	3.370.621.746,00	3.441.934.607,00	166.945.539,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	11.335.835,00	606.682.495,00	608.281.730,00	9.736.600,00
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	848.084.605,00	1.784.114.016,00	1.749.152.959,00	883.045.662,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.164.350,00	597.257.810,00	590.789.560,00	9.632.600,00
37	Rsud. Panembahan Senopati	15.345.520.237,00	84.781.512.106,00	86.509.415.943,00	13.617.616.400,00
38	RSUD Saras Adhyatma	1.489.309.861,19	1.995.235.523,38	2.199.272.761,48	1.285.272.623,09
39	Kapanewon Srandakan	1.203.900,00	126.277.943,00	126.402.943,00	1.078.900,00

40	Kapanewon Sanden	1.449.860,00	145.454.040,00	145.747.400,00	1.156.500,00
41	Kapanewon Pajangan	1.514.490,00	385.931.250,00	386.059.580,00	1.386.160,00
42	Kapanewon Sedayu	1.022.600,00	115.325.000,00	115.146.200,00	1.201.400,00
43	Kapanewon Pandak	1.518.550,00	167.008.050,00	167.425.400,00	1.101.200,00
44	Kapanewon Kasihan	380.100,00	173.764.600,00	172.074.700,00	2.070.000,00
45	Kapanewon Bantul	1.042.000,00	83.419.293,00	83.626.793,00	834.500,00
46	Kapanewon Bambanglipuro	916.690,00	148.839.710,00	148.785.700,00	970.700,00
47	Kapanewon Kretek	2.157.880,00	159.869.352,00	158.831.165,00	3.196.067,00
48	Kapanewon Pundong	7.241.530,00	127.055.587,00	131.215.214,00	3.081.903,00
49	Kapanewon Sewon	204.600,00	62.184.003,00	61.872.603,00	516.000,00
50	Kapanewon Jetis	757.520,00	191.208.950,00	191.483.470,00	483.000,00
51	Kapanewon Imogiri	1.122.780,00	152.762.320,00	152.667.150,00	1.217.950,00
52	Kapanewon Dlingo	910.800,00	163.902.758,00	164.371.098,00	442.460,00
53	Kapanewon Pleret	1.131.900,00	170.910.402,00	170.556.026,00	1.486.276,00
54	Kapanewon Banguntapan	6.177.950,00	121.150.000,00	121.639.950,00	5.688.000,00
55	Kapanewon Piyungan	155.000,00	163.391.906,00	163.199.906,00	347.000,00
56	PPKD	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	50.133.598.705,71	226.244.771.576,77	234.757.571.780,84	41.620.798.501,64

Dalam laporan persediaan Per 31 Desember 2024 khususnya persediaan obat tidak termasuk obat yang telah kadaluarsa /rusak di RSUD Panembahan Senopati sebesar Rp543.259.878,00 obat kadaluarsa di Dinas Kesehatan (gudang farmasi) sebesar Rp332.624.914,17 RSSA sebesar Rp51.124.060,00 dan di 27 Puskesmas sebesar Rp371.351.010,07 dengan rincian sebagai berikut

Nomor	PUSKESMAS	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023(Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Bambanglipuro	16.081.710,94	7.113.962,00	8.967.748,94
2	Banguntapan I	24.880.477,25	12.293.996,56	12.586.480,69
3	Banguntapan II	17.936.774,00	10.809.004,00	7.127.770,00
4	Banguntapan III	13.781.271,00	2.668.841,00	11.112.430,00
5	Bantul I	14.471.143,52	1.695.157,00	12.775.986,52
6	Bantul II	16.218.079,00	4.670.145,72	11.547.933,28
7	Dlingo I	4.938.719,50	7.659.155,60	(2.720.436,10)
8	Dlingo II	15.602.860,00	5.913.232,95	9.689.627,05
9	Imogiri I	6.429.760,08	3.488.439,00	2.941.321,08
10	Imogiri II	3.980.555,00	6.753.188,00	(2.772.633,00)
11	Jetis I	13.635.345,55	3.893.391,30	9.741.954,25

12	Jetis II	10.240.425,01	4.743.159,10	5.497.265,91
13	Kasihan I	22.500.474,78	7.329.143,40	15.171.331,38
14	Kasihan II	18.583.813,20	5.377.765,70	13.206.047,50
15	Kretek	11.834.105,98	5.084.637,00	6.749.468,98
16	Pajangan	17.463.284,00	6.225.172,00	11.238.112,00
17	Pandak I	25.126.511,01	8.005.288,54	17.121.222,47
18	Pandak II	9.235.326,95	2.015.598,84	7.219.728,11
19	Piyungan	12.020.667,00	6.833.862,40	5.186.804,60
20	Pleret	1.564.367,15	5.826.081,00	(4.261.713,85)
21	Pundong	1.455.821,50	6.233.037,28	(4.777.215,78)
22	Sanden	19.457.226,00	8.567.965,16	10.889.260,84
23	Sedayu I	17.613.177,00	8.312.663,70	9.300.513,30
24	Sedayu II	5.845.682,70	2.210.038,00	3.635.644,70
25	Sewon I	4.135.285,95	5.566.431,00	(1.431.145,05)
26	Sewon II	16.673.062,10	6.766.828,00	9.906.234,10
27	Srandakan	29.645.083,90	4.764.079,40	24.881.004,50
	Jumlah total Puskesmas	371.351.010,07	160.820.263,65	210.530.746,42
	RSLKC/RSSA	51.124.060,00	97.872.930,00	(46.748.870,00)
	Gudang Farmasi Kab. Bantul	332.624.914,17	381.663.297,54	(49.038.383,37)
	RSUD Panembahan Senopati	543.259.878,00	176.279.885,00	366.979.993,00
	JUMLAH	1.298.359.862,24	816.636.376,19	481.723.486,05

Mutasi obat kedaluwarsa tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Jumlah obat kedaluwarsa (awal)	816.636.376,19	2.752.397.094,23	(1.935.760.718,04)
2	Koreksi pencatatan atas tahun-tahun sebelunnya	359.614.804,00		359.614.804,00
3	Penambahan tahun berjalan	6.601.841.306,44	839.743.747	5.762.097.559,51
4	Jumlah obat yang diahapuskan tahun 2024	(6.479.732.624,39)	(2.775.504.464,97)	(3.704.228.159,42)
5	Jumlah saldo obat kedaluwarsa	1.298.359.862,24	816.636.376,19	481.723.486,05

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	469.746.685.563,78	610.357.224.338,38	-140.610.538.774,61

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.2.1	Investasi Non Permanen		-	0,00

Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai Investasi Non Permanen

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.2.2	Investasi Permanen	469.746.685.563,78	610.357.224.338,38	-140.610.538.774,61

Investasi Permanen adalah investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bantul berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rincian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	469.746.685.563,78	414.947.814.428,82	54.798.871.134,96
5.3.1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	-	195.409.409.909,57	(195.409.409.909,57)
		469.746.685.563,78	610.357.224.338,38	(140.610.538.774,61)

Penjelasan dari masing-masing Investasi Permanen sebagai berikut:

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	469.746.685.563,78	414.947.814.428,82	54.798.871.134,96

Jumlah tersebut merupakan saldo investasi permanen Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bantul.

Nomor	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Perseroda Bank Bantul	133.986.896.746,00	126.515.322.850,00	7.471.573.896,00
2	Perumda Aneka Dharma	8.627.431.307,00	8.543.245.063,00	84.186.244,00
3	Perumda Air Minum Tirta Projotamansari	121.512.183.329,79	84.479.836.606,25	37.032.346.723,54
4	Perseroan Terbatas Bank BPDDIY	202.641.000.000,00	190.441.000.000,00	12.200.000.000,00
5	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	825.999.833,99	825.999.833,99	-
6	PT Bantul Kota Mandiri (PT BKM):	2.153.174.347,00	4.142.410.075,58	(1.989.235.728,58)
	Jumlah	469.746.685.563,78	414.947.814.428,82	54.798.871.134,96

Atas Investasi permanen diungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan penentuan penempatan Investasi permanen berupa penyetoran penyertaan modal untuk masing-masing BUMD dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:
   - Batasan kewajiban Penyetoran Modal (Modal Disetor) yang tercantum dalam Peraturan Daerah yang mengatur masing-masing BUMD.
   - Situasi dan kondisi yang mempengaruhi kelangsungan BUMD.
   - Ketersediaan dana untuk Pengeluaran Pembiayaan dari APBD.
   - Regulasi peraturan yang lebih tinggi yang mendasari operasional masing-masing BUMD

3 Investasi dinilai dengan menggunakan metode ekuitas untuk kepemilikan 50% atau 20% - 50% namun memiliki pengaruh yang signifikan. Investasi dinilai dengan metode biaya untuk kepemilikan kurang 50%.

4 PT BPR Bank Bantul (Perseroda)

PT BPR Bank Bantul (Perseroda) sebelumnya bernama PD. BPR BANK BANTUL pada awal pendiriannya dikenal sebagai Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Dati II Bantul, didirikan pada Tahun 1983 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 13 tanggal 19 Desember 1983, merupakan sebuah bank BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang komposisi kepemilikan saham sebesar 99,9% milik Pemerintah Kabupaten Bantul dan saham sebesar 0,1% milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantul.
Tujuan utama pendirian PD BPR Bank Pasar Bantul pada waktu berdirinya adalah untuk mengurangi rentenir serta menyediakan dana pinjaman kepada pedagang kecil atau bakul untuk menambah modal usahanya, dengan adanya perubahan badan hukum menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) diperluas yaitu untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, memperluas akses keuangan pada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan dan mengembangkan PT BPR Bank Bantul (Perseroda) dengan tata kelola perusahaan yang baik serta memperoleh keuntungan.

Peraturan yang terkait dengan perubahan bentuk badan hukum PD BPR Bank Bantul menjadi PT BPR Bank Bantul (Perseroda) :
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024770.AH.01.01. Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda).
Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep- 110B /KR.03/2020 Tentang Pengalihan Izin Usaha dari Persahaan Daerah(PD) Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda).
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda).

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bantul pada PT BPR Bank Bantul pada tahun 2024 sebesar Rp133.986.896.746,00 dinilai menggunakan metode ekuitas berdasarkan pada Laporan Keuangan PT BPR Bank Bantul Tahun 2024 Audited dari setoran modal Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2024 sebesar Rp92.030.000.000,00. Setoran penyertaan modal Pemda pada PT BPR Bank Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2029 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) yang menetapkan bahwa modal dasar PT BPR Bank Bantul (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 dimana komposisi kepemilikan modal Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 99,9% dari modal dasar sebesar Rp99.900.000.000,00 dan pihak lain paling banyak sebesar 0,1% dari modal dasar atau sebesar Rp100.000.000,00

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR Bank Bantul (Perseroda) No. 33 tanggal 28 November 2024 mengenai perubahan peningkatan Modal Dasar perseroaan dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) menjadi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah). Menerima dan menyetujui penambahan Modal Disetor sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga total Modal disetor menjadi sebesar Rp92.130.000.000,00 (sembilan puluh dus milyar seratus tiga puluh juta rupiah). Penambahan modal disetor tersebut telah tercatat dalam Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00078122.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPR Bank Bantul (Perseroda) sehingga jumlah modal saham yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Nomor	Nama	Lembar	%	Nominal	Jumlah
1	Pemerintah Kabupaten Bantul	92.030	99,89	1.000.000,00	92.030.000.000,00
2	PDAM Kabupaten Bantul	100	0,11	1.000.000,00	100.000.000,00
	Jumlah	92.130	100		92.130.000.000

Nilai Ekuitas PT BPR Bank Bantul (Perseroda)yang tersaji pada LKPD Kabupaten Bantul per 31 Desember 2023 berbeda dengan nilai Ekuitas yang tersaji pada Laporan Keuangan PT BPR Bank Bantul (Perseroda) per 31 Desember 2024

Nilai Ekuitas di LKPD	126.515.322.850,00
Nilai Ekuitas di LK PT BPR Banaka Bantul (Perseroda)	131.015.322.850,00
Selisih	(4.500.000.000,00)

Penjelasan selisih:

Merupakan jumlah penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk PT BPR Bank Bantul (Perseroda) tahun 2023 yang sampai Laporan Keuangan PT BPR Bank Bantul (Perseroda) tahun 2023 terbit, ijin dari OJK terkait storan modal tersebut belum turun

4. Perumda Aneka Dharma

Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman N0 36 Bantul berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2078 dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Perda Nomor 03 Tahun 2019

Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma bertujuan untuk menyediakan pelayanan publik yang baik, memberi kemudahan akses terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan pendapatan daerah yang didasarkan pada potensi yang dimiliki Daerah. Pelaksanaan peran Perumda Aneka Dharma tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh bidang, seperti bidang perdagangan umum, bidang pelayanan jasa, bidang pertanian, bidang perindustrian, bidang pertambangan, bidang peternakan, dan bidang pariwisata.
Akan tetapi dalam melaksanakan perannya, Perumda Aneka Dharma masih mengalami beberapa kendala, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia sehingga kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan.
Kepemilikan Pemerintah Daerah terhadap Perumda Aneka Dharma 100% .
Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Bantul pada Perumda Aneka Dharma per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.627.431.307,00 dinilai dengan metode ekuitas karena kberdasarkan Laporan Keuangan Perumda Aneka Dharma per 31 Desember 2024 Audited dari setoran mdal Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.666.156.851,00.

5. Perumdam Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul
Prosentase kepemilikan Pemerintah Daerah terhadap Perumdam Tirta Projotamansari 100%

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantul didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 1991 Seri D tanggal 22 April 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Bantul. Terakhir di ubah dengan Perda Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansai.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2024 sebesar Rp121.52.183.329,79 dinilai dengan menggunakan metode ekuitas mendasarkan pada laporan Keuangan Perumdam Tirta Projotamansari per 31 Desember 2024 Audited dari setoran modal Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2024 sebesar Rp63.631.172.880,00. Setoran penyertaan modal Pemda pada Perumdam Tirta Projotamansari berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta Projotamansari.

Nilai Ekuitas Perumdam Tirta Projotamansasri Kabupoaten Bantul yang tersaji pada LKPD Kabupaten Bantul per 31 Desember tahun per 31 Desember 2023 berbeda dengan nilai Ekuitas yang tersaji pada Laporan Keuangan Perumdam Tirta Projotamanasariper 31 Desember 20234.

Nilai Ekuitas di LKPD	84.479.836.606,25
Nilai Ekuitas di LK Perumdam Tirta Projotamansasri	106.816.339.486,25
Selisih	(22.336.502.880,00)

Penjelasan

Merupakan angka koreksi dari Tim BPK audit LKPD TA 2023 atas barang yang diserahkan ke Perumda Tirta Projotamansari yang belum ada BAST nya tapi sudah dicatat oleh Perumda Tirta Projotamansari. BAST atas barang tersebut telah dilakukan pada tahun 2024 dengan nomor BAST B/000.2.3.2/03694/BPKPAD

6 Perseroan Terbatas Bank BPD DIY

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, atau disingkat Bank BPD DIY, adalah sebuah bank BUMD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank BPD DIY didirikan pada tanggal 15 Desember 1961, berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Sebagai suatu perusahaan daerah, pertama kalinya Bank BPD DIY diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Dengan berjalannya waktu, dilakukan berbagai penyesuaian.

Landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, junctis Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sejak tahun 2012 berubah status badan hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT Bank BPD DIY) yang sebelumnya adalah Perusahaan Daerah. Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2012 yang berisi Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD DIY menjadi PT BPD DIY.

Dasar hukum penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bantul kepada PT BPD DIY adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPD DIY.

Metode penghitungan investasinya menggunakan metode biaya

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo Investasi Permanen pada Bank BPD DIY Per 31 Desember 2024 dan 2023	202.641.000.000,00	190.441.000.000,00	12.200.000.000,00

Mutasi penyertaan modal ke PT. BPD DIY tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Penyertaan modal sampai dengan Tahun 2024 dan 2023	190.441.000.000,00	177.241.000.000,00	13.200.000.000,00
Penambahan Penyertaan Modal TA 2024 dan 2023	12.200.000.000,00	13.200.000.000,00	(1.000.000.000,00)
Penyertaan modal sampai dengan Tahun 2024 dan 2023	202.641.000.000,00	190.441.000.000,00	12.200.000.000,00

7 Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

BUKP adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, didirikan berdasarkan PERDA DIY Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan

BUKP didirikan di tiap-tiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten dan Kota se Provinsi DIY yang pendiriannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BUKP berkedudukan di ibukota kecamatan

Metode penghitungan investasinya menggunakan metode biaya

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo Investasi Permanen pada BUKP Per 31 Desember 2024 dan 2023	825.999.833,99	825.999.833,99	

Untuk tahun 2024 tidak ada penyertaan modal kepada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) sehingga penyertaan modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp825.999.833,99 untuk 17 BUKP se Kabupaten Bantul

8 PT Bantul Kota Mandiri (PT BKM):

PT Bantul Kota Mandiri (PT BKM) merupakan perusahaan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bantul bersama PT Perwita Karya pada tahun 2002 berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggall 21

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah di aktakan melalui Akta Notaris Rosevia Herlijanta, S.H. No. 06 tanggal 18 Agustus 2011 maka para pemegang Selanjutnya dibentuk Tim Likuidasi yang bertugas untuk melakukan penjualan aset/kekayaan perusahaan berupa tanah dan membagikan hasilnya kepada para pemegang saham.

Dasar hukum pembagian 61% - 39% hasil penjualan aset/kekayaan PT. Bantul Kota Mandiri (dalam likuidasi) kepada para pemegang saham (61% untuk Pemda Bantul dan 39% untuk

Kegiatan selama tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Tim Likuidasi adalah sebagai berikut:

1. Perikatan jual beli antara Tim Likuidasi dengan PT. Soerja Agoeng Kentjana berkedudukan di Kota Administrasi Jakarata Barat atas sebidang tanah milik PT BKM (Dalam likuidasi) sertifikat HGB Nomor 00014/Sendangsari seluas 6.916 meter persegi yang tertuang dalam Akta Notaris Agustinus Janarko Sigit Prasetio, SH.,M.Kn dengan Perikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 28 November 2023 telah dilakukan penyelesaian administrasi dan keuangannya.
2. Melakukan penyetoran hadil penjualan kepada para pemegang saham yaitu:
   a. Pemkab Bantul sebesar Rp981.337.500,00
   b. PT Perwita Karya sebesar Rp627.412.500,00
3. Melakukan komunikasi ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul untuk memastikan status dan tata ruang tanah BKM
4. Menandatangani dokumen tanda jadi dan menerima uang tanda jadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) dengan calonb pembeli tanmah BKM HGB no. 30 seluas 5.886 m2 yang terletak di Kunden Sedangsari Pajangan
5. melakukan appraisal ulang tahun 2024 terhadap seluruh sisa tanah BKM dengan hasil keseluruhan sebesar Rp4.868.800.000,00
6. Sisa tanah BKM yang belum laku terjual sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023(Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo Investasi Permanen Lainnya pada PT. BKM (dalam likuidasi) Per 31 Desember 2024 dan 2023:	2.153.174.347,00	4.142.410.075,58	(1.989.235.728,58)

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Bertambah/Berkurang
Saldo Kas	416.751,00	416.751,00	-
Saldo Bank	269.327.260,47	1.100.991.438,47	(831.664.178,00)
Kekurang pembayaran atas penjualan tanah (HGB 00014)	-	864.500.000,00	(864.500.000,00)
Sisa tanah sesuai dengan nilai laporan *appraisal*	4.868.800.000,00	4.824.928.000,00	43.872.000,00

	5.138.544.011,47	6.790.836.189,47	(1.652.292.178,00)
Pembagian hasil penjualan tanah tahun 2023	1.608.750.000,00		1.608.750.000,00
Jumlah uang yang dibagi	3.529.794.011,47	6.790.836.189,47	(3.261.042.178,00)
Jumlah Nilai investasi	2.153.174.347,00	4.142.410.075,58	(1.989.235.728,58)

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	-	195.409.409.909,57	(195.409.409.909,57)

Saldo tersebut merupakan saldo investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2023 kepada:

Nomor	Investasi Permanen Lainnya	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Perseroan Terbatas Bank BPDDIY		190.441.000.000,00	- 190.441.000.000,00
2	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)		825.999.833,99	- 825.999.833,99
3	PT Bantul Kota Mandiri (PT BKM):		4.142.410.075,58	- 4.142.410.075,58
	Jumlah	-	195.409.409.909,57	(195.409.409.909,57)

saldo Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2024 di reklas ke akun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.3	Aset Tetap	2.971.890.261.465,52	2.880.650.606.330,87	91.239.655.134,65

Akun ini menggambarkan aset berwujud milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 .

	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.3	Aset Tetap	6.284.097.545.337,69	6.016.122.696.480,00	267.974.848.857,69
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(3.312.207.283.872,17)	(3.135.472.090.149,13)	(176.735.193.723,04)
	Nilai Buku Aset Tetap	2.971.890.261.465,52	2.880.650.606.330,87	91.239.655.134,65

Rincian Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.3.1	Tanah	582.065.352.437,00	579.954.608.048,00	2.110.744.389,00
5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	1.136.522.584.747,24	1.069.346.685.886,79	67.175.898.860,45
5.3.1.3.3	Gedung & Bangunan	1.550.938.819.379,66	1.495.787.606.833,84	55.151.212.545,81
5.3.1.3.4	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.925.731.270.882,29	2.785.233.822.699,23	140.497.448.183,06
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	85.893.658.734,82	85.799.973.012,14	93.685.722,68
5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.945.859.156,69	- ,0	2.945.859.156,69
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(3.312.207.283.872,17)	(3.135.472.090.149,13)	(176.735.193.723,04)
	Jumlah	2.971.890.261.465,52	2.880.650.606.330,87	91.239.655.134,65

Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian		Saldo Tahun 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo Tahun 2024
			Penambahan	Pengurangan	
		Rp	Rp	Rp	Rp
5.3.1.3.1	Tanah	579.954.608.048,00	2.894.688.489,00	783.944.100,00	582.065.352.437,00
5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	1.069.346.685.886,79	127.955.181.880,26	60.779.283.019,81	1.136.522.584.747,24
5.3.1.3.3	Gedung & Bangunan	1.495.787.606.833,84	118.230.963.962,82	63.079.751.417,00	1.550.938.819.379,66
5.3.1.3.4	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.785.233.822.699,23	181.560.946.861,06	41.063.498.678,00	2.925.731.270.882,29
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	85.799.973.012,14	9.428.864.728,80	9.335.179.006,12	85.893.658.734,82
5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	2.945.859.156,69		2.945.859.156,69
	Jumlah	6.016.122.696.480,00	443.016.505.078,62	175.041.656.220,93	6.284.097.545.337,69

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.3.1	Tanah	582.065.352.437,00	579.954.608.048,00	2.110.744.389,00

Aset tanah tahun 2024 mengalami penambahan sebesar Rp2.110.744.389,00 bersumber dari aset tahan yang belum tercatat di KIB A pada:

Dinas Pendidikan Kepumudaan dan Olah Raga		1.745.506.389,00
- SD Baran	387.718.500,00	
- SD 1 Bantul	1.357.787.889,00	
PPKD (Man Wonokromo)		365.238.000,00
	Jumlah	2.110.744.389,00

Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah sebagai asset tetap tanah ada yang dikuasai atau di manfaatkan oleh pihak ketiga dengan bentuk pemanfaatan secara sewa dan pinjam pakai. Barang milik daerah tersebut tetap di catat sebagai barang milik daerah (Aset Tetap) kabupaten.

Untuk keperluaan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bantul juga menggunakan tanah yang bukan milik daerah dengan sistem sewa, pinjam pakai atau kompensasi, yang terdiri dari tanah milik pemda lain, Tanah Kas Desa dan Tanah Kasultanan.

Dalam rangka pemenuhan dokumen MCP KPK Area 7 (tujuh) pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mempunyai timeline terkait pensetifikatan tanah Pemerintah Daerah yang meliputi pemberkasan, pemasangan pathok, pendaftaran pengukuran, pengkuran dan pendaftaran sertipikat. Progres kegiatan sampai dengan tahun 2024, dari total data aset tanah yang tercatat dalam SIMAS sebanyak 781 bidang, yang sudah bersertifikat sebanyak 260 bidang sehingga terdapat sisa sebanyak 521 bidang yang belum bersertifikat. Tahun 2024 target pensertifikatan tanah Pemda sebanyak 40 bidang, telah terbit sertifikat sebanyak 5 bidang . Untuk tahun 2025 kita targetkan sebanyak 30 bidang. Daftar rincian aset tanah per bidang terlampir.(dalam lampiran)

Nilai Tanah Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per OPD sebagai berikut:

Nomor	Nama Perangkat Daerah	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Sekretariat DPRD	2.925.465.000,00	2.925.465.000,00	-
2	Inspektorat Daerah	26.113.580,00	26.113.580,00	-
3	Dinas Pendidikan Kepumudaan dan Olah Raga	15.941.202.882	14.195.696.493	1.745.506.389,00
4	Dinas Kesehatan	606.376.500,00	606.376.500,00	-
5	DPUPKP	420.877.946.496,00	420.877.946.496,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja		0,00	-
7	DISNAKERTRANS	97.800.000,00	97.800.000,00	-
8	Dinas Perhubungan	4.025.200.000,00	4.025.200.000,00	-
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.150.511.250,00	2.150.511.250,00	-
10	Dinas Kedudayaan	26.095.675.000,00	26.095.675.000,00	-
11	Dinas Pariwisata	44.772.000,00	44.772.000,00	-
12	BPKPAD	8.162.720.080,00	50.566.209.271,00	(42.403.489.191,00)
13	RSUD Panembahan Senopati	45.000.000	45.000.000,00	-
14	RSUD Saras Adyatma	2.406.872.420,00	2.406.872.420,00	-
15	BPBD	377.421.375,00	377.421.375,00	-
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	788.025.000,00	788.025.000,00	-
17	Kapanewon Kretek	187.975.000,00	187.975.000,00	-

18	Kapanewon Imogiri	648.200.000,00	648.200.000,00	-
19	Bagian Umum dan Protokol	9.013.350.000,00	9.013.350.000,00	-
20	DKUKMP	44.172.451.514,00	44.172.451.514,00	-
21	Dinas Sosial	155.833.400,00	155.833.400,00	-
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	219.092.749,00	219.092.749,00	-
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	248.624.000,00	248.624.000,00	-
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	79.997.000,00	79.997.000,00	-
25	PPKD	42.768.727.191,00	0,00	42.768.727.191,00
	JUMLAH	582.065.352.437,00	579.954.608.048,00	(40.657.982.802,00)

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	1.136.522.584.747,24	1.069.346.685.886,79	67.175.898.860,45

Mutasi Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp63.433.510.257,59 berasal dari:

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo awal Peralatan dan Mesin	1.069.346.685.886,79	1.000.913.175.629,20	68.433.510.257,59
Mutasi tambah	153.450.717.041,98	120.713.772.513,87	32.736.944.528,11
Realisasi Belanja modal	83.581.489.731,00	76.046.486.634,86	7.535.003.096,14
Penerimaan Hibah Barang	2.723.251.950,00	7.169.852.460,00	(4.446.600.510,00)
(+) Pemeliharaan	439.890.385,00	1.276.510.060,01	(836.619.675,01)
(+) Belanja Barang dan Jasa	2.998.285.769,00	79.513.500,00	2.918.772.269,00
Gropping dari DIKPORA	17.938.077.312,00		17.938.077.312,00
Kapitalisasi dari Belanja DAK		4.062.498,00	(4.062.498,00)
Honor	67.542.149,98		67.542.149,98
Mutasi antar OPD (Droping Masuk)	26.670.671.673,00	35.408.658.421,00	(8.737.986.748,00)
Belanja tahun lalu	445.451.500,00		445.451.500,00
Kapitalisasi dari Persediaan		39.157.140,00	(39.157.140,00)
Kelebihan entry	28.800.000,00		28.800.000,00

Kapitalisasi dari Belanja BOSNAS		677.281.800,00	(677.281.800,00)
Kapitalisasi dari Belanja Danais		12.250.000,00	(12.250.000,00)
Reklasifikasi KIB	884.265.000,00		
(-) Reklasifikasi akun anggaran	13.881.591.572,00		13.881.591.572,00
Perbedaan SIPD dengan MARKAS	3.791.400.000,00		3.791.400.000,00
Mutasi kurang	(86.274.818.181,54)	(52.280.262.256,28)	(33.994.555.925,26)
Reklasifikasi ke persediaan		(1.649.329.096,00)	1.649.329.096,00
Pemberiaan Hibah		(24.200.000,00)	24.200.000,00
Penghapusan		(23.789.827.825,00)	23.789.827.825,00
Mutasi antar OPD	(26.670.671.673,54)	(25.939.732.883,00)	(730.938.790,54)
Kurang catat		(402.577.100,88)	402.577.100,88
Reklas anggaran		(355.978.680,40)	355.978.680,40
Mutasi pindah SKPD		(118.616.671,00)	118.616.671,00
Dropping ke sekolah	(17.288.029.857,00)		
Hibah BPBD ke Desa	(1.209.133.600,00)		
Penghapusasn intracomtable	(33.487.467.185,00)		
Penghapusasn ektracomtable	(1.438.000,00)		
(-) Belanja Barang dan Jasa	(1.277.104.670,69)		
(-)Belanja Pemeliharaan	(255.721.735,31)		
(-) Reklasifikasi akun anggaran	(6.085.251.460,00)		
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin	1.136.522.584.747,23	1.069.346.685.886,79	124.638.168.971,29

Seabagian aset tetap peralatan dan mesin di pinjjam oleh pihak lain (Instansi Vertikal) yaitu Kantor Pelayanan Pajak Daerah (SAMSAT), Rumah Tahanan Negara, Polres, Kejaksaan Negeri,Pengadilan Negeri, Kodim 0729 Bantul, KPU dan BPN (Kantor Pertanahan dan Bawaslu).

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul perihal pencatatan aset tetap Peralatan dan mesin, Pemerintah Kabupaten Bantul juga mencatat aset tetap peralatan mesin dengan nilai di bawah Rp300.000,00 sebesar Rp30.663.286.773,10

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bantul melakuakan penghapusan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp34.545.830.690 berupa kendaraan roda 2, roda 3, roda 4 dan roda 6 serta barang inventaris kantor .

Nilai Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2022 per OPD sebagai berikut:

Nomor	Nama Perangkat Daerah	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Bagian Tata Pemerintahan	603.680.507,04	648.317.840,04	-44.637.333,00
2	Bagian Hukum	557.141.980,00	598.718.680,00	-41.576.700,00
3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2.474.879.269,94	2.754.720.827,16	-279.841.557,22
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.106.411.595,00	1.997.051.595,00	109.360.000,00
5	Bagian Organisasi	893.102.114,00	963.201.614,00	-70.099.500,00
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17.984.317.414,32	18.087.066.464,32	-102.749.050,00
7	Inspektorat Daerah	3.642.057.960,01	3.668.900.460,01	-26.842.500,00
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	267.457.234.030,00	254.838.970.104,67	12.618.263.925,33
9	Dinas Kesehatan	140.834.295.059,00	140.051.365.726,00	782.929.333,00
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	18.776.608.188,00	17.034.016.544,00	1.742.591.644,00
11	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	3.786.434.937,00	3.814.272.437,00	-27.837.500,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	6.662.219.853,00	6.915.601.903,00	-253.382.050,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.842.956.402,30	4.266.994.781,36	575.961.620,94
14	Dinas Perhubungan	27.971.264.582,15	27.041.027.848,83	930.236.733,32
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.580.074.318,34	9.495.732.335,34	-915.658.017,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	53.429.464.264,97	39.868.621.516,62	13.560.842.748,35
17	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	2.106.636.730,01	1.962.930.258,01	143.706.472,00
18	Dinas Pariwisata	6.541.075.099,41	6.178.972.042,88	362.103.056,54
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.335.357.541,11	5.066.054.541,11	269.303.000,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	47.925.665.658,87	42.638.661.307,82	5.287.004.351,05
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.977.030.549,50	7.506.738.774,50	-529.708.225,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.908.555.216,00	6.079.672.864,00	-171.117.648,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	16.418.677.003,86	28.556.345.209,00	-12.137.668.205,14
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	4.782.363.517,01	5.060.856.567,01	-278.493.050,00
25	RSUD Panempahan Senopati	310.497.554.619,81	296.072.520.662,81	14.425.033.957,00
26	RSUD Saras Adyatma	21.722.719.283,26	7.277.726.864,95	14.444.992.418,31
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.172.092.590,00	20.539.689.998,00	1.632.402.592,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.873.065.293,00	1.808.006.293,00	65.059.000,00

29	Kapanewon Srandakan	1.370.935.844,50	1.363.345.844,50	7.590.000,00
30	Kapanewon Sanden	1.189.727.632,00	1.205.026.342,00	-15.298.710,00
31	Kapanewon Pajangan	1.226.322.522,00	1.217.261.022,00	9.061.500,00
32	Kapanewon Sedayu	1.369.421.987,50	1.349.971.987,50	19.450.000,00
33	Kapanewon Pandak	1.392.566.647,00	1.362.064.897,00	30.501.750,00
34	Kapanewon Kasihan	1.564.359.373,00	1.573.450.773,00	-9.091.400,00
35	Kapanewon Bantul	1.287.189.008,00	1.290.689.008,00	-3.500.000,00
36	Kapanewon Bambanglipuro	1.116.335.500,00	1.144.947.600,00	-28.612.100,00
37	Kapanewon Kretek	1.225.068.880,00	1.247.693.380,00	-22.624.500,00
38	Kapanewon Pundong	1.483.001.814,00	1.460.024.914,00	22.976.900,00
39	Kapanewon Sewon	1.264.008.731,00	1.261.972.531,00	2.036.200,00
40	Kapanewon Jetis	1.323.672.696,00	1.359.172.696,00	-35.500.000,00
41	Kapanewon Imogiri	1.322.248.040,00	1.324.758.995,00	-2.510.955,00
42	Kapanewon Dlingo	1.432.126.151,50	1.366.248.037,50	65.878.114,00
43	Kapanewon Pleret	1.321.818.450,00	1.290.814.050,00	31.004.400,00
44	Kapanewon Banguntapan	1.623.979.833,50	1.589.735.833,50	34.244.000,00
45	Kapanewon Piyungan	1.275.687.721,17	1.225.217.221,17	50.470.500,00
46	Bagian Umum dan Protokol	25.088.213.216,38	24.874.320.851,38	213.892.365,00
47	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1.183.079.157,84	1.198.265.193,55	-15.186.035,71
48	Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA	654.841.000,00	656.582.000,00	-1.741.000,00
49	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	17.138.106.376,81	15.729.490.155,12	1.408.616.221,70
50	Dinas Sosial	7.478.745.799,80	7.221.748.620,80	256.997.179,00
51	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.166.380.046,02	17.414.054.161,02	-247.674.115,00
52	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.284.379.394,51	8.996.979.394,51	287.400.000,00
53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	2.840.067.897,50	2.697.859.352,50	142.208.545,00
54	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.347.516.955,30	7.132.234.965,30	215.281.990,00
55	PPKD	12.689.848.495,00		
	JUMLAH	1.136.522.584.747,23	1.069.346.685.886,79	67.175.898.860,45

1.136.522.584.747,23

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.550.938.819.379,66	1.495.787.606.833,84	55.151.212.545,81

Mutasi Gedung dan Bangunan adalah: 77.908.346.385,02 -

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo awal Gedung dan Bangunan	1.495.787.606.833,84	1.439.781.255.131,43	56.006.351.702,41
Mutasi tambah	133.165.863.560,66	133.847.841.694,41	
Realisasi Belanja Modal	55.257.517.175,64	32.716.587.212,88	22.540.929.962,76
Hibah	436.575.600,00	27.666.474.056,00	-27.229.898.456,00
Mutasi antar OPD	57.984.142.805,00	69.996.958.710,00	
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	7.992.101.867,00		
Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	941.601.605,00	3.432.831.715,53	-2.491.230.110,53
Reklas akun anggaran	3.136.754.450,00	25.000.000	3.111.754.450,00
Penggunaan Kembali bongkaran	500.000.000,00	9.990.000,00	490.010.000,00
Belanja tahun lalu	1.396.382.389,00		1.396.382.389,00
Penilain kembali rumah dinas Bupati	4.876.488.769,02		
Penilain kembali kandang sapi	60.248.900,00		
Honor	584.050.000,00		
Mutasi Kurang	(78.014.651.012,00)	(77.841.489.992,00)	-173.161.020,00
Pemberian Hibah Barang	(95.300.000,00)	(2.778.248.255,00)	
Penghapusan	(10.500.476.678,00)	(5.788.908.941,00)	-4.711.567.737,00
mutasi koreksi rehab sebagian gedung yg belum di akomodir di simas			
Honor	(4.225.000,00)	(195.280.139,00)	
Reklas ke belanja pemeliharaan	(884.265.000,00)		
Reklasifikasi akun anggaran	(13.590.000,00)	(10.003.062,00)	
reklasifikasi honor	(4.474.501.312,00)		
Mutasi antar OPD	(7.337.000,00)	(69.069.049.595)	
kurang catat	(57.984.142.805,00)		
Reklas ke KIB B	(2.945.859.156,00)		
Hibah ke desa	(1.104.954.061,00)		
Saldo akhir Gedung dan Bangunan	1.550.938.819.382,50	1.495.787.606.833,84	48.939.571.180,64

Saldo akhir Gedung dan Bangunan per OPD sebagai berikut:

Nomor	Nama Perangkat Daerah	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Bagian Tata Pemerintahan	301.277.000,00	301.277.000,00	-
2	Bagian Hukum	-	0,00	-
3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	4.985.027.798,24	2.583.048.159,24	2.401.979.639
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8.193.059.650,00	7.221.423.000,00	971.636.650
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.939.729.583,00	1.939.729.583,00	-
6	Inspektorat Daerah	203.257.000,00	203.257.000,00	-
7	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	590.860.842.382,25	582.637.867.014,99	8.222.975.367
8	Dinas Kesehatan	130.966.963.605,10	128.972.823.208,10	1.994.140.397
9	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	118.793.187.410,00	141.277.606.110,00	(22.484.418.700)
10	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	2.826.249.337,00	2.826.249.337,00	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja	4.922.618.950,00	120.916.350,00	4.801.702.600
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.522.309.010,45	526.042.700,00	996.266.310
13	Dinas Perhubungan	14.990.496.497,00	13.313.765.620,00	1.676.730.877
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.439.353.805,00	2.439.353.805,00	-
15	Dinas Lingkungan Hidup	35.305.802.620,22	26.566.551.707,65	8.739.250.913
16	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	6.208.378.650,46	6.208.378.650,46	-
17	Dinas Pariwisata	55.605.047.312,59	54.704.426.851,59	900.620.461
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.359.597.418,00	7.309.797.418,00	49.800.000
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.274.528.396,00	1.182.246.596,00	92.281.800
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.277.566.590,00	7.406.776.650,00	8.870.789.940
21	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-	12.754.593.215,20	(12.754.593.215)
22	RSUD Panempahan Senopati	92.728.367.866,79	78.670.387.770,79	14.057.980.096
23	RSUD Saras Adyatma	15.276.907.252,00	8.256.665.029,00	7.020.242.223
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.692.472.497,63	15.795.626.797,00	2.896.845.701
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	704.063.000,00	704.063.000,00	-
26	Kapanewon Srandakan	2.760.767.739,00	2.760.767.739,00	-
27	Kapanewon Sanden	3.242.450.397,00	3.124.881.097,00	117.569.300
28	Kapanewon Pajangan	3.251.098.188,00	3.251.098.188,00	-
29	Kapanewon Sedayu	1.456.835.797,00	1.456.835.797,00	-

30	Kapanewon Pandak	2.040.123.787,00	2.003.816.087,00	36.307.700
31	Kapanewon Kasihan	2.239.586.484,00	2.239.586.484,00	-
32	Kapanewon Bantul	2.219.096.284,00	2.219.096.284,00	-
33	Kapanewon Bambanglipuro	1.705.602.372,00	1.705.602.372,00	-
34	Kapanewon Kretek	1.116.205.687,00	1.116.205.687,00	-
35	Kapanewon Pundong	2.428.387.578,00	2.428.387.578,00	-
36	Kapanewon Sewon	2.815.513.759,00	2.815.513.759,00	-
37	Kapanewon Jetis	2.242.085.565,00	2.242.085.565,00	-
38	Kapanewon Imogiri	2.433.766.358,00	2.433.766.358,00	-
39	Kapanewon Dlingo	3.130.451.667,00	2.694.977.017,00	435.474.650
40	Kapanewon Pleret	2.241.945.869,00	2.241.945.869,00	-
41	Kapanewon Banguntapan	1.288.512.200,00	1.288.512.200,00	-
42	Kapanewon Piyungan	2.914.305.438,00	2.914.305.438,00	-
43	Bagian Umum dan Protokol	48.240.591.322,48	45.867.646.226,48	2.372.945.096
44	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	236.219.135.928,31	235.415.432.490,31	803.703.438
45	Dinas Sosial	7.274.916.349,78	7.274.916.349,78	-
46	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28.188.572.118,91	27.658.046.691,02	530.525.428
47	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.428.698.634,00	7.428.698.634,00	-
48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	3.033.346.666,00	2.758.320.666,00	275.026.000
49	Dinas Kelautan dan Perikanan	28.523.763.476,37	26.524.289.684,23	1.999.473.792
		20.125.956.083,08		
	PPKD	1.550.938.819.379,65	1.495.787.606.833,84	35.025.256.462,74

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.500.476.678,00

Sebagian Aset Tetap Gedung dan Bangunan ada yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga dengan bentuk Pemanfaatan Sewa, Pinjam Pakai, atau Penggunaan untuk dioperasikan pihak lain.

Terhadap Aset Tetap Gedung dan Bangunan telah diterapkan Penyusutan, termasuk Gedung dan Bangunan yang dimanfaatkan oleh Pihak ketiga sebagaimana tercantum dalan Bab VI.

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.4.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.925.731.270.882,29	2.785.233.822.699,23	140.497.448.183,06

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penghapusan Jalan,Irigasi dan jaringan sebesar Rp28.240.065.810,00

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo awal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.785.233.822.699,23	2.675.892.391.386,40	109.341.431.312,83
Mutasi tambah	192.268.020.712,06	263.876.949.894,07	(71.608.929.182,01)
Realisasi Belanja Modal	132.989.716.998,25	110.642.014.782,07	22.347.702.216,18
Penerimaan Hibah Barang	38.366.508.646,00	24.511.444.900,00	13.855.063.746,00
Kapitalisasi dari BelanjaPemeliharaan	105.573.000,81	20.039.000,00	85.534.000,81
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa		2.300.000,00	(2.300.000,00)
Mutasi antar OPD	12.824.969.817,00	128.316.605.212,00	(115.491.635.395,00)
Reklasifikasi akun anggaran	5.696.446.850,00	384.546.000,00	5.311.900.850,00
Belanja tahun lalu	1.619.318.600,00		1.619.318.600,00
Kapitalisasi dari Belanja Honor	44.582.800,00		44.582.800,00
Reklas antar KIB	620.904.000,00		620.904.000,00
Mutasi kurang	(51.770.572.529,00)	(154.535.518.581,24)	102.764.946.052,24
Pemberian Hibah		(1.992.325.360,00)	1.992.325.360,00
Penghapusan	(41.065.035.627,00)	(6.393.756.355,24)	(34.671.279.271,76)
Reklasifikasi akun anggaran	(8.702.400,00)		(8.702.400,00)
Reklasifikasi KIB	(8.627.480.002,00)		(8.627.480.002,00)
Kurang Catat		(22.111.982.654,00)	22.111.982.654,00
Mutasi antar OPD		(124.037.454.212,00)	124.037.454.212,00
Reklas ke barjas	(2.069.354.500,00)		(2.069.354.500,00)
Saldo akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.925.731.270.882,29	2.785.233.822.699,23	140.497.448.183,06

Saldo akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD sebagai berikut:

Nomor	Nama Perangkat Daerah	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Bagian Hukum		5.000.000,00	(5.000.000,00)
2	Inspektorat Daerah	15.300.000,00	15.300.000,00	-
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	13.558.140.136,93	13.271.556.086,77	286.584.050,16
4	Dinas Kesehatan	13.468.805.567,16	1.907.305.467,00	11.561.500.100,16
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.603.810.736.233,24	2.504.547.456.119,44	99.263.280.113,80
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	220.000.000,00	220.000.000,00	

6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	-
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.300.000,00	21.300.000,00	-
8	Dinas Perhubungan	162.305.573.609,97	147.103.141.303,08	15.202.432.306,89
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	191.298.000,00	191.298.000,00	-
10	Dinas Lingkungan Hidup	14.165.943.819,92	13.187.081.779,17	978.862.040,75
11	Dinas Pariwisata	13.367.317.336,07	12.998.523.342,07	368.793.994,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.075.000,00	22.075.000,00	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	934.270.500,00	934.270.500,00	-
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	155.391.800,00	164.191.800,00	(8.800.000,00)
15	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	8.950.000,00	59.304.473.568,33	(59.295.523.568,33)
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			-
17	RSUD Panempahan Senopati	17.057.152.679,00	17.057.152.679,00	-
18	RSUD Saras Adyatma	1.791.954.350,00	43.007.500,00	
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	959.267.500,00	959.267.500,00	-
20	Kapanewon Srandakan	2.200.000,00	2.200.000,00	-
21	Kapanewon Sanden	7.782.800,00	7.782.800,00	-
22	Kapanewon Pajangan	10.470.000,00	10.470.000,00	-
23	Kapanewon Sedayu	2.500.000,00	2.500.000,00	-
24	Kapanewon Pandak	8.743.900,00	8.743.900,00	-
25	Kapanewon Kasihan	1.700.000,00	1.700.000,00	-
26	Kapanewon Bantul	6.990.000,00	6.990.000,00	-
27	Kapanewon Kretek	0,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)
28	Kapanewon Pundong	1.100.000,00	30.000,00	1.070.000,00
29	Kapanewon Sewon	30.000,00	26.850.000,00	(26.820.000,00)
30	Kapanewon Jetis	26.850.000,00	5.412.750,00	21.437.250,00
31	Kapanewon Imogiri	5.412.750,00	30.200.000,00	(24.787.250,00)
32	Kapanewon Dlingo	1.100.000,00	11.362.000,00	(10.262.000,00)
33	Kapanewon Pleret	2.500.000,00	2.500.000,00	-
34	Kapanewon Banguntapan	8.000.000,00	8.000.000,00	-
35	Bagian Umum dan Protokol	2.969.613.368,00	2.969.613.368,00	-
36	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	691.809.896,00	691.809.896,00	-
37	Dinas Sosial	20.039.000,00	20.039.000,00	
38	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.857.524.949,00	3.857.524.949,37	(0,37)

39	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	113.678.478,00	113.678.478,00	-
40	Dinas pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan	2.606.182.810,00	931.650.000,00	
41	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.571.264.913,00	4.571.264.913,00	-
		68.762.301.487,00		
	Jumlah	2.925.731.270.883,29	2.785.233.822.699,23	68.311.667.037,06

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	85.893.658.734,82	85.799.973.012,14	93.685.722,68

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penghapusan terhadap jalan, Irigasi dan jaringan sebesar Rp9.044.689.037,00
Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah:

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo awal Aset Tetap Lainnya	85.799.973.012,14	82.030.386.109,96	3.769.586.902,18
Mutasi tambah	17.806.444.199,00	15.001.684.629,01	2.804.759.569,99
Realisasi Belanja Modal	8.041.511.571,00	8.268.805.559,00	(227.293.988,00)
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa		893.750,00	(893.750,00)
Belanja tahun lalu	31.341.700,00		
Mutasi antar OPD		6.731.985.320,01	
Dropping	8.261.978.328,00		
Temuan BPK tahun lalu	1.439.017.500,00		
Kapitalisasi dari Belanja BLUD	32.595.100,00		
Mutasi kurang	(17.712.758.476,33)	(11.232.097.726,83)	(6.480.660.749,50)
Mutasi antar OPD	(7.806.988.946,33)		(7.806.988.946,33)
Reklas ke persediaan	(92.101.999,00)		
Reklas akun anggaran	(525.332.725,00)		
Reklas ke persediaan	(2.000.000,00)		
Bosda	(400,00)		
Penghapusan	(9.286.334.406,00)	(2.969.292.167,83)	(6.317.042.238,17)
Reklas ke ATB		(1.011.013.569,00)	1.011.013.569,00
BOS		(7.112.878.260)	
BLUD		(48.913.730,00)	(3.000.000,00)

Reklasifikasi akun		(90.000.000,00)	(636.226.700,00)
Saldo akhir Aset Tetap Lainnya	85.893.658.734,81	85.799.973.012,14	93.685.722,67

- 0,01

Saldo akhir Aset Tetap Lainnya per OPD sebagai berikut:

Nomor	Nama Perangkat Daerah	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Bagian Tata Pemerintahan	64.756.833,00	64.756.833,00	-
2	Bagian Hukum	107.829.500,00	107.829.500,00	-
3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	452.700,00	452.700,00	-
4	Bagian Kesejahteran Rakyat	0,00	0,00	
5	Bagian Organisasi	8.740.832,96	8.740.832,96	-
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	182.128.008,00	182.128.008,00	-
7	Inspektorat Daerah	44.262.091,32	44.262.091,32	-
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	75.159.994.393,63	75.976.142.025,00	
9	Dinas Kesehatan	206.857.726,00	206.857.726,00	-
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	30.052.857,00	30.052.857,00	-
11	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	242.857,00	242.857,00	-
12	Satuan Polisi Pamong Praja	7.729.190,00	7.729.190,00	-
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	492.857,00	492.857,00	-
14	Dinas Perhubungan	2.816.767.252,32	2.816.767.252,32	-
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.372.190,00	2.372.190,00	-
16	Dinas Lingkungan Hidup	422.157.027,00	422.157.027,00	-
17	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	467.512.057,00	467.512.057,00	-
18	Dinas Pariwisata	680.690,32	680.690,32	-
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54.246.570,32	54.246.570,32	-
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.880.357,00	49.880.357,00	-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.072.323.835,40	3.891.535.992,90	180.787.842,50
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.000.670,00	12.000.670,00	-
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.086.257,00	4.930.857,00	(844.600,00)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	23.102.357,00	23.102.357,00	-
25	RSUD Panempahan Senopati	22.499.251,00	22.499.251,00	-
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.099.077,00	50.099.077,00	-
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.461.057,00	14.461.057,00	-
28	Kapanewon Srandakan	909.357,00	909.357,00	-
29	Kapanewon Sanden	492.857,00	492.857,00	-

30	Kapanewon Pajangan	492.857,00	492.857,00	-
31	Kapanewon Sedayu	1.178.190,32	1.178.190,32	-
32	Kapanewon Pandak	1.865.690,32	1.865.690,32	-
33	Kapanewon Kasihan	2.184.190,32	2.184.190,32	-
34	Kapanewon Bantul	4.443.690,32	4.443.690,32	-
35	Kapanewon Bambanglipuro	786.875,00	786.875,00	-
36	Kapanewon Kretek	1.568.190,32	1.568.190,32	-
37	Kapanewon Pundong	1.940.357,00	1.940.357,00	-
38	Kapanewon Sewon	16.822.290,00	19.834.190,00	
39	Kapanewon Jetis	27.273.440,32	27.273.440,32	-
40	Kapanewon Imogiri	1.643.690,32	1.643.690,32	-
41	Kapanewon Dlingo	1.427.190,02	1.427.190,02	-
42	Kapanewon Pleret	1.815.690,32	1.815.690,32	-
43	Kapanewon Banguntapan	11.737.440,32	11.737.440,32	-
44	Kapanewon Piyungan	740.357,00	740.357,00	-
45	Bagian Umum dan Protokol	215.780.733,32	215.780.733,32	-
46	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1.205.000,00	1.205.000,00	-
47	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	6.703.630,32	6.703.630,32	-
48	Dinas Sosial	242.857,00	242.857,00	-
49	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.764.650.357,00	1.032.592.965,00	732.057.392,00
50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	492.857,00	492.857,00	-
51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	687.833,00	687.833,46	
	PPKD	844.600,00		
	Jumlah	85.893.658.714,81	85.799.973.012,14	92.841.102,67

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.4.1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	2.945.859.156,69	-	2.945.859.156,69

Realisasi Konstruksi dalam pengerjaan 2024 merupakan pencatatan aset hasil pekerjaan pembangunan Agrowisata Bukit Dermo di Dinas Pariwisata yang dihentikan secara sepihak karena wan prestasi dari pihak pemborong. Realisasi pembayaran yang telah diterima rekanan sebesar RpRp4,011,909.587,00. Atas temuam Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan LHP Nomor 22/LHP/XVIII.YOG/12/2024 dan setoran hasil reviu dari Inspektorat Kabupaten Bantul Nomor 700/0050/Reviu.Bangunan/2025 dengan rincian temuan dari BPK sebesar Rp883.70.286,01 dan temuan hasil reviu dari Inspektorat Kabupaten Bantul sebesar Rp7.980.144,30 sehingga total uang yang harus dikembalikan ke Kasda sebesar Rp1.066.050.430,31. Jumlah konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp2.945.859.156.69 (4.011.909.587,00 - 1.066.050.43,31)

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	3.312.207.283.872,17	3.135.472.090.149,13	176.735.193.723,04

Akumulasi penyusutan adalah kumpulan atau kompilasi dari penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penghitungan penyusutan Aset Tetap telah menggunakan aplikasi SIMAS. Nilai penyusutan yang disajikan telah sesuai dengan kebijakan akuntasi yang mengatur mengenai penyusutan aset tetap.

Rincian Akumulasi Penyusutan tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Akumulasi Penyusutan dari Pengungkapan Saldo awal berdasarkan pencatatan SIMAS	3.135.472.090.149,13	2.935.596.538.815,85	199.875.551.333,28
Penyusutan Tahun berjalan			-
Penyusutan Peralatan dan Mesin	57.944.772.633,17	73.610.108.703,40	(15.665.336.070,23)
Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.489.188.256,76	36.257.046.626,12	(767.858.369,36)
Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.301.232.833,11	90.008.396.003,76	(6.707.163.170,65)
Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun	**3.312.207.283.872,17**	**3.135.472.090.149,13**	**176.735.193.723,04**

Akumulasi Penyusutan dari Pengungkapan Saldo awal berdasarkan pencatatan Simda BMD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	946.837.398.713,73	888.892.626.080,56	57.944.772.633,17
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	414.314.261.542,63	378.825.073.285,87	35.489.188.256,76
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.951.055.623.615,81	1.867.754.390.782,70	83.301.232.833,11
	3.312.207.283.872,17	**3.135.472.090.149,13**	**176.735.193.723,04**

Perhitungan penyusutan aset :

1

Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo Awal	888.892.626.080,56	815.349.271.830,36	(73.543.354.250,20)
Penyusutan tahun berjalan berdasarkan perhitungan aplikasi SIMAS	87.685.383.238,79	87.016.499.949,70	(668.883.289,09)
Saldo Akhir penyusutan berdasarkan rumus	976.578.009.319,35	902.365.771.780,06	(74.212.237.539,29)
Saldo akhir akumulasi berdasarkan perhitungan aplikasi SIMAS	946.837.398.713,73	888.892.626.080,56	(57.944.772.633,17)
koreksi akumulasi penyusutan tahun lalu	(29.740.610.605,62)	(13.473.145.699,50)	16.267.464.906,12
Penyusutan tahun berjalan yang tersaji di laporan		73.543.354.250,20	
Koreksi Penyusutan tahun lalu		66.754.453,20	
Penyusutan tahun berjalan yang tersaji di laporan	57.944.772.633,17	73.610.108.703,40	15.665.336.070,23

2

Gedung dan Bangunan	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo Awal	378.825.073.285,87	342.577.273.379,75	(36.247.799.906,12)
Penyusutan tahun berjalan berdasarkan perhitungan aplikasi SIMAS	30.820.268.441,36	29.768.789.161,15	(1.051.479.280,21)
Saldo Akhir penyusutan berdasarkan rumus	409.645.341.727,23	372.346.062.540,90	(37.299.279.186,33)
Saldo akhir akumulasi berdasarkan perhitungan aplikasi SIMAS	414.314.261.542,63	378.825.073.285,87	(35.489.188.256,76)
koreksi penyusutan tahun berjalan	4.668.919.815,40	6.479.010.744,97	1.810.090.929,57
Penyusutan tahun berjalan yang tersaji di laporan	35.489.188.256,76	36.247.799.906,12	758.611.649,36
Koreksi Penyusutan tahun lalu		9.246.720,00	
Penyusutan tahun berjalan yang tersaji di laporan		36.257.046.626,12	

3

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo Awal	1.867.754.390.782,70	1.777.745.994.778,94	(90.008.396.003,76)
Penyusutan tahun berjalan berdasarkan perhitungan aplikasi SIMAS	86.764.267.895,71	90.609.154.608,57	3.844.886.712,86
Saldo Akhir penyusutan berdasarkan rumus	1.954.518.658.678,41	1.868.355.149.387,51	(86.163.509.290,90)
Saldo akhir akumulasi berdasarkan perhitungan aplikasi SIMAS	1.951.055.623.615,81	1.867.754.390.782,70	(83.301.232.833,11)
koreksi penyusutan tahun berjalan	(3.463.035.062,60)	(600.758.604,81)	2.862.276.457,79
Penyusutan tahun berjalan yang tersaji di laporan	83.301.232.833,11	90.008.396.003,76	6.707.163.170,65

Akumulasi penyusutan mengalami penyesuaian dikarenakan terjadi perubahan cara penilaian aset yang disusutkan antara lain:

1 Untuk penambahan masa manfaat yang diakibatkan adanya pemeliharaan maka masa manfaat aset tetap tersebut tidak melebihi masa manfaat awal, sehingga dalam penghitungan penyusutan pembagi untuk masa manfaat tidak melebihi masa manfaat awal;

2 Penghitungan penyusutan setelah pemeliharaan berdasarkan dari nilai buku terakhir.

5.3.1.4 Dana Cadangan

Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 tidak mempunyai dana cadangan

5.3.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset non lancar yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kelompok Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, maupun Dana Cadangan.

Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 terdiri atas:

	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.5.1	Tagihan Piutang (Piutang pajak pemnafaatan ABT, piutang kepada PO Jatayu, Piutang UMK dana SO)	15.311.414,00	15.311.414,00	-
5.3.1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			-
5.3.1.5.3	Aset Tidak Berwujud	32.304.782.230,43	30.036.435.380,43	2.268.346.850,00
5.3.1.5.4	Aset Lain-Lain	365.094.000,00	-	365.094.000,00
5.3.1.5.5	Aset lain yang dibatasi penggunaannya (Kas di pengelola jasa bongkar reklame, Kas di pengelola rusunawa, Kas di pengelola pengajuan keberatan PBB P2, Kas di Bendahara Penerima untuk penampungan PBB P2	1.882.800.072,00	1.888.802.321,00	(6.002.249,00)
5.3.1.5.6	Akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud	(25.113.343.858,00)	(21.470.023.582,80)	(3.643.320.275,20)
	Jumlah Aset Lainnya	9.454.643.858,43	10.470.525.532,63	(1.015.881.674,20)

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.5.1	Tagihan Piutang	15.311.414,00	15.311.414,00	0,00

Tagihan Piutang	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Piutang Pajak Pemanfaatan ABT Piutang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah merupakan piutang yang disebabkan adanya pengalihan penanggungjawab pengelolaan pajak ABT dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi tahun 2006	8.232.414,00	8.232.414,00	-
Piutang kepada PO Jatayu			

Piutang yang diakibatkan adanya tunggakan retribusi pariwisata dari PO Jatayu yang belum dibayarkan per 31 Desember 2005 dan belum dilunasi karena PO Jatayu sudah tidak melayani jalur reguler ke Pantai Parangtritis	800.000,00	800.000,00	-
Piutang UMK Dana SO Piutang tersebut merupakan koreksi LHP BPK atas LKD Tahun 2004 dari Pos Aset Tetap hasil pembelian dari Kegiatan Supporting Organisasi di reklasifikasi ke piutang	6.279.000,00	6.279.000,00	-
Jumlah	15.311.414,00	15.311.414,00	0,00

5.3.1.5.2 TGR

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)

Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai saldo Tuntutan Ganti Rugi

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.5.3 Aset Tak berwujud	32.304.782.230,43	30.036.435.380,43	2.268.346.850,00

Aset tersebut merupakan aset berupa Program/software yang ada dibeberaka SKPD yang dulunya ada di ast tetap dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Nilai Aset Tak Berwujud awal	30.036.435.380,43	24.175.510.060,43	5.860.925.320,00
Penambahan	2.421.726.950,00	6.811.961.020,00	(4.390.234.070,00)
Penghapusan	153.380.100,00	951.035.700,00	(797.655.600,00)
			-
Saldo akhir Aset Tak berwujud	32.304.782.230,43	30.036.435.380,43	673.035.650,00

Nomor	Nama Perangkat Daerah	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Bagian Organisasi	65.115.850,00	108.775.950,00	(43.660.100,00)
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	134.024.000,00	134.024.000,00	-
3	Inspektorat Daerah	211.031.800,00	211.031.800,00	-
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.034.422.247,57	1.023.023.648,00	11.398.599,57
5	Dinas Kesehatan	739.826.000,00	739.826.000,00	-
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	13.186.550.450,00	11.693.075.400,00	1.493.475.050,00
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	862.035.700,00	862.035.700,00	-
8	Dinas Perhubungan	1.383.799.890,00	1.021.377.800,00	362.422.090,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	103.790.400,00	103.790.400,00	-

10	Dinas Lingkungan Hidup	225.781.000,00	225.781.000,00	-
11	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1.667.814.865,00	1.667.814.865,00	-
12	Dinas Pariwisata	823.016.000,00	793.266.000,00	29.750.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	380.764.000,00	380.764.000,00	-
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.607.028.030,00	3.552.168.030,00	54.860.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	430.502.900,00	430.502.900,00	-
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.180.056.700,00	3.180.056.700,00	-
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	891.240.175,00	1.482.527.887,00	(591.287.712,00)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	260.331.000,00	314.013.500,00	(53.682.500,00)
19	RSUD Panempahan Senopati	123.669.810,00	74.467.950,00	49.201.860,00
20	RSUD Saras Adyatma	158.221.600,00	78.321.600,00	79.900.000,00
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	167.206.000,00	149.586.000,00	17.620.000,00
22	Bagian Umum dan Protokol	34.650.000,00	34.650.000,00	-
23	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	824.618.250,00	729.116.250,00	95.502.000,00
24	Dinas Sosial	161.757.500,00	161.757.500,00	-
25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	114.015.000,00	114.015.000,00	-
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	64.550.000,00	64.550.000,00	-
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	319.992.000,00	290.244.000,00	29.748.000,00
28	Kepanewon Pleret	96.903.000,00	96.903.000,00	-
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	417.120.250,00	318.968.500,00	98.151.750,00
30	PPKD	634.947.812,43		
	Jumlah	**32.304.782.230,00**	**30.036.435.380,00**	**1.633.399.037,57**

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.5.4	Aset Lain-lain	365.094.000,00	-	365.094.000,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp365.094.000,00 merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitasi TDF sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Non Tunai melalui Fasilitas Deposit Facility (TDF) dan Surat Edaran dari Kemendagri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui fasilitas TDF. Saldo per 31 Desember 2024.

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)

5.3.1.5.5 Aset lain yang dibatasi penggunaannya	1.882.800.072,00	1.888.802.321,00	(6.002.249,00)

Aset lainnya yang dibatasi merupakan kas yang ada di pengelola kegiatan yang tersimpan dalam rekening pengelola yang penggunaannya (pemasukan dan pengeluaran) melalui mekanisme yang telah diatur dalam kegiatan tersebut dan dimungkinkan dapat menjadi potensi pendapatan daerah.

Rincian Aset lain yang dibatasi penggunaannya sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Kas di Pengelola Jasa Bongkar Reklame	42.439.919,00	44.942.168,00	(2.502.249,00)

Pada Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu mengelola uang titipan biaya bongkar reklame pada rekening penampungan jaminan pembongkaran di Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor 004.111. 001274 atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu QQ Eka Purnamasari, yang merupakan uang titipan penyelenggaran reklame yang belum jatuh tempo dan belum menjadi hak Pemda.sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Mutasi dari Kas di Pengelola Jasa Bongkar Reklame	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Salso awal	44.942.168,00	38.357.993,00	6.584.175,00
Kas Masuk	19.019.664,00	23.811.925,00	(4.792.261,00)
Diambil Wajib Pajak	(21.521.913,00)	(17.227.750,00)	(4.294.163,00)
Dilimpahkan ke Kas Daerah			-
Jumlah	42.439.919,00	44.942.168,00	-2.502.249,00

Saldo Kas di Pengelola Jasa Bongkar Reklame di RC sebesar Rp45.118.620,00. Dalamsaldo tersebut terdapat jasa giro yang belum dilimpahkan ke Kas Daerah sebesar RP176.452.

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Kas di Pengelola Jasa Bongkar Menara Telekomunikasi	1.687.160.153,00	1.687.160.153,00	0,00

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengelola uang titipan biaya bongkar Menara Telekomunikasi pada rekening penampungan jaminan pembongkaran di Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor 004.111. 001274 atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu QQ Eka Purnamasari, yang merupakan uang titipan penyelenggaran Menara Telekomunikasi yang belum jatuh tempo dan belum menjadi hak Pemda.sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Untuk tahun anggaran 2024 tidak ada mutasi di Rekening tampungan.

Kas di Pengelola Jasa Bongkar Menara Telekomunikasi	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Salso awal	1.687.160.153,00	1.687.160.153,00	0,00
Kas Masuk	-		0,00
Diambil Wajib Pajak	-		0,00

Dilimpahkan ke Kas Daerah	-		0,00
Saldo akhir	**1.687.160.153,00**	**1.687.160.153,00**	**0,00**

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Kas di Pengelola Rusunawa	153.200.000,00	156.700.000,00	(3.500.000,00)

Pada Pengelolaan Rusunawa di DPU terdapat kebijakan yang bertujuan untuk menghindari kerugian akibat tidak terbayarnya uang sewa dengan cara penyimpanan uang jaminan sewa selama 2 bulan dan jaminan tersebut akan dikembalikan setelah penyewa tidak menempati Rusunawa. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 terdapat kas pada rekening giro no. 004.111.001021

Mutasi Kas di Pengelola Rusunawa	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Salso awal	156.700.000,00	167.800.000,00	(11.100.000,00)
Kas Masuk	40.250.000,00	37.200.000,00	3.050.000,00
Diambil Wajib Pajak	(43.750.000,00)	(48.300.000,00)	4.550.000,00
Dilimpahkan ke Kas Daerah	-		-
Jumlah	153.200.000,00	156.700.000,00	-3.500.000,00

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.1.5.6	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(25.113.343.858,00)	(21.470.023.582,80)	(3.643.320.275,20)

Nilai dari akumulasi amortisasi merupakan hasil perhitungan secara sistematis yang berasal dari seluruh aset tidak berwujud yang sudah diatur amortisasinya secara umur dan teknis penyusutannya.

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Akumulasi amortisasi dari Pengungkapan Saldo awal berdasarkan pencatatan SIMAS	21.470.023.582,80	16.333.937.538,00	5.136.086.044,80
Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun berjalan	3.643.320.275,20	5.136.086.044,80	(1.492.765.769,60)
Akumulasi amortisasi Akhir	25.113.343.858,00	21.470.023.582,80	3.643.320.275,20

Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Saldo Awal	21.470.023.582,80	16.333.937.538,00	5.136.086.044,80
Penyusutan tahun berjalan berdasarkan perhitungan aplikasi SIMAS	3.637.370.275,20	4.181.750.345,20	- 544.380.070,00
Saldo Akhir penyusutan berdasarkan rumus	25.107.393.858,00	20.515.687.883,20	4.591.705.974,80
Saldo akhir akumulasi berdasarkan perhitungan aplikasi SIMAS	25.113.343.858,00	21.470.023.582,80	3.643.320.275,20
koreksi penyusutan tahun berjalan	5.950.000,00	954.335.699,60	- 948.385.699,60
Penyusutan tahun berjalan yang tersaji di laporan	**3.643.320.275,20**	**5.136.086.044,80**	**(1.492.765.769,60)**

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.2	KEWAJIBAN	45.698.105.907,86	62.510.161.243,30	-16.812.055.335,44

Akun ini merupakan saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Bantul Per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan perincian sebagai berikut:

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	45.698.105.907,86	62.510.161.243,30	-16.812.055.335,44

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2024 yang meliputi Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja RSUD Panembahan Senopati, Utang Beban Listrik, Telepon, Air dan langganan lainnya serta kekurangan pembayaran Belanja Pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.2.1.1	Utang PFK	-	-	-
5.3.2.1.2	Utang Bunga	-	-	-
5.3.2.1.3	Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-
5.3.2.1.4	Pendapatan diterima dimuka	1.131.014.707,13	774.944.782,30	356.069.924,83
5.3.2.1.5	Utang belanja	44.567.091.200,73	61.735.216.461,00	(17.168.125.260,27)
	Jumlah	45.698.105.907,86	62.510.161.243,30	(16.812.055.335,44)

Penjelasan dari masing-masing pos hutang jangka pendek adalah:

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.2.1.1	Utang PFK		-	

Untuk tahun 2024 dan 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak memiliki Utang PFK

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.2.1.2	Utang Bunga			#REF!

Untuk tahun 2024 dan 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai utang bunga

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.2.1.3	Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat		-	0,00

Untuk tahun 2024 dan 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat

	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.2.1.4 Pendapatan diterima dimuka	1.131.014.707,13	774.944.782,30	356.069.924,83

Jumlah tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah yang disebabkan oleh Pendapatan yang diterima dimuka yaitu:

Nomor	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Kelebihan pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Air Bawah Tanah dan Parkir	49.221.813,80	49.221.813,80	-
2	Pemanfaatan kios di Pasar Piyungan untuk ATM BPD DIY dengan jangka waktu sewa selama lima tahun dari 15 Oktober 2019 sampai dengan 15 Oktober 2024		2.682.750,00	(2.682.750,00)
3	Pendapatan diterima dimuka pada BKAD atas sewa berupa Gedung Eks DIKMENOF di Jl. Juanda No 103 Bantul oleh Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kab Bantul dalam rangka penyelenggaraan SMPUA	32.083.333,33	43.083.333,33	(11.000.000,00)
4	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa berupa sebagian tanah dan bangunan yang digunakan untuk bangunan ATM dan Kantor Kas BPD DIY (Komplek Parasamya) dengan jangka waktu 5 tahun	108.000.000,00	144.000.000,00	(36.000.000,00)
5	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa berupa sebagian tanah yang digunakan untuk bangunan ATM dan Kantor Kas BPD DIY (Komplek perkantoran Manding) dengan janka waktu selama 3 tahun dari tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan 3 Mei 2023	23.333.333,33	38.000.000,00	(14.666.666,67)
6	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa lahan untuk pembangunan dan pengoperasian industri daging olahan dan rumah potong ayam di desa argosari dengan jangka waktu selama 17 tahun dari tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan 10 Agustus 2028	185.633.610,00	235.135.906,00	(49.502.296,00)
7	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa lahan untuk pembangunan waterboom dan sarpras penunjang pariwisata lainnya di Desa Timbulharjo Kapanewon Sewon dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun	-	14.727.212,50	(14.727.212,50)
8	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa tanah dan bangunan Menara Telekomunikasi milik Pemda Bantul yang terletak di Kompleks Parasamya Jl. RW Monginsidi no 1 Bantul oleh PT XL AXIATA, TBK	658.967.500,00	104.047.500,00	554.920.000,00
9	Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Perdagangan atas pemanfaatan sebagian lahan pasar unggas Bantul dalam rangka penyelenggaraan pasar rakyat melalui kegiatan latihan dan lomba burung berkicau dengan jangka waktu selama 3 tahun dari tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2024	-	1.715.000,00	(1.715.000,00)
10	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa lahan untuk pembangunan mesin ATM Bank BPD DIY di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dengan jangka waktu selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2026	21.250.000,00	36.250.000,00	(15.000.000,00)

11	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa sebagian bangunan yang digunakan untuk pembangunan kantor kas kompleks 2 pemda Bantul PT Bank BPD DIY dengan jangka waktu selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2026	23.625.000,00	42.525.000,00	(18.900.000,00)
12	Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Perdagangan atas sewa sebagian lahan di Pasar Unggas Bantul untuk penyelenggaraan promosi Pasar Rakyat melalui kegiatan latihan dan lomba burung berkicau di Pasar Unggas dengan jangka waktu selama 3 tahun terhitung mulai 18 Oktober 2021 sd 18 Oktober 2024	-	325.000,00	(325.000,00)
13	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa Eks Kantor Pengawas UPT Piyungan Kabupaten Bantul untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) keluarga kurang mampu di wilayah Kalurahan Sitimulyo	1.416.666,67	1.916.666,67	(500.000,00)
14	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa Eks Transito Kabupaten Bantul untuk kantor Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bantul	-	6.509.250,00	(6.509.250,00)
15	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Bantul untuk kantor Sekretariat Partai Golkar Kabupaten Bantul	14.292.200,00	20.888.600,00	(6.596.400,00)
16	Pendapatan diterima dimuka pada BPKPAD atas sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Bantul untuk kantor Sekretariat Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul	672.250,00	4.705.750,00	(4.033.500,00)
17	Pendapatan diterima dimuka pada BKAD atas sewa berupa sebagian tanah yang digunakan untuk bangunan ATM PT Bank Mandiri (Komplek perkantoran Manding)	12.519.000,00	29.211.000,00	(16.692.000,00)
	Jumlah	1.131.014.707,13	774.944.782,30	356.069.924,83

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.2.1.5	Utang Belanja	44.567.091.200,73	61.735.216.461,00	(17.168.125.260,27)

Jumlah tersebut adalah utang/kewajiban di beberapa dinas intansi yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang terdiri atas: utang karena keleibihan penerimaan dan utang karena belum terselesaikannya kewajiban dari hak yang sudah diterima.

Nomor	Utang Belanja Jasa	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
I	Utang Belanja Pegawai	988.926.910,00	873.455.060,00	125.421.350,00
1	Hutang Belanja Pegawai pada BLUD RS Panembahan senopati	988.926.910,00	863.505.560,00	125.421.350,00
2	Puskesmas Srandakan		9.949.500,00	
II	Utang Barang dan Jasa	30.606.942.722,00	39.861.485.957,00	(9.254.543.235,00)
1	Utang Pembelian obat, alkes, habis pakai pada RSUD Panembahan senopati dan Puskesmas	30.606.942.722,00	39.861.485.957,00	(9.254.543.235,00)

III	Utang Jasa	12.971.221.568,73	21.000.275.444,00	(8.193.400.308,00)
1	Utang Pelaksanaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) tahun 2023 kepada Pihak ketiga (RSU) yang memiliki kerjasama dengan UPT Jamkesda	279.753.600,00	33.084.750,00	246.668.850,00
2	Utang Tagihan Rekening Listri dan PJU dan Gedung-gedung Perkantoran	4.057.354.228,00	3.798.327.486,00	259.026.742,00
3	Utang Tagihan Rekening Telepon di SKPD di Kabupaten Bantul	34.435.229,00	32.421.138,00	2.014.091,00
4	Utang Tagihan Rekening AIR/PDAM di SKPD di Kabupaten Bantul	34.319.100,00	37.582.500,00	(3.263.400,00)
5	Utang Tagihan Internet di SKPD di Kabupaten Bantul	10.731.906,00	12.079.364,00	(1.347.458,00)
6	Utang Tagihan langganan surat kabar di SKPD di Kabupaten Bantul	650.000,00	250.000,00	400.000,00
7	Utang Belanja jasa layanan pada BLUD Puskesmas	7.955.411.880,00	15.433.769.203,00	(7.478.357.323,00)
8	Utang terhadap pihak ketiga pada BLUD Puskesmas	394.599.309,00	1.626.747.312,00	(1.232.148.003,00)
9	Utang Tagihan sampah di SKPD di Kabupaten Bantul	20.869.884,00	7.263.691,00	13.606.193,00
10	Utang sewa lahan	183.096.432,73	18.750.000,00	
	Jumlah total utang belanja	44.567.091.200,73	61.735.216.461,00	(17.322.522.193,00)

Rincian utang jasa per OPD sebagai berikut :

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Utang pembelian pembelian obat, alkes dan bahan habis pakai	30.606.942.722,00	39.861.485.957,00	-9.254.543.235,00

NO	OPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Puskesmas Bambanglipuro		18.998.205,00	-18.998.205,00
2	Puskesmas Sewon I		4.679.205,00	-4.679.205,00
3	Puskesmas Sedayu I		3.079.140,00	-3.079.140,00
4	RSUD Panembahan Senopati	30.606.942.722,00	39.834.729.407,00	-9.227.786.685,00
		30.606.942.722,00	**39.861.485.957,00**	**-9.254.543.235,00**

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
2	Hutang Pelaksanaan Jamkesda di Dinas Kesehatan	279.753.600,00	33.084.750,00	246.668.850,00

Nomor	Rumah Sakit	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	RSUD. Panembahan Senopati Bantul	12.109.500,00		12.109.500,00
2	RSUD Saras Adhyatma	10.472.850,00		10.472.850,00

3	RS Sarjito	1.508.400,00		1.508.400,00
4	RS Nur Hidayah	1.401.100,00		1.401.100,00
5	Rs Khusus Bedah Ringroad Selatan Yogyakarta	-	5.000.000,00	-5.000.000,00
6	RS PKU Bantul	30.771.700,00		30.771.700,00
7	RSPAU dr Suhadi Hardjolukito	4.642.000,00		4.642.000,00
8	Srandakan	4.434.850,00		4.434.850,00
9	Sanden	12.754.540,00		12.754.540,00
10	Kretek	7.940.360,00	11.597.200,00	-3.656.840,00
11	Pundong	18.964.160,00		18.964.160,00
12	Bambanglipuro	8.771.190,00	5.747.550,00	3.023.640,00
13	Pandak I	4.228.100,00		4.228.100,00
14	Pandak II	5.349.160,00		5.349.160,00
15	Bantul I	1.777.800,00		1.777.800,00
16	Bantul II	7.315.630,00		7.315.630,00
17	Jetis I	12.484.380,00		12.484.380,00
18	Jetis II	2.811.770,00		2.811.770,00
19	Imogori I	20.835.890,00		20.835.890,00
20	Imogiri II	17.427.950,00		17.427.950,00
21	Dlingo I	8.660.900,00		8.660.900,00
22	Dlingo II	-		0,00
23	Pleret	13.109.740,00		13.109.740,00
24	Piyungan	5.815.560,00	2.701.650,00	3.113.910,00
25	Banguntapan I	9.440.690,00		9.440.690,00
26	Banguntapan II	-		0,00
27	Banguntapan III	434.050,00		434.050,00
28	Sewon I	9.122.220,00	4.829.600,00	4.292.620,00
29	Sewon II	8.743.270,00		8.743.270,00
30	Kasihan I	11.176.850,00	3.208.750,00	7.968.100,00
31	Kasihan II	9.614.120,00		9.614.120,00
32	Pajangan	9.328.190,00		9.328.190,00
33	Sedayu I	4.146.450,00		4.146.450,00
34	Sedayu II	4.160.230,00		4.160.230,00
	Jumlah	279.753.600,00	33.084.750,00	246.668.850,00

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
3	Utang Tagihan Rekening Listrik di SKPD di Kabupaten Bantul	4.057.354.228,00	3.798.327.486,00	259.026.742,00

Hutang Tagihan Rekening Listrik di SKPD merupakan hutang beban belanja barang dan jasa berupa beban tagihan listrik bulan Desember 2024 dan 2023 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2025 dan 2024. Antara lain ada pada OPD

No	OPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Bagian Umum	1.853.647,00		1.853.647,00
2	Dinas Pariwisata	417.364,00	1.277.907,00	(860.543,00)
3	Dinas Pertanahan & Tata Ruang			-
4	RS Panembahan Senopati	208.286.074,00	224.799.760,00	(16.513.686,00)
5	Dinas Perhubungan		3.102.662,00	(3.102.662,00)
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.714.745,00	7.148.124,00	(433.379,00)
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.257.413,00	2.794.931,00	462.482,00
8	BPKPAD	3.712.853.190,00	3.490.245.387,00	222.607.803,00
9	DIKPORA	9.130.048,00	1.226.716,00	7.903.332,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	54.347.276,00		54.347.276,00
11	BPBD			-
12	Dinas Kesehatan (Puskesmas)	59.273,00	10.785.728,00	(10.726.455,00)
13	DPUPKP	24.773.240,00	24.645.435,00	127.805,00
14	Dinas Kebudayaan	54.066,00	54.066,00	-
15	Dinas Kominfo	66.540,00	55.740,00	10.800,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.294.172,00		3.294.172,00
17	Kepanewon Piyungan	4.258.924,00	4.335.402,00	(76.478,00)
18	Kepanewon Banguntapan	1.457.298,00	1.741.119,00	(283.821,00)
19	Kepanewon Pundong	1.447.800,00		
20	Kepanewon Pandak	-		-
21	Kepanewon Imogri	583.015,00	959.762,00	(376.747,00)
22	Kepanewon Pleret	2.546.239,00	2.850.105,00	(303.866,00)
23	Kepanewon Pajangan	729.876,00	664.740,00	65.136,00

24	Kepanewon Jetis	3.512.239,00	3.191.982,00	320.257,00
25	Kepanewon Kasihan	3.113.372,00	3.309.499,00	(196.127,00)
26	Kepanewon Sedayu	2.913.100,00	3.096.904,00	(183.804,00)
27	Kepanewon Dlingo	1.374.464,00	2.167.244,00	(792.780,00)
28	Kepanewon Bantul	3.409.959,00	3.540.823,00	(130.864,00)
29	Kepanewon Kretek	1.087.300,00	876.058,00	211.242,00
30	Kepanewon Sewon	4.051.080,00	3.277.794,00	773.286,00
31	Kepanewon Srandakan	1.762.514,00	2.179.598,00	(417.084,00)
	Jumlah	4.057.354.228,00	3.798.327.486,00	257.578.942,00

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
4	Hutang Tagihan Rekening Telepon pada OPD Pemerintah Kabupaten Bantul	34.435.229,00	32.421.138,00	2.014.091,00

Hutang Tagihan Rekening Telepon di SKPD merupakan hutang beban belanja barang dan jasa berupa beban tagihan telepon bulan Desember 2024 dan 2023 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2025 dan 2024 . Antara lain ada pada SKPD

No	OPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.217.518,00	2.302.121,00	(84.603,00)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.070,00		47.070,00
3	Dinas Kebudayaan	396.550,00	391.000,00	5.550,00
4	Dinas Pariwisata	2.108.902,00	2.169.475,00	(60.573,00)
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	193.985,00	200.158,00	(6.173,00)
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66.767,00	69.264,00	(2.497,00)
7	Inspektorat Daerah	85.532,00	99.436,00	(13.904,00)
8	BKPSDM	34.357,00	34.634,00	(277,00)
9	Dinas Sosial	68.714,00	81.965,00	(13.251,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	53.513,00	64.581,00	(11.068,00)
11	DINKES dan PUSKESMAS	8.359.992,00	9.369.457,00	(1.009.465,00)
12	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.086.562,00	5.468.359,00	618.203,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	339.832,00	213.569,00	126.263,00
14	RSUD Panempahan Senopati	8.610.174,00	7.730.923,00	879.251,00
	RSUD Saras Adhyatma	667.699,00		667.699,00
15	Dinas Perhubungan	596.505,00	593.191,00	3.314,00

16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	174.097,00	173.112,00	985,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	39.907,00	46.478,00	(6.571,00)
18	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	82.457,00	127.913,00	(45.456,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup	877.943,00		877.943,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	958.719,00	947.448,00	11.271,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.504,00	105.836,00	(20.332,00)
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	912.700,00	928.378,00	(15.678,00)
23	Bagian Umum dan Protokol	72.286,00		72.286,00
24	Kapanewon Piyungan	101.626,00	102.735,00	(1.109,00)
25	Kapanewon Pundong	68.657,00	70.546,00	(1.889,00)
26	Kapanewon Banguntapan	92.192,00	82.351,00	9.841,00
27	Kapanewon Pandak	74.264,00	75.929,00	(1.665,00)
28	Kapanewon Imogiri	39.907,00	39.907,00	-
29	Kapanewon Pleret	79.814,00	68.714,00	11.100,00
30	Kapanewon Pajangan	68.714,00	68.714,00	-
31	Kapanewon Kasihan	79.814,00	91.413,00	(11.599,00)
32	Kapanewon Sedayu	74.274,00	69.968,00	4.306,00
33	Kapanewon Dlingo	57.500,00	55.500,00	2.000,00
34	Kapanewon Bantul	75.374,00	77.039,00	(1.665,00)
35	Kapanewon Jetis	66.600,00	66.600,00	-
36	Kapanewon Sewon	273.842,00	290.891,00	(17.049,00)
37	Kapanewon Kretek	76.652,00	74.819,00	1.833,00
38	Kapanewon Srandakan	68.714,00	68.714,00	-
	Jumlah	34.435.229,00	32.421.138,00	2.014.091,00

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5	Hutang Tagihan Rekening Air/PDAM pada OPD Pemerintah Kabupaten Bantul	34.319.100,00	37.582.500,00	(3.263.400,00)

Hutang Tagihan Rekening Air/PDAM di SKPD merupakan hutang beban belanja barang dan jasa berupa beban tagihan telepon bulan Desember 2024 dan 2023 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2025 dan 2024. Antara lain ada pada SKPD

No	Nama OPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.074.100,00	954.100,00	120.000,00
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	381.800,00	361.500,00	20.300,00
4	Inspektorat Daerah	204.200,00	242.300,00	(38.100,00)
5	Dinas Kesehatan	2.273.100,00	1.183.000,00	1.090.100,00
6	RSUD Panempahan Senopati	4.118.700,00	8.747.400,00	(4.628.700,00)
7	RSUD Saras Adhyatma	1.594.000,00	1.165.000,00	429.000,00
8	Dinas Sosial	1.734.300,00	209.700,00	1.524.600,00
9	DP3APP & KB	128.600,00	71.200,00	57.400,00
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	16.950.700,00	23.727.000,00	(6.776.300,00)
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.000,00	60.000,00	-
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-		-
13	Kapanewon Piyungan	386.900,00	71.200,00	315.700,00
14	Kepanewon Jetis	237.700,00	401.500,00	(163.800,00)
15	Kapanewon Dlingo	155.500,00	388.600,00	(233.100,00)
16	Bagian Umum dan Protokol	4.049.200,00		4.049.200,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	970.300,00		970.300,00
	Jumlah	34.319.100,00	37.582.500,00	(3.263.400,00)

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
6	Hutang Tagihan Layanan Internet di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul	10.731.906,00	12.079.364,00	(1.347.458,00)

Hutang Tagihan Layanan Internet di OPD merupakan hutang beban belanja barang dan jasa berupa beban tagihan telepon bulan Desember 2024 dan 2023 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2025 dan 2024. yaitu di OPD:

No	OPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	984.850,00		984.850,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	766.180,00	766.180,00	-
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.480.850,00	2.480.850,00	-
5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	489.790,00	979.300,00	(489.510,00)
6	Dinas Kesehatan	4.799.279,00	6.513.700,00	(1.714.421,00)
7	RSUD Saras Adhyatma		328.177,00	(328.177,00)
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	311.857,00	311.857,00	-

9	BKPSDM	380.800,00	377.400,00	3.400,00
	Bagian Umum dan Protokol	193.900,00		193.900,00
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	324.400,00	321.900,00	2.500,00
	Jumlah	10.731.906,00	12.079.364,00	(1.347.458,00)

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
7	Hutang Tagihan Langganan Surat Kabar di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul	650.000,00	250.000,00	400.000,00

NO	OPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	DPUPKP		250.000,00	(250.000)
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	650.000,00		650.000
3	Kepanewon Srandakan			-
	Jumlah	650.000,00	250.000,00	400.000,00

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
8	Utang Jasa Layanan	7.955.411.880,00	15.433.769.203,00	

NO	OPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Puskesmas Srandakan	3.235.000,00	285.783.493,00	-282.548.493,00
2	Puskesmas Kretek		4.317.365,00	-4.317.365,00
3	Puskesmas Bambanglipuro	7.058.648,00	261.527.954,00	-254.469.306,00
4	Puskesmas Pandak I	608.540,00	6.518.575,00	-5.910.035,00
5	Puskesmas Pandak II	553.600,00	18.916.700,00	-18.363.100,00
6	Puskesmas Bantul I	17.331.350,00	27.401.650,00	-10.070.300,00
7	Puskesmas Bantul II	0,00	226.491.400,00	-226.491.400,00
8	Puskesmas Jetis I	6.807.861,00	99.483.330,00	-92.675.469,00
9	Puskesmas Jetis II	3.641.150,00	179.501.210,00	-175.860.060,00
10	Puskesmas Imogiri I	24.012.380,00	106.567.063,00	-82.554.683,00
11	Puskesmas Imogiri II	25.257.450,00	465.761.728,00	-440.504.278,00
12	Puskesmas Dlingo I	23.584.810,00	38.332.662,00	-14.747.852,00
13	Puskesmas Dlingo II	0,00	98.490.503,00	-98.490.503,00

14	Puskesmas Pleret	48.996.465,00	217.547.375,00	-168.550.910,00
15	Puskesmas Banguntapan I		176.608.505,00	-176.608.505,00
16	Puskesmas Banguntapan II		250.152.015,00	-250.152.015,00
17	Puskesmas Banguntapan III		82.195.550,00	-82.195.550,00
18	Puskesmas Sewon I		35.811.800,00	-35.811.800,00
	Puskesmas Kasihan I	12.333.200,00		12.333.200,00
19	Puskesmas Pajangan	3.166.300,00	150.611.050,00	-147.444.750,00
20	Puskesmas Sedayu I		125.873.166,00	-125.873.166,00
21	Puskesmas Sedayu II		288.831.551,00	-288.831.551,00
22	RS Saras Adhyatma	168.360.889,00	0,00	168.360.889,00
23	RSUD Panembahan Senopati	7.610.464.237,00	12.287.044.558,00	-4.676.580.321,00
		7.955.411.880,00	15.433.769.203,00	(7.478.357.323,00)

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
9	Utang Pihak Ketiga	394.599.309,00	1.626.747.312,00	

NO	OPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Puskesmas Srandakan		4.133.000,00	-4.133.000,00
2	Puskesmas Bantul I	1.477.100,00	-	1.477.100,00
3	Puskesmas Bantul II		9.250.000,00	-9.250.000,00
4	Puskesmas Jetis I		45.300,00	-45.300,00
5	Puskesmas Imogiri I		2.404.200,00	-2.404.200,00
6	Puskesmas Imogiri II		-	0,00
7	Puskesmas Banguntapan I		21.689.400,00	-21.689.400,00
8	Puskesmas Sewon I		270.000,00	-270.000,00
9	Puskesmas Sedayu I		450.000,00	-450.000,00
10	RSUD Panembahan Senopati	371.820.209,00	1.564.243.802,00	-1.192.423.593,00
11	RSUD Saras Adyatma	21.302.000,00	24.261.610,00	-2.959.610,00
		394.599.309,00	1.626.747.312,00	(1.232.148.003,00)

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)

10	Hutang Tagihan Langganan sampah di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul bulan Desember 2024 dan 2023	20.869.884,00	7.263.691,00	

NO	OPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	DIKPORA	216.405,00	90.700,00	125.705,00
2	DINKES	3.710.834,00	7.172.991,00	
3	RSUD Panembahan Senopati	12.967.500,00	-	
4	RSUD Saras Adhyatma	3.975.145,00		3.975.145,00
	Jumlah	**20.869.884,00**	**7.263.691,00**	**4.100.850,00**

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
11	Hutang sewa lahan di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul	183.096.432,73	18.750.000,00	

NO	OPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	DPUPKP	79.018.008,40		79.018.008
	DKUKMP	10.434.314,33		
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	74.144.110,00		74.144.110
3	RSUD PS	19.500.000,00	18.750.000,00	750.000
	Jumlah	**183.096.432,73**	**18.750.000,00**	**153.912.118,40**

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
6)	Utang Jangka Pendek Lainnya.		-	-

Pemerintah Kabupaten Bantul tidak memiliki Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
b.	Kewajiban Jangka Panjang		-	-

Pemerintah Kabupaten Bantul tidak memiliki Utang Jangka Panjang Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.3	EKUITAS	3.723.789.820.032,21	3.749.705.016.161,81	-29.226.149.285,85

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.3.1	Ekuitas Dana Lancar	272.698.229.144,92	248.226.659.959,93	24.471.569.185,00

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan perhitungan sebagai berikut:

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.3.1.1	SILPA	173.920.250.697,45	196.239.211.759,59	(22.318.961.062,14)
5.3.3.1.2	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-	-
5.3.3.1.3	Cadangan Piutang	270.757.666.155,46	227.284.857.674,44	43.472.808.481,02
5.3.3.1.4	Cadangan Persediaan	41.620.798.501,64	50.133.598.705,71	(8.512.800.204,07)
5.3.3.1.5	Dana Lancar Lainnya (Dana lancar diluar SiLPA)			-
5.3.3.1.6	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(45.698.105.907,86)	(62.510.161.243,30)	16.812.055.335,44
5.3.3.1.7	Dana yang harus disediakan untuk penyisihan aset	(167.902.380.301,76)	(162.920.846.936,52)	(4.981.533.365,25)
5.3.3.1.8	Dana yang harus disediakan untuk amortisasi aset			
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	272.698.229.144,92	248.226.659.959,93	24.471.569.185,00

5.3.3.1.1

Saldo SILPA Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 terdiri atas:	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Kas di Kas Daerah	161.319.107.783,71	171.064.455.774,11	(9.745.347.990,40)
Kas di Bendahara Penerimaan	304.712.756,00	699.567.547,00	(394.854.791,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	-
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	10.404.078.395,43	23.947.680.740,48	(13.543.602.345,05)
Kas dana BOSP	101.060.109,00	0,00	101.060.109,00
Kas Dana BOK Puskesmas	900.241.223,00	0,00	900.241.223,00
Kas Pemerintah diluar Pengelolaan BUD - Dana BOS	0,00	527.507.698,00	(527.507.698,00)
Kas Lainnya	891.050.430,31		
Jumlah	173.920.250.697,45	196.239.211.759,59	(22.682.503.794,45)

5.3.3.1.3

Cadangan Piutang	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Piutang Pajak Daerah	152.385.877.881,50	148.876.031.658,50	3.509.846.223,00
Piutang Retribusi	17.239.224.192,85	4.919.697.367,85	12.319.526.825,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.606.126.723,86		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	60.546.502.899,00	60.782.486.429,00	(235.983.530,00)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-		-
Piutang Transfer Antar Daerah	8.242.200.378,00	366.750.338,00	7.875.450.040,00
Piutang Lainnya	10.647.600.119,00	10.665.494.879,00	(17.894.760,00)
Beban Dibayar Dimuka	1.090.133.961,25	1.674.397.002,09	(584.263.040,84)

Jumlah	270.757.666.155,46	227.284.857.674,44	22.866.681.757,16

Dana yang harus disediakan untuk penyisihan aset	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Penyisihsn Piutang Pajak	103.669.763.346,29	101.279.537.629,04	2.390.225.717,25
Penyisihan Piutang Retribusi	3.858.091.362,26	2.582.836.373,11	1.275.254.989,16
Peanyisian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	49.726.925.474,22	48.392.978.055,37	1.333.947.418,85
Penyisihan Piutang Lainnya	10.647.600.119,00	10.665.494.879,00	(17.894.760,00)
Jumlah	167.902.380.301,76	162.920.846.936,52	4.981.533.365,25

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.3.2	Ekuitas Dana Investasi	3.451.091.590.887,29	3.501.478.356.201,88	-53.697.718.470,85

Jumlah tersebut merupakan selisih antara nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan perhitungan sebagai berikut:

(0,01)

		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.3.3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	469.746.685.563,78	610.357.224.338,38	(140.610.538.774,61)
5.3.3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	6.281.151.686.181,00	6.016.122.696.480,00	265.028.989.701,00
5.3.3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	9.454.643.858,43	10.470.525.532,63	(1.380.975.674,20)
5.3.3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0,00	-	-
5.3.3.2.5	Akumulasi Penyusutan	(3.312.207.283.872,17)	(3.135.472.090.149,13)	(176.735.193.723,04)
	Jumlah Ekuitas Dana yang Diinvestasikan	3.451.091.590.887,29	3.501.478.356.201,88	-53.697.718.470,85

5 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, yaitu periode 1 Januari – 31 Desember 2024. Pengakuan pendapatan maupun beban dalam LO menggunakan basis akrual.

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1	Pendapatan-LO	2.695.520.912.148,42	2.468.004.109.589,63	227.516.802.558,79

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan – LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan – LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD atau realisasi penerimaan kas di kasda, tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD atau penerimaan yang tidak melalui rekening Kas Daerah.

Merupakan Pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 Pendapatan -LO Daerah Kabupaten Bantul meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2024 sebagai berikut:

	Jenis Pendapatan	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	673.404.998.907,43	586.028.976.953,98	87.376.021.953,45
5.4.1.2.	Pendapatan Transfer	1.975.930.554.266,00	1.821.833.893.156,65	154.096.661.109,35
5.4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	46.185.358.974,99	60.141.239.479,00	-13.955.880.504,01
	Jumlah	2.695.520.912.148,42	2.468.004.109.589,63	227.516.802.558,79

Rincian lebih lanjut Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
5.4.1.1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	673.404.998.907,43	586.028.976.953,98	87.376.021.953,45

	Pendapatan Asli Daerah - LO terdiri atas :	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.1.1	Pajak Daerah - LO	299.279.541.581,90	269.146.516.123,00	30.133.025.458,90
5.4.1.1.2	Retribusi Daerah - LO	319.948.111.131,00	42.601.372.586,80	277.346.738.544,20
5.4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	40.689.921.706,16	20.515.070.732,29	20.174.850.973,87
5.4.1.1.4	Lain – Lain PAD yang Sah - LO	13.487.424.488,37	253.766.017.511,89	(240.278.593.023,52)
	Jumlah	673.404.998.907,43	586.028.976.953,98	87.376.021.953,45

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA, jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO lebih tinggi sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

	Jenis Pendapatan Asli Daerah - LO	REALISASI 2024		
	Pendapatan Asli Daerah - LO terdiri atas :	LO	LRA	Selisih
5.4.1.1.1	Pajak Daerah - LO	299.279.541.581,90	295.769.695.358,90	3.509.846.223,00
5.4.1.1.2	Retribusi Daerah - LO	319.948.111.131,00	307.622.088.520,00	12.326.022.611,00
5.4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	40.689.921.706,16	20.083.794.982,30	20.606.126.723,86
5.4.1.1.4	Lain – Lain PAD yang Sah - LO	13.487.424.488,37	15.092.285.398,37	(1.604.860.910,00)
	Jumlah	673.404.998.907,43	638.567.864.259,57	34.837.134.647,86

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pajak Daerah - LO

Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, yaitu diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional tahun 2024 adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2024 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2024. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pajak Daerah - LO pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp299.279.541.581,00 mengalami peningkatan sebesar Rp30.133.025.458,90 atau 11,20% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.1.1	Pajak Daerah-LO	299.279.541.581,90	269.146.516.123,00	30.133.025.458,90

	Pendapatan Pajak :	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.1.1.1.1.1	Pajak Hotel	3.513.777.072,00	9.573.476.074,00	(6.059.699.002,00)
5.1.1.1.1.2	Pajak Restoran	11.646.826.243,70	31.143.128.944,00	(19.496.302.700,30)
5.1.1.1.1.3	Pajak Hiburan	205.131.613,00	985.113.818,00	(779.982.205,00)
5.1.1.1.1.4	Pajak Reklame	3.045.612.172,80	3.718.112.735,00	(672.500.562,20)
5.1.1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	21.436.650.156,00	58.650.214.017,00	(37.213.563.861,00)
5.1.1.1.1.6	Pajak Parkir	73.796.107,00	292.842.169,00	(219.046.062,00)
5.1.1.1.1.7	Pajak Air Tanah	1.309.886.434,40	1.283.796.194,00	26.090.240,40
5.1.1.1.1.8	Pajak Sarang Burung Walet	-	1.500.000,00	(1.500.000,00)
5.1.1.1.1.9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.153.000,00	186.696.450,00	(156.543.450,00)
5.1.1.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	75.516.447.573,00	67.818.594.654,00	7.697.852.919,00
5.1.1.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	108.239.944.942,00	95.493.041.068,00	12.746.903.874,00
5.1.1.1.1.12	PBJT- Makanan dan Minuman	23.055.301.914,00	-	23.055.301.914,00

5.1.1.1.1.13	PBJT-Tenaga Listrik	43.990.972.571,00	-	43.990.972.571,00
5.1.1.1.1.14	PBJT-Jasa Perhotelan	6.651.788.928,00	-	6.651.788.928,00
5.1.1.1.1.15	PBJT-Jasa Parkir	88.155.502,00	-	88.155.502,00
5.1.1.1.1.16	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	475.097.353,00	-	475.097.353,00
	Jumlah Pajak Daerah	299.279.541.581,90	269.146.516.123,00	(21.072.988.895,10)

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp308.357.659.520,00 mengalami peningkatan sebesar Rp265.756.287.033,20 atau 623,82% dibandingkan dengan tahun 2023 karena adanya reklasifikasi jenis retribusi dari Penerimaan PAD yang sah menjadi komponen retribusi daerah yaitu Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di rumah sakit daerah. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebagai berikut:

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.1.2	Retribusi Daerah-LO	319.948.111.131,00	42.601.372.586,80	277.346.738.544,20

	Pendapatan Retribusi Daerah :	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.1.2.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	64.443.894.573,00	-	64.443.894.573,00
5.4.1.1.2.2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	208.176.029.421,00	-	208.176.029.421,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adhyatma	366.244.600,00		
5.4.1.1.2.3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	409.799.000,00	-	409.799.000,00
5.4.1.1.2.4	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.821.927.941,00	1.787.772.815,00	1.034.155.126,00
5.4.1.1.2.5	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	278.655.000,00	297.610.000,00	(18.955.000,00)
5.4.1.1.2.6	Retribusi Kebersihan Pasar		283.786.600,00	(283.786.600,00)
5.4.1.1.2.7	Retribusi Pelayanan Pasar	5.160.108.776,00	4.563.687.380,00	596.421.396,00
5.4.1.1.2.8	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		910.708.000,00	(910.708.000,00)
5.4.1.1.2.9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	23.952.500,00	21.775.000,00	2.177.500,00
5.4.1.1.2.10	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan		351.928.000,00	(351.928.000,00)
5.4.1.1.2.11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	183.945.000,00	145.327.000,00	38.618.000,00
5.4.1.1.2.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan		13.729.000,00	(13.729.000,00)
5.4.1.1.2.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	(11.091.600,00)	1.135.800.000,00	(1.146.891.600,00)
5.4.1.1.2.14	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang		96.856.500,00	(96.856.500,00)
5.4.1.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		1.636.058.160,00	(1.636.058.160,00)
5.4.1.1.2.16	Retribusi Penyewaan Bangunan	732.505.980,00	-	732.505.980,00
5.4.1.1.2.17	Retribusi Pemakaian Laboratorium	704.701.000,00	-	704.701.000,00
5.4.1.1.2.18	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	18.562.500,00	-	18.562.500,00

5.4.1.1.2.19	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	112.675.899,00	72.576.993,00	40.098.906,00
5.4.1.1.2.20	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	208.570.000,00	231.057.700,00	(22.487.700,00)
5.4.1.1.2.21	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	273.660.000,00	274.680.000,00	(1.020.000,00)
5.4.1.1.2.22	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	12.100.000,00	11.300.000,00	800.000,00
5.4.1.1.2.23	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	-	774.360.000,00	(774.360.000,00)
5.4.1.1.2.24	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	35.220.000,00	37.380.000,00	(2.160.000,00)
5.4.1.1.2.25	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	32.010.568.000,00	27.446.416.750,00	4.564.151.250,00
5.4.1.1.2.26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.159.064.423,00	1.251.560.110,00	(92.495.687,00)
5.4.1.1.2.27	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	521.150.200,00	-	521.150.200,00
5.4.1.1.2.28	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.556.917.918,00	1.257.002.578,80	299.915.339,20
5.4.1.1.2.29	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	748.950.000,00	-	748.950.000,00
	Jumlah	319.948.111.131,00	42.601.372.586,80	276.980.493.944,20

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan pencatatan atas penerimaan yang berasal dari pengakuan laba /rugi pada 3 BUMD tahun 2024 (*unaudited)* yang metode pencatatan investasinya menggunakan metode ekuitas.

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO terdiri dari	40.689.921.706,16	20.515.070.732,29	20.174.850.973,87

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO terdiri dari	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
PT BPD DIY	30.509.103.876,00	15.865.045.674,00	14.644.058.202,00
PD BPR Bank Bantul	7.877.899.567,28	3.627.482.239,00	4.250.417.328,28
BUKP	306.085.820,30	221.928.458,29	84.157.362,01
PD Aneka Dharma	-	19.112.119,00	-19.112.119,00
PDAM	1.996.832.442,58	781.502.242,00	1.215.330.200,58
Jumlah	40.689.921.706,16	20.515.070.732,29	20.174.850.973,87

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.1.4	Lain – Lain PAD yang Sah - LO	13.487.424.488,37	253.766.017.511,89	(240.278.593.023,52)

	Rincian pendapatan Lain-lain PAD_LO tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut :	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.1.4.1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO			-
5.4.1.1.4.2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	739.600.383,00	(739.600.383,00)

5.4.1.1.4.3	Hasil Sewa BMD	779.189.007,00	-	779.189.007,00
5.4.1.1.4.4	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	143.351.816,00	-	143.351.816,00
5.4.1.1.4.5	Penerimaan Jasa Giro - LO	-	1.505.146.050,00	(1.505.146.050,00)
5.4.1.1.4.6	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.412.935.437,00	-	1.412.935.437,00
5.4.1.1.4.7	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	79.623.629,00	-	79.623.629,00
5.4.1.1.4.8	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	17.894.760,00	38.299.000,00	(20.404.240,00)
5.4.1.1.4.9	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.318.170.841,49	6.209.253.125,36	108.917.716,13
5.4.1.1.4.10	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	6.000.000,00	30.257.637,75	(24.257.637,75)
5.4.1.1.4.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7.874.008,00	26.228.651,17	(18.354.643,17)
5.4.1.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak - LO	-	4.847.234.390,06	(4.847.234.390,06)
5.4.1.1.4.13	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan	67.657.247,68	-	67.657.247,68
5.4.1.1.4.14	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman	33.240.577,00	-	33.240.577,00
5.4.1.1.4.15	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	635.274,00	-	635.274,00
5.4.1.1.4.16	Pendapatan Denda Pajak Reklame	9.322.107,00	-	9.322.107,00
5.4.1.1.4.17	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir	680.324,00	-	680.324,00
5.4.1.1.4.18	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	3.701.349,20	-	3.701.349,20
5.4.1.1.4.19	Pendapatan Denda Retribusi - LO	-	47.302.784,00	(47.302.784,00)
5.4.1.1.4.20	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.950.798.604,00	-	3.950.798.604,00
5.4.1.1.4.21	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	8.117.079,00	-	8.117.079,00
5.4.1.1.4.22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Los	13.628.903,00	-	13.628.903,00
5.4.1.1.4.23	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	10.804.245,00	-	10.804.245,00
5.4.1.1.4.24	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga	61.320,00	-	61.320,00
5.4.1.1.4.25	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	4.002.000,00	-	4.002.000,00
5.4.1.1.4.26	Pendapatan BLUD - LO	-	239.816.997.335,00	(239.816.997.335,00)
5.4.1.1.4.27	Pendapatan dari Pengembalian	-	505.698.155,55	(505.698.155,55)
5.4.1.1.4.28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	33.803.400,00	-	33.803.400,00
5.4.1.1.4.29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	21.078.112,00	-	21.078.112,00
5.4.1.1.4.30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	1.689.775,00	-	1.689.775,00
5.4.1.1.4.31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	28.704.000,00	-	28.704.000,00
5.4.1.1.4.32	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	12.562.101,00	-	12.562.101,00
5.4.1.1.4.33	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.750.000,00	-	1.750.000,00
5.4.1.1.4.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	227.457.572,00	-	227.457.572,00
5.4.1.1.4.35	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	292.691.000,00	-	292.691.000,00

	Jumlah	13.487.424.488,37	253.766.017.511,89	(240.278.593.023,52)

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	
5.4.1.2.	Pendapatan Transfer-LO	1.975.930.554.266,00	1.821.833.893.156,65	154.096.661.109,35	###

Pendapatan Transfer-LO dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi .

Rincian dari Pendapatan Transfer-LO tahun 2024 dan 2023 adalah :

5.4.1.2.	Pendapatan Transfer-LO	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	
5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.678.657.691.985,00	1.541.171.838.737,00	137.485.853.248,00	###
5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	297.272.862.281,00	280.662.054.419,65	16.610.807.861,35	
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.975.930.554.266,00	1.821.833.893.156,65	154.096.661.109,35	

Adapun rincian dari masing-masing pos pendapatan transfer adalah :

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.678.657.691.985,00	1.541.171.838.737,00	137.485.853.248,00

Rincian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut :

5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.1.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.500.030.298.985,00	1.355.883.247.737,00	144.147.051.248,00
5.4.1.2.1.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	178.627.393.000,00	185.288.591.000,00	(6.661.198.000,00)
	Jumlah	1.678.657.691.985,00	1.541.171.838.737,00	137.485.853.248,00

Rincian Pendapatan Dana Perimbangan tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut :

5.4.1.2.1.1	Dana Perimbangan	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	35.169.801.000,00	34.766.685.062,00	403.115.938,00
5.4.1.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.022.019.834.045,00	954.626.878.777,00	67.392.955.268,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	442.840.663.940,00	366.489.683.898,00	76.350.980.042,00
	Jumlah	1.500.030.298.985,00	1.355.883.247.737,00	144.147.051.248,00

Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari :

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)			
5.4.1.2.1.1.1.1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	957.798.000,00	1.924.979.783,00	(967.181.783,00)
5.4.1.2.1.1.1.2	DBH PPh Pasal 21	26.912.529.000,00	24.225.546.734,00	2.686.982.266,00
5.4.1.2.1.1.1.3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.546.796.000,00	2.179.495.000,00	367.301.000,00
5.4.1.2.1.1.1.4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.582.268.000,00	4.863.841.615,00	(1.281.573.615,00)
5.4.1.2.1.1.1.5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	223.000,00	4.390.193,00	(4.167.193,00)
5.4.1.2.1.1.1.6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	7.000,00	(7.000,00)
5.4.1.2.1.1.1.7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	23.299.000,00	39.280.526,00	(15.981.526,00)
5.4.1.2.1.1.1.8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	-	-	-
5.4.1.2.1.1.1.9	DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap	1.146.888.000,00	1.529.144.211,00	
	Jumlah	35.169.801.000,00	34.766.685.062,00	785.372.149,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.000.093.363.000,00	1.022.019.834.045,00	102,19	954.626.878.777,00

Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut :

	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik			
5.4.1.2.1.1.3.1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3.566.082.700,00	0,00	3.566.082.700,00
5.4.1.2.1.1.3.2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.988.182.000,00	1.267.225.850,00	720.956.150,00
5.4.1.2.1.1.3.3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.794.800.400,00	1.856.048.500,00	1.938.751.900,00
5.4.1.2.1.1.3.4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.683.017.196,00	0,00	10.683.017.196,00
5.4.1.2.1.1.3.5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	721.742.837,00	0,00	721.742.837,00
5.4.1.2.1.1.3.6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	-	391.690.000,00	(391.690.000,00)
5.4.1.2.1.1.3.7	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.489.016.300,00	10.513.006.000,00	10.513.006.000,00
5.4.1.2.1.1.3.8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.572.480.120,00	3.065.880.000,00	3.065.880.000,00
5.4.1.2.1.1.3.9	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	5.162.409.700,00	0,00	5.162.409.700,00
5.4.1.2.1.1.3.10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	23.254.487.000,00	(23.254.487.000,00)
5.4.1.2.1.1.3.11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	23.287.454.000,00	0,00	23.287.454.000,00
5.4.1.2.1.1.3.12	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	213.224.000,00	0,00	213.224.000,00
5.4.1.2.1.1.3.13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	535.500.000,00	0,00	535.500.000,00
5.4.1.2.1.1.3.14	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.999.187.500,00	0,00	2.999.187.500,00

5.4.1.2.1.1.3.15	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	947.739.200,00	0,00	947.739.200,00
5.4.1.2.1.1.3.16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.788.500.000,00	0,00	1.788.500.000,00
5.4.1.2.1.1.3.17	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	3.264.647.000,00	0,00	3.264.647.000,00
5.4.1.2.1.1.3.18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	693.289.000,00	(693.289.000,00)
5.4.1.2.1.1.3.19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	51.967.495.531,00	15.535.000.000,00	36.432.495.531,00
	Jumlah DAK Fisik	116.981.478.484,00	56.576.626.350,00	60.404.852.134,00
5.4.1.2.1.1.4				-
5.4.1.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.1.1.4.1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	101.148.011.449,00	102.590.252.271,00	(1.442.240.822,00)
5.4.1.2.1.1.4.2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.480.000.000,00	5.027.500.000,00	(547.500.000,00)
5.4.1.2.1.1.4.3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	141.422.297.000,00	140.587.086.560,00	835.210.440,00
5.4.1.2.1.1.4.4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.566.397.000,00	2.826.210.000,00	(259.813.000,00)
5.4.1.2.1.1.4.5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	24.039.021.367,00	24.537.329.664,00	(498.308.297,00)
5.4.1.2.1.1.4.6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.711.641.624,00	4.322.385.974,00	389.255.650,00
5.4.1.2.1.1.4.7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.763.693.785,00	20.390.425.337,00	(14.626.731.552,00)
5.4.1.2.1.1.4.8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.008.719.850,00	6.198.102.072,00	947.739.200,00
5.4.1.2.1.1.4.9	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	407.482.240,00	5.354.582.700,00
5.4.1.2.1.1.4.10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.762.435.000,00	200.000.000,00	3.985.603.150,00
5.4.1.2.1.1.4.11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	767.408.958,00	331.892.430,00	1.245.462.900,00
5.4.1.2.1.1.4.12	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	430.655.200,00	525.178.500,00	47.115.512.727,00
5.4.1.2.1.1.4.13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2.192.271.500,00	1.969.212.500,00	61.126.594.971,00
5.4.1.2.1.1.4.14	DAK Non Fisik-PK2UMK	670.254.290,00	0,00	(391.690.000,00)
5.4.1.2.1.1.4.15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	6.567.744.500,00	0,00	(6.567.744.500,00)
5.4.1.2.1.1.4.16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	22.328.633.933,00	0,00	1.623.639.178,00
	Jumlah DAK Non Fisik	325.859.185.456,00	309.913.057.548,00	98.289.572.745,00

5.4.1.2.1.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.1.2.1	Dana Insentif Daerah	-	58.809.566.000,00	(58.809.566.000,00)
5.4.1.2.1.2.2	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
5.4.1.2.1.2.3	Dana Desa	127.393.902.000,00	126.479.025.000,00	914.877.000,00
5.4.1.2.1.2.4	Dana Insentif Fiskal	51.233.491.000,00	-	51.233.491.000,00
	Jumlah	178.627.393.000,00	185.288.591.000,00	(6.661.198.000,00)

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar Daerah pada Laporan Operasional seluruhnya berasal dari realisasi pendapatan transfer yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran dan Pemerintah Kabupaten Bantul mengakui piutang kepada Pemerintah Propinsi atas kurang bayar Pendapatan transfer.

5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	208.808.735.838,00	201.955.211.813,00	6.853.524.025,00
5.4.1.2.2.2	Bantuan Keuangan	88.464.126.443,00	78.706.842.606,65	9.757.283.836,35
	Jumlah	297.272.862.281,00	280.662.054.419,65	16.610.807.861,35

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	208.808.735.838,00	201.955.211.813,00	6.853.524.025,00

Rincian realisasi pendapatan Bagi hasil pajak tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut :

5.4.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
5.4.1.2.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	70.524.416.926,00	67.118.442.790,00	3.405.974.136,00
5.4.1.2.2.1.2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.014.166.009,00	29.378.789.476,00	635.376.533,00
5.4.1.2.2.1.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	58.894.138.252,00	57.946.328.116,00	947.810.136,00
5.4.1.2.2.1.4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	128.669.484,00	103.951.513,00	24.717.971,00
5.4.1.2.2.1.5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	49.247.345.167,00	47.407.699.918,00	1.839.645.249,00
	Jumlah	208.808.735.838,00	201.955.211.813,00	6.853.524.025,00

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.2.2	Bantuan Keuangan	88.464.126.443,00	78.706.842.606,65	9.757.283.836,35

	Rincian bantuan keuangan tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-
5.4.1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	87.860.158.443,00	78.317.260.606,65	9.542.897.836,35
5.4.1.2.2.2.3	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	603.968.000,00	389.582.000,00	214.386.000,00
	Jumlah	88.464.126.443,00	78.706.842.606,65	9.757.283.836,35

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	46.185.358.974,99	60.141.239.479,00	-13.955.880.504,01

5.4.1.1.4	Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai berikut :	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)

5.4.1.1.4.1	Pendapatan Hibah	2.790.385.919,00	7.164.398.619,00	(4.374.012.700,00)
5.4.1.1.4.2	Dana Darurat	-	-	-
5.4.1.1.4.3	Pendapatan Lainnya	43.394.973.055,99	52.976.840.860,00	(9.581.867.804,01)
	Jumlah	46.185.358.974,99	60.141.239.479,00	(13.955.880.504,01)

-

Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Operasional berasal dari realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Lainnya yang berasal dari dana pembangunan yang bersumber dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi berbentuk serta hibah barang yang langsung diberikan ke sekolah tanpa melalui Kas Daerah, yang dilaksanakan oleh OPD atau unit dibawah OPD. Dana hibah tersebut berupa dana atau langsung barang yang dinilai dengan uang. Dana tersebut terdapat pada PPKD

Dana dan atau barang yang bersumber dari hibah

Nomor	OPD	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	PPKD	43.394.973.055,99	52.959.003.616,00	(9.564.030.560,01)
	Jumlah	43.394.973.055,99	52.959.003.616,00	(9.564.030.560)

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2	Beban-LO	2.510.955.160.649,03	2.413.226.637.825,24	97.728.522.823,80

Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah atau bendahara pengeluaran.

Perbedaan Beban dan Belanja terutama pada beban operasi dan belanja operasi,untuk belanja modal pada laporan keuangan berbasis akrual langsung diakui sebagai aset tetap/aset lainnya pada laporan neraca, Pengalokasian nilai aset tetap/aset lainnya secara sistematik dibebankan pada beban penyusutan dan amortisasi sesuai masa manfaat aset yang bersangkutan sedangkan untuk pengungkapan beban transfer, beban bantuan keuangan yang masuk kedalam belanja operasi pada Laporan Realisasi Anggaran.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri atas beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Penjelasan lebih lanjut atas masing-masing jenis Beban, sebagi berikut :

5.4.2.1	BEBAN OPERASI	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.1	Beban Pegawai - LO	952.846.677.725,00	860.407.416.528,00	92.439.261.197,00
5.4.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	879.887.956.479,24	881.270.168.373,54	(1.382.211.894,30)
5.4.2.1.3	Beban Bunga	-	-	-
5.4.2.1.4	Beban Subsidi	,	-	
5.4.2.1.5	Beban Hibah	128.922.914.717,00	115.915.380.000,00	13.007.534.717,00
5.4.2.1.6	Beban Bantuan Sosial	4.790.600.000,00	4.947.600.000,00	(157.000.000,00)
5.4.2.1.7	Beban Penyisihan Piutang	4.981.533.365,25	2.325.643.106,82	2.655.890.258,43
	JUMLAH BEBAN OPERASI	1.971.429.682.286,48	1.864.866.208.008,35	106.563.474.278,13

5.4.2.2	BEBANPENYUSUTAN DAN AMORTISASI			
5.4.2.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	57.944.772.633,17	73.543.354.250,20	(15.598.581.617,03)
5.4.2.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.489.188.256,76	36.247.799.906,12	(758.611.649,36)
5.4.2.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.301.232.833,11	90.008.396.003,76	(6.707.163.170,65)
5.4.2.2.4	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	3.643.320.275,20	5.136.086.044,80	(1.492.765.769,60)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	180.378.513.998,24	204.935.636.204,88	(24.557.122.206,64)
5.4.2.3	BEBAN TRANSFER			
5.4.2.3.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	30.451.302.893,00	26.764.870.787,00	3.686.432.106,00
5.4.2.3.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.168.929.660,00	3.912.168.310,00	1.256.761.350,00
5.4.2.3.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	120.347.030,00	100.151.140,00	20.195.890,00
5.4.2.3.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	320.285.641.200,00	311.524.613.400,00	8.761.027.800,00
5.4.2.3.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-
5.4.2.3.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	356.026.220.783,00	342.301.803.637,00	13.724.417.146,00
5.4.2.4	BEBAN TIDAK TERDUGA			
	Beban Tidak Terduga	3.120.743.581,31	1.122.989.975,00	1.997.753.606,31
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	3.120.743.581,31	1.122.989.975,00	1.997.753.606,31
	JUMLAH BEBAN	2.510.955.160.649,03	2.413.226.637.825,24	97.728.522.823,80

Perbedaan antara Beban Operasi dan Belanja Operasi terdapat pada komponen Belanja Bantuan Keuangan, dimana dalam Laporan Realisasi Anggaran menjadi komponen Belanja Operasi sedangkan dalam Laporan Operasional menjadi komponen Beban transfer.

Penjelasan dari masing-masing beban operasi adalah :

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.1	Beban Pegawai	952.846.677.725,00	860.407.416.528,00	92.439.261.197,00

Rincian Beban Pegawai - LO

Nomor	Uraian	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	571.299.108.434,00	520.281.693.331,00	51.017.415.103,00
5.4.2.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	121.535.115.731,00	113.953.212.449,00	7.581.903.282,00
5.4.2.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.674.185.866,00	158.697.139.482,00	32.977.046.384,00
5.4.2.1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.962.056.909,00	22.927.229.561,00	34.827.348,00
5.4.2.1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	169.179.602,00	169.004.900,00	174.702,00
5.4.2.1.1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.053.808.000,00	1.093.120.000,00	(39.312.000,00)
5.4.2.1.1.7	Belanja Pegawai BOS	29.833.595.755,00	28.372.820.500,00	1.460.775.255,00

5.4.2.1.1.8	Belanja Pegawai BLUD	14.319.627.428,00	14.913.196.305,00	(593.568.877,00)
	Jumlah	952.846.677.725,00	860.407.416.528,00	92.439.261.197,00

Jika dibandingkan antara Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Uraian	REALISASI 2024		
		LO	LRA	Selisih
5.4.2.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	571.299.108.434,00	571.299.108.434,00	-
5.4.2.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	121.535.115.731,00	121.535.115.731,00	-
5.4.2.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.674.185.866,00	191.674.185.866,00	-
5.4.2.1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.962.056.909,00	22.962.056.909,00	-
5.4.2.1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	169.179.602,00	169.179.602,00	-
5.4.2.1.1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.053.808.000,00	1.053.808.000,00	-
5.4.2.1.1.7	Belanja Pegawai BOS	29.833.595.755,00	29.833.595.755,00	-
5.4.2.1.1.8	Belanja Pegawai BLUD	14.319.627.428,00	14.204.155.578,00	115.471.850,00
	Jumlah	952.846.677.725,00	952.731.205.875,00	115.471.850,00

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	879.887.956.479,24	881.270.168.373,54	(1.382.211.894,30)

Rincian beban barang dan jasa sebagai berikut :

	Uraian	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.1	Beban Barang	165.827.959.358,71	170.584.238.783,29	(4.756.279.424,58)
5.4.2.1.2.2	Beban Jasa	294.966.471.819,80	308.040.267.884,43	(13.073.796.064,63)
5.4.2.1.2.3	Beban Pemeliharaan	26.373.669.431,34	26.454.572.748,30	(80.903.316,96)
5.4.2.1.2.4	Beban Perjalanan Dinas	32.913.272.097,00	37.486.232.078,50	(4.572.959.981,50)
5.4.2.1.2.5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	39.906.071.692,34	47.456.831.343,00	(7.550.759.650,66)
5.4.2.1.2.6	Beban Barang dan Jasa BOS	68.594.049.304,00	71.530.844.668,00	(2.936.795.364,00)
5.4.2.1.2.7	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.626.599.750,00	0,00	18.626.599.750,00
5.4.2.1.2.8	Beban Barang dan Jasa BLUD	232.679.863.026,05	219.717.180.868,02	12.962.682.158,03
	Jumlah	879.887.956.479,24	881.270.168.373,54	(1.382.211.894,30)

Rincian dari Beban Barang sebagai berikut :

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.1	Beban Barang			

5.4.2.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			
5.4.2.1.2.1.2	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	29.716.996.719,31	29.946.738.267,00	(229.741.547,69)
5.4.2.1.2.1.3	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.041.532.809,00	1.749.632.320,00	291.900.489,00
5.4.2.1.2.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.461.899.648,00	12.291.653.236,00	(829.753.588,00)
5.4.2.1.2.1.5	Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	5.590.000,00	(5.590.000,00)
5.4.2.1.2.1.6	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.726.092.751,00	1.391.260.700,00	334.832.051,00
5.4.2.1.2.1.7	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	62.293.500,00	51.763.725,00	10.529.775,00
5.4.2.1.2.1.8	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	180.808.500,00	124.324.100,00	56.484.400,00
5.4.2.1.2.1.9	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	320.466.000,00	295.128.900,00	25.337.100,00
5.4.2.1.2.1.10	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.732.461.041,29	11.070.786.986,12	(1.338.325.944,83)
5.4.2.1.2.1.11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	804.745.495,00	289.251.750,00	515.493.745,00
5.4.2.1.2.1.12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	98.224.000,00	0,00	98.224.000,00
5.4.2.1.2.1.13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	43.576.000,00	84.792.466,00	(41.216.466,00)
5.4.2.1.2.1.14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)
5.4.2.1.2.1.15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	49.084.375,00	36.396.000,00	12.688.375,00
5.4.2.1.2.1.16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	53.813.000,00	0,00	53.813.000,00
5.4.2.1.2.1.17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.508.042.950,00	11.321.355.353,00	(7.813.312.403,00)
5.4.2.1.2.1.18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.003.613.639,00	47.439.800,00	1.956.173.839,00
5.4.2.1.2.1.19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.884.642.979,00	6.718.159.682,00	(3.833.516.703,00)
5.4.2.1.2.1.20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	315.180.350,00	262.878.000,00	52.302.350,00
5.4.2.1.2.1.21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.203.860.740,00	769.718.514,00	434.142.226,00
5.4.2.1.2.1.22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.466.464.654,00	108.422.000,00	3.358.042.654,00
5.4.2.1.2.1.23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.839.845.307,80	1.765.272.778,00	1.074.572.529,80
5.4.2.1.2.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	20.930.000,00	0,00	20.930.000,00
5.4.2.1.2.1.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	8.295.000,00	1.725.000,00	6.570.000,00
5.4.2.1.2.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	550.000.000,00	1.249.111.828,00	(699.111.828,00)
5.4.2.1.2.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	389.988.667,57	5.452.231.681,00	(5.062.243.013,43)
5.4.2.1.2.1.28	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.799.613.568,61	3.809.767.242,17	3.989.846.326,44
5.4.2.1.2.1.29	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	643.973.975,00	507.121.500,00	136.852.475,00
5.4.2.1.2.1.30	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	25.738.305.007,39	6.329.116.550,00	19.409.188.457,39
5.4.2.1.2.1.31	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	3.135.102.500,00	2.088.644.500,00	1.046.458.000,00
5.4.2.1.2.1.32	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	399.484.312,74	297.460.000,00	102.024.312,74
5.4.2.1.2.1.33	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	0,00	133.750.000,00	(133.750.000,00)
5.4.2.1.2.1.34	Belanja Natura dan Pakan-Natura	118.473.655,00	293.018.700,00	(174.545.045,00)

5.4.2.1.2.1.35	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	420.949.202,00	530.396.800,00	(109.447.598,00)
5.4.2.1.2.1.36	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	8.370.000,00	2.550.000,00	5.820.000,00
5.4.2.1.2.1.37	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.038.227.250,00	21.745.881.850,00	(4.707.654.600,00)
5.4.2.1.2.1.38	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.136.324.002,00	2.514.944.700,00	(378.620.698,00)
5.4.2.1.2.1.39	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	6.840.000,00	(6.840.000,00)
5.4.2.1.2.1.40	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	548.582.250,00	(548.582.250,00)
5.4.2.1.2.1.41	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	710.037.010,00	6.540.862.500,00	(5.830.825.490,00)
5.4.2.1.2.1.42	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	8.443.998.250,00	397.928.150,00	8.046.070.100,00
5.4.2.1.2.1.43	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.169.140.550,00	31.993.078.956,00	(12.823.938.406,00)
5.4.2.1.2.1.44	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	172.150.000,00	169.041.325,00	3.108.675,00
5.4.2.1.2.1.45	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	4.400.000,00	4.500.000,00	(100.000,00)
5.4.2.1.2.1.46	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	135.000.000,00	132.000.000,00	3.000.000,00
5.4.2.1.2.1.47	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	162.500.000,00	74.960.000,00	87.540.000,00
5.4.2.1.2.1.48	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	63.000.000,00	126.028.000,00	(63.028.000,00)
5.4.2.1.2.1.49	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	473.530.400,00	206.630.000,00	266.900.400,00
5.4.2.1.2.1.50	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	67.500.000,00	66.000.000,00	1.500.000,00
5.4.2.1.2.1.51	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	228.970.000,00	766.805.475,00	(537.835.475,00)
5.4.2.1.2.1.52	Belanja Pakaian Penyelamatan	200.325.000,00	0,00	200.325.000,00
5.4.2.1.2.1.53	Belanja Pakaian Teknik	562.500.200,00	620.784.200,00	(58.284.000,00)
5.4.2.1.2.1.54	Belanja Pakaian Adat Daerah	297.545.000,00	0,00	297.545.000,00
5.4.2.1.2.1.55	Belanja Pakaian Batik Tradisional	250.728.500,00	0,00	250.728.500,00
5.4.2.1.2.1.56	Belanja Pakaian Olahraga	1.361.670.000,00	0,00	1.361.670.000,00
5.4.2.1.2.1.57	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00
5.4.2.1.2.1.58	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.459.523.100,00	1.328.656.050,00	130.867.050,00
5.4.2.1.2.1.59	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.259.800,00	0,00	3.259.800,00
5.4.2.1.2.1.60	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	75.615.000,00	0,00	75.615.000,00
5.4.2.1.2.1.61	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	73.743.500,00	0,00	73.743.500,00
5.4.2.1.2.1.62	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	10.360.000,00	0,00	10.360.000,00
5.4.2.1.2.1.63	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	99.950.000,00	0,00	99.950.000,00
5.4.2.1.2.1.64	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	16.370.000,00	0,00	16.370.000,00
5.4.2.1.2.1.65	Belanja Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
5.4.2.1.2.1.66	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	36.235.950,00	0,00	36.235.950,00
5.4.2.1.2.1.67	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	821.225.500,00	0,00	821.225.500,00

	Jumlah	165.827.959.358,71	166.279.981.834,29	(1.595.782.225,58)

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.2	Beban Jasa	294.966.471.819,80	308.040.267.884,43	(17.263.874.474,63)

Rincian dari Beban Jasa Seabagai berikut :

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	215.740.107.346,70	235.904.912.921,63	-20.164.805.574,93
5.4.2.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	45.785.716.916,14	36.266.542.449,30	9.519.174.466,84
5.4.2.1.2.2.3	Belanja Sewa Tanah	746.579.797,89	2.901.283.509,50	-2.154.703.711,61
5.4.2.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.623.122.379,00	8.066.724.720,00	-443.602.341,00
5.4.2.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.269.994.000,00	2.372.965.000,00	-1.102.971.000,00
5.4.2.1.2.2.7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	65.350.000,00	791.725.000,00	-726.375.000,00
5.4.2.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.190.078.410,00	6.080.719.758,00	-6.080.719.758,00
5.4.2.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.707.909.953,07	9.787.953.799,00	-2.080.043.845,93
5.4.2.1.2.2.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi	912.565.103,00	86.833.947,00	825.731.156,00
5.4.2.1.2.2.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	2.750.000,00	-2.750.000,00
5.4.2.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.925.047.914,00	5.003.304.890,00	5.921.743.024,00
5.4.2.1.2.2.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	50.397.469,00	-50.397.469,00
5.4.2.1.2.2.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	724.154.421,00	-724.154.421,00
	Jumlah	294.966.471.819,80	308.040.267.884,43	-17.263.874.474,63

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.3	Beban Pemeliharaan	26.373.669.431,34	26.454.572.748,30	-80.903.316,96

Rincian Beban Pemeliharaan

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.3.1	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	5.852.125,00	-5.852.125,00
5.4.2.1.2.3.2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.927.357.934,00	8.051.049.528,00	-16.978.407.462,00
5.4.2.1.2.3.3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.563.796.138,34	13.131.950.227,35	-22.695.746.365,69
5.4.2.1.2.3.4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.882.515.359,00	5.081.867.904,00	-12.964.383.263,00
5.4.2.1.2.3.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	183.852.963,95	-183.852.963,95
	Jumlah	26.373.669.431,34	26.454.572.748,30	-52.828.242.179,64

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.4	Beban Perjalanan Dinas	32.913.272.097,00	37.486.232.078,50	-4.572.959.981,50

Rincian Beban Perjalanan Dinas

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.4.1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	20.148.406.009,00	17.214.592.907,50	2.933.813.101,50
5.4.2.1.2.4.2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	12.764.866.088,00	20.172.583.657,00	-7.407.717.569,00
5.4.2.1.2.4.3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	9.690.239,00	-9.690.239,00
5.4.2.1.2.4.4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.2.1.2.4.5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.2.1.2.4.6	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	89.365.275,00	-89.365.275,00
	Jumlah	32.913.272.097,00	37.486.232.078,50	-4.572.959.981,50

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	39.906.071.692,34	47.456.831.343,00	-7.550.759.650,66

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.5.1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.493.458.750,00	11.947.127.250,00	-453.668.500,00
5.4.2.1.2.5.1.1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.512.450.000,00	2.358.210.000,00	1.154.240.000,00
5.4.2.1.2.5.1.2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	4.605.008.750,00	5.845.917.250,00	-1.240.908.500,00
5.4.2.1.2.5.1.3	Belanja Beasiswa	0,00	43.000.000,00	-43.000.000,00
5.4.2.1.2.5.1.4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	2.216.000.000,00	0,00	2.216.000.000,00
5.4.2.1.2.5.1.5	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1.160.000.000,00	3.700.000.000,00	-2.540.000.000,00
5.4.2.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.412.612.942,34	35.509.704.093,00	-7.097.091.150,66
5.4.2.1.2.5.2.1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	28.412.612.942,34	12.528.564.093,00	15.884.048.849,34
5.4.2.1.2.5.2.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	22.981.140.000,00	-22.981.140.000,00
	Jumlah	39.906.071.692,34	47.456.831.343,00	-7.550.759.650,66

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.6	Beban Barang dan Jasa BOS	68.594.049.304,00	71.530.844.668,00	(2.936.795.364,00)

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.998.647.600,00	18.626.599.750,00	372.047.850,00

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.2.8	Beban Barang dan Jasa BLUD	232.433.194.176,05	219.717.180.868,02	12.962.682.158,03

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.3	Beban Bunga	-	-	0,00

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.4	Beban Subsidi	-	-	0,00

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.5	Beban Hibah	128.922.914.717,00	115.915.380.000,00	13.007.534.717,00

Rincian dari beban Hibah adalah :

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.5.1	Hibah ke Pemerintah Pusat	32.349.169.650,00	21.071.194.400,00	11.277.975.250,00
5.4.2.1.5.2	Beban Hibah kepada BUMD	-	3.710.000.000,00	(3.710.000.000,00)
5.4.2.1.5.3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	96.573.745.067,00	61.547.997.300,00	35.025.747.767,00
5.4.2.1.5.4	Beban Hibah Dana BOS	-	27.623.874.900,00	(27.623.874.900,00)
5.4.2.1.5.5	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	1.962.313.400,00	(1.962.313.400,00)
5.4.2.1.5.6	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan untuk sekolah swasta (koreksi gedung dan Bangunan)	-	-	-
	Jumlah	128.922.914.717,00	115.915.380.000,00	13.007.534.717,00

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.6	Beban Bantuan Sosial	4.790.600.000,00	4.947.600.000,00	(157.000.000,00)

Beban bantuan sosial diberikan kepada masyarakat tertentu yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan dan dalam proses penganggaran telah sesuai dan dalam Laporan Operasional sesuai dengan aturan yang berlaku tidak memperhitungkan utang piutang, perangkaan sama dengan realisasi belanja LRA.

Rincian dari Beban

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)

5.4.2.1.6.1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	1.280.600.000,00	1.467.600.000,00	(187.000.000,00)
5.4.2.1.6.2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.510.000.000,00	3.480.000.000,00	30.000.000,00
5.4.2.1.6.3	Beban sosial kepada Kelompok/Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-
5.4.2.1.6.4	Beban sosial kepada Anggota Masyarakat (Dinas Sosial)	-	-	-
5.4.2.1.6.5	Beban Bantuan Sosial Tidak Direncanakan	-	-	-
	Jumlah	4.790.600.000,00	4.947.600.000,00	(157.000.000,00)

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.7	Beban Penyisihan Piutang	4.981.533.365,25	2.325.643.106,82	-64.635.660,00

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan besaran dan formulasi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 81 Tahun 2022 terdiri dari:

Rincian dari Beban Penyisihan Piutang adalah :

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.7.1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	2.390.225.717	1.392.651.858	997.573.859
5.4.2.1.7.2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	1.275.254.989,16	203.525.602,99	1.071.729.386
5.4.2.1.7.3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD	1.333.947.418,85	682.724.745,41	651.222.673
5.4.2.1.7.4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(17.894.760,00)	46.740.900,00	(64.635.660)
	Jumlah	4.981.533.365,25	2.325.643.106,82	2.655.890.258,43

Adapun rincian lebih lanjut dari masing-masing beban penyisihan piutang adalah :

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.1.7.1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	2.390.225.717,25	1.392.651.858,42	997.573.858,83

Beban Penyisihan Piutang Pajak terdiri dari :

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
5.4.2.1.7.1.1	Beban Penyisihan PBJT-Makanan dn/atau minuman	(20.092.674,10)	(13.309.566,71)	(6.783.107,38)
5.4.2.1.7.1.2	Beban Penyisihan Pajak PBJT-Perhotelan	8.060.402,44	(11.641.291,46)	19.701.693,90
5.4.2.1.7.1.3	Beban Penyisihan PBJT-Kesenian dan Hiburan	4.250.000,00	-	4.250.000,00
5.4.2.1.7.1.4	Beban Penyisihan Pajak PBJT-Jasa Parkir	166.861,13	163.104,00	3.757,13
5.4.2.1.7.1.5	Beban Penyisihan Pajak Air Tanah	2.279.307,80	579.875,78	1.699.432,02
5.4.2.1.7.1.6	Beban Penyisihan Pajak PBB P2	2.327.186.177,02	1.391.259.293,53	935.926.883,49
5.4.2.1.7.1.7	Beban Penyisihan Pajak Reklame	68.375.642,95	25.600.443,28	42.775.199,67
	Jumlah	2.390.225.717,25	1.392.651.858,42	997.573.858,83

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
5.4.2.1.7.2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	1.275.254.989,16	203.525.602,99	1.071.729.386,17

Beban Penyisihan Piutang Retribusi terdiri dari :

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
5.4.2.1.7.2.1	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di BLUD RSUD	1.170.680.630,39	-	1.170.680.630,39
5.4.2.1.7.2.2	Retribusi Menara Telekomunikasi	(862.200,00)	4.170.600,00	(5.032.800,00)
5.4.2.1.7.2.3	Retribusi Khusus Parkir	(35.155.000,00)	6.685.000,00	(41.840.000,00)
5.4.2.1.7.2.4	Retribusi Parkir Tepi Jalan	(24.950.000,00)	32.155.000,00	(57.105.000,00)
5.4.2.1.7.2.5	Retribusi Rusunawa	-	-	-
5.4.2.1.7.2.6	Retribusi IMB	2.933.095,60	4.512.688,50	(1.579.592,90)
5.4.2.1.7.2.7	Limbah Rumah Tangga	11.171.000,00	-	11.171.000,00
5.4.2.1.7.2.8	Retribusi Ijin Gangguan	0,00	(0,00)	0,00
5.4.2.1.7.2.9	Retribusi Sampah	-	-	-
5.4.2.1.7.2.10	Retribusi Pelayanan Pasar	20.457.662,39	2.713.331,00	17.744.331,39
5.4.2.1.7.2.11	Retribusi Kebersihan Pasar	126.276.353,82	139.477.243,49	(13.200.889,67)
5.4.2.1.7.2.12	Retribusi Ijin MInuman Beralkohol	11.393.446,97	7.121.740,00	4.271.706,97
5.4.2.1.7.2.13	Retribusi benih padi	(6.690.000,00)	6.690.000,00	(13.380.000,00)
	Jumlah	1.275.254.989,16	203.525.602,99	1.071.729.386,17

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
5.4.2.1.7.3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD	1.333.947.418,85	682.724.745,41	651.222.673,43

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD terdiri dari :

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
5.4.2.1.7.3.1	Beban Penyisihan Piutang Pasien RSUD	-	159.673.041,23	(159.673.041,23)
5.4.2.1.7.3.2	Kantor Pengelolaan Pasar	-	-	-
5.4.2.1.7.3.3	Beban penyisihan piutang denda pajak PBB-P2	1.093.128.052,18	696.703.057,15	396.424.995,03
5.4.2.1.7.3.4	Beban penyisihan piutang denda pajak Hotel	3.799.453,12	(5.693.788,63)	9.493.241,75
5.4.2.1.7.3.5	Beban penyisihan piutang denda pajak Restoran	(9.863.391,17)	(6.434.866,34)	(3.428.524,83)
5.4.2.1.7.3.6	Beban penyisihan piutang denda pajak Hiburan	2.040.000,00	-	2.040.000,00
5.4.2.1.7.3.7	Beban penyisihan piutang denda pajak Parkir	76.637,91	80.075,71	(3.437,80)
5.4.2.1.7.3.8	Beban penyisihan piutang denda pajak Air Bawah Tanah	43.620.593,10	(42.356.916,02)	85.977.509,12
5.4.2.1.7.3.9	Beban penyisihan piutang denda pajak Reklame	165.272.873,71	(119.425.223,69)	284.698.097,40

5.4.2.1.7.3.10	Piutang atas sewa barang milik daerah berupa tanah dan gedung eks Transito kabupaten Bantul oleh Universitas Nahdatul ulama (UNU) Yogyakarta	-	-	-
5.4.2.1.7.3.11	Piutang Dinas Kelautan dan Perikanan dengan omah lele	35.873.200,00	179.366,00	35.693.834,00
	Jumlah	1.333.947.418,85	682.724.745,41	615.528.839,43

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
5.4.2.1.7.4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-17.894.760,00	46.740.900,00	-64.635.660,00

Rincian Beban Penyisihan Piutang Lainnya per jenis piutang lainnya sebagai berikut :

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
5.4.2.1.7.4.1	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman PIK	(200.000,00)	(3.934.000,00)	3.734.000,00
5.4.2.1.7.4.2	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman PEKM	-	(39.400,00)	39.400,00
5.4.2.1.7.4.3	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman PSG	-	-	-
5.4.2.1.7.4.4	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman UKM	(3.648.760,00)	-	(3.648.760,00)
5.4.2.1.7.4.5	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman KUPK	-	24.249.400,00	(24.249.400,00)
5.4.2.1.7.4.6	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Sapi	(12.430.000,00)	(20.460.000,00)	8.030.000,00
5.4.2.1.7.4.7	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Penambang Pasir (Dipertahut)	-	-	-
5.4.2.1.7.4.8	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Penambang Pasir BKK,PP,KB)	-	-	-
5.4.2.1.7.4.9	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Gurameh	-	(4.200.000,00)	4.200.000,00
5.4.2.1.7.4.10	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman BMT	-	-	-
5.4.2.1.7.4.11	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Pedagang Pasar	(616.000,00)	51.124.900,00	(51.740.900,00)
5.4.2.1.7.4.12	Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Pasca Panen	(1.000.000,00)	-	(1.000.000,00)
	Jumlah	(17.894.760,00)	46.740.900,00	(64.635.660,00)

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	180.378.513.998,24	204.935.636.204,88	-24.557.122.206,64

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.2.1	Beban Penyusutan Tahun berjalan	176.735.193.723,04	199.799.550.160,08	(23.064.356.437,04)
5.4.2.2.2	Beban Amortisasi Tahun berjalan	3.643.320.275,20	5.136.086.044,80	(1.492.765.769,60)
	Jumlah	180.378.513.998,24	204.935.636.204,88	(24.557.122.206,64)

Rincian Beban Penyusutan Tahun berjalan :

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.2.1.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	57.944.772.633,17	73.543.354.250,20	95.463.064.366,27
5.4.2.2.1.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.489.188.256,76	36.247.799.906,12	28.502.598.323,95
5.4.2.2.1.3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.301.232.833,11	90.008.396.003,76	92.534.806.690,23
	Jumlah	176.735.193.723,04	199.799.550.160,08	216.500.469.380,45

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.3	Beban Transfer	356.026.220.783,00	342.301.803.637,00	13.724.417.146,00

5.4.2.3	Beban Transfer terdiri dari :	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.3.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	30.451.302.893,00	26.764.870.787,00	3.686.432.106,00
5.4.2.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.168.929.660,00	3.912.168.310,00	1.256.761.350,00
5.4.2.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	120.347.030,00	100.151.140,00	20.195.890,00
5.4.2.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	320.285.641.200,00	311.524.613.400,00	8.761.027.800,00
	Jumlah	356.026.220.783,00	342.301.803.637,00	13.724.417.146,00

Beban transfer di Kabupaten terdiri dari:

5.4.2.3.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan beban yang harus dikeluarkan Pemerintah untuk memenuhi amanat perundangan yaitu dengan membagi hasil Pajak daerah yang diperoleh tahun sebelumnya dengan menggunakan formula yang telah ditentukan,besaran beban operasional sama denga transfer LRA dan belum memperhitungkan utang piutang

5.4.2.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya / bagi hasil retribusi merupakan beban yang harus dikeluarkan Pemerintah untuk memenuhi amanat perundangan yaitu dengan membagi Pendapatan Lainnya / bagi hasil retribusi daerah dengan menggunakan formula yang telah ditentukan, besaran beban operasional sama denga transfer LRA dan belum memperhitungkan utang piutang

5.4.2.2.3 Beban Transfer bantuan keuangan ke Pemerintah daerah lainnya diberikan kepada Pemerintah Propinsi DIY sebagai bagian dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Piyungan yang dilaksanakan oleh Propinsi DIY dhi Kartamantul yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh Prop DIJ, Pemkab Bantul, Pemkab Sleman dan Pemkot Jogja termasuk bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten serta pemerintah desa dan belum memperhitungkan utang piutang

5.4.2.2.4 Beban transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Desa merupakan konsekwensi dari pelaksanaan UU Desa no tahun 2014 yang berupa antara lain Dana Desa (DD) yang merupakan penerusan transfer dari Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten yang harus dibadi ke Desa yang sudah ditentukan formulasinya dan transfer bantuan keuangan lain berupa kegiatan yang diprakarsai oleh SKPD dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.4	Beban Tidak Terduga			
		3.120.743.581,31	1.122.989.975,00	1.997.753.606,31
	Jumlah Beban Tidak Terduga	3.120.743.581,31	1.122.989.975,00	1.997.753.606,31

	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)

5.4.2.5	Surplus/defisit dari kegiatan non Operasional	1.368.877.380,00	759.066.011,00	609.811.369,00

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.6	BEBAN LUAR BIASA	-	-	-

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5.4.2.7	SURPLUS/DEFISIT- LO	185.934.628.879,39	55.536.537.775,39	130.398.091.104,00

Surplus/defisit -LO adalah selisih antara pendapatan- Lo dan beban. Surplus/defisit-Lo akan dicatat dan disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.5 Laporan Arus Kas

Pos-pos pada Laporan Arus Kas secara umum sudah disajikan dan diuraikan dalam Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I Pernyataan No. 11 tentang Laporan Keuangan konsolidasi paragraf 21 dengan diterbitkannya PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan merupakan konsolidasi Arus Kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun di luar pengelolaan BUD termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) baik pendapatan maupun belanjanya dan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya yaitu:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi;
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan;
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

Informasi ini bertujuan untuk:
a. Menilai pengaruh dari masing-masing aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah
b. Mengevaluasi hubungan antara masing-masing aktivitas

Komponen laporan arus kas yang disajikan terdiri dari:

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023(Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
5.5.1.1	Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	2.608.044.477.024,57	2.415.325.351.343,57	192.719.125.681,00

Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah selama tahun anggaran 2024 dan 2023 terdiri atas:

5.5.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	295.769.695.358,90	269.918.537.186,00	25.851.158.172,90
5.5.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	307.622.088.520,00	42.382.506.560,80	265.239.581.959,20
5.5.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.083.794.982,30	20.515.070.732,29	(431.275.749,99)
5.5.1.1.4	Lain – Lain PAD yang Sah	13.723.408.018,37	253.859.858.182,83	(240.136.450.164,46)
5.5.1.1.5	Dana Bagi Hasil	35.169.801.000,00	34.766.685.062,00	403.115.938,00
5.5.1.1.6	Dana Alokasi Umum	1.022.019.834.045,00	954.626.878.777,00	67.392.955.268,00
5.5.1.1.7	Dana Alokasi Khusus Fisik	116.981.478.484,00	56.576.626.350,00	60.404.852.134,00
5.5.1.1.8	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	325.859.185.456,00	309.913.057.548,00	15.946.127.908,00

5.5.1.1.9	Dana Insentif Daerah	0,00	58.809.566.000,00	(58.809.566.000,00)
5.5.1.1.10	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
5.5.1.1.11	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
5.5.1.1.12	Dana Desa	127.393.902.000,00	126.479.025.000,00	914.877.000,00
5.5.1.1.13	Insentif Fiskal	51.233.491.000,00	0,00	51.233.491.000,00
5.5.1.1.14	Dana Bagi Hasil dari Propinsi	200.933.285.798,00	201.588.461.475,00	(655.175.677,00)
5.5.1.1.15	Dana Bantuan Keuangan	88.464.126.443,00	78.706.842.606,65	9.757.283.836,35
5.5.1.1.16	Penerimaan Hibah	2.790.385.919,00	7.164.398.619,00	(4.374.012.700,00)
5.5.1.1.17	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
5.5.1.1.18	Peneriman dari Pendapatan Lainnya	0,00	17.837.244,00	(17.837.244,00)
	Jumlah Arus Kas Masuk	2.608.044.477.024,57	2.415.325.351.343,57	192.719.125.681,00
5.5.1.2	Arus Kas Keluar aktivitas Operasi	2.336.045.265.740,82	2.183.752.083.338,91	152.293.182.401,91

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan pengeluaran untuk belanja operasi, transfer dan belanja tak terduga selama tahun anggaran 2024 dan 2023, terdiri atas:

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023(Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.1.2.1	Pembayaran Pegawai	952.731.205.875,00	860.578.542.728,00	92.152.663.147,00
5.5.1.2.2	Pembayaran Barang	886.056.158.351,82	858.885.766.998,91	27.170.391.352,91
5.5.1.2.3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00	0,00
5.5.1.2.4	Pembayaran Hibah	128.922.914.717,00	115.915.380.000,00	13.007.534.717,00
5.5.1.2.5	Pembayaran Bantuan Sosial	4.790.600.000,00	4.947.600.000,00	(157.000.000,00)
5.5.1.2.6	Pembayaran Bantuan Keuangan kpd Prop/Kab/kota/Pemerintah Desa	320.405.988.230,00	311.624.764.540,00	8.781.223.690,00
5.5.1.2.7	Pembayaran tak Terduga	7.518.166.014,00	1.122.989.975,00	6.395.176.039,00
5.5.1.2.8	Pembayaran Bagi Hasil Kpd Kab/kota/Pemerintah Desa	35.620.232.553,00	30.677.039.097,00	4.943.193.456,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	2.336.045.265.740,82	2.183.752.083.338,91	152.293.182.401,91
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	271.999.211.283,75	231.573.268.004,66	40.425.943.279,09

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun anggaran 2024 dan 2023

5.5.2	Aliran Kas dari Aktivitas Investasi	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023(Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)

5.5.2.1	Aliran Kas masuk dari Aktivitas Investasi	2.350.214.880,00	759.066.011,00	1.591.148.869,00
5.5.2.1.1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1.2	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1.3	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.175.022.380,00	672.806.511,00	502.215.869,00
5.5.2.1.4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	175.855.000,00	52.250.000,00	123.605.000,00
5.5.2.1.5	Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1.6	Pendapatan Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1.7	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	18.000.000,00	25.500.000,00	(7.500.000,00)
5.5.2.1.8	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	8.509.500,00	(8.509.500,00)
5.5.2.1.9	Penjualan atas Penjualan Hasil Peternakan	0,00	0,00	0,00
5.5.2.1.10	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	981.337.500,00	0,00	981.337.500,00
5.5.2.2	Arus Kas Keluar aktivitas investasi	296.668.387.225,89	251.724.987.988,81	44.943.399.237,08

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi tersebut merupakan pengeluaran untuk belanja aset tetap dan aset lainnya selama tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023(Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.2.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
5.5.2.2.2	Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00
5.5.2.2.3	Perolehan Peralatan dan Mesin	83.581.489.731,00000	76.046.486.634,86	7.535.003.096,14
5.5.2.2.4	Perolehan Gedung dan Bangunan	55.257.517.175,64000	32.716.587.212,88	22.540.929.962,76
5.5.2.2.5	Perolehan Jalan, Irigasi an Jaringan	132.989.716.998,25000	110.642.014.782,07	22.347.702.216,18
5.5.2.2.6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	8.041.511.571,00000	8.268.805.559,00	(227.293.988,00)
5.5.2.2.7	Perolehan Aset Lainnya	98.151.750,00000	0,00	98.151.750,00
5.5.2.2.8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	16.700.000.000,00000	24.051.093.800,00	(7.351.093.800,00)
5.5.2.2.9	Pengeluaran Pembelian Investasi non Permanen			
	Jumlah Arus Kas Keluar	296.668.387.225,89	251.724.987.988,81	44.943.399.237,08

	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023(Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(294.318.172.345,89)	(250.965.921.977,81)	(43.352.250.368,08)

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi tahun anggaran 2024 dan 2023

5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2024 dan Pembiayaan tahun 2023	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023(Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.3.1	Arus Kas Masuk dari aktivitas pendanaan	0,00	32.709.000,00	(32.709.000,00)

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan merupakan penerimaan kas yang antara lain berasal dari pinjaman, penjualan obligasi, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, selama tahun 2024 dan 2023

5.5.3.1.1	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat			
5.5.3.1.2	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	32.709.000,00	(32.709.000,00)
5.5.3.2	Arus Kas Keluar dari aktivitas pendanaan	0,00	0,00	-

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas pendanaan tersebut merupakan pengeluaran untuk pemberian pinjaman (dana bergulir) dan pembayaran pokok hutang selama tahun 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023(Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
5.5.3.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat			
5.5.3.2.3	Pemberian Pinjaman			
5.5.3.2.4	Pinjaman Daerah (Dana Bergulir)	-	-	-
5.5.3.2.5	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan	0,00	32.709.000,00	(32.709.000,00)

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan tahun anggaran 2024 dan 2023

5.5.4	Arus Kas dari AktivitasTransitoris	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023(Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.4.1	Arus Kas Masuk dari aktivitas transitoris	144.437.307.603,32	153.850.670.636,39	(9.413.363.033,07)

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan kas brutto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan pembiayaan selama tahun 2024 dan 2023 terdiri atas:

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023(Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.4.1.1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	125.907.229.603,32	134.639.673.636,39	(8.732.444.033,07)
5.5.4.1.1.1	Iuran Wajib Pegawai	20.279.767.600,00	0,00	20.279.767.600,00
5.5.4.1.1.2	PPh Pasal 21	3.632.546.709,00	29.671.356.012,50	(26.038.809.303,50)
5.5.4.1.1.3	PPh Pasal 22	1.584.924.082,91	1.813.186.464,61	(228.262.381,70)
5.5.4.1.1.4	PPh Pasal 23	1.552.958.611,96	3.076.777.844,16	(1.523.819.232,20)
5.5.4.1.1.5	PPh Pasal 25	529.817,00	581.000,00	(51.183,00)
5.5.4.1.1.6	PPh Pasal 4(2)	2.914.341.904,20	2.893.116.510,54	21.225.393,66
5.5.4.1.1.7	PPN Pusat	32.538.920.286,25	35.269.501.049,58	(2.730.580.763,33)
5.5.4.1.1.17	Uang Taspen	34.417.136.091,00	26.033.322.219,00	8.383.813.872,00
5.5.4.1.1.18	Iuran Jaminan Kesehatan	25.464.850.831,00	32.625.135.908,00	(7.160.285.077,00)
5.5.4.1.1.19	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	880.314.515,00	814.176.339,00	66.138.176,00
5.5.4.1.1.20	Iuran Jaminan Kematian	2.640.939.155,00	2.442.520.289,00	198.418.866,00
5.5.4.1.1.21	Pajak daerah			-
5.5.4.1.1.22	pajak yang belum disetor di bendahara bosnas			-
5.5.4.1.2	Penerimaan Pengesahan SP2D Nihil untuk Penggunaan Uang Persediaan Tahun 2024 dan 2023	15.689.728.656,00	14.345.497.699,34	1.344.230.956,66
5.5.4.1.2	Pengembalian Sisa Uang Persediaan Tahun 2024 dan 2023	2.840.349.344,00	4.865.499.300,66	(2.025.149.956,66)
		144.437.307.603,32	153.850.670.636,39	(9.413.363.033,07)
5.5.4.2	Arus Kas Keluar aktivitas transitoris	144.437.307.603,32	153.850.670.636,39	(9.413.363.033,07)

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris merupakan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi belanja dan pembiayaan selama tahun 2024 dan 2023 terdiri atas:

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023(Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.5.4.2.1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (Potongan Wajib PNS)	125.907.229.603,32	134.639.673.636,39	(8.732.444.033,07)
5.5.4.2.1.1	Iuran Wajib Pegawai	20.279.767.600,00	0,00	20.279.767.600,00
5.5.4.2.1.2	PPh Pasal 21	3.632.546.709,00	29.671.356.012,50	(26.038.809.303,50)
5.5.4.2.1.3	PPh Pasal 22	1.584.924.082,91	1.813.186.464,61	(228.262.381,70)

5.5.4.2.1.4	PPh Pasal 23	1.552.958.611,96	3.076.777.844,16	(1.523.819.232,20)
5.5.4.2.1.5	PPh Pasal 25	529.817,00	581.000,00	(51.183,00)
5.5.4.2.1.6	PPh Pasal 4(2)	2.914.341.904,20	2.893.116.510,54	21.225.393,66
5.5.4.2.1.7	PPN Pusat	32.538.920.286,25	35.269.501.049,58	(2.730.580.763,33)
5.5.4.2.1.18	Uang Taspen	34.417.136.091,00	26.033.322.219,00	8.383.813.872,00
5.5.4.2.1.19	Iuran Jaminan Kesehatan	25.464.850.831,00	32.625.135.908,00	(7.160.285.077,00)
5.5.4.2.1.20	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	880.314.515,00	814.176.339,00	66.138.176,00
5.5.4.2.1.21	Iuran Jaminan Kematian	2.640.939.155,00	2.442.520.289,00	198.418.866,00
5.5.4.2.2	Pengeluaran Uang Persediaan Tahun 2024 dan 2023	18.530.078.000,00	19.210.997.000,00	(680.919.000,00)
	Jumlah Arus Kas Keluar	144.437.307.603,32	153.850.670.636,39	(9.413.363.033,07)

5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris dan Pembiayaan

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas non anggaran selama tahun 2024 dan 2023.

Kenaikan (Penurunan) Kas	(22.318.961.062,14)	(19.359.944.973,15)	-2.959.016.088,99
Koreksi SiLPA		-	
Kenaikan (Penurunan) Kas setelah koreksi SiLPA	(22.318.961.062,14)		
Saldo Awal Kas (BUD dan BLUD)	196.239.211.759,59	215.631.865.732,74	279.201.069.180,40
Koreksi SiLPA		-	
Saldo Akhir Kas (BUD dan BLUD)	173.920.250.697,45	196.271.920.759,59	276.242.053.091,41
Penjelasan saldo akhir kas Pemerinatah Kabupaten Bantul			
Saldo akhir kas terdiri dari :			
Saldo Silpa	173.920.250.697,45	196.239.211.759,59	(22.318.961.062,14)
Kas di Kas Daerah	161.319.107.783,71	171.064.455.774,11	(9.745.347.990,40)
Kas di Bendahara Penerimaan	304.712.756,00	699.567.547,00	(394.854.791,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	-
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	10.404.078.395,43	23.947.680.740,48	(13.543.602.345,05)
Kas Dana BOSP	101.060.109,00	0,00	101.060.109,00

Kas Dana BOK Puskesmas	900.241.223,00	0,00	900.241.223,00
Kas Pemerintah diluar Pengelolaan BUD - Dana BOS	0,00	527.507.698,00	(527.507.698,00)
Kas Lainnya	891.050.430,31	0,00	891.050.430,31
	173.920.250.697,45	196.239.211.759,59	(22.318.961.062,14)

5 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS -

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.6.1	EKUITAS AWAL	3.554.397.164.882,24	3.539.962.763.941,66	14.434.400.940,58

Saldo Ekuitas Awal TA 2024 sebesar Rp3.554.397.164.882,24 merupakan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 pada Laporan Neraca. Apabila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas Awal tahun 2023 sebesar Rp3.539.962.763.941,66 terdapat peningkatan sebesar Rp14.434.400.940,58 atau 0,41%.

234,80 0,00

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.6.2	SURPLUS/DEFISIT-LO	185.934.628.879,39	55.536.537.775,39	130.398.091.104,00

Saldo Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan – LO dengan Beban pada Laporan Operasional. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 terdapat surplus sebesar Rp185.934.628.879,81 dan apabila dibandingkan dengan saldo surplus -LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.536.537.775,39 terdapat peningkatan sebesar Rp130.398.091.104,42

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.6.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			-
5.6.3.1	Koreksi Nilai Persediaan		-	-
5.6.3.2	Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
5.6.3.3	Koreksi ekuitas lainnya	(16.541.973.729,42)	(41.102.136.834,81)	24.560.163.105,39
5.6.3.4	Pengungkapan atas koreksi ekuitas untuk beban penyusutan tahun sebelumnya			-
		(16.541.973.729,42)	(41.102.136.834,81)	24.560.163.105,39

		REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.6.4	EKUITAS AKHIR	3.723.789.820.032,21	3.554.397.164.882,24	169.392.655.149,97

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.723.789.820.032,22 berasal dari penjumlahan Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2024

BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

Sesuai dengan amanat SAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, maka pada BAB VI ini disajikan informasi lainnya yang belum disajikan pada laporan keuangan, yaitu :

6.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeintah Kabupaten Bantul

SOTK pada tahun 2024 adalah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan – Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada masing-masing perangkat daerah tersebut.

6.2.2 OPD yang menerapakan Pola Pengelolaan Keuanagn -Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu :

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati

   RSUD Panembahan Senopati sejak tahun 2009 menerapkan PPK- BLUD berdasarkan Keputusan Bupati nomor: 195 tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD/PPK BLUD pada RSUD Panembahan Senopati.

2. Rumah Sakit Umum Saras Adyatma

   RSUD Saras Adyatma sejak Tahun 2022 menerapkan PPK- BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul. Pelaksanaan Penerapan PPK BLUD dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan baik dalam tata kelola pengelolaan maupun aturan-aturan yang membawahi pelaksanaan penerapan PPK BLUD

3. Dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan tentang jaminan kesehatan masyarakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat antara lain Perpres no 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah dan Permenkes Nomor 19 tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul menindaklanjuti dengan merubah fungsi Puskesmas menjadi BLUD Puskesmas sebagai unit kerja dibawah Dinas Kesehatan dengan Keputusan

Bupati Nomor 5240 Tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Penerapan PPK-BLUD pada UPT Puskesmas.

6.2.3 Jenis-jenis transaksi Non Rekening Kas Umum Daerah (Non RKUD)

Jenis transaksi non RKUD dalam LKPD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2024 yaitu :

1. penerimaan unit organisasi bersifat khusus dan unit pelaksana teknis daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD
2. pendapatan langsung lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan harus disajikan dalam laporan keuangan Perangkat Daerah, unit organisasi bersifat khusus dan unit perangkat teknis daerah, serta disajikan juga dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,yaitu :
   a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang terdiri dari Bosnas, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.
   b. Dana Desa; dan
   c. BOK Puskesmas

6.2.4 Laporan Perkembangan Aset PT. BKM (dalam likuidasi)

PT Bantul Kota Mandiri (PT BKM) merupakan perusahaan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bantul bersama PT Perwita Karya (PT PK) pada tahun 2002 berdasarkan akta notaris No. 13 tanggal 21 Agustus 2008 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-76934.AH.01.02 tahun 2008 pada tanggal 28 Oktober 2008.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah di aktakan melalui Akta Notaris Rosevia Herlijanta, S.H. No. 06 tanggal 18 Agustus 2011 maka para pemegang saham memutuskan pembubaran dan likuidasi PT BKM (dalam likuidasi) karena belum adanya investor dan stagnan. Pembubaran dan likuidasi PT BKM (dalam likuidasi) disetujui dengan Nomor Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tertanggal 19 April 2011.

Selanjutnya dibentuk Tim Likuidasi yang bertugas untuk melakukan penjualan aset/kekayaan perusahaan berupa tanah dan membagikan hasilnya kepada para pemegang saham.

Dasar hukum pembagian 61% - 39% hasil penjualan aset/kekayaan PT. Bantul Kota Mandiri (dalam likuidasi) kepada para pemegang saham (61% untuk Pemda Bantul dan 39% untuk Perwita Karya) berdasarkan Akte 05 tertanggal 09 Agustus 2012, dengan notaris Rosevia Herijanta,SH dan Berita Acara Kesepakatan Pemegang Saham PT. BKM (dalam likuidasi) tertanggal 29 Mei 2015.

Pada tahun 2023 terjadi pergantian susunan tim likuidasi PT BKM (dalam liuidasi) bedasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Tertulis para Pemegang Saham di luar Rapat Pemegang Saham (SIRKULER) Perseroan

Terbatas Bantul Kota Mandiri (dalam likuidasi) Nomor 04 tanggal 03 Oktober 2023, dengan susunan sebagai berikut :

1. Agus Budi Raharja,SKM, M.Kes sebagai koordinator (Unsur Pemda Bantul)

2. Drs. Fauzan Mu'arifin sebagai Sekretaris (Unsur Pemda Bantul)

3. Yossy Covalina sebagai Bendahara (Unsur Perwita Karya)

4. Andhy Soelistyo, SH.MH sebagai anggota (Unsur PT Perwita Karya)

5. Drs. Trisna Manurung, M.Si sebagai anggota (Unsur Pemda Bantul)

6. Suparman, SIP, MH sebagai anggota (Unsur Pemda Bantul)

Sisa tanah yang belum terjual per 31 Desember 2024 sebanyak 7 (tujuh) bidang/sertifikat dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa	NO HGB	Luas (m) berdasar sertifikat	Nilai Apraisal (Rp)
1	Sendangsari	15	14.998	1.889.748.000,00
2	Sendangsari	16	3.058	238.524.000,00
3	Sendangsari	17	2.531	384.712.000,00
4	Sendangsari	19	1.991	175.208.000,00
5	Sendangsari	25	841	79.054.000,00
6	Sendangsari	30	5.886	924.102.000,00

7	Sendangsari	35	6.967	1.177.423.000,00
		Jumlah	36.272	4.868.771.000,00

Nilai Apraisal berdasarkan apraisal yang dilakukan pada tahun 2024

Posisi saldo kas operasional Tim Likuidasi adalah:

a. Sldo Kas sebesar Rp416.751,00
b. Saldo bank di BPD no Rekening 004.211.025151 sebesar Rp269.327.260,47

6.2.5 Pengungkapan Pengembalian Dana Hibah Koni yang diperuntukan bagi PERSIBA Bantul yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011.

Pada tanggal 6 Maret 2014, Drs.HM Idham Samawi menyetorkan uang sejumlah Rp11.689.669.550,00 ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul, sebagai “pengembalian dana hibah yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 kepada KONI Kabupaten Bantul yang diperuntukan bagi PERSIBA Bantul yang diduga/sisangkakan menyimpang dalam proses pencairannya dan penggunaanya oleh Kejaksaan Tinggi DIY.

Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengadakan pemerikasaan atas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun 2014. Salah satu hasil temuannya menyebutkan bahwa terdapat penerimaan lain-lain sebesar Rp11.759.047.750,00 belum memiliki dasar penerimaan yang sah. Uang setoran sebesar Rp11.759.047.750,00 terdiri dari uang setoran oleh Drs.HM Idham Samawi sebesar Rp11.689.669.550,00 dan setoran pengembalian Sdr. Maryani sebesar Rp69.370.200,00. Rekomendasi BPK RI menyarankan kepada Bupati Bantul agar memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul untuk berkoordinasi dengan pihak penyetor terkait dengan penyelesaian permasalahan dana setoran sebesar Rp11.759.047.750,00 tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Drs HM Idham Samawi selaku pihak penyetor sudah beberapa kali mengajukan Surat Permohonan dan gugatan kepada Bupati Bantul, perihal Penarikan Dana setoran sebesar Rp11.689.669.550,00 dan sampai saat ini belum bisa dikabulkan mengingat belum ada putusan pengadilan yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengembalikan dana tersebut kepada Drs HM Idham Samawi

Berdasarkan Surat permohonan, Drs HM Idham Samawi perihal Penarikan Dana setoran sebesar Rp11.689.669.550,00 kepada Bupati Bantul, Bupati Bantul telah melakukan konsultasi dan berkirim surat kepada beberapa lembaga diantaranya ke Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Kepala Perwakilan BPKP DIY dan Kementrian Dalam Negeri cq Dirjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mendapatkan pertimbangan hukum dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Nomor B-5280/M.4/Gtn.2/12/2024, tertanggal 17 Desember 2024, perihal Permohonan Konsultasi dan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa putusan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan saudara Drs HM Idham Samawi telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sesuai Putusan Kasasi Nomor 3397/K/PDT/2021, tanggal 23 Nopember 2021, namun Putusan a quo hanya memutuskan terkait kompetensi *Absolut*, tidak ada amar putusan terkait pokok perkara, yang memerintahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk mengembalilakn dana yang diseorkan Drs. H.M. Idham Samawi sejumlah Rp11.689.669.550,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
2. Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor Perkara: 8/G/2024/PTUN.YK dalam amar putusan terkait pokok perkara pada bagian d, maka tidak ada kewajiban hukum Bupati Bantul untuk menerbitkan Surat Keputusan Penarikan Danayang disetorkan Penggugat ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp11.689.669.550,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3397 K/PDT/2021, tanggal 23 November 2021 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor Perkara: 8/G/2024/PTUN.YK tersebut diatas tidak dapat dijadikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengembalikan dana yang disetorkan Drs HM Idham Samawi
4. Bahwa dilihat dari Surat BPKP Npmor SR-1440?PW 12/I/2017, tanggal 21 Juni 2017, dapat dimaknai bahwa tidak terjadinya kerugian negara bukan karena tidak adanya penyimpangan dalam pemberian dana hibah, tetapi karena saat melakukan penghitungan kerugian negara, pengembalian dana hibah yang disetorkan oleh Drs HM Idham Samawi dimana uang tersebut telah masuk ke Kaas Daerah sebelum BPKP melakukan perhitungan kerugian Negara.

6.2.6 Pengungkapan Tindak Lanjut LHP BPK terhadap audit Danais tahun 2020 sampai dengan 2022

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Bantul melaksanakan Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten melalui kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi

identifikasi, verifikasi pemberkasan, pengukuran, dan pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten serta tanah desa.

Pada tahun 2020 DPTR melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemberkasan tanah desa dengan capaian 1.000 bidang tanah desa dengan capaian pengukuran sebanyak 1.000 bidang tanah dan 1.000 berkas persyaratan pendaftaran pengukuran tanah dan peta kadastral.

Atas kegiatan pengukuran tersebut, pada tahun 2020 DPTR telah membayarkan biaya Transportasi Akomodasi dan Konsumsi (TAK) sebesar Rp225.000.000,00 (1.000 bidang tanah x 3 Orang x Rp75.000,00) untuk 1.000 bidang tanah ke rekening juru ukur.

Dari target 1000 (seribu) bidang tanah yang telah diajukan baru selesai sebanyak 433 bidang tanah sehingga masih kurang 567 yang belum terselesaikan. Berdasarkan surat pernyataan kesanggupan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul menyatakan bahwa sanggup menyelesaikan secara bertahap pekerjaan pengukuran tanah kasultanan sebanyak 567 bidang tunggakan kegiatan tahun 2020 yang biaya transportasi akomodasi dan konsumsi (TAK) petugas ukurnya telah dibayarkan dengan cacatan berkas permohonan dinyatakan lengkap serta memenuhi syarat teknis dan yuridis dan telah di daftarkan ke Kantor Petanahan Kabupaten Bantul.

Progres penyelesaian pekerjaan pengukuran tanah kasultanan sebanyak 567 bidang tunggakan kegiatan tahun 2020 pada tahun 2024 dapat terselesaikan sebanyak 70 bidang tanah. Sehingga ada sisa sebanyak 442 bidang tanah yang belum terselesaikan.

6.2.7 Realisasi Dana Kalurahan

Dana Kalurahan merupakan pendapatan yang tidak melalui mekanisme APBD. Pendapatan tersebut dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke rekening Pemerintah Kalurahan. Pedoman terkait pengelolaan Dana Kalurahan berdasarkan PP Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan PMK Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Rekapitulasi pencairan Dana Kalurahan dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Kalurahan sebagai berikut :

6.2.8 Laporan Dana Desa

NO	KODE LOKASI	NAMA DESA	REKENING DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	PAGU TAMBAHAN (Rp)	PAGU SILPA (Rp)	ALOKASI TAHUN DEPAN	DANA DESA 2024 (Rp)	PENYALURAN (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9
1	0401-KAB. BANTUL	Argodadi, Kec. Sedayu - 3402172001	004111001074 REKENING KAS KALURAHAN ARGODADI BPD YOGYAKARTA	2.568.747.000	0	223.812.160	0	2.792.559.160	2.568.747.000
2	0401-KAB. BANTUL	Argomulyo, Kec. Sedayu - 3402172004	004111001089 REKENING KAS KALURAHAN ARGOMULYO BPD YOGYAKARTA	1.357.213.000	0	151.960.500	0	1.509.173.500	1.357.213.000
3	0401-KAB. BANTUL	Argorejo, Kec. Sedayu - 3402172002	004111001075 REKENING KAS KALURAHAN ARGOREJO BPD YOGYAKARTA	1.496.592.000	144.516.000	201.171.205	0	1.842.279.205	1.641.108.000
4	0401-KAB. BANTUL	Argosari, Kec. Sedayu - 3402172003	004111001085 REKENING KAS KALURAHAN ARGOSARI BPD YOGYAKARTA	1.570.951.000	0	92.830.450	0	1.663.781.450	1.570.951.000
5	0401-KAB. BANTUL	Bangunharjo, Kec. Sewon - 3402152003	004111001069 REKENING KAS KALURAHAN BANGUNHARJO BPD YOGYAKARTA	1.926.679.000	144.516.000	181.964.969	0	2.253.159.969	2.071.195.000
6	0401-KAB. BANTUL	Bangunjiwo, Kec. Kasihan - 3402162001	004111001071 REKENING KAS KALURAHAN BANGUNJIWO	2.215.926.000	144.516.000	96.322.924	0	2.456.764.924	2.360.442.000

NO	KODE LOKASI	NAMA DESA	REKENING DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	PAGU TAMBAHAN (Rp)	PAGU SILPA (Rp)	ALOKASI TAHUN DEPAN	DANA DESA 2024 (Rp)	PENYALURAN (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9
			BPD YOGYAKARTA						
7	0401-KAB. BANTUL	Banguntapan, Kec. Banguntapan - 3402122002	004111001080 REKENING KAS KALURAHAN BANGUNTAPAN BPD YOGYAKARTA	2.020.671.000	0	329.879.492	0	2.350.550.492	2.020.671.000
8	0401-KAB. BANTUL	Bantul, Kec. Bantul - 3402082003	004111001040 REKENING KAS KALURAHAN BANTUL BPD YOGYAKARTA	1.244.118.000	0	160.634.800	0	1.404.752.800	1.244.118.000
9	0401-KAB. BANTUL	Baturetno, Kec. Banguntapan - 3402122001	004111001057 REKENING KAS KALURAHAN BATURETNO BPD YOGYAKARTA	1.648.236.000	0	97.832.706	0	1.746.068.706	1.648.236.000
10	0401-KAB. BANTUL	Bawuran, Kec. Pleret - 3402132004	004111001064 REKENING KAS KALURAHAN BAWURAN BPD YOGYAKARTA	1.593.919.000	144.516.000	59.217.900	0	1.797.652.900	1.738.435.000
11	0401-KAB. BANTUL	Canden, Kec. Jetis - 3402092002	004111001023 REKENING KAS KALURAHAN CANDEN BPD YOGYAKARTA	1.603.413.000	0	127.567.200	0	1.730.980.200	1.603.413.000
12	0401-KAB.	Caturharjo, Kec. Pandak -	004111001035 REKENING KAS KALURAHAN	1.738.278.000	0	301.165.325	0	2.039.443.325	1.738.278.000

NO	KODE LOKASI	NAMA DESA	REKENING DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	PAGU TAMBAHAN (Rp)	PAGU SILPA (Rp)	ALOKASI TAHUN DEPAN	DANA DESA 2024 (Rp)	PENYALURAN (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9
	BANTUL	3402062001	CATURHARJO BPD YOGYAKARTA						
13	0401-KAB. BANTUL	Dlingo, Kec. Dlingo - 3402112003	004111001050 REKENING KAS KALURAHAN DLINGO BPD YOGYAKARTA	1.915.277.000	0	157.265.000	0	2.072.542.000	1.915.277.000
14	0401-KAB. BANTUL	Donotirto, Kec. Kretek - 3402032003	004111001091 REKENING KAS KALURAHAN DONOTIRTO BPD YOGYAKARTA	1.009.870.000	144.516.000	61.514.000	0	1.215.900.000	1.154.386.000
15	0401-KAB. BANTUL	Gadingharjo, Kec. Sanden - 3402022002	004111001027 REKENING KAS KALURAHAN GADINGHARJO BPD YOGYAKARTA	1.057.668.000	0	183.754.104	0	1.241.422.104	1.057.668.000
16	0401-KAB. BANTUL	Gadingsari, Kec. Sanden - 3402022001	004111001026 REKENING KAS KALURAHAN GADINGSARI BPD YOGYAKARTA	1.579.286.000	144.516.000	153.206.720	0	1.877.008.720	1.723.802.000
17	0401-KAB. BANTUL	Gilangharjo, Kec. Pandak - 3402062003	004111001081 REKENING KAS KALURAHAN GILANGHARJO BPD YOGYAKARTA	1.849.771.000	0	392.646.700	0	2.242.417.700	1.849.771.000

NO	KODE LOKASI	NAMA DESA	REKENING DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	PAGU TAMBAHAN (Rp)	PAGU SILPA (Rp)	ALOKASI TAHUN DEPAN	DANA DESA 2024 (Rp)	PENYALURAN (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9
18	0401-KAB. BANTUL	Girirejo, Kec. Imogiri - 3402102006	004111001079 REKENING KAS KALURAHAN GIRIREJO BPD YOGYAKARTA	1.344.394.000	0	198.447.710	0	1.542.841.710	1.344.394.000
19	0401-KAB. BANTUL	Guwosari, Kec. Pajangan - 3402072003	004111001054 REKENING KAS KALURAHAN GUWOSARI BPD YOGYAKARTA	1.927.249.000	0	94.121.900	0	2.021.370.900	1.927.249.000
20	0401-KAB. BANTUL	Imogiri, Kec. Imogiri - 3402102008	004111001047 REKENING KAS KALURAHAN IMOGIRI BPD YOGYAKARTA	862.731.000	0	70.983.780	0	933.714.780	862.731.000
21	0401-KAB. BANTUL	Jagalan, Kec. Banguntapan - 3402122003	004111001058 REKENING KAS KALURAHAN JAGALAN BPD YOGYAKARTA	823.726.000	0	116.724.368	0	940.450.368	823.726.000
22	0401-KAB. BANTUL	Jambidan, Kec. Banguntapan - 3402122005	004111001059 REKENING KAS KALURAHAN JAMBIDAN BPD YOGYAKARTA	1.489.411.000	0	186.098.933	0	1.675.509.933	1.489.411.000
23	0401-KAB. BANTUL	Jatimulyo, Kec. Dlingo - 3402112006	004111001053 REKENING KAS KALURAHAN JATIMULYO	1.712.732.000	0	219.909.198	0	1.932.641.198	1.712.732.000

NO	KODE LOKASI	NAMA DESA	REKENING DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	PAGU TAMBAHAN (Rp)	PAGU SILPA (Rp)	ALOKASI TAHUN DEPAN	DANA DESA 2024 (Rp)	PENYALURAN (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9
			BPD YOGYAKARTA						
24	0401-KAB. BANTUL	Karangtalun, Kec. Imogiri - 3402102007	004111001046 REKENING KAS KALURAHAN KARANGTALUN BPD YOGYAKARTA	860.985.000	0	128.962.425	0	989.947.425	860.985.000
25	0401-KAB. BANTUL	Karangtengah, Kec. Imogiri - 3402102005	004111001045 REKENING KAS KALURAHAN KARANGTENGAH BPD YOGYAKARTA	1.456.525.000	0	204.540.425	0	1.661.065.425	1.456.525.000
26	0401-KAB. BANTUL	Kebonagung, Kec. Imogiri - 3402102004	004111001076 REKENING KAS KALURAHAN KEBONAGUNG BPD YOGYAKARTA	1.135.841.000	0	143.391.436	0	1.279.232.436	1.135.841.000
27	0401-KAB. BANTUL	Mangunan, Kec. Dlingo - 3402112001	004111001048 REKENING KAS KALURAHAN MANGUNAN BPD YOGYAKARTA	1.586.749.000	0	32.433.750	0	1.619.182.750	1.586.749.000
28	0401-KAB. BANTUL	Mulyodadi, Kec. Bambanglipuro - 3402052002	004111001088 REKENING KAS KALURAHAN MULYODADI BPD YOGYAKARTA	1.660.532.000	144.516.000	170.063.650	0	1.975.111.650	1.805.048.000
29	0401-KAB.	Muntuk, Kec. Dlingo -	004111001049 REKENING KAS KALURAHAN	2.069.767.000	0	409.969.331	0	2.479.736.331	2.069.767.000

NO	KODE LOKASI	NAMA DESA	REKENING DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	PAGU TAMBAHAN (Rp)	PAGU SILPA (Rp)	ALOKASI TAHUN DEPAN	DANA DESA 2024 (Rp)	PENYALURAN (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9
	BANTUL	3402112002	MUNTUK BPD YOGYAKARTA						
30	0401-KAB. BANTUL	Murtigading, Kec. Sanden - 3402022004	004111001086 REKENING KAS KALURAHAN MURTIGADING BPD YOGYAKARTA	1.371.298.000	0	95.023.687	0	1.466.321.687	1.371.298.000
31	0401-KAB. BANTUL	Ngestiharjo, Kec. Kasihan - 3402162004	004111001073 REKENING KAS KALURAHAN NGESTIHARJO BPD YOGYAKARTA	2.063.633.000	0	280.467.991	0	2.344.100.991	2.063.633.000
32	0401-KAB. BANTUL	Palbapang, Kec. Bantul - 3402082001	004111001038 REKENING KAS KALURAHAN PALBAPANG BPD YOGYAKARTA	1.685.907.000	0	323.240.000	0	2.009.147.000	1.685.907.000
33	0401-KAB. BANTUL	Panggungharjo, Kec. Sewon - 3402152004	004111001070 REKENING KAS KALURAHAN PANGGUNGHARJO BPD YOGYAKARTA	2.091.639.000	144.516.000	198.989.009	0	2.435.144.009	2.236.155.000
34	0401-KAB. BANTUL	Panjangrejo, Kec. Pundong - 3402042002	004111001032 REKENING KAS KALURAHAN PANJANGREJO BPD YOGYAKARTA	1.787.595.000	144.516.000	254.174.750	0	2.186.285.750	1.932.111.000

NO	KODE LOKASI	NAMA DESA	REKENING DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	PAGU TAMBAHAN (Rp)	PAGU SILPA (Rp)	ALOKASI TAHUN DEPAN	DANA DESA 2024 (Rp)	PENYALURAN (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9
35	0401-KAB. BANTUL	Parangtritis, Kec. Kretek - 3402032002	004111001028 REKENING KAS KALURAHAN PARANGTRITIS BPD YOGYAKARTA	1.442.446.000	0	42.894.150	0	1.485.340.150	1.442.446.000
36	0401-KAB. BANTUL	Patalan, Kec. Jetis - 3402092001	004111001087 REKENING KAS KALURAHAN PATALAN BPD YOGYAKARTA	1.835.989.000	0	243.458.050	0	2.079.447.050	1.835.989.000
37	0401-KAB. BANTUL	Pendowoharjo, Kec. Sewon - 3402152001	004111001068 REKENING KAS KALURAHAN PENDOWOHARJO BPD YOGYAKARTA	2.116.267.000	144.516.000	342.133.084	0	2.602.916.084	2.260.783.000
38	0401-KAB. BANTUL	Pleret, Kec. Pleret - 3402132002	004111001093 REKENING KAS KALURAHAN PLERET BPD YOGYAKARTA	1.592.949.000	35.000.000	78.744.105	0	1.706.693.105	1.627.949.000
39	0401-KAB. BANTUL	Poncosari, Kec. Srandakan - 3402012001	004111001024 REKENING KAS KALURAHAN PONCOSARI BPD YOGYAKARTA	1.977.683.000	0	421.759.150	0	2.399.442.150	1.977.683.000
40	0401-KAB. BANTUL	Potorono, Kec. Banguntapan - 3402122006	004111001060 REKENING KAS KALURAHAN POTORONO	1.372.318.000	0	144.843.104	0	1.517.161.104	1.372.318.000

NO	KODE LOKASI	NAMA DESA	REKENING DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	PAGU TAMBAHAN (Rp)	PAGU SILPA (Rp)	ALOKASI TAHUN DEPAN	DANA DESA 2024 (Rp)	PENYALURAN (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9
			BPD YOGYAKARTA						
41	0401-KAB. BANTUL	Ringinharjo, Kec. Bantul - 3402082002	004111001039 REKENING KAS KALURAHAN RINGINHARJO BPD YOGYAKARTA	1.412.563.000	0	183.431.500	0	1.595.994.500	1.412.563.000
42	0401-KAB. BANTUL	Sabdodadi, Kec. Bantul - 3402082005	004111001042 REKENING KAS KALURAHAN SABDODADI BPD YOGYAKARTA	1.160.299.000	144.516.000	106.860.420	0	1.411.675.420	1.304.815.000
43	0401-KAB. BANTUL	Segoroyoso, Kec. Pleret - 3402132003	004111001063 REKENING KAS KALURAHAN SEGOROYOSO BPD YOGYAKARTA	1.502.263.000	0	281.144.020	0	1.783.407.020	1.502.263.000
44	0401-KAB. BANTUL	Seloharjo, Kec. Pundong - 3402042001	004111001031 REKENING KAS KALURAHAN SELOHARJO BPD YOGYAKARTA	2.000.268.000	0	377.768.500	0	2.378.036.500	2.000.268.000
45	0401-KAB. BANTUL	Selopamioro, Kec. Imogiri - 3402102001	004111001044 REKENING KAS KALURAHAN SELOPAMIORO BPD YOGYAKARTA	3.012.392.000	0	578.696.660	0	3.591.088.660	3.012.392.000
46	0401-KAB.	Sendangsari, Kec. Pajangan -	004111001084 REKENING KAS KALURAHAN	2.483.024.000	0	251.967.372	0	2.734.991.372	2.483.024.000

NO	KODE LOKASI	NAMA DESA	REKENING DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	PAGU TAMBAHAN (Rp)	PAGU SILPA (Rp)	ALOKASI TAHUN DEPAN	DANA DESA 2024 (Rp)	PENYALURAN (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9
	BANTUL	3402072002	SENDANGSARI BPD YOGYAKARTA						
47	0401-KAB. BANTUL	Sidomulyo, Kec. Bambanglipuro - 3402052001	004111001034 REKENING KAS KALURAHAN SIDOMULYO BPD YOGYAKARTA	1.549.061.000	0	74.834.560	0	1.623.895.560	1.549.061.000
48	0401-KAB. BANTUL	Singosaren, Kec. Banguntapan - 3402122004	004111001078 REKENING KAS KALURAHAN SINGOSAREN BPD YOGYAKARTA	925.109.000	0	117.972.900	0	1.043.081.900	925.109.000
49	0401-KAB. BANTUL	Sitimulyo, Kec. Piyungan - 3402142001	004111001065 REKENING KAS KALURAHAN SITIMULYO BPD YOGYAKARTA	1.688.929.000	0	222.853.321	0	1.911.782.321	1.688.929.000
50	0401-KAB. BANTUL	Srigading, Kec. Sanden - 3402022003	004111001077 REKENING KAS KALURAHAN SRIGADING BPD YOGYAKARTA	1.280.481.000	0	265.621.442	0	1.546.102.442	1.280.481.000
51	0401-KAB. BANTUL	Srihardono, Kec. Pundong - 3402042003	004111001033 REKENING KAS KALURAHAN SRIHARDONO BPD YOGYAKARTA	1.495.326.000	0	202.652.050	0	1.697.978.050	1.495.326.000

NO	KODE LOKASI	NAMA DESA	REKENING DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	PAGU TAMBAHAN (Rp)	PAGU SILPA (Rp)	ALOKASI TAHUN DEPAN	DANA DESA 2024 (Rp)	PENYALURAN (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9
52	0401-KAB. BANTUL	Sriharjo, Kec. Imogiri - 3402102002	004111001056 REKENING KAS KALURAHAN SRIHARJO BPD YOGYAKARTA	1.912.227.000	0	311.437.920	0	2.223.664.920	1.912.227.000
53	0401-KAB. BANTUL	Srimartani, Kec. Piyungan - 3402142003	004111001067 REKENING KAS KALURAHAN SRIMARTANI BPD YOGYAKARTA	1.837.927.000	0	254.796.805	0	2.092.723.805	1.837.927.000
54	0401-KAB. BANTUL	Srimulyo, Kec. Piyungan - 3402142002	004111001099 REKENING KAS KALURAHAN SRIMULYO BPD YOGYAKARTA	1.619.869.000	0	110.507.211	0	1.730.376.211	1.619.869.000
55	0401-KAB. BANTUL	Sumberagung, Kec. Jetis - 3402092003	004111001043 REKENING KAS KALURAHAN SUMBERAGUNG BPD YOGYAKARTA	1.891.651.000	0	142.794.550	0	2.034.445.550	1.891.651.000
56	0401-KAB. BANTUL	Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro - 3402052003	004111001055 REKENING KAS KALURAHAN SUMBERMULYO BPD YOGYAKARTA	1.571.655.000	0	250.189.829	0	1.821.844.829	1.571.655.000
57	0401-KAB. BANTUL	Tamanan, Kec. Banguntapan - 3402122007	004111001061 REKENING KAS KALURAHAN TAMANAN	1.663.486.000	144.516.000	269.716.959	0	2.077.718.959	1.808.002.000

NO	KODE LOKASI	NAMA DESA	REKENING DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	PAGU TAMBAHAN (Rp)	PAGU SILPA (Rp)	ALOKASI TAHUN DEPAN	DANA DESA 2024 (Rp)	PENYALURAN (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9
			BPD YOGYAKARTA						
58	0401-KAB. BANTUL	Tamantirto, Kec. Kasihan - 3402162003	004111001098 REKENING KAS KALURAHAN TAMANTIRTO BPD YOGYAKARTA	1.934.978.000	0	191.033.687	0	2.126.011.687	1.934.978.000
59	0401-KAB. BANTUL	Temuwuh, Kec. Dlingo - 3402112004	004111001051 REKENING KAS KALURAHAN TEMUWUH BPD YOGYAKARTA	1.341.231.000	144.516.000	68.154.000	0	1.553.901.000	1.485.747.000
60	0401-KAB. BANTUL	Terong, Kec. Dlingo - 3402112005	004111001052 REKENING KAS KALURAHAN TERONG BPD YOGYAKARTA	1.253.492.000	0	47.882.250	0	1.301.374.250	1.253.492.000
61	0401-KAB. BANTUL	Timbulharjo, Kec. Sewon - 3402152002	004111001083 REKENING KAS KALURAHAN TIMBULHARJO BPD YOGYAKARTA	1.891.349.000	144.516.000	277.480.558	0	2.313.345.558	2.035.865.000
62	0401-KAB. BANTUL	Tirtohargo, Kec. Kretek - 3402032005	004111001030 REKENING KAS KALURAHAN TIRTOHARGO BPD YOGYAKARTA	1.014.023.000	0	91.052.251	0	1.105.075.251	1.014.023.000
63	0401-KAB.	Tirtomulyo, Kec. Kretek -	004111001095 REKENING KAS KALURAHAN	1.166.132.000	0	93.048.900	0	1.259.180.900	1.166.132.000

NO	KODE LOKASI	NAMA DESA	REKENING DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	PAGU TAMBAHAN (Rp)	PAGU SILPA (Rp)	ALOKASI TAHUN DEPAN	DANA DESA 2024 (Rp)	PENYALURAN (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9
	BANTUL	3402032001	TIRTOMULYO BPD YOGYAKARTA						
64	0401-KAB. BANTUL	Tirtonirmolo, Kec. Kasihan - 3402162002	004111001072 REKENING KAS KALURAHAN TIRTONIRMOLO BPD YOGYAKARTA	2.627.750.000	0	228.337.974	0	2.856.087.974	2.627.750.000
65	0401-KAB. BANTUL	Tirtosari, Kec. Kretek - 3402032004	004111001029 REKENING KAS KALURAHAN TIRTOSARI BPD YOGYAKARTA	1.359.691.000	144.516.000	86.327.500	0	1.590.534.500	1.504.207.000
66	0401-KAB. BANTUL	Triharjo, Kec. Pandak - 3402062002	004111001097 REKENING KAS KALURAHAN TRIHARJO BPD YOGYAKARTA	1.916.686.000	0	243.529.800	0	2.160.215.800	1.916.686.000
67	0401-KAB. BANTUL	Trimulyo, Kec. Jetis - 3402092004	004111001090 REKENING KAS KALURAHAN TRIMULYO BPD YOGYAKARTA	2.380.850.000	0	242.451.325	0	2.623.301.325	2.380.850.000
68	0401-KAB. BANTUL	Trimurti, Kec. Srandakan - 3402012002	004111001025 REKENING KAS KALURAHAN TRIMURTI BPD YOGYAKARTA	2.380.886.000	0	172.513.715	0	2.553.399.715	2.380.886.000

NO	KODE LOKASI	NAMA DESA	REKENING DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	PAGU TAMBAHAN (Rp)	PAGU SILPA (Rp)	ALOKASI TAHUN DEPAN	DANA DESA 2024 (Rp)	PENYALURAN (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9
69	0401-KAB. BANTUL	Trirenggo, Kec. Bantul - 3402082004	004111001041 REKENING KAS KALURAHAN TRIRENGGO BPD YOGYAKARTA	1.656.241.000	0	186.181.316	0	1.842.422.316	1.656.241.000
70	0401-KAB. BANTUL	Triwidadi, Kec. Pajangan - 3402072001	004111001037 REKENING KAS KALURAHAN TRIWIDADI BPD YOGYAKARTA	2.395.841.000	0	218.321.095	0	2.614.162.095	2.395.841.000
71	0401-KAB. BANTUL	Wijirejo, Kec. Pandak - 3402062004	004111001036 REKENING KAS KALURAHAN WIJIREJO BPD YOGYAKARTA	1.281.208.000	0	127.915.150	0	1.409.123.150	1.281.208.000
72	0401-KAB. BANTUL	Wirokerten, Kec. Banguntapan - 3402122008	004111001094 REKENING KAS KALURAHAN WIROKERTEN BPD YOGYAKARTA	1.529.058.000	0	300.089.661	0	1.829.147.661	1.529.058.000
73	0401-KAB. BANTUL	Wonokromo, Kec. Pleret - 3402132001	004111001062 REKENING KAS KALURAHAN WONOKROMO BPD YOGYAKARTA	1.816.716.000	144.516.000	238.679.065	0	2.199.911.065	1.961.232.000
74	0401-KAB. BANTUL	Wonolelo, Kec. Pleret - 3402132005	004111001066 REKENING KAS KALURAHAN WONOLELO	1.413.360.000	0	121.196.713	0	1.534.556.713	1.413.360.000

NO	KODE LOKASI	NAMA DESA	REKENING DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	PAGU TAMBAHAN (Rp)	PAGU SILPA (Rp)	ALOKASI TAHUN DEPAN	DANA DESA 2024 (Rp)	PENYALURAN (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)	9
			BPD YOGYAKARTA						
75	0401-KAB. BANTUL	Wukirsari, Kec. Imogiri - 3402102003	004111001082 REKENING KAS KALURAHAN WUKIRSARI BPD YOGYAKARTA	2.015.643.000	0	159.828.200	0	2.175.471.200	2.015.643.000
TOTAL				**125.046.646.000**	**2.347.256.000**	**14.471.389.320**	**0**	**141.865.291.320**	**127.393.902.000**

6.2.9 Daftar Rekapitulasi Barang Milik Daerah Yang Digunakan Pihak Ketiga

Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul yang digunakan pihak ketiga selama tahun 2024 baik dalam bentuk pinjam pakai maupun sewa adalah sebagai berikut:

6.2.9.1 Daftar BMD yang dipinjam pakai oleh pihak ketiga

Pinjam Pakai Tanah dan Gedung

NO	PEMOHON	NAMA TANAH DAN GEDUNG	ALAMAT	PEMANFAATAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1	Pemda DIY	Tanah	Wijirejo, Pandak, Bantul	Pembibitan Pertanian	01 Mei 2020 s/d 31 April 2025	No Perjanjian : 590/04336/BKAD ; 38/Perj/Sekda/x/2020
2	Kodim	Gedung Eks Disperindagkop	Jl. Pramuka No. 3 Bantul	Sekretariat Fepabri	21 Januari 2021 s/d 20 Januari 2026	No perjanjian : 0028/0015/BKAD
3	Rupbasan Bantul	Gedung Eks Tuti Barat	Jl. Srandakan, Pandak Bantul	Kantor Rupbasan	17 Mei 2021 s/d 16 Mei 2026	No Perjanjian : 04/KEPT/SEKDA/2022
4	Pemda DIY	Gedung Eks Kantor Pora	Jl. RA Kartini Bantul	Kantor Balai Pendidikan Menengah Kab. Bantul	26 Januari 2022 s/d 26 Januari 2027	No perjanjian : 0028/0015/BKAD

NO	PEMOHON	NAMA TANAH DAN GEDUNG	ALAMAT	PEMANFAATAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
5	Kejaksaan Negeri Bantul	Tanah dan Gedung	Jalan RA Kartini Trirenggo Bantul	Rumah Dinas Kejaksaan Negri Bantul	12 Juni 2023 s/d 11 Juni 2028	Nomor Perjanjian : B/000.2.3.2/000951 / BPKPAD
6	BNNK Bantul	Tanah	Jalan Bantul Km 9 Karanggede Dagen Pendowoharjo Sewon Bantul	Kantor BNNK Bantul	01 September 2023 s/d 31 Agustus 2028	Nomor Perjanjian : B/000.1.4/0011/ BPKPAD
		Gedung Eks Transito	Jalan Bantul Km 9 Karanggede Dagen Pendowoharjo Sewon Bantul	Kantor BNNK Bantul	01 September 2023 s/d 31 Agustus 2028	Nomor Perjanjian : B/000.1.4/0011/ BPKPAD
7	KPUD Bantul	Tanah	Jl. Wachid Hasyim Sumuran, Palbapang, Bantul	Kantor KPUD Bantul	02 Oktober 2023 s/d 30 September 2028	Nomor Perjanjian : B/000.2.3.2/0042/ BPKPAD
		Gedung Eks Kantor Tuti Tengah	Jl. Wachid Hasyim Sumuran, Palbapang, Bantul	Kantor KPUD Bantul	02 Oktober 2023 s/d 30 September 2028	Nomor Perjanjian : B/000.2.3.2/0042/ BPKPAD
8	BAWASLU BANTUL	GEDUNG	DUKUH SABDODADI BANTUL	KANTOR BAWASLU	20 JUNI 2022 S/D 19 JUNI 2027	640/02589/BPKPAD

Pinjam Pakai Kendaraan Dinas

NO	PEMOHON	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	NO POLISI	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
1	Kejaksaan Negeri Bantul	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T	AB 1139 UB / AB 4 B	MHFJW8EMX J2356026	1TR-A500884	2018	1	06 Maret 2019 s/d 05 Maret 2024	Nomor Perjanjian : 024/01041/BKAD B-523/04.13/B/2019
			Kijang Avanza Veloz	AB 1315 UB	MHKM1CA4JE K067917	DEG1348	2014	1		
2	Kantor BPN Bantul	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota Kijang Innova G Lux	AB 1310 UB	MHFXW42G0 E227834	1 TR7709838	2014	1	11 Maret 2019 s/d 30 Maret 2024	Nomor Perjanjian : 024/01086/BKAD 552/SKB-34.02.UP/ III/2019
3	Polres Bantul	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota Kijang STD KF 70 Short	AB 1011 BV	MHF11KF703 0040471	7K0607184	2023	1	04 Februari 2020 s/d 03 Februari 2025	Nomor Perjanjian : 024/0034/BKAD B/2208/XI/2020
4	Kantor Pelayanan pajak (Samsat)	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota New Avanza	AB 86 B	MIBA2J6 K 0017889	K 3DB7 3565	2006	1	01 November 2020 s/d 31 Oktober 2025	Nomor Perjanjian : 024/04508 024/07982
5	Kodim 0729 Bantul	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Honda GL 200 CW RI	AB 2380 UB	NHIMC22119K O21011	MC22E1021129	2009	1	25 November 2020 s/d 24 November	Nomor Perjanjian : 024/04509 858/XI/2020
			Honda GL 200	AB 2381	NHIMC22149K	MC22E1021130	2009	1		

NO	PEMOHON	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	NO POLISI	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			CW RI	UB	O21018				2025	
			Honda GL 200 CW RI	AB 2382 UB	NHIMC22199K O21015	MC22E1021134	2009	1		
6	Polres Bantul	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Honda GL 200 CW RI	AB 2383 UB	NHIMC22129K O17291	MC22E17237	2009	1	25 November 2020 s/d 24 November 2025	Nomor Perjanjian : 024/0034/BKAD B/2208/XI/2020
			Honda GL 200 CW RI	AB 2374 UB	NHIMC22129K O18988	MC22E18941	2009	1		
			Honda GL 200 CW RI	AB 2375 UB	NHIMC22189K O18400	MC22E18314	2009	1		
			Honda GL 200 CW RI	AB 2376 UB	NHIMC22119K O21042	MC22E20945	2009	1		
			Honda GL 200 CW RI	AB 2377 UB	NHIMC22149K O21049	MC22E20948	2009	1		
			Honda GL 200 CW RI	AB 2378 UB	NHIMC22109K O20965	MC22E20977	2009	1		
			Honda GL 200 CW RI	AB 2379 UB	NHIMC22169K O21005	MC22E21127	2009	1		
7	RumahTahanan Negara	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota Avanza E M/T	AB 1016 IB	MHFM1BA 2J7K 008 060	DC 47169	2007	1	15 Desember 2020 s/d 14 Desember	Nomor Perjanjian : 024/05001/BKAD/ 2020

NO	PEMOHON	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	NO POLISI	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
									2025	
8	BNNK Bantul	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Panther	AB 1078 UB	TRB54K115666	E-115666	2004	1	01 September 2023 s/d 31 Agustus 2028	Nomor Perjanjian : B/000.1.4/0011/ BPKPAD
		Multi Ourpose Vehicle (MPV)	Toyota Kijang G Lux	AB 1312 UB	MHFXW42G2E2283659	1TR7756492	2014	1		
		Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Honda	AB 2972 UB	MH1NFD12YK006750	NFGDE1006718	2000	1		
9	Kejaksaan Negeri Bantul	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	NEW AVANZA 1.36 M/T	AB 1301 UB	MHKMIBA31EK196760	MD27089	2014	1	12 Juni 2023 s/d 11 Juni 2028	Nomor Perjanjian : B/000.2.3.2/000951/ BPKPAD
10	Polres Bantul	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota New Kijang Innova 2.0 G M/T	AB 1129 UB	MHFJW8EM9J2356096	1TR-A501557	2018	1	11 Desember 2023 s/d 10 Desember 2028	Nomor Perjanjian : B/000.2.3.2/00189/ BPKPAD B/2446/XII/HUK.8.1.1/2023/Res.Btl
			Toyota Kijang Veloz 1.5 M/T	AB 1202 YY	MHFAB1BY1P0084867	2NR-Y156227	2023	1		
		Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5118 UB	MH4LX150GJJP70110	LX150CEWB9574	2018	1		

NO	PEMOHON	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	NO POLISI	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5120 UB	MH4LX150GJ JP65919	LX150CEWB5722	2018	1		
			KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5123 UB	MH4LX150GJ JP68970	LX150CEWB4421	2018	1		
			KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5124 UB	MH4LX150GJ JP70102	LX150CEWB9876	2018	1		
			KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5125 UB	MH4LX150GJ JP70118	LX150CEWB9009	2018	1		
			KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5126 UB	MH4LX150GJ JP68899	LX150CEWB4418	2018	1		
			KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5127 UB	MH4LX150GJ JP68969	LX150CEWB4412	2018	1		
11	Pengadilan Negeri Bantul	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T	AB 5 B	MHFJW8EM0J 2356150	1TR-A500546	2018	1	11 Desember 2023 s/d 10 Desember 2028	Nomor Perjanjian : B/000.2.3.2/00188/ BPKPAD 3514/SEK.PN.W13-45/ PL1.2/XII/23023

NO	PEMOHON	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	NO POLISI	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
12	Pengadilan Agama Bantul	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota Kijang Innova G	AB 1304 UB	MHFXW42G9E2283464	1TR-7754926	2014	1	02 Januari 2024 s/d 01 Januari 2029	Nomor Perjanjian : B/000.2.3.2/00011/ BPKPAD
13	Kodim 0729 Bantul	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5119 UB	MH4LX150GJJP69057	LX150CEWB5175	2018	1	02 Januari 2024 s/d 01 Januari 2029	Nomor Perjanjian : B/000.2.3.2/00009/ BPKPAD B/4611/2024
			KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5122 UB	MH4LX150GJJP69431	LX150CEWB5489	2018	1		
			KAWASAKI KLX 150 G (PREMIUM)	AB 5121 UB	MH4LX150GJJP69132	LX150CEWB4961	2018	1		
		Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T	AB 1095 UB	MHFJW8EMSJ2356077	1TR-A501088	2018	1		
14	BAWASLU	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	NevVario 110F CBS-ISS	AB 5220 UB	JFY1E1121557	JFY114JK124720	2018	1	02 Januari 2024 s/d 01 Januari 2029	Nomor Perjanjian : B/000.2.3.2/0006/ BPKPAD
			NevVario 110F CBS-ISS	AB 5219 UB	JFY1E1121543	JFY114JK124793	2018	1		
			Supra helm in F1 MMC VIN	AB 5207 UB	JBG11XJK208044	JBG1E1204628	2018	1		

NO	PEMOHON	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	NO POLISI	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			Supra helm in F1 MMC VIN	AB 5168 UB	JBG11XJK208 126	JBG1E1204675	2018	1		

Pinjam Pakai Peralatan dan Mesin

NO	PEMOHON	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
1	BPN Kabupaten Bantul	Komputer	ENVY 23 2245d Touch Smart AiO	5 Unit	10 September 2019 s/d 09 September 2024	No Perjanjian : 028/04313/BKAD ; 1777/SKB-34.02.UP. 03/IX/20190
		Printer	Epson Stylus Photo 1390	3 Unit		
		Printer	LQ 2190	1 Unit		
		Printer	HP Laserjet Pro P1566	2 Unit		
		GPS	Maggellan Ex Plorist 510	4 Unit		
2	BPN Kabupaten Bantul	Laptop	Asus A412FL-EK703T	1 Unit	03 Juni 2020 s/d 02 Juni 2025	Nomor Perjanjian : 028/02181/BKAD/ 2020 1174/SKB-34.02.UP. 03/VI/2020
3	BPN Kabupaten Bantul	GPS	GPS CHC i50	1 Unit	03 Juni 2020 s/d 02 Juni 2025	Nomor Perjanjian : 028/02181/BKAD/ 2020 1174/SKB-34.02.UP. 03/VI/2020

NO	PEMOHON	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
4	BPN Kabupaten Bantul	Lemari Arsip Dorong	Wifile MFB-6 BS 22	2 Buah	21 Januari2020 s/d 20 Januari 2025	Nomor Perjanjian : 028/00675/I/2020
5	Polres Bantul	Kamera Digital	Canon IXUS 125 HS	1 Unit	25 Februari 2020 s/d 24 Februari 2025	No Perjanjian : 020/01265 ; B/347/III/2020
		Kursi Tamu	-	1 Set		
6	BNNK Bantul	AC Split	Nasionnal	1 Unit	01 September 2023 s/d 31 Agustus 2028	Nomor Perjanjian : B/000.1.4/0011/ BPKPAD
		Almari Arsip		1 Unit		
		Display		1 Unit		
		Filling Kabinet	Alba	2 Buah		
		Komputer	Acer Aspire T3-780	1 Unit		
		Kursi Biasa	Lokal	2 Buah		
		Kursi Kayu	Lokal	3 Buah		
		Kursi Kerja	Lokal	6 Buah		
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Kayu	1 Buah		
		Kursi Rapat	Futura	8 Buah		

NO	PEMOHON	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
		Kursi Rapat	Chitose	1 Buah		
		Almari Besi/Metal		1 Buah		
		Lemari Kayu		1 Buah		
		Lemari Pakaian	Lokal	1 Buah		
		Meja ½ Biro		6 Buah		
		Meja Kayu ½ Biro		7 Buah		
		Meja Kerja	Lokal	3 Buah		
		Meja Kerja Kayu		4 Buah		
		Meja Kerja Pejabat Eselon III		1 Buah		
		Meja Kursi Tamu	Lokal	1 Set		
		Meja Pimpinan	Lokal	1 Buah		
		Meja Tulis	Lokal	6 Buah		
		Note Book Profesional	Asus X441UV	1 Buah		
		Printer	HP L J Prop 1102WCE658A	1 Buah		

NO	PEMOHON	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
		Meja Kayu	Lokal	5 Buah		
		Kursi Kayu	Lokal	13 Buah		
		Meja Kerja Kayu	Lokal	2 Buah		
7	Kodim 0729	LCD Proyektor dan Layar	Panasonic LB280 XGA	1 Unit	21 September 2020 s/d 20 September 2025	No Perjanjian : 028/03839/BKAD/ ASET ; B/780/IX/2020
8	Kodim 0729	Meja Kerja		10 Buah	7 November 2022 s/d 6 November 20276	Nomor Perjanjian : 020/05088/BPKPAD
		Kursi Kerja		10 Buah		
9	Kejaksaan Negeri Bantul	Sofa	Handmade	2	20 Desember 2023 s/d 19 Desember 2028	Nomor Perjanjian : B/000.2.1/00036/ BPKPAD B/149/M9.12/01/ 2024
		Televisi	LG 43 Inch	1		
		Televisi	LG 55 Inch	1		
		Televisi	LG 55 Inch	1		
		Mesin Cuci	Aqua	1		
		Meja Tamu Biasa	Handmade	1		

NO	PEMOHON	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
		Kitchen Set	Handmade	1		
		Gordyin/Kray	Handmade 100 M	1		
		Tabung Gas	Elpiji 12 Kg	1		
		Kompor Gas (Alat Dapur)	Rinnai	1		
		Lemari Es	LG	1		
		A.C. Split	LG 3/4 PK	5		
		Kasur/Spring Bed	Handmade	6		
		MEJA RAPAT PEJABAT Lain-lain	Handmade	2		
		Lemari Kayu	Handmade	5		
		AC Split	Panasonic 2 PK	3		
10	Bawaslu	Filling Kabinet	Datascrib	2 Unit		
		Printer	HP LJ Pro 210n 9CF465A	2 Unit	02 Januari 2024 s/d 01 Januari 2029	Nomor Perjanjian : B/000.2.3.2/00006 BPKPAD
		Komputer	Asus K31AD care13	2 Unit		
		Note Book	Asus P2430U	2 Unit		

NO	PEMOHON	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
		Almari Kayu	Lokal	2 Buah		
		Meja Tamu	Fortuna Mexico	1 Set		
		Meja ½ Biro	Modera Class COD 128	2 Buah		
		Kursi Kerja	Ivhico IC 303	2 Buah		
		Kursi Rapat	Chitose Caesar P	41 Buah		
		Rak Buku	Brother B901	2 Buah		
		Almari ½ Tinggi Tanpa Pintu	Modera ACL 7491	3 Buah		
		Almari Besi Kaca	Brother B 304	4 Buah		
		Meja Rapat	Modera C class CCT 189	13 Buah		

6.2.9.2 Daftar BMD Yang Disewa Oleh Pihak Ketiga

No	PEMOHON	NAMA GEDUNG & BANGUNAN	ALAMAT	LUAS		PEMANFAATAN	NO. PERJANJIAN SEWA	MASA SEWA TAHUN	BESARAN SEWA PER TAHUN	TOTAL NILAI SEWA	JANGKA WAKTU	
				TANAH	GEDUNG						TANGGAL MULAI	TANGGAL AKHIR
1	SMP Unggulan Aisyiah Bantul	Gedung Eks Dikmenof	Jl. Ir.H. Juanda No. 103 Trirenggo Bantul	-	2.500 m²	SMP Unggulan Aisyiah Bantul	119/04688/BP KPAD 037/KS-PDA/A/IX/22	5	11.000.000,00	55.000.000,00	21-Nov-22	20-Nov-27
2	PT Bank BPD DIY	Tanah dan Bangunan	Jalan lingkar Manding Komplek Perkantoran Pemda II	3,25 m²	3,25 m²	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	B/0002.3.2/001 40 PKS 063/HT 0501	5	8.000.000,00	40.000.000,00	2 Oktober 2023	1 Oktober 2028
3	PT Bank Mandiri Persero tbk)	Tanah dan Bangunan	Jalan lingkar Manding Komplek Perkantoran Pemda II	3,50 m²	3,50 m²	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	B/0002.3.2/001 38 JRB.R07.Ar.Y GY/GA.0308/2 023	2	16.692.000,00	33.384.000,00	2 Oktober 2023	1 Oktober 2028
4	PT BPD DIY	Tanah di Komplek DPRD Kab Bantul	Jl. Gajah Mada KOmplek Kantor Sekretariat DPRD Kab. Bantul	9 m²	-	ATM BPD	640/01902/BK AD 031/HT 0501	5	15.000.000,00	75.000.000,00	1 Juni 2021	31 Mei 2026

No	PEMOHON	NAMA GEDUNG & BANGUNAN	ALAMAT	LUAS		PEMANFAATAN	NO. PERJANJIAN SEWA	MASA SEWA TAHUN	BESARAN SEWA PER TAHUN	TOTAL NILAI SEWA	JANGKA WAKTU	
				TANAH	GEDUNG						TANGGAL MULAI	TANGGAL AKHIR
5	PT. BPD DIY	Tanah di Komplek Perkantoran	Jl. Robert Wolter Monginsidi Bantul Komplek Perkantoran Parasamya	52,75 m²	52,75 m²	Kantor Kas BPD DIY Cab. Bantul dan ATM (Parasmya	593/06040/BPKPAD 039/HT 0501	5	36.000.000,00	180.000.000,00	28 Desember 2022	27 Desember 2027
6	PT. Bank BPD DIY	Sebagian Tanah dan Bangunan	Jalan lingkar Manding Kmplek Perkantoran Pemda II	50 m²	-	Bangunan Kantor Kas BPD DIY (Dinas Perijinan)	640/01100/BKAD 024/HT 0501	5	18.900.000,00	94.500.000,00	31 Maret 2021	30 Maret 2026
7	Majelis Wakil Cabang NU Kap. Piyungan	Bangunan/Gedung	Nglengis Sitimulyo Piyungan Bantul	485 m²	144 m²	Penyelenggaraan PAUD Kel Kurang mampu di Wil Kel. Sidomulyo	028/04609 061/MWC/TANF.AU/2-14/X/2022	5	500.000,00	2.500.000,00	18 Oktober 2022	17 Oktober 2027
8	Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa	Tanah dan Bangunan	Jl. Bantul Km. 9 Dukuh Karanggede Pendowoharjo Sewon Bantul,,,	3.130 m²	638 m²	Kantor Sekretariat DPC PKB	028/01048/BPKPAD 94/DPC-24,02/02/III/2022	2	39.055.500,00	78.111.000,00	10 Maret 2022	09 Maret 2024
9	DPC Partai PPP	Tanah	Jl. WR Supratman Babadan Bantul	392 m²	-	Kantor DPC Partai PPP	028/01047/BPKPAD 17/DPC/PPP/III/22	3	4.033.500,00	12.100.500,00	10 Maret 2022	09 Maret 2025

No	PEMOHON	NAMA GEDUNG & BANGUNAN	ALAMAT	LUAS		PEMANFAATAN	NO. PERJANJIAN SEWA	MASA SEWA TAHUN	BESARAN SEWA PER TAHUN	TOTAL NILAI SEWA	JANGKA WAKTU	
				TANAH	GEDUNG						TANGGAL MULAI	TANGGAL AKHIR
10	DPD Partai Golkar	Tanah	Jl. A. Yani I/IV Nyangkringan Bantul	634 m²	-	Kantor DPD Partai Golkar	028/00820/BPKPAD 01/GOLKAR/DPD-11/2022	5	6.596.400,00	32.982.000,00	22 Fabruari 2022	21 Fabruari 2027
11	MAN 3 BANTUL	Tanah	Jl. Jejeran Pleret Bantul Kalurahan Wonokromo Pleret Bantul	927 m ²	-	Tempat Parkir sebagai Penunjang Sarana Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran Sekolah	B/400.10.2.4/06741/BPKPAD 1574/MA.12.12.02.2/HM.01/09/2024	5	1.485.000,00	7.425.000,00	10-Sep-24	09-Sep-29

BAB VII

PENUTUP

Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 Kabupaten Bantul telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini mungkin masih belum sempurna, dalam arti belum seperti yang diharapkan oleh para pengguna. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan

Bantul, 2025

BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH